

SALINAN



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
7. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka

- kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka memadu serasikan aspirasi dan usulan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
 18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
 20. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
 21. Perencanaan Daerah berbasis e-planing adalah pendekatan perencanaan menggunakan aplikasi informasi dan teknologi.
 22. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
 23. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
 24. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 25. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021- 2026 adalah memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis, kemampuan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- (2) Tujuan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan strategis pembangunan yang berkelanjutan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai arahan dalam RPJPD Kabupaten Manggarai Barat periode 2021-2026;
 - b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II ISI DAN SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi daerah;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
 - h. Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - i. Bab IX penutup.

- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 23 Juni 2021

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,


TTD

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021
NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HILARIUS MADIN, SH
NIP. 19651231 199402 1 012

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 – 2026

I. UMUM

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara terencana, berkelanjutan dan sinergi melalui perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program yang dipilih secara langsung oleh rakyat, dimana penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arahan kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Manggarai Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan “sistem perencanaan pembangunan nasional”, melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta segmentasi dari RPJPD Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan Fiskal Daerah serta Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Kerangka Regulasi dan Pendanaan yang bersifat Indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 memuat: “Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap” dengan penjabaran misi; (1) Mengembangkan Pariwisata secara berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi; (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;

(3) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal; (4) Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan; dan (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani. Mewujudkan visi dan misi di atas, dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, serta penetapan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama 2021-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 adalah pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009. Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJP Daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 telah melalui analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang terdiri dari: Bab I pendahuluan; Bab II gambaran umum kondisi daerah; Bab III gambaran keuangan daerah Bab IV permasalahan dan isu strategis daerah; Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran; Bab VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; Bab IX penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
BARAT TAHUN 2021 NOMOR 219

KABUPATEN

MANGGARAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat Nya kegiatan Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi Bersama yaitu **Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap**. Dokumen ini kemudian akan menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026, dimana dalam dokumen tersebut memuat rencana-rencana strategis setiap perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi Kabupaten Manggarai Barat melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Saya mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menyusun dokumen ini. Ada begitu banyak pihak, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini. Selanjutnya, saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan dalam membangun Kabupaten Manggarai Barat yang kita cintai ini.

Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Labuan Bajo, Juli 2021
BUPATI MANGGARAI BARAT, L.
EDISTASTIUS ENDI, S.E.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2005-2025	8
1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	9
1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	11
1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat	12
1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030	14
1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	15
1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	17
1.3.8. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD	18
1.3.9. Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD	18
1.3.10. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan RPJMD	18
1.4. Maksud dan Tujuan	19
1.4.1. Maksud	19
1.4.2. Tujuan	19
1.5. Sistematika Penulisan	19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	21
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	21
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	21
2.1.2. Wilayah Rawan Bencana	34
2.1.3. Demografi	38
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	40
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	40
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	51
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	61
2.3. Aspek Pelayanan Umum	63
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	63
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	124
2.3.2. Fokus Fungsi Penunjang	141
2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Umum	152

2.3.4.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	153
2.3.5.	Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	155
2.3.6.	Fokus Sumber Daya Manusia	165
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		168
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu		168
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	168
3.1.2.	Neraca Daerah	177
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		184
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	184
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	186
3.3. Kerangka Pendanaan		187
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Barat	187
3.3.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	197
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		204
4.1. Permasalahan Pembangunan		204
4.1.1.	Tinjauan Terhadap Struktur Perekonomian Daerah	204
4.1.2.	Tinjauan Terhadap Aspek Kesejahteraan Sosial	208
4.1.3.	Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	209
4.1.4.	Tinjauan Terhadap Lingkungan Strategis	240
4.2. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat		282
4.2.1.	Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas	282
4.2.2.	Manggarai Barat sebagai wilayah pertanian	284
4.2.3.	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	285
4.2.4.	Stabilitas ekonomi serta pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan	286
4.2.5.	Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian yang berkelanjutan	287
4.2.6.	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan pelayanan publik yang prima	288
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN		290
5.1. Visi		290
5.2. Misi		292
5.3. Tujuan Dan Sasaran		296
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		305
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan		305
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan		326
6.3. Program Pembangunan Daerah		327
6.4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS		381
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		394
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		450
8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah		450
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah		451
8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)		461
BAB IX PENUTUP		475

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Target Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam RPJMN 2020-2024	10
Tabel 1. 2. Indikator Makro RPJMD-P Provinsi NTT 2019-2023	12
Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat	22
Tabel 2. 2. Persentase Ketinggian Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	24
Tabel 2. 3. Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016	28
Tabel 2. 4. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat	32
Tabel 2. 5. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat	33
Tabel 2. 6. Peta Rawan Bencana	35
Tabel 2. 7. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Barat	37
Tabel 2. 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 - 2020	39
Tabel 2. 9. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Tahun 2017-2020 (Juta Rupiah)	41
Tabel 2. 10. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2020	42
Tabel 2. 11. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020	44
Tabel 2. 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	44
Tabel 2. 13. Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2015-2019 (Persen)	46
Tabel 2. 14. PDRB Per-Kapita Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020	46
Tabel 2. 15. PDRB Per Kapita Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2018-2020	47
Tabel 2. 16. Indeks Gini Provinsi NTT Tahun 2017-2019	48
Tabel 2. 17. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019 (Persen)	48
Tabel 2. 18. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2019	49
Tabel 2. 19. Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019	49
Tabel 2. 20. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019	50
Tabel 2. 21. Perkembangan Angka Melek Huruf Manggarai Barat Tahun 2016-2020	52
Tabel 2. 22. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019	52
Tabel 2. 23. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	53
Tabel 2. 24. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	54
Tabel 2. 25. Angka Mengulang Kelas tahun 2017-2019 (orang)*	55
Tabel 2. 26. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019	56
Tabel 2. 27. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)	56
Tabel 2. 28. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2020 (persen)	57
Tabel 2. 29. Rasio penduduk yang bekerja (persen)	57
Tabel 2. 30. IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020	58
Tabel 2. 31. Komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020	58

Tabel 2. 32. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)	59
Tabel 2. 33. Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018-2020	60
Tabel 2. 34. Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	62
Tabel 2. 35. Prestasi Kabupaten Manggarai Barat dalam Pekan Olah Raga (POR) NTT Tahun 2015-2019	62
Tabel 2. 36. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat (juta rupiah)	64
Tabel 2. 37. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020	64
Tabel 2. 38. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	65
Tabel 2. 39. Jumlah Siswa Putus Sekolah tahun 2017-2019 (orang)*	66
Tabel 2. 40. Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019	66
Tabel 2. 41. Rasio Guru dan Siswa Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2019	68
Tabel 2. 42. Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2017-2020 (Persen)	69
Tabel 2. 43. Persentase Guru Tersertifikasi Tahun 2018-2020	70
Tabel 2. 44. Nilai UKG Manggarai Barat dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019	71
Tabel 2. 45. Angka Kelulusan Siswa Tahun 2015-2019 (Persen)	71
Tabel 2. 46. Persentase Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019	72
Tabel 2. 47. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016-2019	72
Tabel 2. 48. Akreditasi Sekolah Tahun 2019	73
Tabel 2. 49. AKB dan AKI Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020	74
Tabel 2. 50. Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2019	75
Tabel 2. 51. Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019	76
Tabel 2. 52. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020	76
Tabel 2. 53. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019	78
Tabel 2. 54. Kondisi Prasarana Jembatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019	81
Tabel 2. 55. Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangan di Kabupaten Manggarai Barat	81
Tabel 2. 56. Luas Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020	82
Tabel 2. 57. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020	85
Tabel 2. 58. Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum di Kabupaten Manggarai Barat	86
Tabel 2. 59. Sambungan Rumah PDAM Mbeliling Tahun 2019	86
Tabel 2. 60. Cakupan Kegiatan PAMSIMAS Tahun 2020	87
Tabel 2. 61. Kepemilikan Jamban di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020	88
Tabel 2. 62. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase	89
Tabel 2. 63. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	91
Tabel 2. 64. Jumlah Pelanggaran PERDA Di Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2019	91
Tabel 2. 65. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020	93
Tabel 2. 66. Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	93
Tabel 2. 67. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)	95
Tabel 2. 68. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2020 (persen)	95
Tabel 2. 69. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	96
Tabel 2. 70. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020	96
Tabel 2. 71. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi dan Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 – 2020	97

Tabel 2. 72. Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017-2019	98
Tabel 2. 73. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2016-2020	99
Tabel 2. 74. Persentase Jumlah Pekerja Anak di bawah Umur Tahun 2016 s/d 2020	100
Tabel 2. 75. Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101
Tabel 2. 76. Indeks ketahanan pangan dan komponen pembentuknya di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 -2020	102
Tabel 2. 77. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Manggarai Barat (kg/kapita/tahun)	103
Tabel 2. 78. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	103
Tabel 2. 79. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2019	104
Tabel 2. 80. Jumlah Trayek Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020	104
Tabel 2. 81. Prasarana Transportasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019	105
Tabel 2. 82. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab Manggarai Barat Tahun 2019	106
Tabel 2. 83. Volume Sampah di Wilayah Kota Labuan Bajo Tahun 2018-2020	106
Tabel 2. 84. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat	107
Tabel 2. 85. Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Tertutup Pepohonan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2019	108
Tabel 2. 86. Luas Lahan yang Bersertifikat Tahun 2015-2019	108
Tabel 2. 87. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat	109
Tabel 2. 88. Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya dan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Manggarai Barat	111
Tabel 2. 89. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2020	111
Tabel 2. 90. Omzet Usaha Mikro dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Menjadi Kecil di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020	112
Tabel 2. 91. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019	112
Tabel 2. 92. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020	113
Tabel 2. 93. Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020	114
Tabel 2. 94. Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020	115
Tabel 2. 95. Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020	116
Tabel 2. 96. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020	117
Tabel 2. 97. Bumdes Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020	118
Tabel 2. 98. Persentase Bumdes Aktif tahun 2020	119
Tabel 2. 99. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Manggarai Barat	120
Tabel 2. 100. Perkembangan Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	120
Tabel 2. 101. Persentase OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik Tahun 2016 s/d 2020	121
Tabel 2. 102. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020	122
Tabel 2. 103. Pemenuhan Kebutuhan Data/Statistik Tahun 2015-2019	123
Tabel 2. 104. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015-2019	123

Tabel 2. 105. Luas Areal Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2020 (Ha)	125
Tabel 2. 106. Luas Areal Tanaman Pangan (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau) Tahun 2020 (Ha)	126
Tabel 2. 107. Jumlah Produksi dan Produktivits Tanaman Pangan Tahun 2016-2020	126
Tabel 2. 108. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ha)	128
Tabel 2. 109. Jumlah Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kg/Ha) Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	129
Tabel 2. 110. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ton)	130
Tabel 2. 111. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ton)	131
Tabel 2. 112. Jumlah Poktan dan Gapoktan di Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2020	132
Tabel 2. 113. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (Orang)	132
Tabel 2. 114. Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (kg)	133
Tabel 2. 115. Produksi Produk Asal Ternak Tahun 2015-2020	133
Tabel 2. 116. Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020	134
Tabel 2. 117. Tingkat Kelahiran dan Kematian Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	135
Tabel 2. 118. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020	135
Tabel 2. 119. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2015-2020	136
Tabel 2. 120. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke ODTW di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020	136
Tabel 2. 121. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019	137
Tabel 2. 122. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2020 (Ton)	138
Tabel 2. 123. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2020 (Ton)	139
Tabel 2. 124. Tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	139
Tabel 2. 125. Jumlah pasar, isb/kios/gudang Tahun 2015-2020	140
Tabel 2. 126. Perkembangan Industri di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	140
Tabel 2. 127. Nilai produksi IKM dan jumlah produk IKM yang bersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020	141
Tabel 2. 128. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	142
Tabel 2. 129. Opini BPK terhadap LKPD Kab. Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020	143
Tabel 2. 130. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020	144
Tabel 2. 131. Tingkat Pendidikan PNS tahun 2021	145
Tabel 2. 132. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak tahun 2020	146
Tabel 2. 133. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2020	146
Tabel 2. 134. Perkembangan Jumlah PNS yang Melanjutkan Studi Tahun 2016-2020	147
Tabel 2. 135. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	147

Tabel 2. 136. Persentase Pejabat Eselon II, III dan IV yang Telah Mengikuti PIM Tahun 2016-2020	148
Tabel 2. 137. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kab. Manggarai Barat Tahun 2019-2020	148
Tabel 2. 138. Jumlah dan Persentase Auditor Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020	149
Tabel 2. 139. Jumlah Temuan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Tahun 2015-2019	149
Tabel 2. 140. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2016-2020	150
Tabel 2. 141. Capaian Kinerja Daerah Tahun 2016-2020	151
Tabel 2. 142. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Kantibmas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019	152
Tabel 2. 143. Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019	153
Tabel 2. 144. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	154
Tabel 2. 145. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2016-2020	155
Tabel 2. 146. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2019	156
Tabel 2. 147. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019	156
Tabel 2. 148. Perkembangan Jumlah Akomodasi Hotel di Manggarai Barat Tahun 2016-2019	158
Tabel 2. 149. Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerjanya Tahun 2019	158
Tabel 2. 150. Cakupan dan Pengguna Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat	159
Tabel 2. 151. Kondisi Sumber Daya Manusia Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2020	165
Tabel 2. 152. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	166
Tabel 2. 153. Tindak Kriminal di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020	167
Tabel 3. 1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019	169
Tabel 3. 2. Pertumbuhan dan Kontribusi PAD Tahun 2016-2019	174
Tabel 3. 3. Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019	176
Tabel 3. 4. Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 -2019	178
Tabel 3. 5. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019	181
Tabel 3. 6. Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019	185
Tabel 3. 7. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	186
Tabel 3. 8. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019	186
Tabel 3. 9. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	189
Tabel 3. 10. Hasil Perhitungan SiLPA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	197
Tabel 3. 11. Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	199
Tabel 3. 12. Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	201
Tabel 3. 13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026	202
Tabel 4. 1. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Location Quotient	205
Tabel 4. 2. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Shift Share	206

Tabel 4. 3. Posisi Relatif Sektor Basis pada PDRB Kab Manggarai Barat Berdasarkan Analisis Shift Share	207
Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan	210
Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan	211
Tabel 4. 6. Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	212
Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	213
Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	214
Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial	216
Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja	217
Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	217
Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan Urusan Pangan	218
Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanian	219
Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup	219
Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	220
Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	221
Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	222
Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan	223
Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika	224
Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	225
Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan Urusan Penanaman Modal	225
Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga	226
Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik	227
Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan	227
Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan	228
Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan	228
Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian	229
Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan	229
Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan Urusan Perindustrian	230
Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan Urusan Pariwisata	231
Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanian	232
Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan Urusan Perdagangan	234
Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan Urusan Perencanaan	234
Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan Urusan Keuangan	235
Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	236
Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan	237
Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengawasan	237
Tabel 4. 38. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Dewan	238
Tabel 4. 39. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah	239
Tabel 4. 40. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum	240
Tabel 4. 41. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	253
Tabel 4. 42. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	255
Tabel 4. 43. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026	257
Tabel 4. 44. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial	259
Tabel 4. 45. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi	262

Tabel 4. 46. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan	263
Tabel 4. 47. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola	267
Tabel 4. 48. Sistem Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat	268
Tabel 4. 49. Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Utama untuk Transportasi Darat, Laut Dan Udara	269
Tabel 4. 50. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat	270
Tabel 4. 51. Luas Kawasan Hutan Lindung Per Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat	275
Tabel 4. 52. Luas Kawasan Rawan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat	277
Tabel 4. 53. Luas Kawasan Budidaya Per Kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat	281
Tabel 5. 1. Keterkaitan Anatara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	295
Tabel 5. 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	297
Tabel 6. 1. Strategi dan Arah Kebijakan	306
Tabel 6. 2. Prioritas Pembangunan Daerah	328
Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah	332
Tabel 6. 4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS RPJMD	382
Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026	394
Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	396
Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026	450
Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2026	452
Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 -2026	462

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Suhu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019	31
Grafik 2. 2. Curah Hujan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019	31
Grafik 2. 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020	38
Grafik 2. 4. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020	59
Grafik 2. 5. Indeks Pemerataan Guru Tahun 2019	69
Grafik 2. 6. Presentase Jalan dalam Kondisi Mantab di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (%)	79
Grafik 2. 7. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (Km)	80
Grafik 2. 8. Proporsi Luas Irigasi dalam Kondisi Baik Terhadap Luas Irigasi Total di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (Ha)	82
Grafik 2. 9. Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020	83
Grafik 2. 10. Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020	84
Grafik 2. 11. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020	85
Grafik 2. 12. Jumlah Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020	88
Grafik 2. 13. Jumlah/angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019	92
Grafik 2. 14. Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2020.	143
Grafik 3. 1. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019	172
Grafik 3. 2. Proporsi Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar dokumen Perencanaan	8
Gambar 1. 2. Tahapan pembangunan dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025	8
Gambar 1. 3. Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024	10
Gambar 1. 4. Peta Destinasi Pariwisata Nasional Komodo-Ruteng	16
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat	23
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Manggarai Barat	25
Gambar 2. 3. Peta Kelerengan Kabupaten Manggarai Barat	26
Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat	27
Gambar 2. 5. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat	29
Gambar 2. 6. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat	30
Gambar 2. 7. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Manggarai Barat	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Aturan ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan menurut prakarsa sendiri guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakatnya. Maka dalam rangka penyelenggaraan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Dalam kerangka itu pula, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Kabupaten Manggarai Barat sejak berdiri tahun 2003 telah menyusun dan menjalankan 3 periode RPJMD, yakni periode 2005-2010, periode 2010-2015, dan periode 2015-2020. Pelaksanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD telah menunjukkan capaian hasil yang baik di berbagai bidang, meskipun masih terdapat pula tantangan dan persoalan pembangunan yang harus direspon dan diperbaiki. Analisis terhadap capaian pembangunan akan menjadi modal yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja pembangunan dalam periode RPJMD selanjutnya.

Kabupaten Manggarai Barat saat ini memasuki periode RPJMD 2021-2026 yang dipimpin oleh pasangan **Bupati Edistasius Endi, SE** dan **Wakil Bupati dr. Yulianus Weng, M.Kes** yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 26 Februari 2021. Periode ini diharapkan mampu menjalankan proses pembangunan yang semakin baik untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah **“Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap”**. Pencapaian visi tersebut membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan potensi dan peluang, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian agar semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan daerah secara umum. Namun di sisi lain, juga perlu sinergi untuk menjawab tantangan pembangunan, misalnya dalam pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

Proses perencanaan pembangunan melalui proses penyusunan Rancangan Teknokratik, Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir dan penetapan Perda RPJMD. Muatan RPJMD terdiri dari 9 bab yang secara substansi merupakan sinkronisasi antara pendekatan perencanaan teknokratik politik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta tematik-holistik, integratif, dan spasial. Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah dipadukan dengan berbagai pendekatan perencanaan yang kemudian dioperasionalisasikan ke dalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah, yang disertai kerangka pendanaan indikatif.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

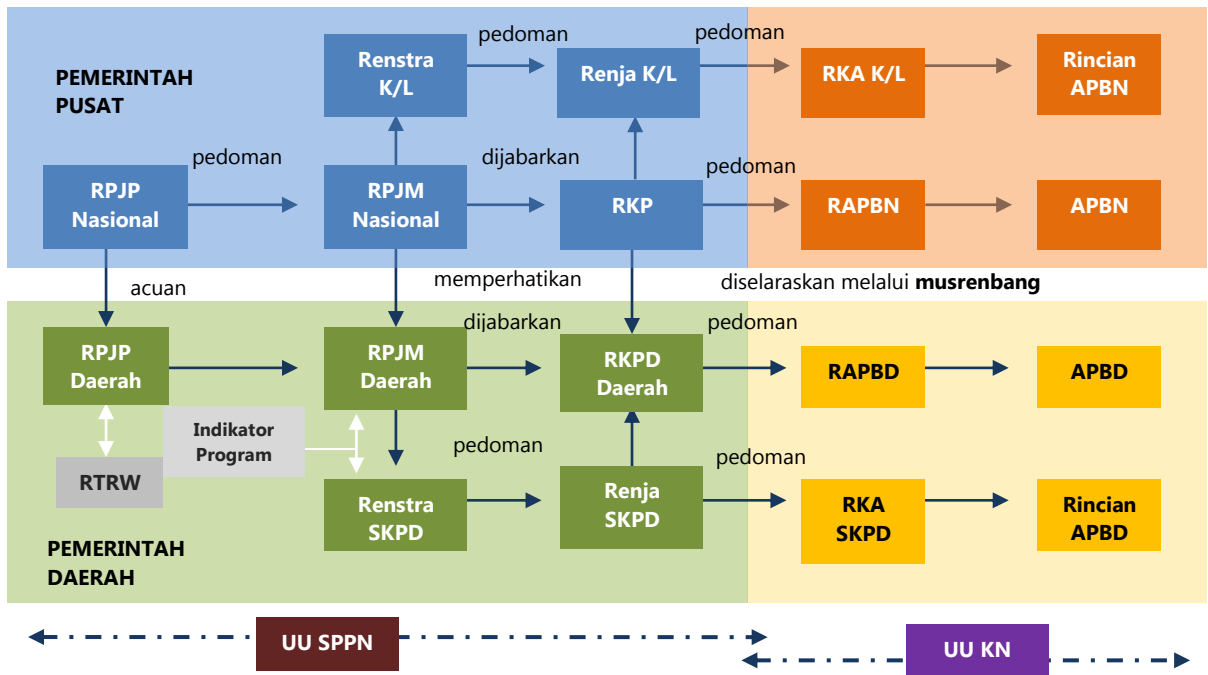
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kajian Lingkungan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

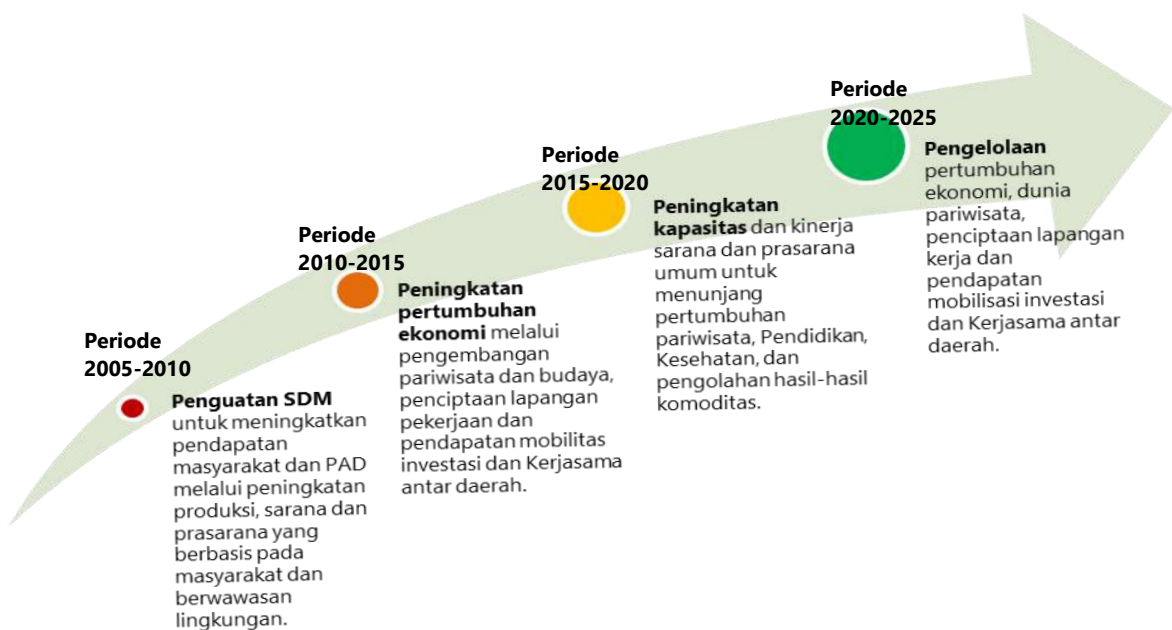
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah haruslah saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah harus pula berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Secara skematis, hubungan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Hubungan Antar dokumen Perencanaan

1.3.1. Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2005-2025

RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah pula memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015-2025 dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2. Tahapan pembangunan dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025

Berdasarkan gambar 1.2, terlihat bahwa RPJMD periode 2021-2026 merupakan tahapan terakhir atau tahap IV dari RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2015-2025. Prioritas pembangunan pada dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai Barat 2015-2025 ini menjadi pedoman substansi dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan tahap ini diprioritaskan pada aspek-aspek berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Dunia pariwisata
3. Penciptaan lapangan kerja dan pendapatan
4. Mobilisasi investasi
5. Kerja sama antardaerah

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

RPJMD bagian dari upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam upaya mencapai visi tersebut, RPJMN memiliki posisi sebagai bahan penyusunan RPJMD dan RPJMD merupakan instrumen penjabaran dari program RPJMN. Pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD juga harus memperhatikan 9 Misi RPJMN atau Nawa Cita Jilid 2 sebagai berikut:

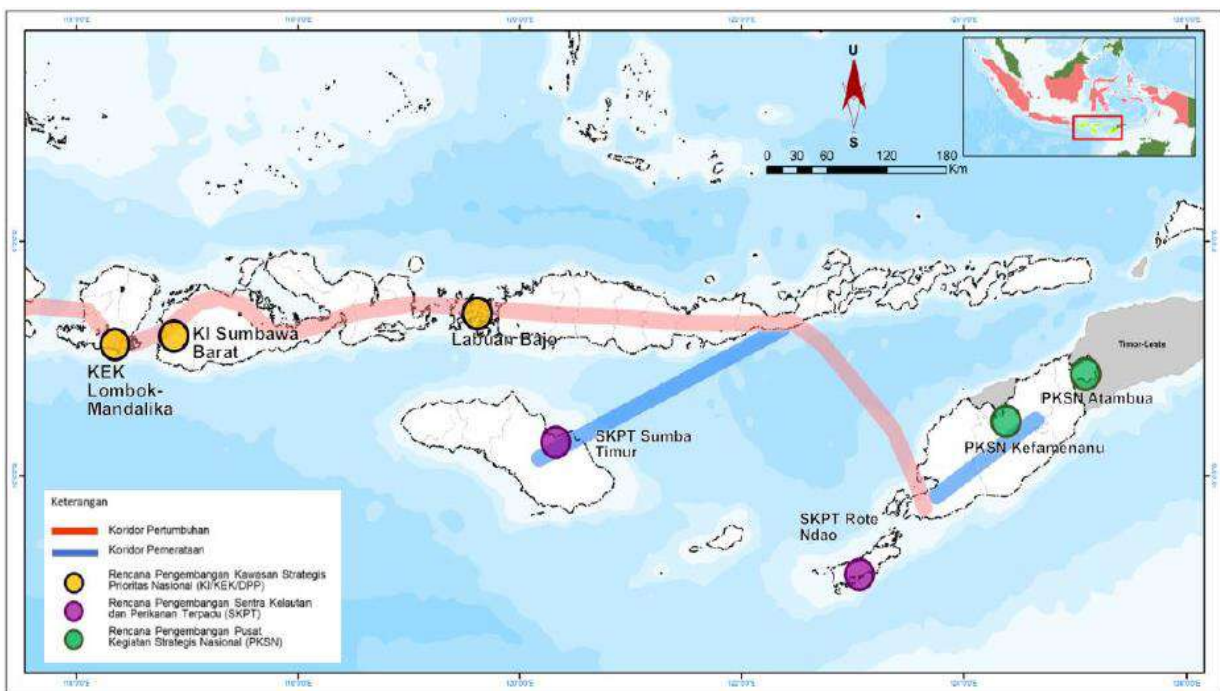
1. Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN. Indikator kinerja dan target tersebut bagian dari arah pembangunan wilayah Nusa Tenggara di dalam RPJMN 2020-2024.

Tabel 1. 1. Target Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam RPJMN 2020-2024

Indikator Pembangunan	Target NTT dalam RPJMN 2020-2024			
	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,50	6,90	7,30	7,50
Tingkat Kemiskinan (%)	17,35	16,15	14,56	12,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	2,60	2,20	2,00
Perkiraan kebutuhan investasi (Rp triliun)	63,91	71,47	80,94	91,78

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara mencakup kegiatan prioritas: pengembangan sektor unggulan; pengembangan kawasan strategis; pengembangan kawasan perkotaan; pembangunan desa, Kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; penataan kelembagaan dan keuangan daerah.



Gambar 1. 3. Sebaran Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2020-2024

Sumber: Arah Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024

Kabupaten Manggarai Barat bagian dari Koridor Pertumbuhan dalam pembangunan wilayah Nusa Tenggara di RPJMN 2020-2024. Kabupaten Manggarai

Barat ditetapkan sebagai bagian pengembangan Kawasan strategis dengan proyek prioritas: destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa; serta pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, antara lain yang berlokasi di Labuan Bajo berupa jalan akses Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Pelabuhan, dan Bandara. Labuan Bajo sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas RPJMN diharapkan membawa manfaat bagi peningkatan devisa pariwisata dan peningkatan jumlah perjalanan dan kedatangan wisatawan mancanegara.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menyusun Perubahan RPJMD 2018-2023 untuk merespon perkembangan sosial yang dinamis, penyesuaian dengan kondisi global, dan implementasi atas perubahan regulasi. Perubahan RPJMD tersebut yang kemudian juga perlu sinergis dan menjadi bahan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026. Sinergi perencanaan antara kabupaten dengan provinsi dimulai dari telaah Visi dan Misi yang menjadi gambaran besar kondisi yang akan dicapai dan upaya yang dilakukan untuk mencapainya. RPJMD Kabupaten Manggarai Barat menjadi bagian untuk mencapai Visi RPJMD Provinsi NTT 2018-2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat juga perlu terkait dengan Misi Provinsi NTT sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil
2. Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*)
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Provinsi NTT telah menetapkan indikator kinerja makro pembangunan di dalam RPJMD-P. Indikator makro tersebut mengalami perubahan dari sisi jumlah, rumusan, dan target indikator dari RPJMD induk. Indikator makro RPJMD-P sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Indikator Makro RPJMD-P Provinsi NTT 2019-2023

Indikator	Baseline	Target		
		2021	2022	2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,20	5,87-6,50	6,33-6,90	6,7-7,3
PDRB per kapita (Rp juta)	19,5	20-23	23-25	25-27
Indeks Pembanguna Manusia (poin)	65,23	65,54-67	67,35-69	70-71
Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,62	21-19,63	19,35-16,15	15-12
Inflasi (%)	0,67	3-3,34	3-3,32	3-3,32
Prevalensi stunting (%)	27,9	21,8	16,7	10-12
Indeks Gini (poin)	0,355	0,35-0,34	0,34-0,33	0,34-0,32
Indeks Pembangunan Gender (poin)	92,72	94	95	95
Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,35	3,2-2,6	2,5-1,9	1,9-1,5
Rasio PAD (%)	23,90	25,31	30,12	39,74
Emisi gas rumah kaca (tCO ₂ ^{eq})	17.248.829	17.248.829	17.248.829	17.248.829
Kebutuhan investasi (Rp triliun)	44,93	63,91	71,47	80,94
Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	60,37	65	69	71

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat

Penyusunan RPJMD harus mempedomani tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan pola ruang di dalam RTRW. Kebijakan pembangunan yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 diarahkan selaras dengan kebijakan penataan ruang, baik dalam rangka mengoptimalkan kawasan peruntukan budidaya untuk pengembangan potensi dan akselerasi pembangunan ekonomi daerah, maupun menjaga kawasan lindung. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagai pusat distribusi barang dan jasa sesuai ruang peruntukan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari:

1. Pemantapan sistem perkotaan yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian dan kelautan untuk peningkatan pelayanan wisata dan peningkatan komoditi pertanian serta potensi kelautan unggulan;
2. Pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-pusat pelayanan;
3. Pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman yang mendukung pelayanan wisata serta peningkatan komoditi pertanian dan potensi kelautan unggulan;
4. Pengelolaan sistem transportasi yang terpadu untuk membantu kelancaran bagi masyarakat untuk melakukan pergerakan interaksi fungsional antar pusat kegiatan satu dengan yang lainnya;
5. Penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah-rumah masyarakat;
6. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi;
7. Pengembangan kawasan budidaya meliputi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan kawasan pariwisata, agropolitan, dan minapolitan;
8. Pengaturan zona pemanfaatan dan zona konservasi pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, guna mencegah terjadinya konflik kepentingan, serta pengaturan mekanisme penegakan hukum yang mengikutsertakan masyarakat;
9. Mengembangkan kawasan pariwisata, agropolitan, minapolitan dan kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup, sebagai kawasan strategis kabupaten;
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat yang berkualitas, adil, dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana. Kebijakan penataan ruang daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

1. Pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi;
2. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama;
4. Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya;
5. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang;
7. Pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang;
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Terkait dengan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat, terutama dalam konteks pembangunan sektor pariwisata, maka perlu ditelaah beberapa ketentuan terkait pembangunan pariwisata di dalam RTRW Provinsi NTT. Kawasan Pariwisata didefinisikan sebagai Kawasan dengan luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari peruntukan pariwisata alam, budaya, dan buatan/taman rekreasi. Kawasan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam. Pengembangan Kawasan peruntukan pariwisata dijalankan melalui basis klaster. Kabupaten Manggarai Barat berada dalam Klaster II yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo dengan konsep pengembangan pulau penuh pesona yang bertumpu pada binatang Komodo sebagai ciri khas serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. RTRW Provinsi NTT memberikan arahan pengembangan klaster-klaster pariwisata sebagai berikut:

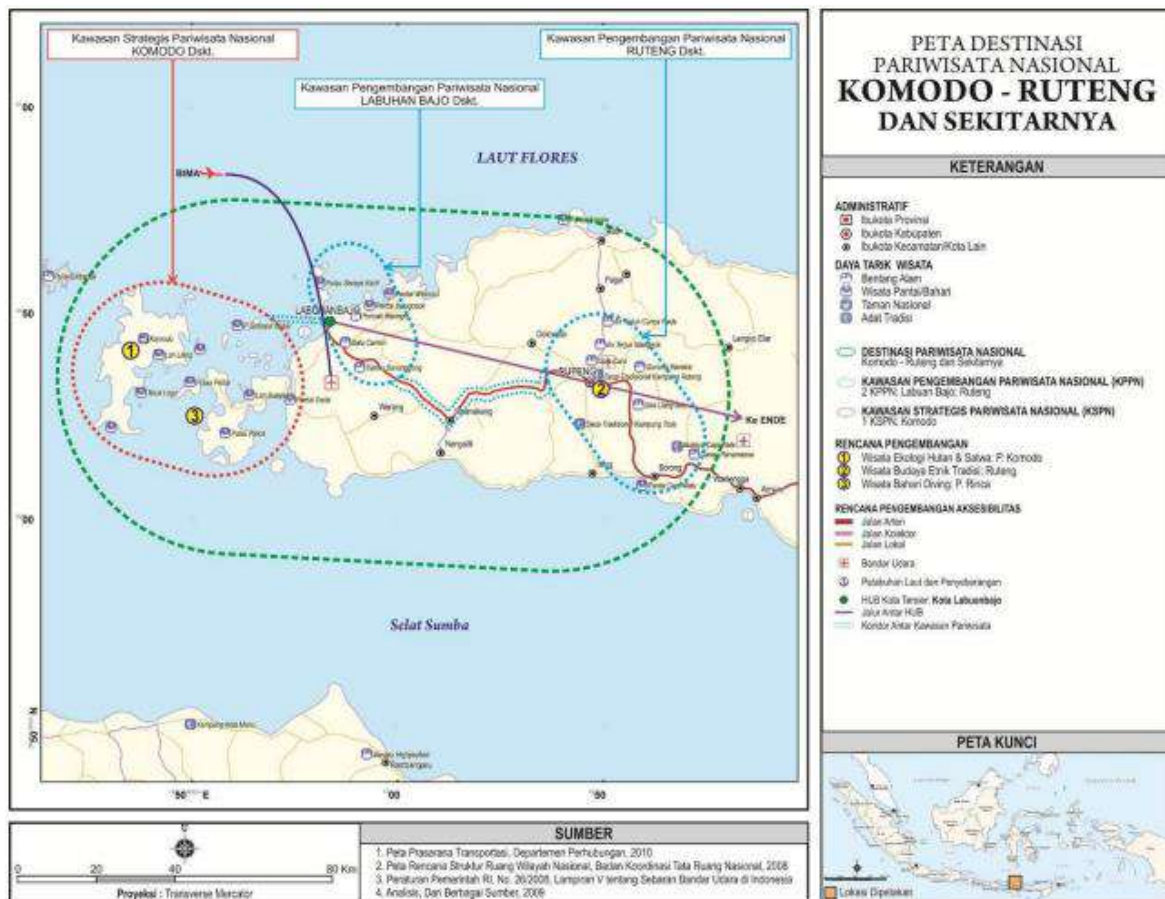
1. Menonjolkan citra kawasan berdasarkan konsep pengembangan yang telah ditetapkan di masing-masing klaster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan
2. Memanfaatkan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata
3. Turut serta dalam konservasi alam dan melestarikan alam
4. Mengembangkan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan atraksi budaya
5. Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut
6. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai kawasan peruntukan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam Kawasan
7. Mempertahankan dan meningkatkan pengembangan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata
8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
9. Mengembangkan kawasan pariwisata alam yang tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan di laut
10. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang pelayanan prima di kawasan wisata potensial
11. Melakukan penyusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai paket wisata wilayah Provinsi

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kawasan Peruntukan Pariwisata diatur dalam RTRW Nasional yang didefinisikan sebagai Kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup Sebagian areal dalam kawasan lindung atau Kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Adapun kriteria suatu Kawasan ditetapkan sebagai peruntukan pariwisata, yaitu memiliki obyek dan daya tarik wisata; serta menudukung upaya pelestarian budaya,

keindahan alam, dan lingkungan. Penerapan kriteria tersebut diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya
3. Tidak mengganggu fungsi lindung
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
7. Menciptakan kesempatan kerja
8. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 4. Peta Destinasi Pariwisata Nasional Komodo-Ruteng

Sumber: Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011

Kebijakan nasional yang lebih detail dalam pengaturan Kepariwisata adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki posisi strategis karena ditetapkan ke dalam Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Komodo-Ruteng dan sekitarnya, yang di dalamnya terdapat terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan sekitarnya, serta Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Labuan Bajo dan sekitarnya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 telah merumuskan kriteria prioritas pembangunan DPN dan KSPN sebagai berikut:

1. Komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan
2. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis
3. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional
4. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan
5. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat
6. Citra yang sudah dikenal secara luas
7. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia
8. Keunggulan daya saing internasional

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS RPJMD memiliki peran untuk memandu agar prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi perencanaan jangka menengah daerah. Penyusunan KLHS RPJMD dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Bentuk integrasi tersebut secara operasional adalah prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi setidaknya mulai dari pendahuluan; analisis gambaran kondisi daerah; pemetaan masalah dan isu strategis pembangunan; rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan; strategi dan arah kebijakan pembangunan; serta program pembangunan dan perangkat daerah.

1.3.8. Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran untuk menjabarkan program pembangunan daerah dan perangkat daerah yang terdapat di dalam RPJMD melalui rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra memiliki peran strategis untuk mencapai target indikator kinerja kepala daerah yang ditopang dengan pencapaian indikator kinerja kepala perangkat daerah beserta struktur yang berada di bawahnya.

1.3.9. Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan RPJMD

Perencanaan jangka menengah harus dijabarkan setiap tahunnya melalui RKPD. Oleh karena itu, di dalam RPJMD juga memiliki tema atau fokus pembangunan tahunan untuk memandu sinkronisasi dengan perencanaan tahunan. RKPD juga memiliki peran penting untuk sinkronisasi antara RPJMD dengan dukungan penganggaran setiap tahun dalam bentuk APBD.

1.3.10. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan RPJMD

Desa memiliki posisi penting bagi efektivitas pembangunan di daerah, karena desa menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sinergi perencanaan desa dengan pemerintah daerah diperlukan agar terdapat pembagian peran yang jelas dan sinergis berbasis kewenangan masing-masing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal tersebut dilakukan dengan menyelaraskan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan dokumen RPJMD adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan/perangkat daerah, dan kerangka pendanaan, sehingga dapat menjadi panduan bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat dalam periode 2021-2026.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 ini disusun dengan tujuan:

1. Membangun keterpaduan antar berbagai pendekatan perencanaan;
2. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan perangkat daerah;
3. Menyediakan bahan untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat kinerja keuangan lima tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini memuat visi dan misi RPJMD, serta tujuan dan sasaran beserta indikatornya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk strategi dan arah kebijakan, serta program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat kerangka pendanaan sebagai dasar alokasi belanja dan program perangkat daerah serta indikatornya yang berbasis setiap urusan pemerintah daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci di setiap urusan pemerintah daerah.

BAB IX PENUTUP

Bagian ini memuat kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum Kabupaten Manggarai Barat dari aspek geografi dan demografinya, daya saing serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini menunjukkan potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi sumber daya bagi pembangunan daerah pada masa datang. Bab ini juga memberikan gambaran dasar tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu diatasi pada masa yang akan datang.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub-bab ini berisi tentang gambaran kondisi geografi maupun demografi Kabupaten Manggarai Barat. Aspek geografi yang dijelaskan pada sub-bab ini meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan wilayah rawan bencana. Aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Manggarai Barat dapat dideskripsikan melalui beberapa hal, meliputi: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, geologi, hidrologi, dan klimatologi. Data-data tersebut penting untuk membangun kebijakan berbasis spasial. Penjabaran karakteristik lokasi dan wilayah dilengkapi dengan analisis terhadap data sekunder dan narasi kualitatif yang relevan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

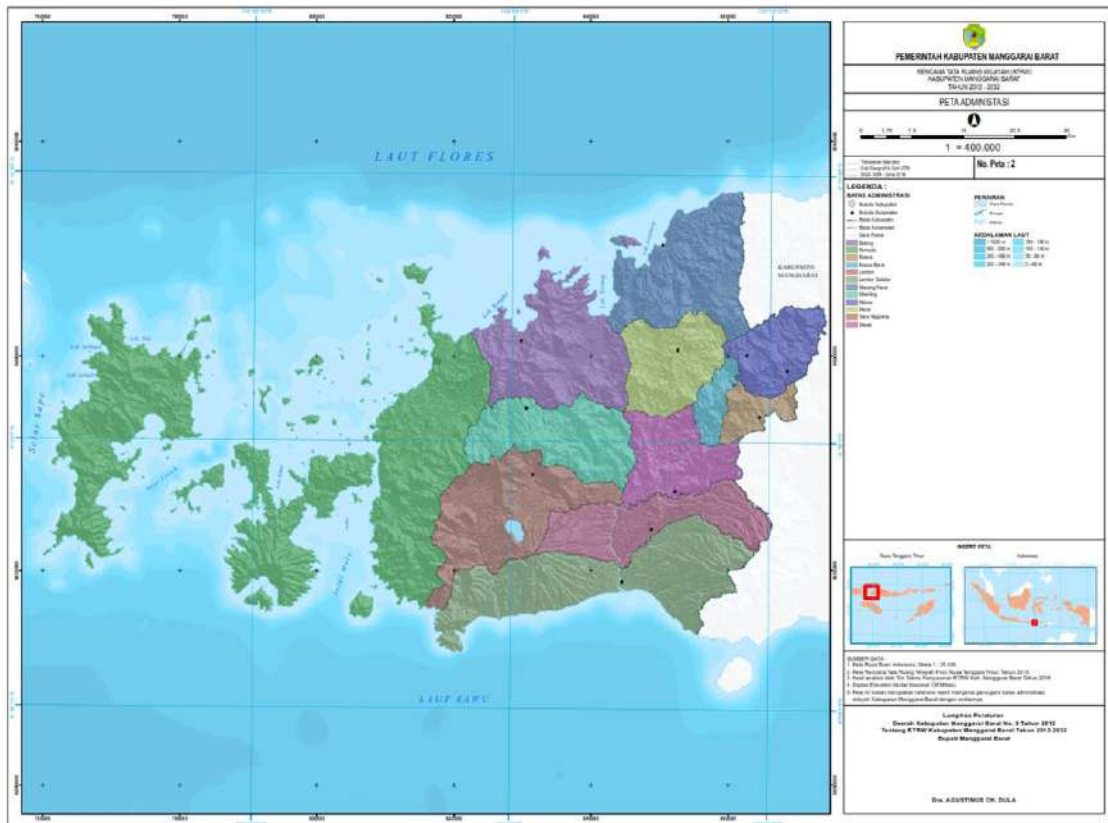
Kabupaten Manggarai Barat memiliki luas wilayah 9.450 km². Luas daratannya sebesar 2.947,50 km². Daratan tersebut terdiri dari Pulau Flores, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Longos, dan beberapa pulau kecil lainnya. Sisanya adalah lautan dengan luas 6.052,50 km², atau sekitar 64% dari total luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 1. Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Komodo	Labuan Bajo	813.53	19
2	Boleng	Terang	486.56	11
3	Sano Nggoang	Werang	360.19	15
4	Mbeliling	Warsawe	231.53	15
5	Lembor	Wae Nakeng	145.68	15
6	Welak	Orong	319.19	16
7	Lembor Selatan	Lengkong Cepang	275.87	15
8	Kuwus	Golo Welu	54.55	12
9	Ndoso	Ndoso	124.95	15
10	Macang Pacar	Bari	42.66	10
11	Kuwus Barat	Nandong	174.64	13
12	Pacar	Kampung Pacar	112.12	13
Jumlah			3141.47	169

Sumber: Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka, 2020

Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan, yakni Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Lembor, Kecamatan Welak, Kecamatan Kuwus, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Mbeliling, Kecamatan Ndoso, Kecamatan Pacar dan Kecamatan Kuwus Barat. Jumlah desa/kelurahan yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat adalah 169 desa/kelurahan, yang terdiri dari 164 desa dan 5 kelurahan.



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber Data: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

Kecamatan terluas di Kabupaten Manggarai Barat adalah Kecamatan Komodo. Luas total area dari Kecamatan Komodo sebesar 813,53 Km², atau mencapai 25,88% dari luasan total Kabupaten Manggarai Barat. Kecamatan Kuwusa Barat menjadi daerah dengan luasan administratif terkecil di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu dengan luasan total 42,55 Km². Batas-batas Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan secara administratif adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Manggarai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi NTB;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Manggarai Barat terletak di ujung barat pulau Flores di antara 08°.14' - 09°.00' Lintang Selatan, dan 119°.21' - 120.20' Bujur Timur. Secara geografis, wilayah daratan Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh daerah dataran tinggi dan pegunungan. Daerah permukiman dan lahan pertanian

umumnya berada di lereng-lereng dan lembah antar pegunungan. Keberadaan lembah antar pegunungan yang relatif luas tersebut berada di bagian selatan hingga barat wilayah daratan Pulau Flores.

Keberadaan Kabupaten Manggarai Barat yang berada di ujung paling barat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi keuntungan strategis secara geografis. Akses yang sangat baik dan berkontribusi sebagai pintu bagian barat dari Provinsi NTT untuk menghubungkan dengan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi di daerah Indonesia bagian barat dan tengah, seperti Kota Surabaya dan Kota Makassar. Selain itu, keberadaan obyek dan daya tarik pariwisata yang juga potensial, seperti keberadaan Pulau Komodo dan keindahan alam Labuan Bajo, menjadikan Kabupaten Manggarai Barat berpeluang besar menjadi penghubung wisata paket utama di Indonesia, seperti dengan Bali dan Toraja.

2.1.1.3. Topografi

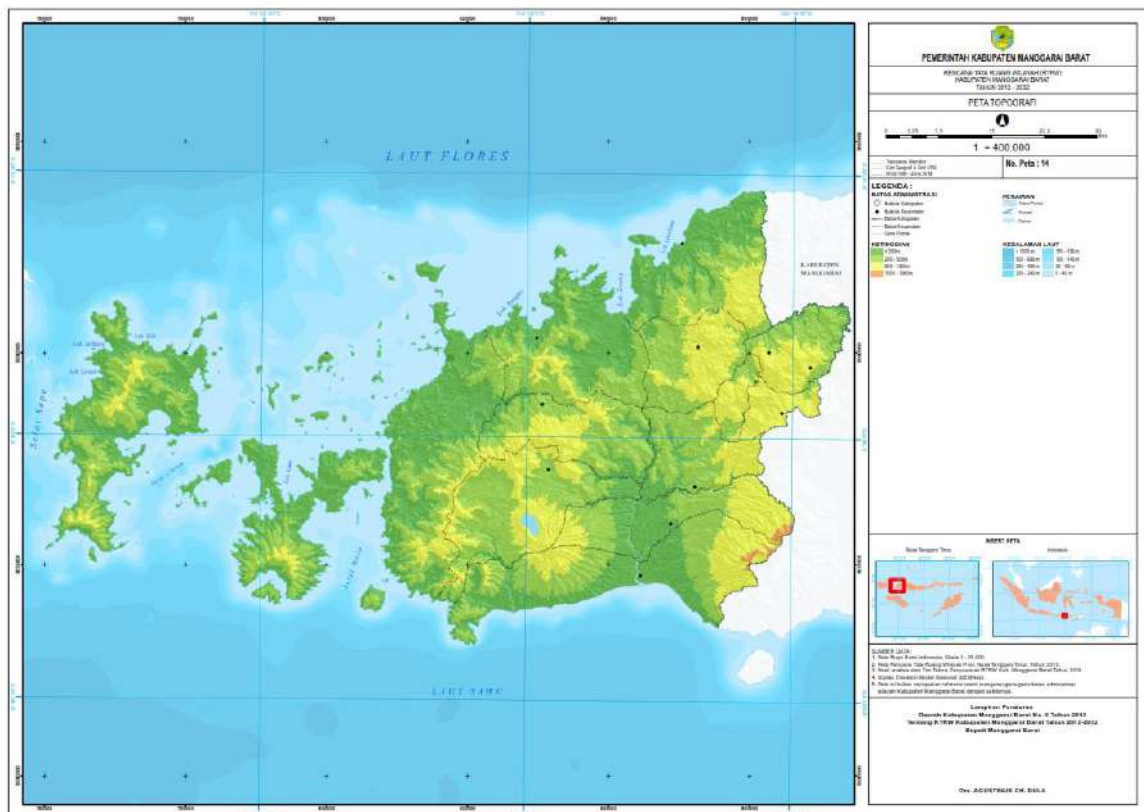
Klasifikasi topografi di Kabupaten Manggarai Barat terbagi menjadi empat. Dominan kelas topografi berada di ketinggian 100 – 500 m. Kelas topografi dengan unit terkecil yaitu di ketinggian > 1.000 m. Rincian wilayah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Persentase Ketinggian Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Klasifikasi Topografi (Ha)				Jumlah
		0-100m	100-500m	500-1.000m	>1.000m	
1	Boleng	11013	16907	1474	0	29394
2	Komodo	47434	45550	6005	0	98989
3	Kuwus	304	32	4003	1023	5362
4	Kuwus Barat	2089	707	3688	68	6552
5	Lembor	1458	11905	5538	1806	20707
6	Lembor Selatan	7637	19121	6134	2754	35646
7	Macang Pacar	8659	13653	4602	0	26914
8	Mbeliling	322	14279	6187	116	20904
9	Ndoso	5802	0	3717	389	9908
10	Pacar	1407	7192	7773	0	16372
11	Sano Nggoang	340	17679	9765	265	28049
12	Welak	194	11442	3425	290	15351
Total		86659	158467	62311	6711	314148

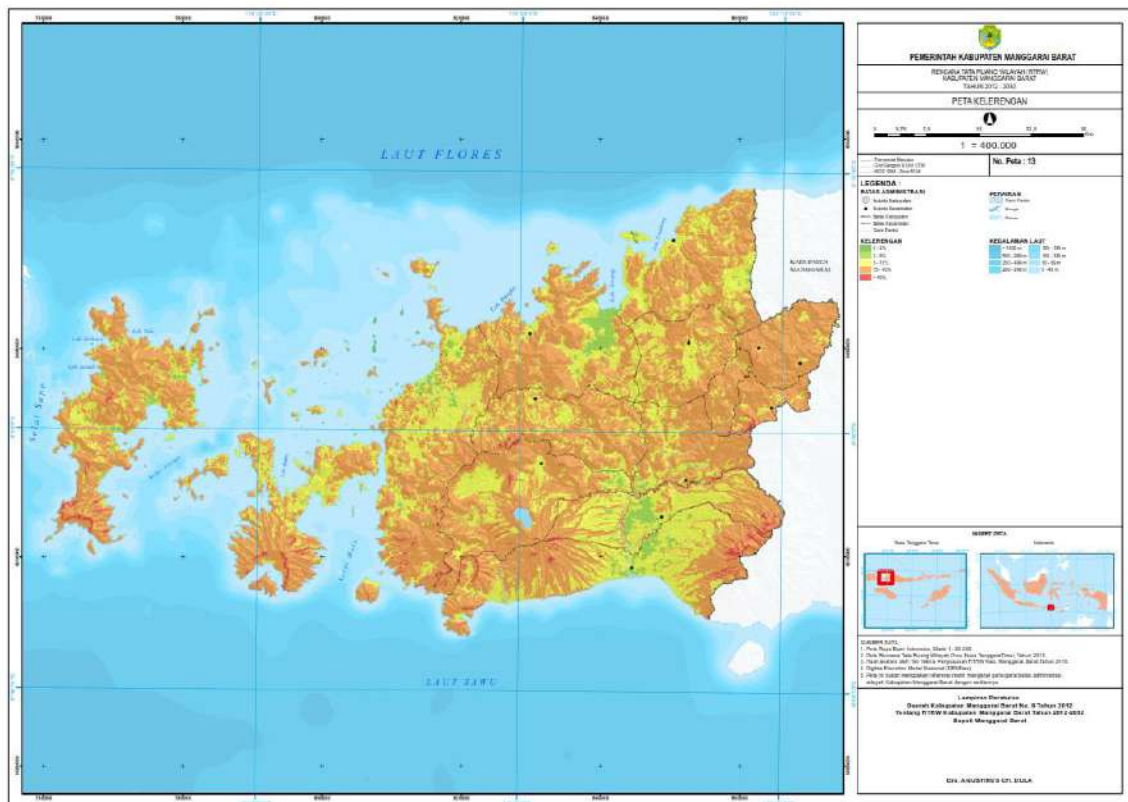
Sumber: Dokumen RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

Topografi Manggarai Barat dengan dominasi wilayah berketinggian sedang antara 100 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) mencerminkan karakteristik dataran yang bergelombang, dengan dominasi morfologi berupa perbukitan. Sedangkan kelas topografi > 1.000 m memiliki morfologi berupa pegunungan, dengan kelerengan yang curam. Kontrol secara genesis yang dipengaruhi adanya tenaga endogen maupun eksogen menjadi salah satu indikator penyebab berkembangnya fisiografis Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Manggarai Barat
Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

Dataran rendah hingga dataran tinggi yang direpresentasikan dengan warna hijau muda, hijau tua hingga kuning di peta, mendominasi seluruh Kabupaten Manggarai Barat, kecuali di bagian sisi Timur Laut. Adanya variasi karakteristik topografi, morfologi maupun kelerengan dari suatu wilayah, berimplikasi kompleks dalam penyusunan suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Beberapa aspek tersebut tentu menjadi aspek yang juga harus dipertimbangkan dalam menerapkan suatu kebijakan pembangunan wilayah.



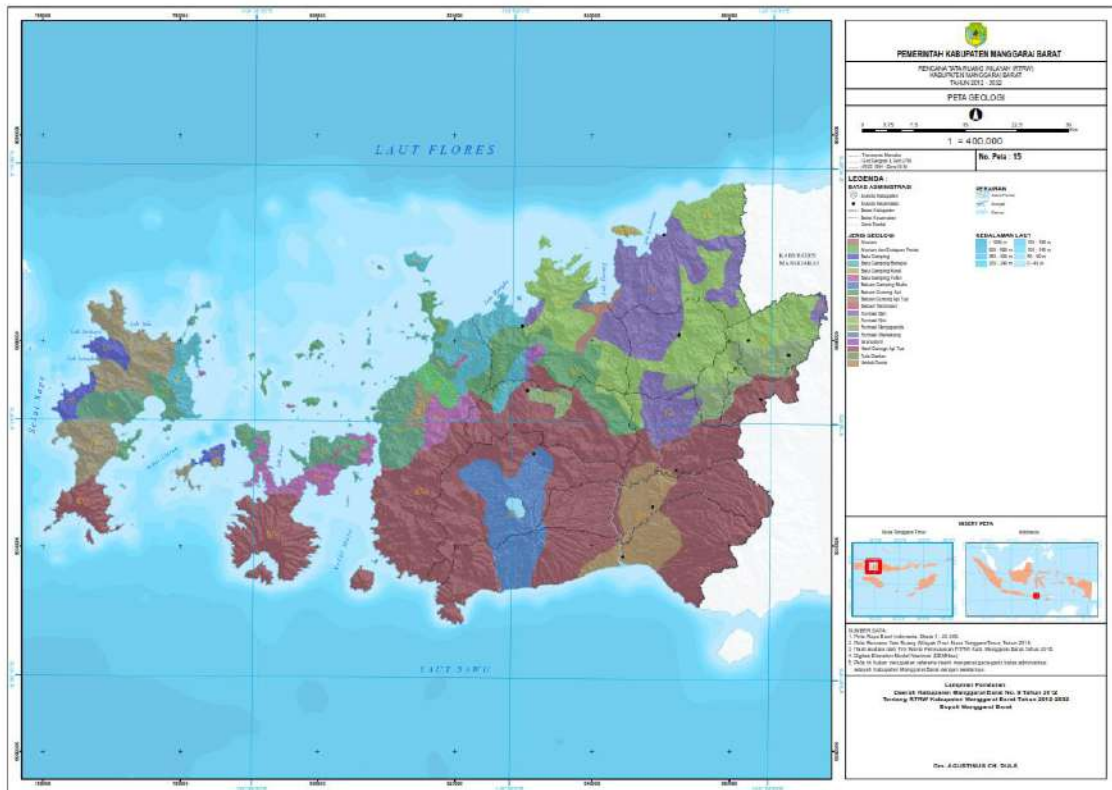
Gambar 2. 3. Peta Kelerengan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

Kemiringan lereng di Kabupaten Manggarai Barat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas. Kelas kemiringan lereng dominan di kemiringan 16 – 35 meter atau terkategori pada kelas lereng 5. Artinya, kelerengan di Kabupaten Manggarai Barat didominasi dengan kelas lereng agak curam. Kondisi dengan kelerengan tersebut memberikan peluang terjadinya beberapa bencana, terutama bencana tanah gerak ataupun longsor. Informasi mengenai kondisi lereng menjadi salah satu aspek lain yang penting, khususnya dalam menerapkan pengaturan zonasi maupun aspek kebijakan penataan ruang.

2.1.1.4. Geologi

Tatanan geologi Kabupaten Manggarai Barat mempunyai kondisi yang cukup rumit dan kompleks. Kompleksitas dari kondisi geologi juga berimplikasi terhadap geomorfologi di Kabupaten Manggarai Barat. Posisi dari Kabupaten Manggarai Barat yang terdapat di Pulau Flores, menjadikan keberadaannya terletak di antara Busur Sunda di bagian barat dan Busur Banda di bagian timur. Selain itu, posisi Kabupaten Manggarai Barat juga berada di antara perbatasan antara Cekungan Flores di bagian utara dan Cekungan Sawu di bagian selatan.



Gambar 2. 4. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

Sisi utara tersusun atas batuan berumur tersier dengan dominasi batuan berupa batuan beku, klastika gunung api dan batuan sedimen. Sedangkan bagian selatan didominasi dengan batuan berumur kuartar dengan keberadaan gunung api yang masih aktif. Dominasi formasi batuan yaitu QTvb, yang mencerminkan formasi batuan tersusun dari material gunung api. Tatanan formasi geologi yang kompleks dan juga unik tersebut juga memberikan potensi geologis yang dapat dimanfaatkan. Potensi geothermal yang ditemukan di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Sementara potensi geowisata juga dapat dikembangkan. Potensi tersebut antara lain berasal dari bentuk asal karst yang berasal dari formasi batuan gamping, seperti gua-gua gamping, travertine, stalagtit, dan stalagmit.

2.1.1.5. Jenis Tanah

Karakteristik topografi Kabupaten Manggarai Barat berupa dataran hingga bergunung. Kondisi tersebut berimplikasi pada variasi sebaran jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan peta jenis tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Tanah Bogor, variasi jenis tanah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat berupa tanah mediteran, litosol dan latosol.

Tabel 2. 3. Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016

Kecamatan	Jenis Tekstur Tanah (km ²)			Jumlah (km ²)
	Mediteraan	Litosol	Latosol	
Komodo	183,11	578,20	1,98	763,29
Boleng	42,09	413,20	1,22	456,51
Sano Nggoang ¹	389,38	91,20	74,60	555,81
Lembor ²	292,25	97,33	5,93	3395,51
Welak	220,54	75,27	3,67	299,48
Kuwus ³	186,84	-	21,60	208,44
Macang Pacar ⁴	20,00	249,05	-	269,05
Manggarai Barat	1.334,21	1.504,25	109,00	2.947,46

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

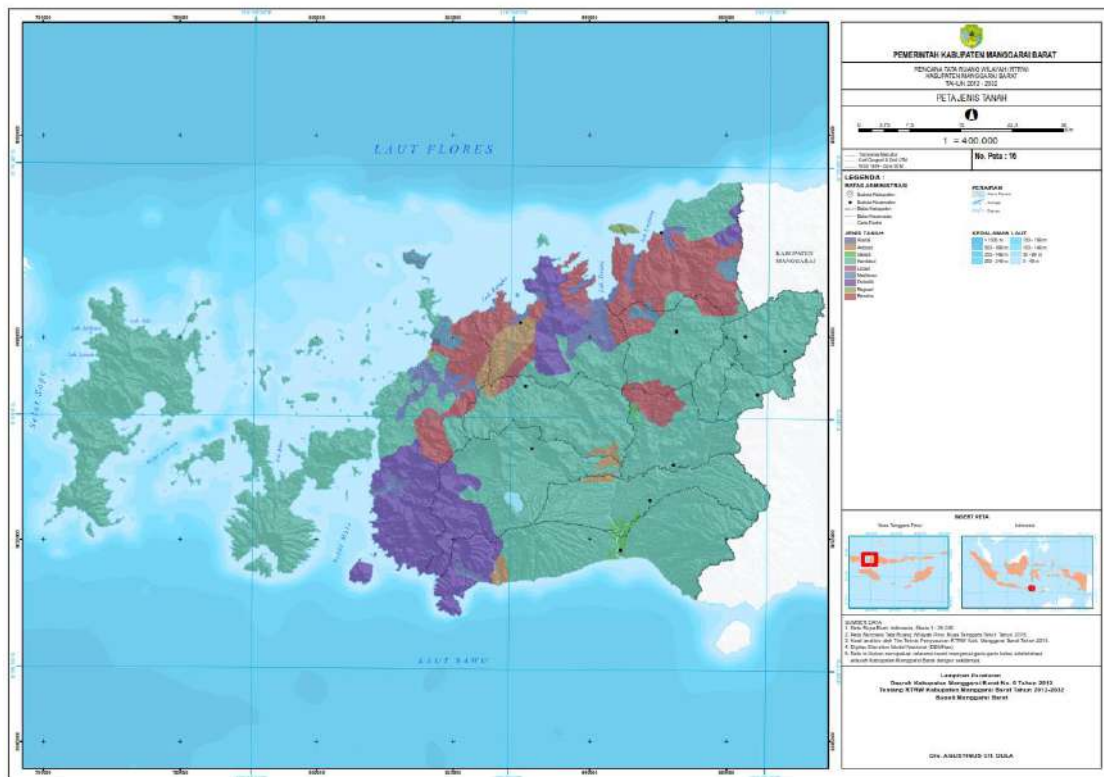
¹ Termasuk Kecamatan Mbellong

² Termasuk Kecamatan Lembor Selatan

³ Termasuk Kecamatan Ndosu dan Kuwus Barat

⁴ Termasuk Kecamatan Pacar

Tanah Mediteran memiliki lapisan solum yang tebal dengan kemampuan menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang. Selain itu, tekstur tanah mediteran berupa geluh hingga lempung. Persebaran jenis-jenis tanah mediteran banyak dijumpai di Kecamatan Sano Nggoang dan Lembor. Jenis tanah selanjutnya yaitu tanah latosol. Karakteristik tanah latosol diantaranya mempunyai horizon yang telah berkembang, dengan tekstur lempung, dan struktur remah hingga gumpal. Adapun persebaran tanah latosol banyak ditemukan di Kecamatan Sano Nggoang. Adapun distribusi variasi jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat disajikan pada peta sebagai berikut.



Gambar 2. 5. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

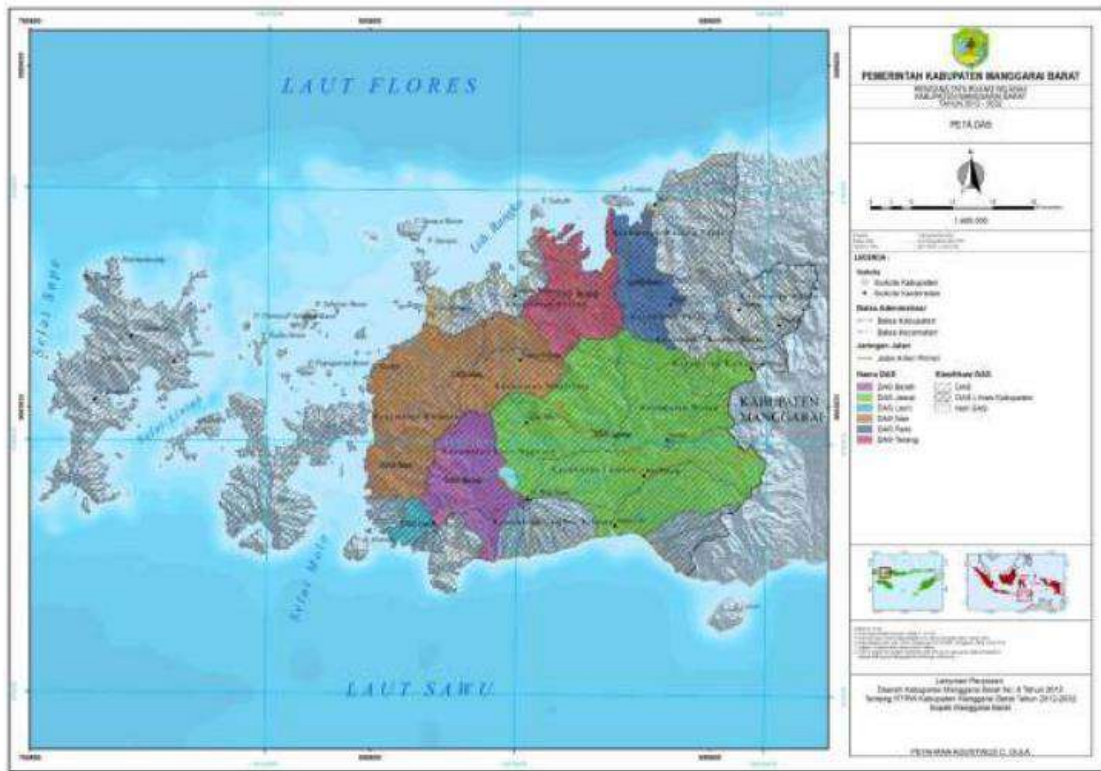
Jenis tanah litosol merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan di atas batuan, sehingga kedalaman profil kurang dari 50 cm. Kedangkalan profil tanah memicu kurangnya kadar air, sehingga kemungkinan untuk diolah sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Tekstur tanah beranekaragam, dan pada umumnya berpasir dengan dominasi solum yang umumnya tidak berstruktur. Distribusi tanah litosol dominan berada di Kecamatan Komodo.

Jenis tanah mediteran dan latosol, yang memiliki tekstur dominan berupa geluh hingga lempung, memiliki karakteristik cenderung mudah menyerap air, namun sulit untuk meloloskan air. Kondisi tersebut berimplikasi pada karakteristik kembang susut tanah yang sangat signifikan (stabilitas tanah kurang baik). Sehingga, diperlukan upaya stabilisasi terhadap jenis tanah tersebut, apabila dimanfaatkan sebagai tanah dasar dalam pendirian suatu bangunan maupun jalan.

2.1.1.6. Hidrologi

Air permukaan yang ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 15 sungai dan satu danau. Sungai mengalir dari pegunungan ke arah utara dan selatan. Dari 15 sungai yang berada di daerah ini, kurang lebih 25% di antaranya

mengalir sepanjang tahun, sedangkan selebihnya merupakan sungai musiman. Sungai-sungai utama yang mengalir sepanjang tahun di antaranya adalah sungai Wae Jamal, Wae Jare, Wae Mese, Wae Impor, Wae Reno, Wae Ncuring, Wae Bakok Pa'a, Wae Longge.



Gambar 2. 6. Peta Geologi Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kab. Manggarai Barat, 2018

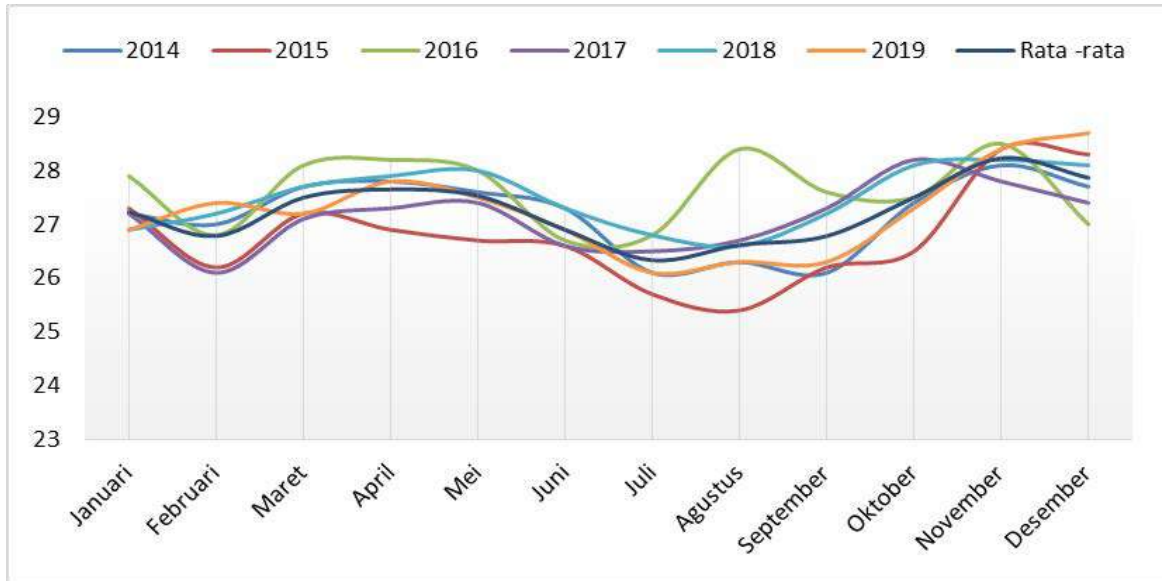
Adanya kesamaan karakteristik fisiografis, dan juga arah aliran, kesatuan dari unit – unit sungai tersebut, tergabung menjadi beberapa daerah aliran sungai (DAS), menjadikan Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari beberapa DAS. Daerah aliran sungai yang dimaksud antara lain, DAS Jamal, Nae, Bereh, Terang, Raru, Komodo dan Rinca. DAS yang memiliki luasan yang terbesar adalah DAS Jamal, yaitu kurang lebih 85.974,14 Ha. Selain itu, DAS Jamal juga termasuk dalam DAS lintas kabupaten, karena juga mencakup dari sebagian wilayah dari Kabupaten Manggarai Barat di bagian tengah. Dengan demikian, dalam pengelolaan setiap DAS, diperlukan kajian yang saling terintegrasi antar wilayah, dari segi regulasi maupun secara teknis.

2.1.1.7. Klimatologi

Kondisi iklim dari Kabupaten Manggarai Barat dapat diidentifikasi dari kondisi suhu dan curah hujan tahunannya. Analisis suhu yang dilakukan selama 6 tahun

menunjukkan bahwa rata-rata suhu di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 27,24°C. Suhu minimum dalam kurun waktu 6 tahun sebesar 25,4°C dan suhu maksimum 28.7°C.

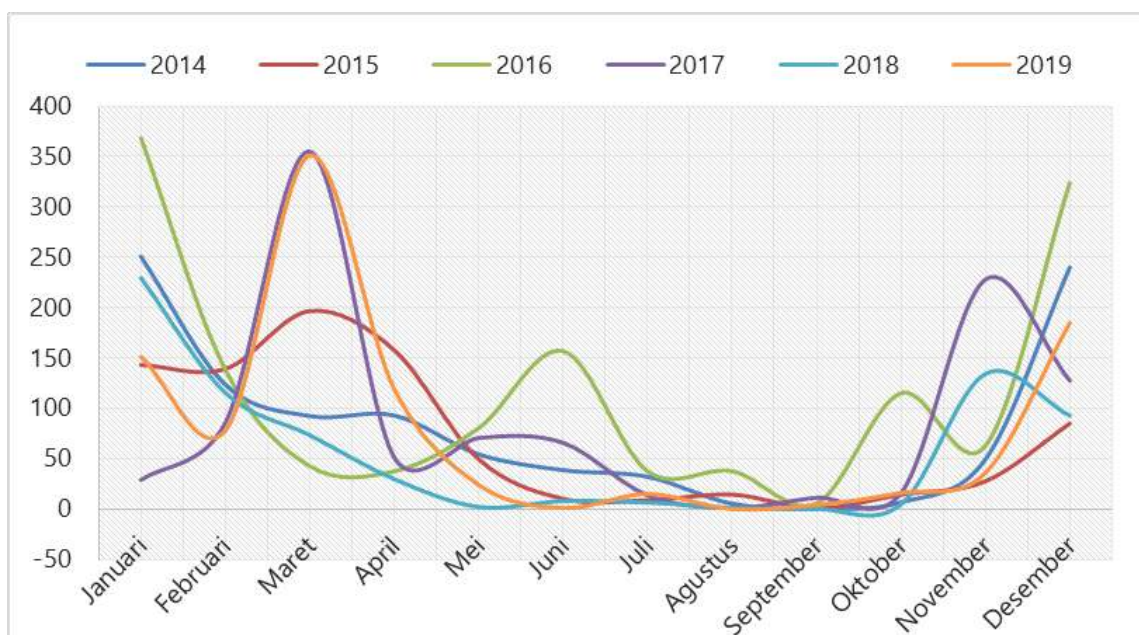
Grafik 2. 1. Suhu Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019



Sumber: BPS Manggarai Barat, 2020

Rata-rata suhu di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2014 – 2019 relatif dalam kondisi yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya perubahan suhu yang signifikan. Kondisi ini juga merepresentasikan belum adanya aktivitas – aktivitas yang memicu kenaikan suhu secara drastis. Selain itu, suhu yang relatif stabil juga mencerminkan kondisi tutupan lahan masih dalam kondisi yang baik, belum terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun secara masif.

Grafik 2. 2. Curah Hujan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 – 2019



Curah hujan Kabupaten Manggarai Barat menurut klasifikasi tipe curah hujan di Indonesia tergolong dalam tipe monsunial. Artinya, musim hujan hanya terjadi sekali periode dalam 1 tahun, dan biasanya terjadi pada Bulan Oktober hingga Bulan April, mengikuti pergerakan angin musim barat dan timur. Rata-rata curah hujan dalam kurun waktu 6 tahun, yaitu tahun 2014 hingga 2019 sebesar 994,7 mm/tahun, dengan curah hujan tertinggi 1406 mm/tahun dan curah hujan terendah 696,9 mm/tahun. Besaran curah hujan di Kabupaten Manggarai Barat, jika diklasifikasikan dalam iklim menurut Schmidt Ferguson termasuk dalam iklim E atau agak kering. Kondisi tersebut sejalan dengan tipe dari musim hujan yang berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat yaitu tipe monsunial. Curah hujan tipe monsunial dihasilkan dari angin yang berhembus dari benua Asia menuju Indonesia. Uap air yang dibawa menuju Indonesia bagian timur akan semakin sedikit, karena telah melewati wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian, seringkali periode musim hujan di Kabupaten Manggarai Barat sangat singkat jika dibandingkan dengan periode musim kemarau.

2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah tentu memperhatikan beberapa aspek, seperti kondisi kelerengan, morfologi, karakteristik tanah maupun topografi dari wilayah tersebut. Aspek tersebut yang selanjutnya menjadi indikator dalam menentukan kelas kemampuan lahan terhadap penggunaan lahan tertentu. Penggunaan lahan di Kabupaten Manggarai Barat secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4. Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	787	0,27
2	Sawah	11.441	3,88
3	Tegalan/ladang	25.344	8,60
4	Perkebunan	2.199	0.75
Total Luas		39.771	13,49

Sumber: Manggarai Barat dalam Angka, 2019

Penggunaan lahan dominan di Kabupaten Manggarai Barat sebagian besar untuk lahan pertanian. Lahan tersebut berupa tegalan atau ladang dengan

persentase sebesar 8,60%. Besarnya persentase luasan pemanfaatan lahan berupa tegalan, menunjukkan adanya beberapa aspek keterbatasan, sehingga lahan hanya dapat dimanfaatkan sebagai tegalan / ladang yang memiliki produktivitas lebih rendah jika dibandingkan dengan pemanfaatan lahan berupa sawah maupun perkebunan.

Tabel 2. 5. Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kelas Kemampuan Lahan (Ha)						Jumlah
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	Kelas VI	Kelas VII	
1	Boleng	2.939,41	-	2.939,41	4.703,06	587,88	1.763,65	12.933,41
2	Komodo	17.818,39	2.969,73	26.727,59	31.677,14	11.878,93	47.515,72	138.587,50
3	Kuwus	53,61	-	107,23	321,68	-	-	482,52
4	Kuwus Barat	-	-	196,59	458,71	-	65,53	720,83
5	Lembor	1.656,48	207,06	-	1.242,36	-	-	3.105,90
6	Lembor Selatan	3.208,10	1.069,37	356,46	2.851,65	356,46	712,91	8.554,95
7	Macang Pacar	1.076,53	-	807,4	1.345,67	-	807,4	4.037,00
8	Mbeliling	836,16	-	627,12	2.717,51	418,078	-	4.598,87
9	Ndoso	-	-	297,26	693,60	-	-	990,86
10	Pacar	163,71	-	327,42	818,54	-	-	1.309,67
11	Sano Nggoang	2.524,46	560,99	560,99	2.524,46	1.121,98	280,50	7.573,38
12	Welak	1.381,55	153,51	921,03	2.149,07	-	-	4.605,16
Total		31.658,40	4.960,66	33.868,50	51.503,45	14.363,33	51.145,71	187.500,05

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

Penggunaan lahan dengan dominasi berupa tegalan / ladang berkorelasi dengan kelas kemampuan lahan yang dominan di Kabupaten Manggarai Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelas kemampuan lahan dominan pada kelas IV. Artinya, terdapat aspek – aspek yang menjadi faktor pembatas, lahan – lahan di Kabupaten Manggarai Barat untuk dikembangkan. Faktor tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh karakteristik kelerengan, jenis tanah, morfologi maupun topografinya.



Gambar 2. 7. Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

Terdapat 6 kelas kemampuan lahan yang terdistribusi di Kabupaten Manggarai Barat. Hanya terdapat 19,53% lahan yang termasuk dalam kategori kemampuan lahan kelas I dan II (direpresentasikan dengan warna hijau tua dan muda pada peta), sedangkan 80,47% sisanya merupakan lahan dengan kelas III hingga VII. Semakin tinggi suatu lahan terkategori dalam kelas kemampuan lahan, maka semakin banyak juga faktor pembatas yang menghambat lahan tersebut untuk dapat dimanfaatkan secara produktif.

2.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses dalam sistem kebumihannya, baik yang terjadi akibat proses alamiah maupun non-alamiah oleh kegiatan manusia. Sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah daerah rawan bencana alam terutama tanah longsor dan angin puting beliung. Kondisi ini sedikit banyak mempengaruhi kondisi infrastruktur daerah terutama jaringan jalan yang rentan rusak. Berikut ini adalah data Peta Rawan Bencana di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 6. Peta Rawan Bencana

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
1	Komodo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran 2. Gempa Bumi 3. Tanah Longsor 4. Banjir 5. Abrasi 6. Stunami 7. Angin Putting Beliung 8. Gunung Api 9. Kekeringan 10. Endemi Menular 11. Konflik Sosial 12. Gelombang Pasang
2	Boleng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Stunami 7. Abrasi 8. Konflik Sosial 9. Kekeringan 13. Endemi Menular 14. Gelombang Pasang
3	Mbeliling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
4	Sano Nggoang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular 9. Gunung Api

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
5	Lembor Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular 9. Abrasi 10. Gelombang Pasang
6	Lembor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
7	Welak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
8	Kuwus dan Kuwus Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular
9	Ndoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Konflik Sosial 7. Kekeringan 8. Endemi Menular

No	Wilayah/Kecamatan	Jenis Potensi Bencana
10	Macang Pacar dan Pacar	1. Tanah Longsor 2. Banjir 3. Angin Putting Beliung 4. Kebakaran 5. Gempa Bumi 6. Stunami 7. Abrasi 8. Konflik Sosial 9. Kekeringan 10. Endemi Menular 11. Gelombang pasang

Sumber Data: BPBD Kabupaten Manggarai Barat, 2019

Data BPBD Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 9 jenis bencana yang memiliki tingkat risiko yang sedang hingga tinggi di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis bencana tersebut di antaranya yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gelombang tinggi dan abrasi, cuaca ekstrim, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Berikut data yang menyajikan tingkat risiko dari setiap jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 7. Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Manggarai Barat

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Penduduk Terpapar (Jiwa)	Lahan Terpapar (Ha)	Kerugian (Juta Rupiah)
1	Banjir	Sedang	39.436	12.954,06	621.014,00
2	Banjir bandang	Tinggi	5.310	2.721,06	140.458,48
3	Gempa bumi	Tinggi	256.269	-	2073061,33
4	Tsunami	Tinggi	4.945	8.406,81	233.990,84
5	Tanah longsor	Tinggi	120.286	174.848,92	1.314.131,06
6	Gelombang ekstrim dan abrasi	Sedang	3.059	7.021,62	68.647,28
7	Cuaca ekstrim	Tinggi	87.579	-	2.688.801,00
8	Kekeringan	Tinggi	243.156	192.053,46	2.869.385,08
9	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi	155.236	120.732,63	-

Sumber Data: Dokumen KRB Kabupaten Manggarai Barat, 2018

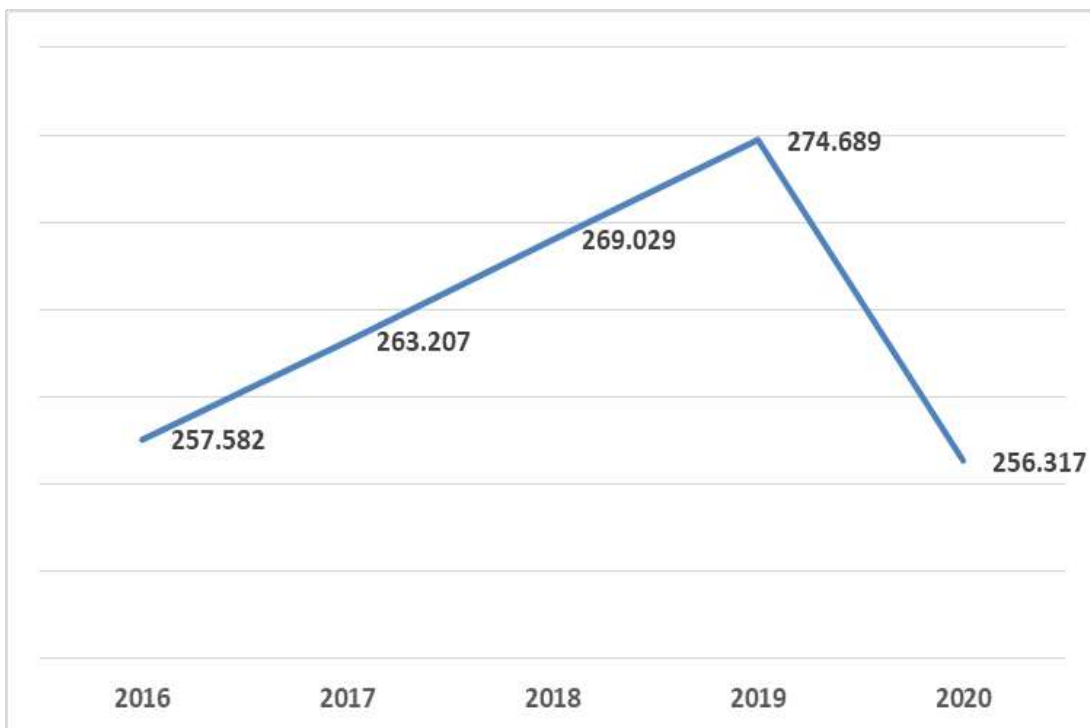
Jumlah penduduk terpapar terbanyak terjadi pada bencana gempa bumi dan kekeringan. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan bencana kekeringan dan tanah

longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana gempa bumi, cuaca ekstrim, dan kekeringan berpotensi menyebabkan kerugian paling tinggi secara ekonomi.

2.1.3. Demografi

Kondisi kependudukan atau demografi adalah salah satu aspek penting yang dijadikan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk menjadi objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Dengan demikian, aspek kependudukan menjadi komponen internal yang sangat penting dalam pengembangan suatu daerah.

Grafik 2. 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber Data: BPS Manggarai Barat, 2021

Jumlah total penduduk Kabupaten Manggarai Barat, yaitu 256.317 jiwa dengan laju pertumbuhan mencapai 1,41 persen pada tahun 2020. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 18.372 jiwa atau sebesar 7,16% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2019. Selain itu, rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2020 mencapai 81,59 jiwa/km². Wilayah terpadat adalah Kecamatan Kuwus Barat yaitu 250,70 jiwa/Km² dan Kuwus yaitu 250,65 jiwa/Km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan terlonggeng adalah Kecamatan Boleng dengan angka kepadatan 38,90 jiwa/Km²

dan Sano Nggoang 39,50/Km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Manggarai Barat belum merata.

Tabel 2. 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 - 2020

Kecamatan	Tahun						
	2017		2018		2019		2020
	L	L	L	P	L	P	L+P
Komodo	26102	26877	26877	26562	27638	27359	53,724
Boleng	9849	10062	10062	1P0078	10267	10299	18925
Sano Nggoang	7346	7454	7454	7680	7554	7797	14229
Mbeliling	6637	6726	6726	6903	6805	6998	13758
Lembor	16797	17143	17143	17771	17471	18142	33653
Welak	11121	11343	11343	11569	11554	11803	21389
Lembor Selatan	12119	12373	12373	12754	12616	13026	23461
Kuwus	12643	7472	7472	7791	7605	7942	13673
Ndoso	9861	9956	9956	10256	10040	10359	20032
Kuwus Barat	-	5411	5411	5634	5507	5745	10695
Macang Pacar	17724	8934	8934	9336	9153	9582	15936
Pacar	-	9252	9252	9692	9479	9948	16842
JUMLAH	130.199	133.003	133.003	136.026	135.689	139.000	256.317
TOTAL	263.207		269.029		274.689		256.317

Sumber Data: BPS Manggarai Barat, 2021

*Sampai tahun 2017, jumlah penduduk masih digabung dengan kecamatan induk

Aspek demografi berikutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019 masih lebih banyak dari jumlah penduduk laki-lakinya. Terlihat bahwa setiap tahunnya ada selisih sekitar tiga ribuan orang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Sehingga angka sex ratio di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 97,62. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97-98 orang penduduk laki-laki.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus memiliki data makro yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan isu strategis daerah. Berikut adalah penjelasan mengenai capaian pembangunan masing-masing fokus di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah melalui pengukuran terhadap pencapaian indikator-indikator makro ekonominya. Indikator-indikator tersebut, di antaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Berikut adalah analisis data dari berbagai indikator ekonomi makro tersebut.

2.2.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.3,519,340,010,000 (tiga triliun lima ratus Sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh juta sepuluh ribu rupiah) dan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp.2,267,552,960,000 (dua triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat bahwa PDRB Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020 dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Selengkapnya mengenai perkembangan produk domestik regional bruto Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 9. Kontribusi Sektor terhadap PDRB Tahun 2017-2020 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2020	2019	2018	2020	2019	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 447 389,00	1 423 042,68	1 343 261,41	927 915,14	920 225,79	892 247,88
B	Pertambangan dan Penggalian	64 195,05	60 931,75	56 418,96	43 128,64	40 932,03	38 399,05
C	Industri Pengolahan	15 846,22	15 597,64	13 995,18	10 167,01	10 294,67	9 577,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1 669,73	1 540,26	1 451,73	1 147,79	1 061,97	1 001,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,64	27,97	26,68	22,81	21,44	20,96
F	Konstruksi	484 124,45	450 536,38	401 936,38	304 687,27	285 067,34	261 999,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	337 082,28	343 997,22	305 405,96	216 443,63	227 977,56	210 746,26
H	Transportasi dan Pergudangan	119 055,93	159 206,06	144 149,29	78 668,78	100 831,10	95 847,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18 106,56	27 780,63	24 632,71	11 222,48	17 577,13	15 740,64
J	Informasi dan Komunikasi	254 713,67	227 919,24	210 244,31	201 039,60	178 619,17	168 028,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20 871,83	20 634,29	19 538,77	13 692,76	13 555,21	13 333,32
L	Real Estate	102 294,44	104 684,22	103 317,96	65 080,46	66 397,98	65 829,36
M,N	Jasa Perusahaan	9 325,65	16 278,74	15 257,02	6 558,62	11 775,98	11 213,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	487 842,37	468 515,23	415 443,68	302 219,72	289 909,56	267 181,00
P	Jasa Pendidikan	112 076,19	104 782,29	94 965,52	61 690,44	59 948,57	56 512,08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40 894,24	36 838,55	33 950,66	21 556,96	20 511,88	19 318,08
R,S, T,U	Jasa lainnya	3 821,75	4 469,03	4 053,00	2 310,86	2 734,84	2 516,66
	PDRB	3 519 340,01	3 466 782,19	3 188 049,21	2 267 552,96	2 247 442,22	2 129 513,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2021

Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat jika dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini disinyalir karena menurunnya produktivitas lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor yang paling menurun adalah pertanian. Sektor ini mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat. Bergolaknya sektor ini berpengaruh terhadap kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Dari ke-17 sektor lapangan usaha, sektor Pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat yakni 41,13%. Diikuti lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, yakni mencapai 13,86%.

Pelambatan terhadap pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini terlihat dari semakin menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya dapat dicermati di tabel berikut.

Tabel 2. 10. Persentase Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,13	41,05	42,13	42,15	42,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,82	1,76	1,77	1,88	1,95
C	Industri Pengolahan	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
F	Konstruksi	13,76	13,00	12,61	12,49	12,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,58	9,92	9,58	9,53	9,42
H	Transportasi dan Pergudangan	3,38	4,59	4,52	4,48	4,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,51	0,80	0,77	0,73	0,68
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,57	6,59	6,77	6,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,60	0,61	0,60	0,59

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
L	Real Estate	2,91	3,02	3,24	3,34	3,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,47	0,48	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,86	13,51	13,03	12,85	12,63
P	Jasa Pendidikan	3,18	3,02	2,98	3,00	2,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,06	1,06	1,08	1,06
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2021

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dari tahun 2016 hingga 2020 terus menurun. Sementara sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata memiliki kontribusi yang meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, walaupun masih sangat kecil. Hal yang sama juga dapat dicermati dari kontribusi lapangan usaha konstruksi yang terus meningkat. Perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur pariwisata di Manggarai Barat turut memacu peningkatan kontribusi di sektor ini. Penurunan kontribusi di beberapa sektor ekonomi disebabkan oleh dua penyebab, yaitu 1) menurunnya kapasitas produksi per sektor dan 2) menurunnya kapasitas pemasaran per sektor. Pandemi Covid-19 juga memiliki pengaruh yang besar terhadap penurunan kontribusi masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 tercatat mencapai 0,89%. Angka ini menurun secara signifikan dari capaian tahun-tahun sebelumnya karena pandemic Covid19 yang sedang terjadi. Walaupun mengalami penurunan pertumbuhan, angka pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat masih lebih baik dari pertumbuhan tingkat provinsi maupun nasional.

Tabel 2. 11. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020

Uraian	Capaian (%)		
	2018	2019	2020
Kabupaten	5,23	5,54	0,89
Provinsi	5,13	5,20	-0,83
Nasional	5,17	5,02	-3,49

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Walaupun menurun, laju pertumbuhan ekonomi Manggarai Barat masih jauh lebih baik dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dan juga nasional. Pandemi Covid19 yang terjadi secara global telah berdampak secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional, regional maupun lokal. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami penurunan sebagai akibat dari pandemic Covid19 ini. Sektor pariwisata dan turunannya menjadi sektor yang cukup tepukul dengan adanya pandemi ini. Berikut adalah data mengenai laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Sektor PDRB		Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	3,14	3,82	4,10	2,86
B	Pertambangan dan Penggalian	5,37	6,60	2,31	4,59	5,68
C	Industri Pengolahan	-	7,49	3,74	7,38	3,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,08	6,00	17,81	1,47	12,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,43	2,27	2,03	1,34	0,61
F	Konstruksi	6,88	8,80	7,79	6,08	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	8,18	6,66	5,88	6,00
H	Transportasi dan Pergudangan	-	5,20	7,99	7,91	6,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	11,67	12,58	12,26	11,98
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	6,30	5,13	5,15	5,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,66	5,75	5,46	3,78
L	Real Estate	-	0,86	4,74	5,52	4,02
M,N	Jasa Perusahaan	-	5,02	5,50	4,98	4,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	8,51	5,77	5,71	6,14

Sektor PDRB		Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
P	Jasa Pendidikan	2,91	6,08	4,40	4,29	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,09	6,18	5,50	5,66	4,65
R,S,T	Jasa lainnya	-	8,67	7,04	7,03	6,25
	PDRB	0,89	5,54	5,23	5,11	4,87

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kab Manggarai Barat, 2021

Di tengah pandemi Covid19 ini, sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan juga sektor informasi dan komunikasi. Sementara sektor-sektor lain mengalami pertumbuhan yang negative dikarenakan oleh kondisi pandemic Covid19 yang tengah melanda dunia ini. Kondisi ini menyebabkan pembatasan aktivitas-aktivitas secara makro maupun mikro yang pada akhirnya berdampak pada menurun secara signifikannya aktivitas-aktivitas perekonomian. Sektor pariwisata dan turunannya juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Adanya larangan-larangan penerbangan sangat berdampak pada aktivitas keparwisataan dan juga aktivitas terkait lainnya.

Pertumbuhan sektor primer terutama pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Sektor tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017, namun pertumbuhannya terus menurun mencapai 0,84% pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan pariwisata yang demikian baik di Kabupaten Manggarai Barat beberapa tahun terakhir belum mampu memacu pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

2.2.1.3. Laju Inflasi

Perkembangan ekonomi daerah juga sangat dipengaruhi oleh laju inflasi. Inflasi adalah pergerakan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Inflasi berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, ketidaklancaran distribusi barang, hingga adanya perilaku spekulasi.

Laju inflasi di Kabupaten Manggarai Barat didasarkan pada pengukuran laju inflasi di tiga kota di Provinsi NTT, yaitu Kota Maumere, Kota Kupang, dan Kota Waingapu. Laju inflasi yang digambarkan di naskah RPJMD ini adalah laju inflasi yang terjadi secara umum di Provinsi NTT. Berikut adalah data laju inflasi Provinsi NTT:

Tabel 2. 13. Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2015-2019 (Persen)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi NTT	2,48	2,00	3,07	0,67	0,26
Inflasi Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kab Manggarai Barat, 2021

Laju inflasi di Provinsi NTT lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional. Laju inflasi mencapai titik terendahnya pada tahun 2020. Penurunan laju inflasi ini tidak lepas dari intervensi program pengendalian harga produk inflasi yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah NTT. Stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting menjadi beberapa faktor yang berpengaruh terhadap inflasi.

2.2.1.4. PDRB Perkapita

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di Kabupaten Manggarai Barat juga berpengaruh pada meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Data BPS menyebutkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2013 masih sebesar Rp 8,2 juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 11,8 juta. PDRB per kapita naik lagi menjadi Rp 12,6 juta pada tahun 2019 dan sedikit menurun menjadi 12,5 juta pada tahun 2020. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan per kapita masyarakat yang cukup besar dari tahun 2018 hingga 2020.

Tabel 2. 14. PDRB Per-Kapita Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Kabupaten	11,8 juta	12,6 juta	12,5 juta
Provinsi	18,4 juta	19,6 juta	19,2 juta
Nasional	55,9 juta	59,1 juta	56,9 juta

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2020. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan rata-rata nasional, terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat masih tergolong kecil. PDRB per kapita Kabupaten Manggarai Barat tidak jauh berbeda dengan PDRB per kapita beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 15. PDRB Per Kapita Beberapa Kabupaten Terdekat Tahun 2018-2020

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Manggarai	12,04 juta	13,2 juta	13,5 juta
Manggarai Timur	10,5 juta	11,2 juta	11,3 juta
Manggarai Barat	12,6 juta	13,7 juta	12,5 juta

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2021

Jika ditelaah lebih mendalam lagi, dengan membandingkan kontribusi setiap sektor terhadap jumlah penduduk yang bekerja pada sektor tersebut, maka akan terlihat ketimpangan pendapatan yang cukup besar. Misalnya, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian kurang lebih sebanyak 199.583 orang pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat, maka diperoleh pendapatan per kapita masyarakat di sektor pertanian ini hanya mencapai 7,13 juta rupiah per tahun.

2.2.1.5. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh indikator indeks gini. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 0, berarti semakin baik pemerataan pendapatan di suatu daerah atau semakin berkurang ketimpangan pendapatan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 1, berarti semakin besar ketimpangan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Indeks Gini Kabupaten Manggarai Barat belum dihitung secara mandiri oleh Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, data RPJMD masih menggunakan indeks gini rata-rata Provinsi NTT. Berikut adalah data indeks gini Provinsi NTT pada tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 2. 16. Indeks Gini Provinsi NTT Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Semester 1 (Maret)	0,351	0,356	0,354
Semester 2 (September)	0,359	0,355	0,356

Sumber: BPS Nusa Tenggara Timur 2021

Indeks gini Provinsi NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang. Indeks gini ini berada di kisaran 0,30-0,40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi NTT termasuk Kabupaten Manggarai Barat, semakin merata. Walaupun PDRB per kapitanya tergolong rendah. Pengembangan sektor pertanian dan UKM harus dijalankan secara berkesinambungan untuk memperkecil ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.1.6. Angka Kemiskinan

Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang lambat dengan daya saing yang rendah berdampak pada banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat. BPS mencatat, penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat berkembang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2020, walaupun secara persentase terus mengalami penurunan. Data BPS mencatat ada sebanyak 49.400 jiwa (17,71% dari total penduduk) pada tahun 2020 masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Data dari Dinas Sosial mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 baru mencapai 41.486 orang. Perbedaan metode dan indikator antar kedua lembaga ini yang menyebabkan adanya perbedaan jumlah penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun terakhir, terlihat ada perkembangan yang cukup baik. Penduduk miskin masih mencapai 50.980 jiwa (20,12%) pada tahun 2015. Namun terus menurun mencapai 49.400 jiwa (17,71%) pada 2020. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional, maka akan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. 17. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2019 (Persen)

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Kabupaten	18,14	18,01	17,71

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Provinsi	21,03	20,62	20,9
Nasional	9,66	9,22	10,19

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Walapun lebih baik dari angka provinsi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat masih tergolong tinggi jika dibandingkan nasional. Kabupaten Manggarai Barat berada di posisi ke-8 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT dan ke-435 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan petani dan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi potensial.

Tabel 2. 18. Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2019

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Manggarai	69,320	69,330	69,520
Manggarai Barat	48,530	49,230	49,400
Manggarai Timur	74,880	75,830	76,690

Sumber BPS NTT, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Kinerja perekonomian yang baik untuk masing-masing sektor ekonomi menjadi determinan yang berpengaruh terhadap kondisi ini. Jika merujuk pada data yang dimiliki Dinas Sosial, maka persebaran penduduk miskin di berbagai kecamatan di Manggarai Barat dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2. 19. Penduduk Miskin Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Komodo	2.125	2.125	1.634	3.138	4.470
2	Boleng	1.778	1.778	1.322	2.745	3.121
3	Sano Nggoang	3.047	3.047	1.349	2.504	2.815
4	Mbeliling*	-	-	1.208	2.107	2.329
5	Lembor	4.522	4.522	3.385	4.214	5.065
6	Welak	1.945	1.945	1.467	3.296	3.650
7	Lembor Selatan**	-	-	1.547	3.410	4.150
8	Kuwus	5.206	5.206	3.513	2.294	3.300
9	Ndoso***	-	-	2.243	3.566	4.182

No.	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
10	Kuwus Barat****	-	-	-	1.902	2.411
11	Macang Pacar	2.557	2.557	3.664	2.532	3.165
12	Pacar*****	-	-	-	2.438	2.828
Total		21.180	21.180	21.332	34.146	41.486

Sumber: Dinas Sosial Kab Manggarai Barat, 2020

Keterangan: *tahun 2015-2016 masih tergabung di kec Sano Nggoang
 ** tahun 2015-2016 masih tergabung di kec Lembor
 *** tahun 2015-2016 masih tergabung di kec Kuwus
 **** tahun 2015-2017 masih tergabung di kec Kuwus
 ***** tahun 2015-2017 masih tergabung di kec Macang Pacar

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Manggarai Barat terdapat di Kecamatan Lembor; diikuti oleh kecamatan Komodo. Sedangkan jumlah penduduk miskin paling sedikit terdapat di Kecamatan Mbeliling. Jika merujuk pada struktur perekonomian di Kecamatan Lembor dan Komodo yang didominasi oleh petani dan nelayan, maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya produktivitas dan minimnya diversifikasi produk pertanian di Kecamatan Lembor dan Komodo menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan juga disebabkan oleh banyaknya petani yang menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil atau sistem kontrak tanah. Kebanyakan petaninya di Kecamatan Lembor adalah buruh tani, bukan pemilik sawah.

Persoalan kemiskinan tidak hanya terkait jumlah dan persentase penduduk miskin. Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Keduanya dapat diukur dengan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2. 20. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

Variabel Kemiskinan	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	49,400	49,23	48,53	49,39	49,55

Variabel Kemiskinan	Tahun				
	2020	2019	2018	2017	2016
Persentase Penduduk Miskin	17,71	18,01	18,14	18,86	19,35
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,09	3,39	3,42	4,00	3,02
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,79	0,90	1,00	1,09	0,85
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	340 094	318 546	313 380	304 277	282 412

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami perbaikan selama 2016 hingga 2020, walaupun angka tersebut tidak begitu signifikan. Capaian indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat lebih baik dari rata-rata Provinsi NTT. Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi NTT mencapai 4,15, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya mencapai 1,13 pada tahun 2019.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan Kabupaten Manggarai Barat juga mengalami kenaikan dari Rp313.380 per kapita per bulan pada tahun 2018 menjadi Rp 340.094 per kapita per bulan di tahun 2020. Ini artinya, tingkat minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk hidup layak di Kabupaten Manggarai Barat juga semakin meningkat.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam pengukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Konteks pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, fokus kesejahteraan sosial diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator, meliputi: Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Angka Harapan Hidup, Rasio Penduduk yang Bekerja, Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Balita Gizi Buruk, dan *Stunting*.

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya

terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Data BPS menyebutkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 sudah mencapai 96,79%. Ini artinya, hampir semua penduduk Kabupaten Manggarai Barat usia 15 tahun ke atas sudah bisa membaca dan hanya 3,21% yang masih buta huruf dan perlu mendapat perhatian pemerintah ke depannya.

Tabel 2. 21. Perkembangan Angka Melek Huruf Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	96,01	96,67	96,83	96,79	95,89
Provinsi	94,85	94,52	94,76	95,76	95,76
Nasional	97,93	97,93	98,07	98,22	98,29

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2020

Angka melek huruf di Kabupaten Manggarai Barat cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Namun demikian, angka ini masih di bawah rata-rata nasional. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi fokus intervensi yang harus dijalankan untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 22. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019

Uraian	Capaian (tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	6,82	7,14	7,18	7,19	7,30
Provinsi	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63
Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan selama periode 2016-2020. Peningkatan signifikan terjadi sebesar 0,32% pada tahun 2017 dan 0,11% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun demikian, jika

dibandingkan dengan RLS Provinsi NTT dan nasional, RLS di Kabupaten Manggarai Barat masih rendah. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,30 pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Manggarai Barat yang berusia 25 tahun ke atas sudah mengenyam pendidikan formal selama 7,30 tahun atau mencapai kelas VIII (2 SMP).

2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator penting untuk menunjukkan level aksesibilitas pendidikan dan tingkat partisipasi penduduk pada suatu jenjang pendidikan. Dalam APK tercermin proporsi siswa sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang bersekolah di jenjang yang tidak sesuai umurnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

APK Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Peningkatan ini juga menunjukkan adanya perbaikan pada aspek sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan. Secara rinci, perkembangan APK Kabupaten Manggarai Barat dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan SMK tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi kasar SD/MI					
Kabupaten	113,72	116,29	121,55	120,23	NA
Provinsi	114,12	114,05	116,58	114,95	113,40
Nasional	109,31	108,50	108,61	107,46	106,32
Angka partisipasi kasar SMP/MTs					
Kabupaten	85,04	85,78	86,43	91,60	NA
Provinsi	89,56	91,35	88,51	87,82	89,85
Nasional	90,12	90,23	91,52	90,57	92,06

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA					
Kabupaten	53,31	58,39	57,81	68,42	NA
Provinsi	79,34	78,83	77,81	84,63	84,70
Nasional	80,89	82,84	80,68	83,98	84,53

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2020

Angka partisipasi kasar Kabupaten Manggarai Barat di tingkat SD/MI dan SMP/MTs cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Namun demikian, di tingkat SMA/MA/SMK terlihat capaiannya tergolong rendah. Hal ini berarti masih ada sekitar 30% anak-anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Barat yang belum dapat mengakses layanan pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin rendah angka partisipasinya. Biaya pendidikan yang semakin mahal di level pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan keengganan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya. Letak sekolah SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Manggarai Barat umumnya terpusat di wilayah-wilayah tertentu, seperti di ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten. Hal ini menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus disiapkan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di luar wilayah pusat aktivitas tersebut.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni

APM merupakan salah satu indikator yang berpengaruh terhadap akses pendidikan. Angka partisipasi murni adalah proporsi penduduk pada kelompok umur di jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 24. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	95,4	97,5	96,78	96,46	96,54
SMP/MTs	78,7	81,9	72,14	73,86	74,24
SMA/MA/SMK	34,6	40,0	47,80	47,15	47,23

Sumber: Neraca Pendidikan dan Manggarai Barat dalam Angka Tahun 2021

Angka partisipasi murni (APM) jauh lebih kecil dari angka partisipasi kasarnya (APK) di semua jenjang pendidikan. Ini menggambarkan bahwa banyak siswa mengenyam pendidikan tidak sesuai umurnya. Misalnya, di tingkat SD/MI, ada banyak siswa yang berumur di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun. Demikian pula di SMP/MTs, ada siswa yang berumur di bawah 12 tahun dan di atas 15 tahun yang seharusnya berada di jenjang SMA. Selain bersekolah tidak sesuai umur, APM yang kecil juga bisa menggambarkan angka mengulang sekolah yang cukup besar seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25. Angka Mengulang Kelas tahun 2017-2019 (orang)*

Jenjang	Tahun		
	2017*	2018*	2019**
SD	1.566	1369	1362
SMP	22	19	19
SMA/SMK		24	24

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud

Keterangan: *Tidak termasuk MI, MTs, dan MA
 **keadaan November 2018
 ** keadaan Juli 2019

Siswa mengulang pada tahun 2019 berjumlah 1405 orang yang terdiri dari 1.362 orang di SD/MI, 19 orang di SMP/MTs, 3 orang di SMA, dan 24 orang di SMK. Kondisi ini mencerminkan bahwa substansi kegiatan belajar mengajar belum mampu diserap secara baik oleh siswa didik. Persoalan ini memerlukan intervensi perbaikan metode pengajaran dan bimbingan yang lebih intensif untuk menurunkan angka mengulang siswa di Kabupaten Manggarai Barat.

2.2.2.5. Angka Harapan Hidup

Kesejahteraan sosial juga dapat dianalisa dari aspek kesehatan. Beberapa komponennya adalah usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, dan stunting. Usia harapan hidup secara sederhana adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Usia harapan hidup di Kabupaten Manggarai Barat tercatat sebesar 67,38 tahun pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 diperkirakan dapat hidup hingga

umur 68 tahun. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 26. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38
Provinsi	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01
Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Manggarai Barat meningkat dari tahun 2016 hingga 2020, meski belum signifikan. Namun demikian, Kabupaten Manggarai Barat memiliki tingkat UHH yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi NTT. Walaupun UHH Kabupaten Manggarai Barat masih jauh di bawah rata-rata UHH nasional.

2.2.2.6. Rasio Penduduk yang Bekerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator lain yang digunakan untuk menilai kesejahteraan sosial adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang menjadi pengangguran. Pengangguran adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari atau belum mendapat pekerjaan. Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat tergambar di tabel berikut.

Tabel 2. 27. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	1,12	1,51	1,3
2018	0,55	2,13	1,19
2019	1,68	3,52	2,42
2020	2,84	4,76	3,72

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2020. Adanya penambahan jumlah pengangguran secara signifikan pada tahun 2020 membuat tingkat pengangguran terbuka di

Kabupaten Manggarai Barat menjadi cukup tinggi. Angka pengangguran di Manggarai Barat ini didominasi oleh kelompok penduduk perempuan.

Tabel 2. 28. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2020 (persen)

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Kabupaten	1,19	2,42	3,72
Provinsi	3,01	3,35	4,28
Nasional	5,34	5,28	7,07

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat masih cukup rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Walaupun demikian, angka pengangguran harus senantiasa ditekan agar tercapai penyerapan angkatan kerja secara optimal di Kabupaten Manggarai Barat. Tingkat pengangguran terbuka juga berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun.

b. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah data rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 29. Rasio penduduk yang bekerja (persen)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	NA	98,69	98,81	97,58	96,27

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Manggarai Barat terus menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan penurunan sebesar 2,54% dalam periode tersebut. Penurunan tersebut diakibatkan oleh semakin banyaknya angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Barat tetapi jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan. Pada tahun 2020 data menunjukkan rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,27%, dengan demikian terdapat sekitar 3,73% angkatan kerja

yang belum terserap atau belum bekerja. Rasio penduduk yang bekerja juga menggambarkan tingkat kesempatan kerja. Semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja maka semakin tinggi tingkat kesempatan kerja.

2.2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM terdiri dari 3 aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat selalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2020. Berikut adalah data capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 30. IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	61,65	62,58	63,50	63,89
Provinsi	63,73	64,39	65,23	65,19
Nasional	70,80	71,39	71,92	71,94

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

IPM Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan sebesar 2,24 poin pada tahun 2017 hingga 2020. Meskipun demikian, Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki angka IPM di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Manggarai Barat berada di urutan ke-12 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT dan di urutan 469 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 2. 31. Komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

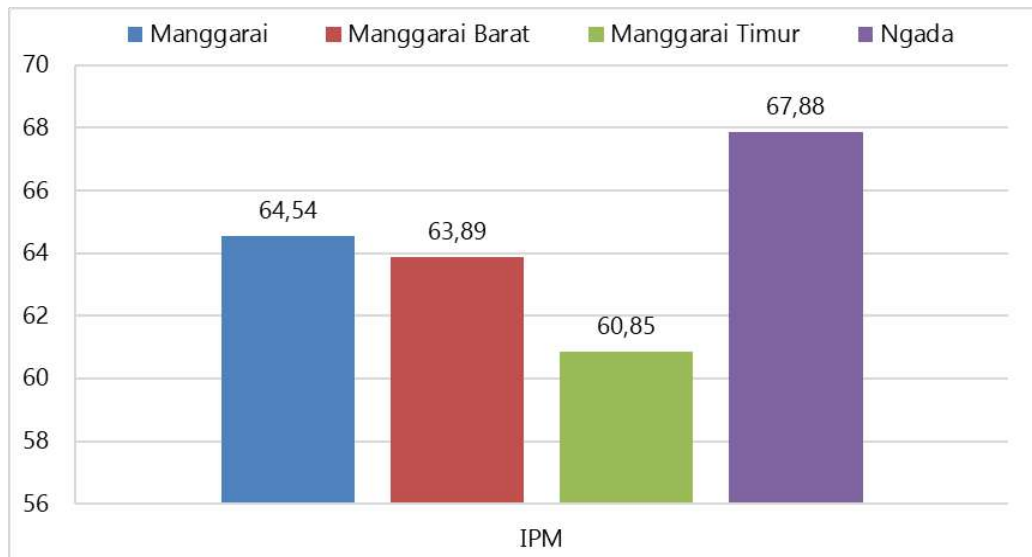
No	Komponen IPM thn 2020	Manggarai Barat	NTT	Indonesia
1.	Rata-rata lama sekolah	7,30 tahun	7,63 tahun	8,48 tahun
2.	Harapan lama sekolah	12,28 tahun	13,18 tahun	12,98 tahun
3.	Umur harapan hidup	67,38 tahun	67,01 tahun	71,47 tahun
4.	Pengeluaran per kapita	7,4 juta	7,5 juta	11,1 juta

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Sebagian besar komponen IPM Kabupaten Manggarai Barat masuk ke dalam kategori tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional, kecuali Usia Harapan Hidup yang memiliki rata-rata 0,37 lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Namun demikian, terlihat bahwa komponen ekonomi memiliki interval pembeda paling

besar. Kondisi tersebut cukup mempengaruhi rendahnya angka IPM Kabupaten Manggarai Barat jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional.

Grafik 2. 4. Perbandingan IPM Kabupaten Manggarai Barat Terhadap Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021

IPM Kabupaten Manggarai Barat, berada di urutan ketiga jika dibandingkan dengan IPM kabupaten sekitarnya pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menjadi penyebab capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat masuk ke dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai dan Ngada. Dengan demikian, fokus utama dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Manggarai Barat ditekankan pada komponen RLS dan HLS.

2.2.2.8. Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran kesehatan masyarakat adalah persentase balita gizi buruk. Semakin besar persentasi balita gizi buruk, maka semakin rendah kualitas kesehatan balita di suatu daerah. Status gizi balita Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017-2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 32. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	1,45	0,27	0,40	2,6
Provinsi	7,40	7,30	2,50	5,10
Nasional	3,80	3,90		

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2020. Data Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa kasus balita gizi buruk dari bulan Januari hingga Agustus pada tahun 2020 tercatat sebanyak 349 kasus dari 87.924 balita di Kabupaten Manggarai Barat. Namun setelah diintervensi melalui kegiatan PMT, jumlah kasus terus berkurang dan tersisa 125 kasus pada bulan November 2020.

2.2.2.9. Stunting

Salah satu isu strategis pembangunan nasional dalam tiga tahun terakhir adalah masih tingginya prevalensi balita stunting. Prevalensi balita stunting adalah proporsi populasi bayi di bawah lima tahun yang memiliki karakteristik tubuh yang pendek dan tidak sesuai dengan keadaan normal bayi sehat.

Prevalensi balita stunting di Indonesia mencapai angka 30,8% pada tahun 2018, sehingga WHO menempatkan Indonesia di urutan ke-5 negara dengan prevalensi tertinggi di dunia. Prevalensi stunting di Provinsi NTT mencapai 27,9% pada tahun 2019. Sementara prevalensi balita stunting untuk Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33. Prevalensi Balita Stunting Tahun 2018-2020

Kecamatan	Tahun								
	2018			2019			2020		
	Jumlah Balita diukur	Balita Stunting	%	Jumlah Balita diukur	Balita Stunting	%	Jumlah Balita diukur	Balita Stunting	%
Komodo	2188	583	26,65	3819	859	22,49	4690	915	19,51
Boleng	990	26	2,63	1463	211	14,42	1754	184	10,49
Sano Nggoang	840	199	23,69	1528	314	20,55	1628	265	16,28
Mbeliling	12	1	8,33	449	77	17,15	414	37	8,94
Lembor	991	439	44,30	1625	494	30,40	2551	816	31,99
Welak	1462	207	14,16	1790	234	13,07	1822	237	13,01
Lembor Selatan	425	135	31,76	1696	463	27,30	2081	469	22,54
Kuwus	1003	246	24,53	957	4	0,42	1104	279	25,27
Ndoso	807	139	17,22	1039	183	17,61	1469	136	9,26
Pacar	1445	92	6,37	1041	48	4,61	1495	81	5,42
Macang Pacar	715	95	13,29	999	282	28,23	1322	388	29,35
Kuwus Barat	644	151	23,45	817	207	25,34	864	233	26,97
Jumlah	11522	2313	20,07	17223	3376	19,60	21194	4040	19,06

Sumber: Bidang Sosbud BP4D, 2020

Kasus *stunting* masih sangat banyak di Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah kasus *stunting* terbanyak terjadi di Kecamatan Komodo, walaupun secara persentase kasus terbanyak ada di Kecamatan Lembor. Ketersediaan sanitasi yang kurang layak, seperti kurangnya ketersediaan air bersih dan gizi yang buruk menjadi penyebab tingginya angka *stunting* di daerah-daerah tersebut.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa data yang dianalisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah data mengenai fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat:

2.2.3.1. Seni Budaya

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mempengaruhi sektor kebudayaan, terutama dengan munculnya sanggar-sanggar budaya. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyebutkan bahwa jumlah sanggar budaya di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019 mencapai 63 sanggar. Umumnya sanggar budaya tersebut dikelola secara mandiri oleh kelompok masyarakat desa di sekitar objek wisata.

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat juga menyelenggarakan pentas seni dan budaya untuk menggairahkan perkembangan sanggar-sanggar tersebut. Hal ini juga dijalankan untuk menciptakan daya tarik bagi wisatawan. Tercatat setiap tahunnya pemerintah menyelenggarakan minimal 1 even Karnaval atau Festival Seni dan Budaya, bahkan pada tahun 2018 terselenggara 3 festival; yakni Festival Komodo, Festival Florata, dan Karnaval Budaya.

2.2.3.2. Olahraga

Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat juga mengembangkan partisipasi para pemuda dalam pembangunan melalui bidang olahraga. Data Dinas PKO menyebutkan bahwa jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat

cukup banyak. Berikut adalah data tentang jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 34. Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Lapangan Olahraga
1	2016	603
2	2017	603
3	2018	603
4	2019	603
5	2020	603

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Walaupun jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat tidak berubah sejak tahun 2016, namun prestasi para atlet daerah dalam Pekan Olah Raga (POR) Daerah NTT cukup baik. Capaian prestasi olahraga tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat semakin baik. Berikut adalah data mengenai prestasi olahraga Kabupaten Manggarai Barat dalam POR NTT.

Tabel 2. 35. Prestasi Kabupaten Manggarai Barat dalam Pekan Olah Raga (POR) NTT Tahun 2015-2019

No	Tahun	Medali
1	2015	2
2	2016	2
3	2017	3
4	2018	5
5	2019	3
6	2020	Tidak ada event

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Perolehan prestasi pada bidang keolahragan selalu meningkat dari tahun ke tahun, terbukti dengan capaian perolehan medali pada kegiatan pekan olah raga provinsi NTT yang diikuti oleh perwakilan atlet dari Kabupaten Manggarai Barat. Walaupun pada tahun 2019 perolehan medali menurun jika dibandingkan pada tahun 2018, namun kecenderungan perolehan medali sejak tahun 2015 selalu mengalami peningkatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Berikut adalah deskripsi capaian kinerja aspek pelayanan umum di Kabupaten Manggarai Barat:

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan. Berikut adalah capaian layanan urusan pemerintahan wajib di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Layanan urusan ini memiliki standar pelayanan minimal yang harus dijaga dengan baik. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan memegang peranan strategis dalam peningkatan mutu sumber daya manusia suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengalokasikan 20% anggaran belanjanya untuk memperbaiki sektor pendidikan. Berikut adalah perkembangan alokasi belanja pendidikan Kabupaten Manggarai Barat tiga tahun terakhir.

Tabel 2. 36. Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat (juta rupiah)

Tahun	Belanja	Urusan pendidikan	Persentase
2020		310.74	
2019	1,228.83	284.89	23,18
2018	1,121.37	291.99	26,04
2017	1,078.25	250.96	23,27

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2020

Persentase belanja urusan pendidikan selalu meningkat trennya dari tahun 2017 hingga 2019. Intervensi pemerintah di urusan pendidikan sangat kuat untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas demi mendukung pembangunan sektor ekonomi potensial dan unggulan. Berbagai upaya pembangunan di bidang pendidikan menghasilkan beberapa pencapaian pembangunan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator yang mendukung pencapaian RLS. Perkembangan APS Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 37. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016-2020

Kelompok Umur (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
5 – 6 tahun	40,90	49,10	33,13	29,23	21,13
7 – 12 tahun	98,52	98,77	98,48	99,11	99,35
13 – 15 tahun	94,52	94,08	94,77	93,26	89,70
16 – 18 tahun	73,98	74,72	66,98	58,71	66,57
19 – 24 tahun	-	15,35	13,46	11,16	9,70

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Partisipasi sekolah di semua kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Namun demikian, masih banyak anak usia sekolah di Kabupaten Manggarai Barat yang tidak mengenyam pendidikan dan persentasenya makin besar seiring naiknya kelompok umur. Terlihat di kelompok usia 7-12 tahun ada sebanyak 1,5% yang tidak sekolah; di kelompok 13-15 tahun ada sekitar 5,5%, dan yang paling besar di kelompok 16-18 tahun yakni sebesar 26,02%.

Tingkat partisipasi sekolah di usia 5-6 tahun pun masih sangat rendah. Belum meratanya sarana pendidikan PAUD di seluruh wilayah menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi di kelompok umur ini. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak di tingkat usia dini juga masih sangat rendah. Masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan usia dini bagi masa depan anak.

Partisipasi sekolah juga bisa dibagi berdasarkan gender. Indikator ini sangat penting untuk menilai inklusifitas pembangunan bidang pendidikan. Berikut adalah data mengenai angka partisipasi sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 38. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Kelompok Umur (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)									
	Laki-laki					Perempuan				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5 – 6	19,30	30,89	49,28	26,95	45,87	37,54	35,83	48,94	49,40	53,62
7 – 12	98,71	97,02	98,40	98,42	98,12	99,51	100	99,17	98,63	99,30
13 – 15	90,32	90,51	92,05	94,41	96,29	97,23	98,58	96,10	94,59	94,28
16 – 18	60,26	68,13	78,25	75,24	72,49	57,20	65,86	70,75	72,07	74,70
19 – 24	9,98	17,24	20,60	-	-	12,01	9,90	10,61	-	-

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Tidak ada perbedaan signifikan antara persentase partisipasi sekolah penduduk perempuan dan laki-laki. Perbedaan mencolok hanya terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun, yakni jenjang SMA/MA/SMK. Terlihat bahwa persentase partisipasi perempuan di kelompok umur ini jauh lebih kecil daripada partisipasi penduduk laki-laki, sedangkan pada kelompok umur lainnya terlihat persentase perempuan selalu lebih besar dengan selisih mencapai 7,5% pada tahun 2018 dan 3,2% pada tahun 2019.

Penduduk perempuan kelompok umur 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Barat banyak yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/MA/SMK atau putus sekolah. Beban ekonomi dan adanya stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi perempuan di kelompok ini. Intervensi pemerintah perlu diberikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat SMA/MA/SMK.

b. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah proporsi anak usia sekolah (kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun) yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah berguna untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah, maka pendidikan semakin tidak merata. Jika angka putus sekolah semakin kecil, maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Berikut adalah tabel jumlah siswa putus sekolah di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 39. Jumlah Siswa Putus Sekolah tahun 2017-2019 (orang)*

Jenjang	Tahun					
	2017*	%	2018*	%	2019**	%
SD	94	0,24	78	0,21	52	0,14
SMP	125	0,69	134	0,73	46	0,25
SMA/SMK	240	1,93	126	0,96	31	0,24
Jumlah	459		337		129	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2019 dan 2020

Keterangan: *Tidak termasuk MI, MTs, dan MA
**keadaan November 2018
** keadaan Juli 2019

Jumlah siswa putus sekolah tingkat SD hingga SMA pada tahun 2019 mencapai 129 orang. Jumlah ini cenderung membaik dari tahun 2017 dan 2018. Kondisi ini mencerminkan bahwa terjadi perbaikan akses pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat.

c. Angka Melanjutkan Sekolah

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat dilihat dari angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs maupun SMP/MTs ke tingkat SMA/MA atau SMK. Angka melanjutkan juga menjadi penanda terhadap akses pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40. Angka Melanjutkan Pendidikan Tahun 2015-2019

NO	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan Pendidikan Tingkat	96,61	85,1	93,62	94,57	95,50

NO	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI ke SMP/MTs					
2	Angka Melanjutkan Pendidikan Tingkat SMP/MTs ke SMA/MA	86,37				

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Angka melanjutkan pendidikan di Manggarai Barat cenderung fluktuatif. Namun demikian, angka melanjutkan pendidikan SD ke SMP dalam selama tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin mudahnya akses pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah di berbagai wilayah Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu penyebab peningkatan tersebut.

d. Tenaga Pendidik

Salah satu elemen penting dari sistem pendidikan adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah tokoh sentral dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama untuk mendukung proses belajar-mengajar di Kabupaten Manggarai Barat di tengah minimnya akses terhadap sumber belajar lain, seperti buku, surat kabar, dan internet. Oleh karena itu, guru menjadi sumber belajar utama bahkan mungkin satu-satunya.

Data Kemendikbud menyebutkan jumlah tenaga pendidik di Manggarai Barat adalah sejumlah 5106 orang yang tersebar di seluruh lembaga pendidikan dari PAUD hingga SMA/SMK dan SLB. Jumlah ini harus ditambah secara kontinu untuk memperbaiki akses pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah data yang menggambarkan ketersediaan guru di Kabupaten Manggarai Barat.

1) Rasio Guru Siswa dan Indeks Pemerataan Guru

Rasio guru-siswa didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-siswa yang terlalu tinggi, akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya, rasio guru-siswa yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses belajar mengajar tidak efisien. Sebab satu guru mengajar sedikit siswa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio guru-siswa yang ideal bagi Indonesia adalah 1:29 untuk jenjang pendidikan SD, 1:24 untuk SMP, dan 1:20 untuk SMA.

Tabel 2. 41. Rasio Guru dan Siswa Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2019

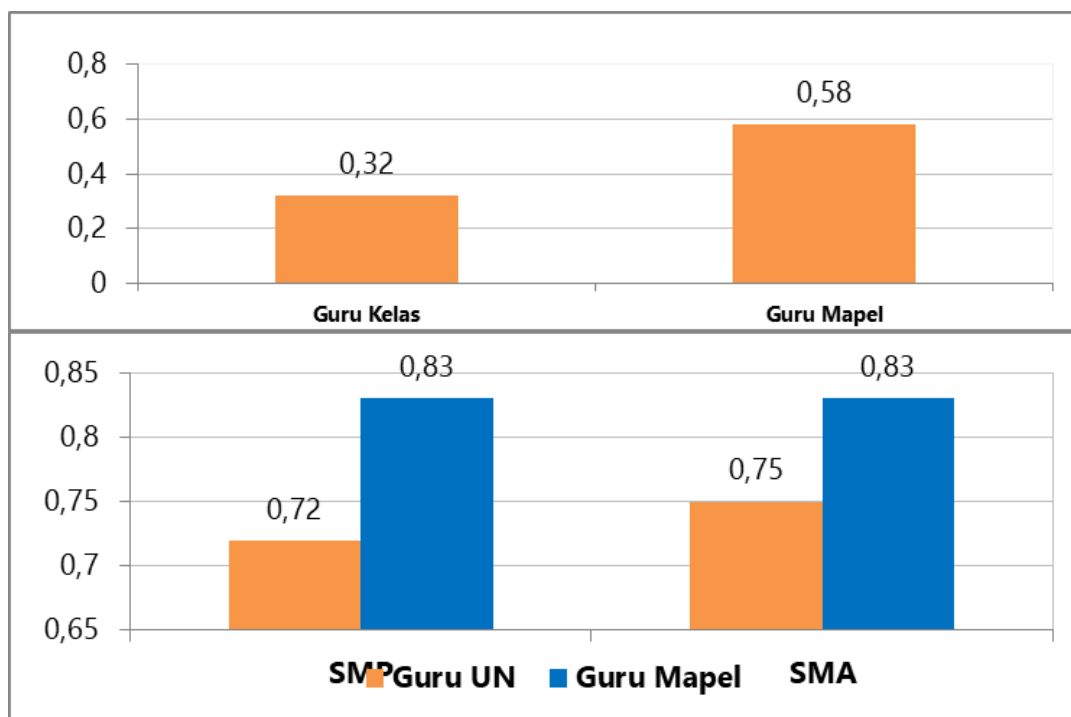
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	1:18	1:14	1:16	1:14	1:11
SMP	1:16	1:14	1:15	1:12	1:11
SMA	1:13	1:15	1:15	1:14	
SMK	1:15	1:17	1:21	1:17	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019, Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Manggarai Barat tergolong terlalu rendah di semua jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan guru yang kurang efisien, karena satu guru mengajar siswa dengan jumlah yang terlalu sedikit. Kebijakan makro pemerintah dalam pembangunan sekolah hendaknya lebih mempertimbangkan potensi siswa dan prediksi beberapa tahun ke depan.

Di sisi lain, dalam distribusi guru PNS di Kabupaten Manggarai Barat terlihat ketimpangan berdasarkan Indeks Pemerataan Guru (IPG). Secara teori, Indeks Pemerataan Guru adalah alat ukur untuk mengetahui derajat ketidakmerataan guru secara agregat dalam suatu provinsi/kabupaten/kota atau dalam lingkup nasional. Ketidakmerataan tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis dan mata pelajaran, maupun perbandingan antar daerah. Jika angka semakin mendekati 0, IPG suatu daerah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika angka semakin mendekati 1 maka IPG dapat dikatakan timpang.

Grafik 2. 5. Indeks Pemerataan Guru Tahun 2019



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019

Indeks pemerataan guru PNS pada jenjang SD, SMP maupun SMA di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan angka mendekati 1. Hal ini berarti bahwa secara umum guru PNS tidak tersebar secara merata. Kondisi ini memerlukan intervensi khusus, agar guru dapat tersebar secara merata di masing-masing sekolah di Kabupaten Manggarai Barat.

2) Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi pendidikan guru juga sangat menentukan pembangunan pendidikan suatu daerah. Semakin tinggi kualifikasi pendidikan guru, maka kualitas pembelajarannya akan semakin baik. Berikut adalah gambaran kualifikasi pendidikan para guru di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 42. Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2017-2020 (Persen)

Jenjang	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
TK	39,29	65,96	56,25	41,01
SD	66,20	78,94	80,48	84,95
SMP	90,18	92,26	93,24	96,09
SMA	95,93	95,93	95,70	
SMK	94,25	93,27	93,31	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019, Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Semua guru atau tenaga pendidik di Kabupaten Manggarai Barat memiliki

kualifikasi pendidikan S1/D4 sebagaimana disyaratkan UU Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen. Data Kemendikbud tahun 2019 memperlihatkan bahwa di tingkat SD masih ada 502 guru yang belum memenuhi ketentuan ini. Di tingkat SMP ada 100 orang, sedangkan di tingkat SMA dan SMK ada 44 orang.

Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2017, terlihat bahwa upaya pemerintah daerah untuk mendorong para guru untuk meningkatkan kualifikasinya cukup berhasil. Kesadaran para guru di Kabupaten Manggarai Barat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 sesuai ketentuan undang-undang juga cukup tinggi. Di tingkat SD masih ada 457 orang guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 pada tahun 2020, sementara di tingkat SMP masih ada 68 orang guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4.

3) Guru Tersertifikasi

UU No.14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen juga mewajibkan guru untuk memiliki sertifikat pendidik. Pemberian sertifikat pendidik adalah bentuk pengakuan negara terhadap guru sebagai profesi yang memiliki standar yang diakui. Berikut adalah data mengenai persentase guru yang tersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 43. Persentase Guru Tersertifikasi Tahun 2018-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun		
	2018	2019	2020
PAUD	8,5	17,3	3,15
SD	22,5	27,3	27,46
SMP	18,3	18,9	24,44
SMA	17,9	20,0	
SMK	13,0	14,4	

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2018 dan 2019, Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase guru bersertifikat pendidik di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat sedikit. Porsi terbanyak ada di tingkat SD, sedangkan porsi terkecil ada di tingkat SMK. Namun demikian, secara umum terdapat peningkatan persentase dari tahun 2018 hingga 2020. Penentuan kuota oleh pemerintah pusat yang sangat terbatas pada setiap tahunnya mempengaruhi percepatan peningkatan jumlah guru yang tersertifikasikan.

4) Kompetensi

Selain meningkatkan kualifikasi pendidikan, pemerintah juga menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) untuk menjamin konsistensi kualitas para guru. Perbandingan rata-rata nilai UKG antara Kabupaten Manggarai Barat dengan Kabupaten Manggarai Timur serta Kabupaten Manggarai diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 44. Nilai UKG Manggarai Barat dan Kabupaten Tetangga Tahun 2019

Kabupaten	Nilai Uji Kompetensi Guru				
	SD	SMP	SMA	SMK	Rata-rata
Manggarai	54.33	52.53	55.90	54.70	54.23
Manggarai Barat	50.83	49.48	51.73	50.27	50.66
Manggarai Timur	51.16	50.27	50.94	52.38	50.99

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019

Rata-rata nilai UKG Kabupaten Manggarai Barat lebih tinggi dari Kabupaten Manggarai, namun lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai Timur. Melalui UKG diharapkan setiap guru dapat mengetahui wilayah kompetensi yang perlu ditingkatkan. Bagi pemerintah, hasil dari kegiatan ini akan membantu memetakan kualitas para guru, sehingga mempermudah pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

e. Angka Kelulusan

Dampak langsung dari peningkatan mutu pembelajaran di sekolah antara lain adalah tingkat kelulusan yang semakin tinggi. Data Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyatakan bahwa angka kelulusan siswa di Manggarai Barat sejak tahun 2016 tergolong sangat baik. Berikut adalah rincian datanya.

Tabel 2. 45. Angka Kelulusan Siswa Tahun 2015-2019 (Persen)

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	99,98	100	100	100

Sumber: Dinas PKO, 2020

Rata-rata angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 100% pada tahun 2016 hingga 2020. Sedangkan di jenjang SMP, persentase terendah hanya terjadi pada tahun 2017, di mana pada

saat itu terdapat 1 siswa juga yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak bersedia mengikuti ujian akhir.

f. Ruang Kelas

Elemen penting lain dari pembangunan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana terutama ruang kelas. Kondisi ruang kelas berpengaruh terhadap kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah kondisi ruang kelas sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019.

Tabel 2. 46. Persentase Kondisi Ruang Kelas Tahun 2019

Jenjang	Kondisi Ruang Kelas (persen)			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
SD	20,23	46,19	12,80	20,79
SMP	31,99	49,04	8,68	10,29
SMA	37,41	55,44	2,04	5,10
SMK	70,45	12,88	0,00	16,67

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019

Sebagian besar ruang kelas sekolah di Kabupaten Manggarai Barat berada dalam kondisi rusak. Persentase kelas dalam kondisi baik rata-rata di bawah 50%. Hanya ruang kelas di jenjang SMK yang memiliki porsi ruang kelas baik di atas 50%. Usia sekolah SMK yang rata-rata baru dibandingkan SD, SMP dan SMA cukup berpengaruh dalam kondisi ini. Jika dicermati perkembangan dari tahun 2016 hingga 2019, maka diperoleh data berikut.

Tabel 2. 47. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016-2019

Kondisi ruang kelas SD	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Baik	267	314	367	395
Rusak Ringan	974	888	975	902
Rusak Sedang	215	202	258	250
Rusak Berat	222	241	367	406
Kondisi ruang kelas SMP	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Baik	122	154	227	199
Rusak Ringan	240	222	277	305
Rusak Sedang	44	61	19	54
Rusak Berat	46	55	58	64

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud 2019

Jumlah ruang kelas rusak dari tahun 2016 hingga 2019 terus meningkat secara signifikan. Dari 1.953 ruang kelas di SD pada tahun 2019, sebanyak 1.558 di antaranya dalam keadaan rusak. Jumlah ini meningkat dari 1.211 ruang kelas pada tahun 2016. Sedangkan di tingkat SMP, dari total 622 ruang kelas pada tahun 2019, 423 di antaranya dalam keadaan rusak. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 di mana jumlah ruang kelas yang rusak hanya 330. Selain karena umur sekolah, kualitas pengerjaan konstruksi bangunan juga harus menjadi perhatian pemerintah.

g. Akreditasi Sekolah

Pencapaian terhadap standar pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah oleh setiap lembaga pendidikan dapat dilihat dari hasil akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Konteks Kabupaten Manggarai Barat, data mengenai akreditasi sekolah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 48. Akreditasi Sekolah Tahun 2019

Jenjang	Akreditasi tahun 2019 (persen)			
	A	B	C	Belum Terakreditasi
SD	1,1	23,4	24,9	50,6
SMP	9,7	22,6	12,9	54,8
SMA	18,5	37,0	18,5	25,9
SMK	10,0	20,0	40,0	30,0

Sumber: Neraca Pendidikan daerah 2019

Sebagian besar sekolah di Kabupaten Manggarai Barat belum terakreditasi; baik di tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK. Hal ini menunjukkan jalan panjang menuju tercapainya Standar Nasional Pendidikan. Namun demikian, sudah ada sekolah di Kabupaten Manggarai Barat yang terakreditasi pada tahun 2019, yakni 3 sekolah di tingkat SD, 9 sekolah di tingkat SMP, dan 5 sekolah di tingkat SMA.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu sektor pembangunan yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Penilaian terhadap derajat kesehatan suatu masyarakat umumnya menggunakan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi mortalitas (kematian), seperti Angka Kematian Ibu (AKI)

dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berikut adalah data mengenai AKB dan AKI di Kabupaten Manggarai Barat.

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat pula disebut sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk melihat derajat kesehatan di suatu masyarakat karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat orang tuanya tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di bidang kesehatan.

Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan – yang disebabkan oleh pengelolaan kehamilannya dan bukan karena sebab-sebab lain – per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 49. AKB dan AKI Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Angka kematian bayi			
Kabupaten	11,4 per KH	9,3 per KH	10,1 per KH
Nasional	21,86 per KH	21,12 per KH	16 per KH
Angka kematian ibu			
Kabupaten	144,53 per KH	101,41 per KH	134,4 per KH
Nasional		305 per KH	183 per KH

Sumber: Dinas Kesehatan Manggarai Barat Tahun 2021

Jumlah kelahiran hidup sebanyak 3629 pada tahun 2019, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 4 kasus, sedangkan kematian bayi tercatat 36 kasus. Pada tahun

2020 Jumlah kelahiran hidup sebanyak 5.280, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 7 kasus, sedangkan kematian bayi tercatat 59 kasus. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, kasus kematian bayi dan ibu di Kabupaten Manggarai Barat tergolong sedikit. Kondisi ini perlu dipertahankan agar dimensi derajat kesehatan ibu dan bayi menjadi semakin membaik.

b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Faktor ini menjadi pendukung bagi perbaikan kualitas kesehatan ibu, bayi dan masyarakat secara umum. Berikut adalah data tentang perbandingan/rasio antara jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 50. Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2017-2019

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Puskesmas	18	19	21	22
Rasio Puskesmas	1 : 13.853	1 : 14.159	1 : 13.080	
Puskesmas Pembantu	34	32	31	31
Rasio Puskesmas Pembantu		1 : 8.407	1 : 8,079	
Polindes	18	18	18	18
Rasio Polindes	1 : 14.622	1 : 14.946	1 : 17.168	
Klinik/Balai Kesehatan	2	2	3	2
Rasio Klinik/Balai Kesehatan	1 : 131.603	1 : 134.514	1 : 91.563	
Rumah Sakit	2	2	2	2
Rasio Rumah Sakit	1 : 131.603	1 : 134.514	1 : 137.344	

Sumber: diolah dari data Dinas Kesehatan Kab Manggarai Barat, 2021

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kabupaten Manggarai Barat adalah sebanyak 75 faskes. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka idealnya 1 faskes melayani 1000 penduduk untuk puskesmas dan puskesmas pembantu serta 1 : 100.000 untuk rumah sakit.

Rasio puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat besar hingga tahun 2019, yakni mencapai 1: 13.080. Ini artinya 1 puskesmas di Kabupaten Manggarai Barat harus melayani lebih dari 13.000 penduduk. Namun, jumlah yang besar ini bisa dibantu oleh adanya puskesmas pembantu, sehingga rasionya menjadi seimbang walaupun belum ideal, yakni 1 puskesmas untuk 8.000

penduduk. Dengan demikian, Kabupaten Manggarai Barat masih membutuhkan banyak puskesmas agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Manggarai Barat adalah 2 unit pada tahun 2019, yakni satu rumah sakit pemerintah dan satu rumah sakit swasta. Dengan demikian, rasionya mencapai 1 : 137.344 atau 1 rumah sakit harus melayani lebih 130.000 jiwa penduduk. Agar rasio menjadi ideal, Kabupaten Manggarai Barat membutuhkan setidaknya 1 rumah sakit lagi.

c. Rasio Dokter dan Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Faktor utama yang berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah ketersediaan dokter dan tenaga medis lain, seperti bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Semakin kecil rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk, maka semakin baik kondisi pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut adalah rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019

Tabel 2. 51. Rasio Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2019

No	Tenaga Medis	Jumlah	Rasio terhadap jumlah penduduk	Rasio per 1.000 penduduk
1.	Dokter	85	1 : 3.231	0,309
2.	Keperawatan	594	1 : 462	2,162
3.	Kebidanan	487	1 : 564	1,773
4.	Kefarmasian	110	1 : 2.497	0,400

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2020

Jumlah tenaga medis di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat sedikit. Rasio tersebut menunjukkan bahwa satu orang dokter di Kabupaten Manggarai Barat harus melayani 3.231 orang, sedangkan standar ideal mengharuskan satu orang dokter sebanyak-banyaknya hanya melayani 2.500 orang. Capaian kinerja urusan kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52. Capaian Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per 1.000 Balita	20.08	20.03	20.63	20.77	20.08
2	Rasio Puskesmas per 1.000 Penduduk	0,0590	0,0588	0,0701	0,0806	0,0834

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio Poliklinik Per 1000 penduduk	0,0039	0,0039	0,0038	0,0038	0,0075
4	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,1337	0,1333	0,1208	0,1190	0,1176
5	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (%)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
7	Cakupan Pertolongan Persalinan (Orang)	90	91	92	94	95
8	Cakupan Kunjungan Bayi	4.973	4.620	5.034	4.939	5.242
9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	0,00%	70,8%	82,8%	78,2%	73,5%
10	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru dan BTA+	86%	55%	57%	50%	80%
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	51,00%	50,00%	58,00%	53,00%	48,00%
12	Persentase Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	100	100	100	100	100%
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin	16,93	17,09	24,78	22,95	0
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	80	80	80	80	0
15	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	100	100	100	100	100
16	Rasio Tenaga Medis Persatuan Tenaga Medis	6,27	0,09	0,1	0,12	0,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Manggarai Barat, 2021

Secara umum beberapa indikator terkait urusan kesehatan mengalami tren yang positif sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun terkait cakupan puskesmas pembantu per 1000 penduduk mengalami penurunan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan puskesmas pembantu di tingkat desa mengalami penurunan. Terbatasnya tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi tersebut.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat keberhasilan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat ditinjau dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kualitas. Indikator penting yang merepresentasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di antaranya yaitu infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, bangunan dan penataan ruang. Berikut adalah data mengenai kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat.

a. Jalan dan Jembatan

Jalan di Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan nasional adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jalan provinsi adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten adalah jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Panjang jalan nasional di Kabupaten Manggarai Barat tercatat sepanjang 86,88 km. Jalan ini merupakan bagian dari jalan trans-flores yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Ruteng, ibukota Kabupaten Manggarai. Sedangkan panjang jalan provinsi tercatat sepanjang 131,94 km yang terdiri dari 4 ruas jalan yang menghubungkan Labuan Bajo, Ruteng dan Reok melalui jalur tengah Flores. Sementara jalan kabupaten, dari tahun 2016 – 2020 tercatat sepanjang 1226,89 km yang terdiri dari 185 ruas dan tersebar di semua kecamatan.

Tabel 2. 53. Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

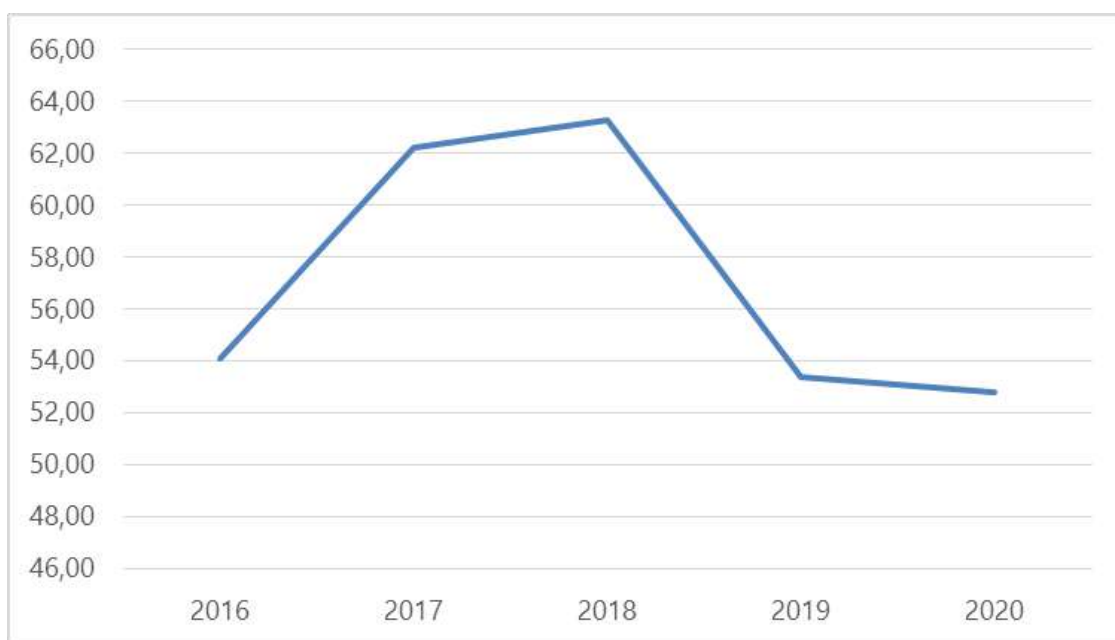
Nama Ruas Jalan	Nama Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Rata-rata (M)
JALAN NASIONAL			
Pang Lembor - Malawatar	Lembor	26,41	6,00
Malawatar – Labuan Bajo	Lembor, Welak, Sano Nggoang, Mbeliling, Komodo	60,47	6,00
Total		86,88	
JALAN PROVINSI			
Sp. Nggorang – Sp. Wangkung – Lando	Komodo, Boleng	33,30	4,50

Nama Ruas Jalan	Nama Kecamatan yang Dilalui	Panjang Ruas (Km)	Lebar Rata-rata (M)
Kondo-Sp. Noa-Hita	Pacar, Macang Pacar	34,21	4,50
Hita-Sp. Tiga Kedindi	Macang Pacar	41,06	4,50
Sp. Noa-GoloWelu	Kuwus Barat, Kuwus	23,38	4,50
Total		131,94	

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2019

Kategori jalan dalam kondisi mantab tercatat mengalami fluktuatif sepanjang tahun 2016 hingga 2020. Presentase panjang jalan dalam kondisi mantab selalu meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2018, dengan rerata kenaikan sebesar 0,084%. Sedangkan presentase penurunan panjang jalan mantab sebesar 0,17% yang terjadi pada 2018 hingga 2020. Adanya penurunan persentase kemantaban jalan dari tahun 2018 ke tahun 2019 disebabkan adanya perbedaan cara penilaian kondisi tipe perkerasan berbutir dan tanah. Sedangkan penurunan persentase kemantaban jalan dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan karena konstruksi eksisting masih menggunakan konstruksi lapen yang memiliki umur ketahanan pendek, serta adanya bencana tanah longsor di wilayah kecamatan yang berdampak pada kemantaban jalan.

Grafik 2. 6. Presentase Jalan dalam Kondisi Mantab di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (%)



Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2021

Capaian panjang jalan dalam kondisi baik tertinggi ada pada tahun 2018. Kondisi ini sangat kontradiktif, karena jumlah panjang jalan dalam kondisi rusak berat juga terjadi pada tahun yang sama. Persentase panjang jalan dalam kondisi rusak berat yang tercatat sepanjang tahun 2016 hingga 2018 cukup signifikan, yakni sebesar 1,33%. Kondisi tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaan pembangunan jalan terdapat ketidaksesuaian dengan kebutuhan teknis di lapangan ataupun dengan kewenangan. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan teknis dibuktikan dengan belum adanya studi khusus pra pembangunan jalan di Kabupaten Manggarai Barat. Padahal untuk mempertahankan kondisi jalan dalam kondisi baik dan berkeselamatan dibutuhkan studi khusus sebelum dilaksanakannya pembangunan jalan, terutama studi tentang tanah dimana jalan akan dibangun. Jenis tanah di Kabupaten Manggarai Barat didominasi struktur yang perlu distabilkan untuk pembangunan jalan. Selain itu pemeliharaan secara berkala terhadap kondisi jalan juga sangat diperlukan. Secara lebih detail untuk menggambarkan kondisi jalan terbangun tahun 2016 hingga 2020 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2. 7. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (Km)



Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2019

Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR. Bidang Fispra BP4D menyebutkan bahwa dari tiga kategori jalan di Kabupaten Manggarai Barat, total terdapat 176 jembatan. Jembatan di ruas jalan nasional sebanyak 32

jembatan, sedangkan jembatan di ruas jalan provinsi sebanyak 39 jembatan dan jembatan di ruas jalan kabupaten sejumlah 105 jembatan. Jembatan di ruas jalan kabupaten memiliki presentase terbesar dibandingkan jembatan di ruas jalan provinsi maupun nasional, yaitu sebesar 59,66%. Sisa presentase sebesar 40,34% merupakan jembatan di ruas jalan provinsi dan nasional.

Tabel 2. 54. Kondisi Prasarana Jembatan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

NO	STATUS JEMBATAN	BAIK		SEDANG		RUSAK		BELUM DIBANGUN		Total
		Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	Jlh (bh)	Bentangan (m)	
1	NEGARA	32	368	-	-	-	-	-	-	32
2	PROPINSI	29	435	8	120	2	35	14	360	53
3	KABUPATEN	68	915	15	255	22	405	187	3.083	292
Jumlah		129	1.718	23	375	24	440	201	3.443	377

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

Data yang tercatat juga menunjukkan bahwa masih terdapat target pembangunan jembatan yang belum terealisasi, khususnya untuk jembatan di ruas jalan provinsi dan kabupaten. Sebanyak 13,64% terdapat jembatan di ruas provinsi maupun kabupaten dalam kondisi rusak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lebih lanjut, guna meningkatkan mobilitas masyarakat.

b. Jaringan Irigasi

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selanjutnya yakni ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi. Terdapat tiga kategori pembagian daerah irigasi sesuai kewenangannya. Pembagian daerah irigasi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat menurut kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

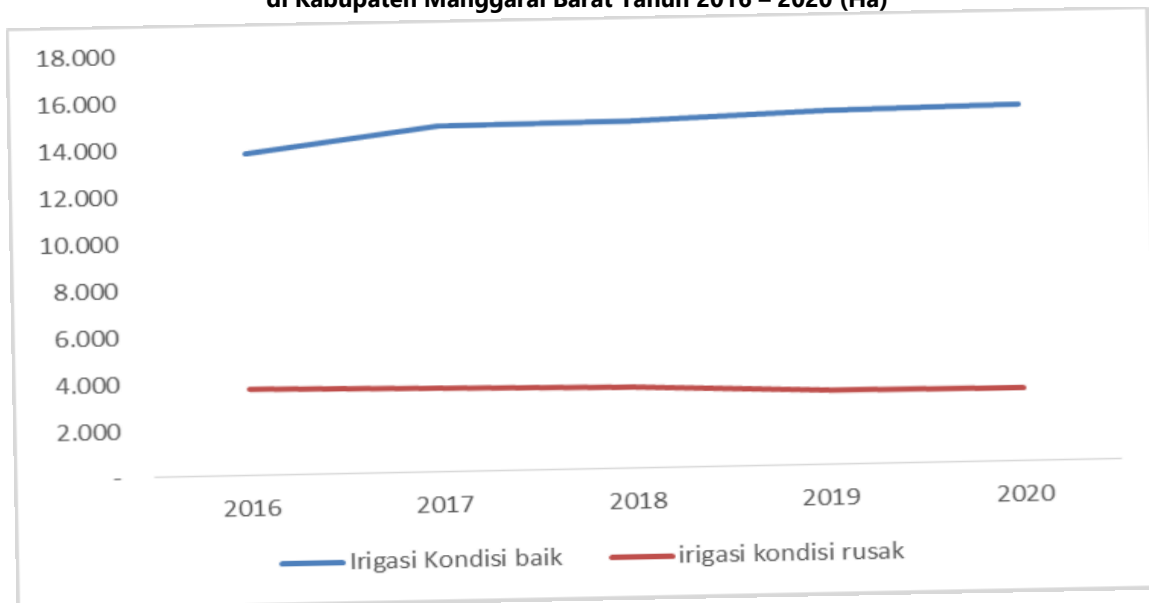
Tabel 2. 55. Daerah Irigasi (DI) sesuai kewenangan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Luas (Ha)		Jumlah DI (Buah)
		Potensial	Fungsional	
1	DI Kewenangan Pusat	8.743	6.795	2
2	DI Kewenangan Propinsi	3.110	2.426	4
3	DI Kewenangan Kabupaten	36.479	15.360	362
Jumlah		48.332	24.581	368

Sumber: Bidang Fispra BP4D

Daerah irigasi di Kabupaten Manggarai Barat baru memanfaatkan sebesar 50,65% dari luasan lahan potensial yang ada sebagai daerah irigasi. Diperlukan adanya peningkatan upaya untuk dapat mengoptimalkan daerah urugasi di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya tersebut perlu untuk segera direalisasikan, guna mendukung pertanian yang juga optimal di Kabupaten Manggarai Barat.

Grafik 2. 8. Proporsi Luas Irigasi dalam Kondisi Baik Terhadap Luas Irigasi Total di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020 (Ha)



Sumber: Bidang Fispra BP4D

Proporsi luas irigasi dalam kondisi baik selalu berada di atas luas irigasi dalam kondisi rusak di Kabupaten Manggarai Barat. Data juga menunjukkan, luas irigasi dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga 2020. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Rerata persentase kenaikan kategori irigasi dalam kondisi baik sebesar 2,57%. Adanya peningkatan upaya rehabilitasi maupun pengadaan irigasi baru, menjadikan adanya penurunan presentase irigasi dalam kondisi rusak yang cukup signifikan, yakni sebesar 4,04%.

Tabel 2. 56. Luas Irigasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2020
1	Luas Irigasi Kabupaten	36.479	36.479	36.479	36.479	36.479
2	Luas Irigasi yang terairi	17.552	18.141	18.375	18.647	18.751
3	Persentase (persen)	48,12	49,73	50,37	51,12	51,40

Sumber Data: Dinas PU Kabupaten Manggarai Barat, 2020

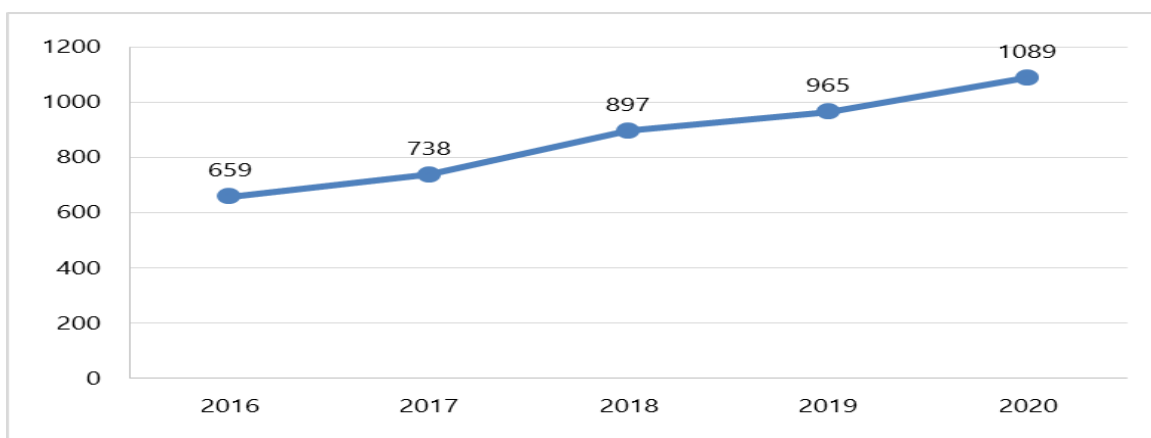
Rerata presentase kenaikan irigasi dalam kondisi terairi sebesar 0,02% dari tahun 2016 – 2020. Meskipun demikian, perhatian lebih 83isban terhadap kondisi irigasi di Kabupaten Manggarai Barat tetap perlu untuk ditingkatkan. Upaya secara teknis maupun regulasi perlu untuk dioptimalkan, guna mendukung rehabilitasi irigasi di Kabupaten Manggarai Barat. Urgensi dari upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan hasil pertanian yang diperoleh.

c. Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat mengacu pada Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat periode 2012-2032 yang saat ini sedang direvisi sejalan dengan perkembangan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional. RTRW Kabupaten Manggarai Barat perlu dilakukan revisi disebabkan karena berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian pada tahun 2017, nilai akhir penilaian peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Manggarai Barat sebesar 62,27%. Sedangkan Rencana rinci tata ruang sampai saat ini yang sudah dibuat dokumen akademisnya adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Labuan Bajo dan sudah mendapat Rekomendasi Gubernur dengan nomor No. BU. 124.3/59/Bappeda/2014.

Bidang urusan penataan ruang yang dapat mencerminkan pembangunan daerah dalam aspek pelayanan umum salah satunya adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Pemerintah Daerah. Jumlah Bangunan ber- IMB pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 9. Jumlah Bangunan ber-IMB di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Izin bangunan ber – IMB selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Terdapat kenaikan sebesar 39,48% pada periode tersebut. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa laju pembangunan ataupun alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun selalu bertambah dari tahun 2016 hingga 2020. Dengan demikian, monitoring terhadap tata ruang secara teknis maupun regulasi perlu diupayakan.

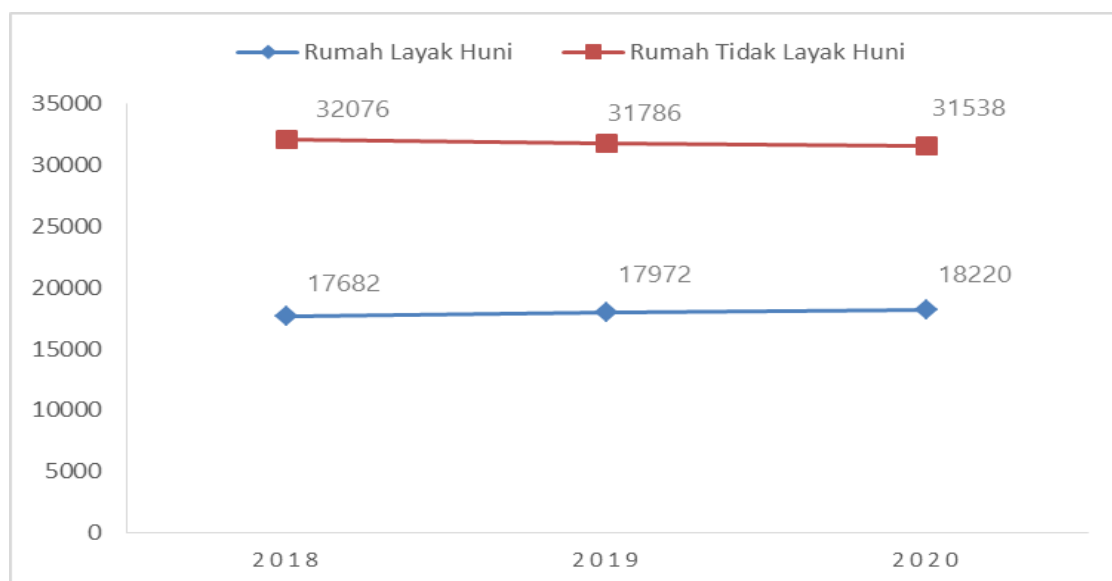
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Komponen indikator yang digunakan untuk mengukur urusan perumahan dan Kawasan permukiman meliputi urusan penyediaan rumah layak huni, air bersih, pengolahan air limbah, drainase, dan jalan lingkungan. Secara umum urusan ini berkaitan erat dengan upaya penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang tempat tinggal yang layak huni. Lebih khusus lagi, urusan wajib pelayanan dasar ini juga berhubungan dengan upaya penanganan kawasan kumuh.

a. Rumah Layak Huni

Data Dinas Perumahan mencatat bahwa total rumah di Kabupaten Manggarai Barat sekitar 49.758 unit. Total dari jumlah tersebut, terdapat rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni dan tidak layak huni. Tercatat terdapat 31.538 rumah yang tergolong tidak layak huni hingga tahun 2020. Dengan demikian, presentase rumah layak huni sebesar 36,62% pada tahun 2020.

Grafik 2. 10. Proporsi jumlah rumah layak huni terhadap rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 – 2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Persentase rumah tidak layak huni selalu menurun pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Tercatat rata – rata penurunan penurunan setiap tahun sebesar 0,84%. Adanya penurunan jumlah rumah tidak layak huni setiap tahun tersebut diimbangi dengan program pembangunan rumah layak huni dan juga penanganan kawasan kumuh. Upaya tersebut ditunjukkan dengan selalu meningkatnya jumlah rumah layak huni yang terbangun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Terdapat peningkatan sebesar 8,36% rumah layak huni yang terbangun.

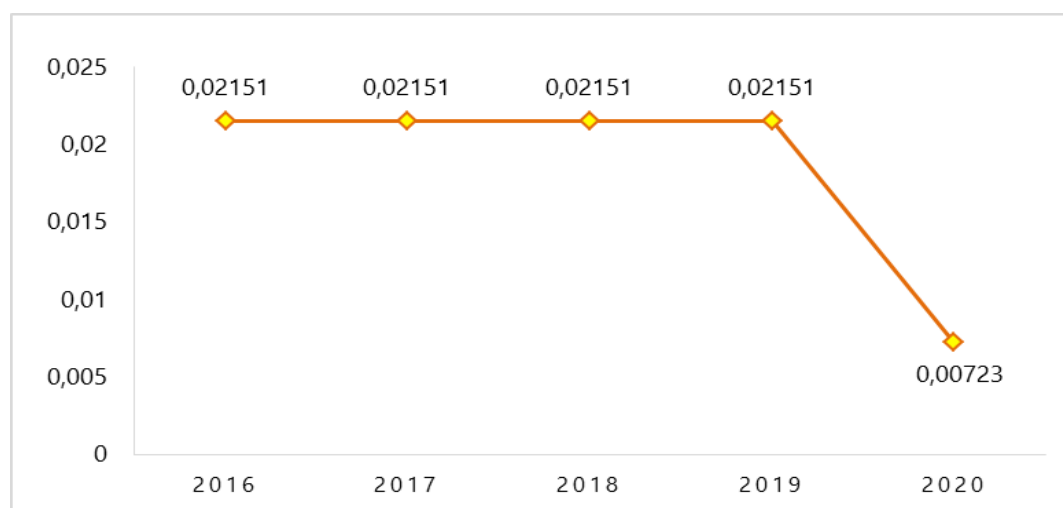
Tabel 2. 57. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Total Penanganan (Unit)
2017	1.219
2018	966
2019	408
2020	387

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

Penanganan terhadap rumah tidak layak huni menunjukkan adanya penurunan penanganan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa setiap tahunnya, jumlah rumah layak tidak huni semakin berkurang, dan tergantikan dengan rumah yang telah terkategori layak. Jumlah penanganan semakin berkurang yang artinya upaya penanganan terhadap kawasan kumuh semakin optimal setiap tahunnya.

Grafik 2. 11. Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

Meskipun upaya penanganan rumah tidak layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2020, yang kemudian juga berimplikasi pada penurunan presentase luasan kawasan kumuh secara signifikan hingga tahun 2020, namun

masih terdapat persoalan yang menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam mewujudkan kelayakhunian tempat tinggal. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat perlu ditingkatkan, melalui edukasi yang dapat disampaikan melalui kampanye maupun aksi secara langsung terkait pola hidup sehat dan bersih.

b. Air Bersih

Data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyebutkan bahwa rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 61,01% dari total rumah tangga pada tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan dari 53,71% pada tahun 2018. Meskipun demikian masih cukup banyak rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat belum terlayani air bersih. Berikut data yang menunjukkan distribusi setiap kecamatan terhadap aksesibilitas air minum.

Tabel 2. 58. Jumlah Rumah Tangga Mendapat Akses Air Minum di Kabupaten Manggarai Barat

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga mendapat akses air minum	26.724	30.510	30.357
jumlah rumah tangga total	49.758	49.785	49.757
Persentase	53,71	61,28	61,01

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Penyediaan air minum bersih dilayani oleh PDAM Mbeliling dan melalui program-program kemitraan seperti PAMSIMAS. Pelayanan PDAM Mbeliling baru mencakup beberapa wilayah. Cakupan pelayanan tersebut meliputi Ibukota Labuan Bajo, Ibukota Kecamatan (IKK) Lembor dan IKK Kuwus.

Tabel 2. 59. Sambungan Rumah PDAM Mbeliling Tahun 2019

No	Wilayah	SR	
		RT	Jiwa
1	Kota Labuan Bajo	4.586	22.930
2	IKK Lembor	1585	6.020
3	IKK Kuwus	96	365
Jumlah		6.267	29.315

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

BP4D menyebutkan bahwa hingga saat ini PDAM Mbeliling hanya beroperasi di Kota Labuan Bajo, IKK Lembor dan IKK Kuwus. Namun terlihat bahwa pelanggan

terbesarnya adalah masyarakat kota Labuan Bajo, diikuti Lembor dan Kuwus. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2015 memang terlihat ada peningkatan jumlah rumah tangga yang bisa terlayani. Tercatat 4630 rumah tangga yang dapat mengakses layanan PDAM pada tahun 2015, dan jumlah ini meningkat menjadi 6267 rumah tangga dengan jumlah jiwa mencapai 31.335 orang pada tahun 2019.

Tabel 2. 60. Cakupan Kegiatan PAMSIMAS Tahun 2020

No	TA	Jumlah Desa	KK	Jumlah Jiwa	Jumlah Dusun Sasaran	KK Akses	Jumlah Jiwa Sasaran Program	Cakupan Layanan (% jiwa)
1	2008	9	3739	16014	14	2442	10187	63,61
2	2009	14	5131	22754	23	2289	9889	43,46
3	2010	14	5382	23000	17	2832	12690	55,17
4	2011	10	3821	16180	17	2325	9728	60,12
5	2012	12	4117	18679	18	2390	10041	53,76
6	2013	12	3950	16078	20	2645	10198	63,43
7	2014	10	2826	11298	26	1933	8052	71,27
8	2015	11	3140	13581	24	2779	12048	88,71
9	2016	0	0	0	0	0	0	0
10	2017	14	3638	15879	20	2266	9770	61,53
11	2018	17	4479	21789	26	2230	10833	49,72
12	2019	18	4986	20567	34	2136	8997	43,74
13	2020	8	1986	8735	16	1257	5495	62,91
Total		149	47.195	204.554	255	27.524	117.928	57,65

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai Barat, 2021

Pelayanan air minum di Manggarai Barat juga disediakan melalui program-program kemitraan di antaranya PAMSIMAS. Tercatat sebanyak 149 desa yang telah terakomodir oleh PAMSIMAS sejak tahun 2008. Total persentase cakupan masyarakat yang terlayani kebutuhannya terhadap air mencapai 57,65%. Dengan demikian, masih terdapat 42,35% atau sebanyak 28 desa/kelurahan lagi yang belum terakomodir dengan pelayanan PAMSIMAS.

c. Air Limbah

Air limbah dibagi dalam dua kategori yakni limbah kotoran manusia dan limbah rumah tangga. Pengelolaan limbah kotoran manusia salah satunya direpresentasikan dengan ketersediaan jamban. Secara umum, jumlah rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki jamban dengan kategori baik belum menyeluruh. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan BABS atau buang air besar di sembarang tempat.

Berikut ini disajikan data terkait kepemilikan jamban di Kabupaten Manggarai Barat.

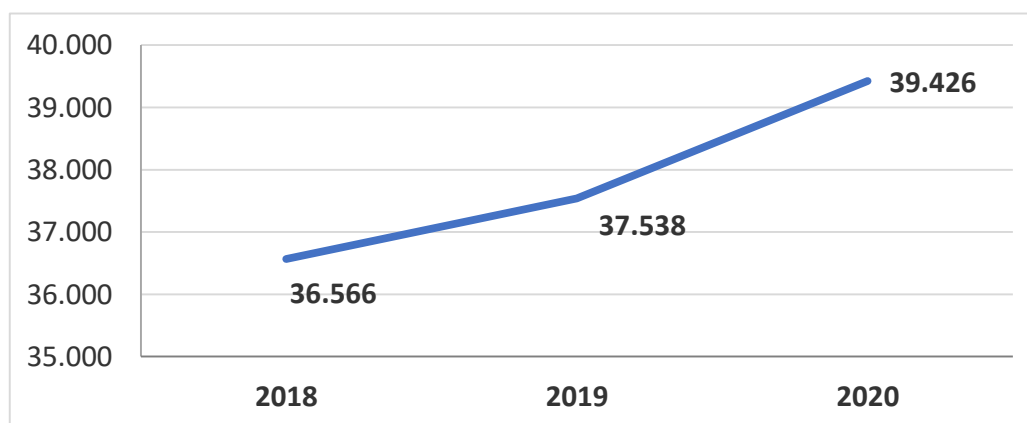
Tabel 2. 61. Kepemilikan Jamban di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	2018		2019		2020	
		Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban	Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban	Rumah yang Memiliki Jamban	Rumah yang Tidak Memiliki Jamban
1	KOMODO	8.566	2.467	8.566	2.467	9.006	2.467
2	BOLENG	2.978	1.106	2.978	1.106	2.978	1.106
3	SANO NGGOANG	2.556	366	2.748	366	3.013	366
4	MBELILING	2.293	480	2.389	480	2.573	480
5	LEMBOR	4.628	1.144	4.628	1.144	4.905	1.144
6	WELAK	2.984	1.366	3.235	1.366	3.423	1.366
7	LEMBOR SELATAN	2.210	2.227	2.304	2.227	2.304	2.227
8	KUWUS	2.200	323	2.251	323	2.401	323
9	NDOSO	2.404	1.286	2.500	1.286	2.575	1.286
10	MACANG PACAR	1.989	1.107	2.085	1.107	2.394	1.107
11	PACAR	2.614	600	2.614	600	2.614	600
12	KUWUS BARAT	1.144	720	1.240	720	1.240	720
TOTAL		36.566	13.192	37.538	13.192	39.426	13.192
JUMLAH		49.758		50.730		52.618	

Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai Barat, 2021

Persentase rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki akses pada jamban mencapai 79,24%. Angka ini mengalami kenaikan terus menerus selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sebesar 73,49%.

Grafik 2. 12. Jumlah Kepemilikan Jamban Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas PRKPP Kab. Manggarai Barat 2021

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap kepemilikan jamban dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Namun demikian, jumlah keluarga di Kabupaten Manggarai Barat yang tidak memiliki jamban dan selanjutnya melakukan buang air besar sembarangan tercatat masih cukup banyak. Tercatat mencapai 20,76% dari total keluarga di Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki jamban dan terbanyak terdapat di Kecamatan Lembor Selatan dan Komodo. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, persentase ini memang terlihat menurun yakni dari 26,50% pada tahun 2015. Meskipun demikian, angka tersebut perlu untuk semakin diturunkan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal kesehatan, yaitu pola hidup sehat dan bersih.

Komponen selanjutnya dari sistem pengelolaan limbah adalah ketersediaan instalasi pembuangan akhir limbah (IPAL). Sistem pengelolaan limbah kotoran manusia secara *off-site* belum dimiliki oleh rumah tangga Kabupaten Manggarai Barat pada saat ini. Sebagian besar masyarakat masih cenderung membuat *septic tank* baru jika *septic tank* sebelumnya telah penuh. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar masyarakat merasa bahwa lahan pekarangan masih luas, dan sangat memungkinkan untuk dibangun *septic tank* yang baru. Perkotaan Labuan Bajo menjadi wilayah yang diinisiasikan memiliki beberapa instalasi pengolahan limbah rumah tangga yang memproses limbah rumah tangga untuk dibuang ke laut. Fasilitas ini disediakan pemerintah terutama di kawasan-kawasan padat penduduk di Perkotaan Labuan Bajo.

d. Drainase

Bagian terpenting selanjutnya dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman yakni keterdapatannya drainase. Secara umum, pembangunan drainase di Kabupaten Manggarai Barat masih belum mendapat perhatian serius baik saluran drainase primer, sekunder maupun saluran drainase lingkungan. Pembangunan drainase selama ini masih difokuskan pada wilayah Perkotaan Labuan Bajo, Lembor dan Kuwus serta sebagian kecil kecamatan lain.

Tabel 2. 62. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Tahun	Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (km)	Panjang Jalan Kabupaten (km)	%
2017	1,9	1226,89	0,16

Tahun	Yang Memiliki Trotoar dan Drainase (km)	Panjang Jalan Kabupaten (km)	%
2018	1,9	1226,89	0,16
2019	1,9	1226,89	0,16
2020	9,6	1226,89	0,78

Sumber: Bidang Fispra BP4D, 2020

Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kabupaten Manggarai Barat tidak berubah sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan tidak adanya penambahan panjang trotoar dan drainase. Penyebab dari kondisi tersebut di antaranya dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang lebih dititik-beratkan pada pembangunan jalan. Faktor yang mendasari penitik-beratan tersebut yaitu karena persentase panjang jalan kabupaten dengan kategori baik di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat rendah.

Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Persentase peningkatan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sebesar 80,21% dalam kurun waktu 2017 hingga 2020. Meskipun demikian, persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase terhadap panjang total jalan kabupaten di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat rendah.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus disediakan oleh pemerintah. Urusan ini sangat erat berkaitan dengan upaya pembinaan dan penanganan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut adalah data mengenai urusan trantibumlimas di Kabupaten Manggarai Barat.

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 2. 63. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	116	127	119	149	164
2	Jumlah Penduduk	257.582	263.207	269.029	274.689	256.317
3	Jumlah Pol PP per 10.000 Penduduk (%)	4,5	4,8	4,4	5,4	6,4

Sumber: Satpol PP Kab. Manggarai Barat, 2021

Apabila mengacu pada standar kepegawaian, rasio yang ideal dikategorikan menjadi tiga, yaitu 1 orang Satpol PP untuk melayani 500 penduduk (1 : 500), kemudian 1 Satpol PP melayani 1.000 penduduk (1 : 1000) dan 1 Satpol PP melayani 2.000 penduduk (1 : 2.000). Dalam konteks Kabupaten Manggarai Barat, jumlah personil Satpol PP tergolong ideal meski ada kelebihan penduduk namun tidak mencapai 50 jiwa.

b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Merujuk pada Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota disebutkan bahwa rasio kebutuhan anggota Linmas Kabupaten/Kota adalah satu orang anggota LINMAS di satu RT. Dengan demikian, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah RT 49.758, maka anggota LINMAS yang dibutuhkan sebanyak 49.758 dan capaian ini sudah berada di angka 100%.

c. Penegakan PERDA

Penegakan PERDA dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran terhadap PERDA dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penegakan PERDA juga menjadi faktor penentu bagi kondusivitas iklim investasi di sebuah daerah. Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggaran PERDA dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 2. 64. Jumlah Pelanggaran PERDA Di Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggaran PERDA di tahun yang bersangkutan	6	7	8	7	11

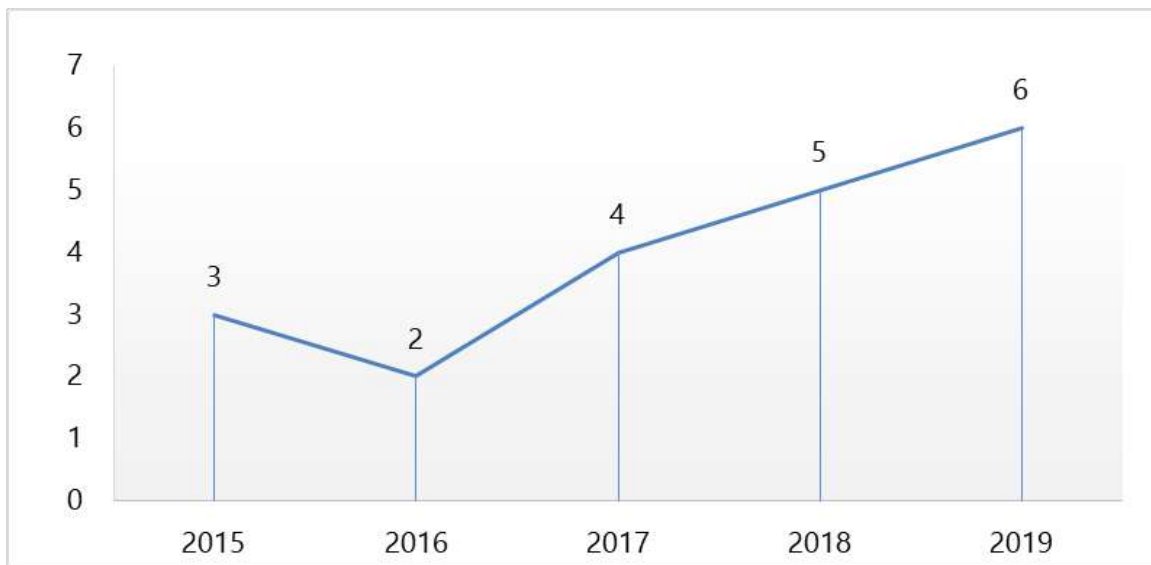
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Manggarai Barat, 2021

Jumlah pelanggaran Perda tahun 2016 – 2020 di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan tren naik setiap tahunnya. Tingginya jumlah pelanggaran Perda disebabkan karena belum optimalnya sosialisasi terkait Perda kepada masyarakat dan masih lemahnya sanksi bagi pelanggar. Selain itu, dari segi internal pemerintah masih terbatasnya jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

d. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan salah satu cerminan untuk melihat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu daerah. Semakin kecil angka kriminalitas, maka semakin baik kondusifitas iklim investasi di sebuah daerah. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 – 2019.

Grafik 2. 13. Jumlah/angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Manggarai Barat Tahun, 2020

Angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh pihak terutama Pemerintah Daerah untuk menekan angka kriminalitas. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi, menurunkan angka kriminalitas adalah suatu hal yang harus diprioritaskan untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan yang datang.

6. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi, dan jaminan sosial terhadap para penyandang cacat, lansia, dan anak-anak terlantar. Urusan ini adalah urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah. Berikut adalah data detail untuk menilai capaian kinerja urusan 93isban:

Tabel 2. 65. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	72.550	72.550	72.550	72.695	81.770
PMKS yang tertangani	44.65%	43.98%	62.46%	82.53%	86.96%

Sumber: Dinas Sosial Manggarai Barat, 2021

Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai Barat naik secara signifikan pada tahun 2020. Namun demikian, terjadi pula peningkatan yang signifikan dalam penanganan PMKS. Sebelumnya, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016 dan tahun 2017 hanya sekitar 40%; sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 18,48% dan 20,07% pada tahun 2019. Kenaikan persentase sebesar 4,43% pada tahun 2020 menunjukkan bahwa cakupan penanganan PMKS terkini di Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup baik.

Tabel 2. 66. Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Na	Na	16,47	16,47	68,44
Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Na	Na	65,83	54	7,3
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Na	Na	92,64	92,70	100

Sumber: Dinas Sosial Manggarai Barat, 2021

Capaian kinerja urusan sosial selama periode 2016-2020 mengalami perubahan yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan naiknya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bisa dilayani. Dinas Sosial menyebutkan bahwa dari 41.409 KK miskin di Kabupaten Manggarai Barat, 54%-nya atau sebanyak 22.520 KK yang

mendapat pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang disiapkan pemerintah pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah yang mendapat pelayanan tetap sama hanya jumlah KK miskinnya tercatat lebih sedikit, yakni hanya sebanyak 34.216 KK akibat database yang digunakan berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial mengalami kenaikan pencapaian dari tahun 2016 hingga 2020. Data dinas sosial menyebutkan bahwa dari 15.908 korban bencana yang ada di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019, sebanyak 14.746 mendapat bantuan sosial dari pemerintah selama masa tanggap darurat. Sisanya mendapat bantuan setelah masa tanggap darurat tersebut. Medan yang sulit untuk menjangkau para korban sedikit banyak menyebabkan keterlambatan pelayanan bantuan selama masa tanggap darurat.

2.3.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; 94isbandin; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Berikut adalah capaian kinerja layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar:

1. Urusan Tenaga Kerja

Indikator makro yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2019. Berikut adalah data mengenai tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 67. Tingkat Pengangguran di Kab. Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (persen)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	1,12	1,51	1,3
2018	0,55	2,13	1,19
2019	1,68	3,52	2,42
2020	2,84	4,76	3,72

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat tergolong tinggi pada tahun 2019. Angka ini naik secara signifikan dari keadaan tahun 2018. Jika ditilik lebih dalam lagi, terlihat bahwa angka pengangguran di Manggarai Barat ini didominasi oleh kelompok penduduk perempuan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Manggarai Barat masih lebih rendah daripada provinsi maupun nasional. Berikut adalah perbandingan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 68. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2020 (persen)

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kabupaten	1,30	1,19	2,42	3,72
Provinsi	3,27	3,01	3,35	3,38
Nasional	5,50	5,34	5,28	6,26

Sumber: BPS Manggarai Barat, 2021

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Barat 95isbandi lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT dan nasional. TPT Kabupaten Manggarai Barat tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2020. Kurangnya serapan tenaga kerja dan persoalan hubungan industrial menjadi beberapa determinan yang berpengaruh terhadap TPT Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu penambahan penduduk usia kerja juga merupakan faktor pendukung yang menyebabkan semakin tingginya TPT Kabupaten Manggarai Barat.

BPS Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa penduduk usia kerja dengan jumlah terbanyak terjadi di tahun 2019 dengan jumlah 170.317 orang, meningkat sebesar 4,87% dari tahun 2017. Berikut adalah data tentang penduduk usia kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 69. Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Penduduk Usia Kerja (PUK) (Jiwa)					
Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	-	79.448	81.443	83.342	92.865
Perempuan	-	82.575	85.212	86.975	95.445
Jumlah	-	162.023	166.655	170.317	147.859

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2020

Angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 124.105 orang. Ini artinya, dari penduduk usia kerja sebanyak 170.317 orang, yang bekerja tercatat sebanyak 72,87%. Sisanya adalah mereka yang pengangguran dan bukan angkatan kerja seperti anak sekolah, ibu rumah tangga atau mereka yang melaksanakan kegiatan nonproduktif lainnya.

Angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau memiliki pekerjaan. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan penduduk yang termasuk dalam usia angkatan kerja, namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah angkatan kerja dan partisipasi angkatan kerja penduduk Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 70. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Angkatan Kerja					
Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	-	68 845	67 086	71 248	79 764
Perempuan	-	57 317	44 974	52 857	68 095
Jumlah	-	126 162	112 060	124 105	147 859
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)					
Jenis Kelamin	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	-	86,65	82,37	85,49	85,89
Perempuan	-	69,41	52,78	60,77	71,34
Jumlah	-	77,87	67,24	72,87	78,52

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2020

Tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Manggarai Barat mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan jumlah angkatan kerjanya. Namun demikian, secara gender dapat disimpulkan bahwa walaupun penduduk usia kerja perempuan lebih banyak daripada penduduk usia kerja laki-laki, yang bekerja jauh lebih sedikit.

Demikian pula angka partisipasinya yang jauh lebih kecil daripada angkatan kerja laki-laki. Doktrin budaya yang memposisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tak perlu bekerja turut menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Manggarai Barat.

Data Dinas Ketenagakerjaan Manggarai Barat menyebutkan hanya ada 0,17% yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dan ada 0,50% yang sudah dilatih berbasis masyarakat. Pelatihan ini sangat diperlukan untuk membentuk kompetensi yang sesuai permintaan pasar tenaga kerja. Secara detail data tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 71. Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi dan Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	0,05	0,12	0,17	0,00
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	0,04	0,13	0,40	0,50	0,55
Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	-	0,05	0,10	0,14	0,00

Sumber: Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKPD, 2019

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Manggarai Barat mengalami tren yang naik selama periode 2016 hingga 2019, walaupun menurun pada tahun 2020 karena pada tahun tersebut tidak diadakan kegiatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi. Data Dinas Tenaga Kerja menyebutkan bahwa hingga tahun 2019 jumlah tenaga kerja bersertifikat di Kabupaten Manggarai Barat sudah mencapai 193 orang. Jumlah ini naik 0,05% dari capaian pada tahun 2018.

Terlihat juga bahwa persentase tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Barat yang mendapat pelatihan yang berbasis masyarakat maupun kompetensi sebagai bagian dari program pemerintah daerah untuk meningkatkan kesempatan kerja baru semakin meningkat. Walau masih sangat sedikit, tercatat sejak tahun 2017 hingga 2020 sudah ada 617 penduduk yang mendapat pelatihan kerja berbasis masyarakat. Sementara yang sudah mendapat pelatihan kerja berbasis kompetensi tercatat sejumlah 249 orang. Secara detail data tersebut tersaji di bawah ini.

Tabel 2. 72. Jenis dan Jumlah Peserta Pelatihan Tahun 2017-2019

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan			Lokasi	Penyerapan di Pasar Kerja
		L	P	JML		
I. TAHUN 2017						
1	Dive Master	3	2	5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
2	Teknik Perbengkelan	5		5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
3	Service Mesin Motor Tempael		10	10	Labuan Bajo Kec. Komodo	10
4	Butcher	7	-	7	Labuan Bajo Kec. Komodo	7
5	Resepcionist	7	8	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
6	Room Attendent	12	3	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
7	Walter	27	13	40	Labuan Bajo Kec. Komodo	40
8	Guide/Pramu Wisata	3	12	15	Labuan Bajo Kec. Komodo	15
JUMLAH 2017		64	48	112		
II. TAHUN 2018						
1	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Pasir Putih Kec. Komodo	20
2	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Nangalili Kec. Lembor Selatan	20
3	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Runggu Kec. Kuwus Barat	20
4	Pengolahan Pangan Lokal	-	11	11	Boleng Kec. Boleng	11
5	Pangkas Rambut	12	-	12	Labuan Bajo Kec. Komodo	12
6	Anyaman Bambu	4	1	5	Labuan Bajo Kec. Komodo	5
7	Pelatihan Menjahit	2	14	16	BBPLK Semarang	16
8	Service Mesin Motor Tempael	10	-	10	BLK Komodo	10
9	Walters	10	-	10	BLK Komodo	10
10	Tukang Batu	5	-	5	BLK Komodo	5
11	Tukakang Kayu	5	-	5	BLK Komodo	5
12	Diving (Advince)	5	-	5	BLK Komodo	5
13	Pariwisata	9	23	32	BBPLK Medan	32
14	IT/ Komputer	10	1	11	BBPLK Cevest Bekasi	11
15	Otomotif	10	-	10	BBPLK Bandung	10
JUMLAH 2018		82	110	192		
III. TAHUN 2019						
1	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Pacar	20
2	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Macang Pacar	20
3	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Kecamatan Welak	20
4	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Orong Kec. Welak	20
5	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Golo Lujang Kec. Boleng	20
6	Pengolahan Pangan Lokal	-	20	20	Desa Papagarang Kec. Komodo	20
7	Pariwisata	3	-	3	BBPLK Medan	3
8	Las	10	-	10	BBPLK serang	10
9	Manufactur	20	-	20	BBBPLK Bandung	20
JUMLAH 2019		33	120	153		
IV. TAHUN 2020						
1	Pengolahan Pakan Ternak	20		20	Desa Ngancar	20
2	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Cunca Wulang	20

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta Pelatihan			Lokasi	Penyerapan di Pasar Kerja
		L	P	JML		
3	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Siru	20
4	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Poco Rutang	20
5	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Nggorang	20
6	Pelatihan Bengkel	20		20	Desa Golo Ndaring	20
7	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Desa Batu Cermin	20
8	Pengolahan Pangan Lokal		20	20	Kelurahan Nantal	20
JUMLAH 2020		40	120	160		
TOTAL 2017-2020		219	398	617		617

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Jenis pelatihan kompetensi yang diberikan kepada tenaga kerja disesuaikan berdasarkan lokasi dan potensi ekonomi yang terdapat di wilayah tersebut. Tenaga kerja di wilayah Kecamatan Lembor lebih banyak diberikan pelatihan pengolahan pangan lokal. Tenaga kerja di wilayah Kecamatan Komodo lebih banyak diberikan pelatihan untuk membangun kompetensi di bidang pariwisata dan sektor ekonomi tersier lainnya.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Seiring perkembangan dunia dan kompleksitas kebutuhan masyarakat, diperlukan pemberdayaan peran perempuan secara optimal. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa 50,60% penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah perempuan. Dengan jumlah yang besar tersebut, perempuan menjadi salah satu modal pembangunan yang penting bagi Kabupaten Manggarai Barat. Jika penduduk perempuan lebih produktif, maka Kabupaten Manggarai Barat akan mengalami kemajuan yang pesat.

Diperlukan akses seluas-luasnya untuk perempuan untuk berperan aktif di semua lini kehidupan. Gambaran untuk mengetahui peran aktif penduduk perempuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat dicermati melalui indikator persentase peran serta perempuan dalam pembangunan. Berikut adalah deskripsi datanya.

Tabel 2. 73. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perempuan dalam lembaga pemerintah	8,75	9,00	10,23	10,03	4,31

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perempuan dalam lembaga legislatif	3,33	3,33	3,33	3,33	6,6
Persentase perempuan dalam lembaga swasta	43,5	43,6	43,66	45,55	95,66
Persentase partisipasi angkata kerja perempuan	82	83	84	85	71,34

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat 2021

Porsi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintah, legislatif dan lembaga swasta masih sangat kecil pada tahun 2016 hingga 2020. Namun demikian, peningkatan terus terjadi pada periode yang sama. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Manggarai Barat sudah mencapai 85% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 71,34 % di tahun 2020. Sekitar 95,66%, di antaranya bekerja di lembaga swasta dan 4,31% bekerja di lembaga pemerintah. Semakin terbukanya sistem rekrutmen di lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta telah ikut mendorong kenaikan partisipasi penduduk perempuan.

Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tercatat meningkat pada tahun 2019. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat terjadi di 54 keluarga. Jumlah korbannya mencapai 164 orang yang terdiri dari perempuan dan anak-anak.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, kasus kekerasan tercatat terjadi di 39 keluarga dengan jumlah korban 69 orang. Data dinas menyebutkan keseluruhan korban telah mendapat penanganan oleh petugas dari Unit Pelayanan Terpadu. Diharapkan kasus seperti ini tidak lagi terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, Dinas PPPA dan KB juga menyebutkan bahwa kasus pekerja anak-anak di bawah umur juga masih menjadi masalah di Kabupaten Manggarai Barat. Data selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 74. Persentase Jumlah Pekerja Anak di bawah Umur Tahun 2016 s/d 2020

No	Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pekerja Anak di bawah umur	0,15	0,14	0,13	0,10	0,005

No	Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	90	100	100	100	100

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat 2021

Dari total anak usia 5-14 tahun di Kabupaten Manggarai Barat yakni sejumlah 67.616 orang, masih terdapat kasus anak yang menjadi pekerja yaitu sebanyak 70 orang anak. Namun demikian, terjadi penurunan dari keadaan tahun 2016 yakni di angka 0,15% dan di tahun 2020 di angka 0,005%. Perlindungan terhadap anak di bawah umur harus segera ditingkatkan untuk menekan angka pekerja anak di bawah umur.

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang serta mengembangkan kualitas penduduk dan keluarga. Urusan ini masuk ke dalam kategori urusan wajib bukan pelayanan dasar. Capaian urusan ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 75. Perkembangan Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Contraceptive Prevalensi Rate terhadap PUS (peserta KB Aktif)	61	61,5	62,5	68,51	65,15
2	Persentase Penggunaan MKJP	28,3	30,3	31,3	32,73	26,04
3	Persentase Unmeet Need	14,5	13,5	12,5	11,63	11,49
4	Angka ASFR (Average Specific Fertility Rate per 1000 WUS)	47	46	45	42,12	29,47

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Manggarai Barat 2021

Persentase peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat hingga mencapai 68,51% pada tahun 2019 lalu menurun menjadi 65,15 % pada tahun 2020. Data Dinas PPPA dan KB menyebutkan bahwa dari 41.375 jumlah pasangan usia subur di Manggarai Barat, sebanyak 28.350 di antaranya adalah peserta KB aktif. Dari jumlah tersebut, 32,73% atau sekitar 9.278 orang di antaranya adalah peserta KB MKJP. Angka ini meningkat signifikan dari keadaan pada tahun 2016 yang hanya mencapai 28,3%. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Program KB.

Angka *Unmeet Need* juga terus menurun secara signifikan selama periode 2016 hingga 2020. Ini menunjukkan pelayanan yang diberikan petugas KB dari tahun 2016 hingga 2020 semakin baik. Data Dinas PPPA dan KB mencatat bahwa hingga tahun 2019, dari 41.375 pasangan usia subur di Kabupaten Manggarai Barat, hanya sebanyak 4.812 akseptor KB yang tidak terlayani. Angka ini meningkat secara signifikan dari kondisi di tahun 2016 yang hanya mencapai 14,5%.

Indikator berikutnya adalah ASFR (*Average Specific Fertility Rate*) per 1000 WUS di Kabupaten Manggarai Barat. Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah kelahiran wanita usia subur usia 15-19 tahun per 1000 wanita usia subur. Angka ASFR dikatakan membaik jika perbandingan kelahiran WUS ini menurun setiap tahunnya. Angka ASFR Kabupaten Manggarai Barat terus menurun sesuai harapan meskipun masih tergolong tinggi. Penurunan angka ASFR ini memperlihatkan semakin baiknya kesadaran masyarakat untuk menunda perkawinan hingga mencapai umur matang.

4. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup menjadi modal dasar bagi upaya pemerintah untuk membangun daerah. Sebaliknya, kerawanan pangan bisa jadi penghambat bahkan awal kegagalan pembangunan. Oleh sebab itu, mewujudkan ketahanan pangan adalah persoalan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Berikut adalah data mengenai indeks ketahanan pangan dan komponen pendukungnya di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 76. Indeks ketahanan pangan dan komponen pembentuknya di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018 -2020

Indikator ketahanan pangan	2018	2019	2020
Indeks ketahanan pangan	68.09	74.61	71.05
Indeks ketersediaan	Na	95.05	94.06
Indeks keterjangkauan	Na	68.00	62.60
Indeks pemanfaatan	Na	64.24	60.14

Sumber: Kementerian Pertanian RI, 2021

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan selama tahun 2018 hingga 2019. Angka tersebut sempat menurun sebesar 3,56

point dari tahun 2019 hingga 2020. Penurunan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan menjadi faktor permasalahan yang dihadapi. Ketiga komponen tersebut harus dibenahi untuk memperbaiki capaian ketahanan pangan Kabupaten Manggarai Barat.

Salah satu komponen ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan. Data ini terkait dengan beberapa komoditas pangan utama yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut adalah perkembangan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri dari beras, daging, telur dan ikan.

Tabel 2. 77. Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Manggarai Barat (kg/kapita/tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras	446,05	539,17	670,49	593,27	522,93
2	Daging	0,41	0,59	0,22	1,77	0,92
3	Telur	0,22	0,11	0,11	0,15	0,34
4	Ikan	179,74	197,92	175,68	17,19	13,47

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Manggarai Barat cenderung fluktuatif. Tren kenaikan hanya diperlihatkan oleh pangan beras dan daging sedangkan telur dan ikan cenderung menurun. Hal ini mempengaruhi skor PPH (pola pangan harapan) ketersediaan. Berikut perkembangan skor pola pangan harapan selama tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 78. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PPH Ketersediaan	67,97	69,63	60,02	65,43	74,62
2	PPH Konsumsi	-	-	75	82	81,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Skor PPH ketersediaan Kabupaten Manggarai Barat masih cukup rendah. Ini menunjukkan bahwa baik ketersediaan maupun keanekaragaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat belum masuk dalam kategori baik, terutama keragaman pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Persoalan ini disebabkan oleh belum memadainya stok cadangan pangan dan masih kurangnya lumbung pangan di Kabupaten Manggarai Barat. Namun demikian, dari segi

konsumsi, skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Manggarai Barat mencapai 82; naik dari 75 di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa dari skor ideal 100, skor PPH Konsumsi Pangan Kabupaten Manggarai Barat terlihat sudah cukup tinggi.

5. Urusan Perhubungan

Layanan urusan perhubungan berkaitan dengan aksesibilitas dan kualitas transportasi di suatu daerah. Sasaran layanan urusan ini yaitu terwujudnya sistem transportasi yang memadai. Sistem transportasi yang semakin memadai, berimplikasi pada semakin terakomodirnya akses konektivitas antar wilayah.

Tabel 2. 79. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prasarana transportasi terbangun	N/A	N/A	18	18	13
2	Persentase pemasangan rambu-rambu	N/A	N/A	61%	70,86%	46
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	625	738	865	1018	
4	Rasio trayek	N/A	N/A	0,00066	0,00066	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD tahun 2019

Pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat berkembang dengan baik. Data Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa terdapat pembangunan 18 sarana transportasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018. Data dinas perhubungan juga menyebutkan bahwa dari 1154 kendaraan angkutan umum, terdapat 865 (75%) unit kendaraan umum yang dinyatakan lulus. Namun, dengan semakin lengkapnya sarana pengujian pada tahun 2019 diharapkan seluruh kendaraan angkutan umum dapat segera diuji pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 80. Jumlah Trayek Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Jumlah Trayek	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkutan Darat	2	2	1	1	159
2	Angkutan Laut	7	7	9	11	12

Sumber: Dinas Perhubungan, Kabupaten Manggarai Barat, tahun 2020

Jumlah trayek Kabupaten Manggarai Barat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tercatat kenaikan yang cukup signifikan trayek angkutan darat pada tahun 2020. Sedangkan trayek angkutan laut juga selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, penambahan trayek selalu dibutuhkan setiap tahunnya, guna mengakomodir transportasi di darat maupun di laut.

Kebutuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas memiliki urgensi yang tinggi dengan pertimbangan kondisi geografis di Kabupaten Manggarai Barat berupa daratan yang bergunung-gunung dan rawan bencana, sehingga kerentanan terhadap kecelakaan lebih tinggi. Data Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa kebutuhan rambu-rambu di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 350 rambu-rambu. Namun hingga 2019, kebutuhan rambu terpenuhi sebanyak 205 rambu-rambu.

Tabel 2. 81. Prasarana Transportasi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Kecamatan
1.	Dermaga rakyat	13	Komodo, Macang Pacar, Boleng
2.	Terminal	2	Komodo, Lembor

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Prasarana juga menjadi komponen penting untuk membantu mobilitas masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Prasarana transportasi terbangun terdiri dari dermaga rakyat, terminal umum maupun moda transportasi yang anggarannya berasal dari APBD 2 maupun APBN. Kabupaten Manggarai Barat adalah daerah kepulauan yang sangat bergantung dari ketersediaan dermaga dan moda transportasinya.

6. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan sebuah daerah. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan suatu daerah sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penilaian kualitas lingkungan hidup diukur dari indikator kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 82. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab Manggarai Barat Tahun 2019

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Indeks kualitas air	35,00	0,376	10,50
2.	Indeks kualitas udara	89,70	0,405	26,91
3.	Indeks kualitas tutupan hutan	58,00	0,219	23,20
IKLH Kabupaten				60,61

Sumber: Laporan IKLH Kab Manggarai Barat Tahun 2019

Data dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup Manggarai Barat pada tahun 2019 mendapat nilai 60,61 (predikat baik). Tabel menunjukkan bahwa kualitas air masih menjadi kendala pencapaian IKLH yang belum optimal. Data dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 2 aliran sungai yang dijadikan sampel penelitian yakni Sungai Wae Kemiri dan Wae Ara, memiliki kandungan zat pencemar seperti TSS, BOD, fosfat, fecal coliform.

Total coliform di kedua sungai tersebut diketahui cukup tinggi, sehingga keduanya dikategorikan pada sungai yang tercemar sedang. Faktor penyebab pencemaran tersebut, di antaranya disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat di sepanjang daerah aliran kedua sungai yang membuang limbah langsung ke sungai tersebut. Selain kualitas air, tantangan berat lainnya yang dihadapi Kabupaten Manggarai Barat adalah urusan persampahan. Persampahan menjadi tantangan selanjutnya bagi Kabupaten Manggarai Barat sebagai implikasi dari penetapan Kota Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata nasional.

Tabel 2. 83. Volume Sampah di Wilayah Kota Labuan Bajo Tahun 2018-2020

No	Uraian	Volume (ton)		
		2018	2019	2020
1	Volume Sampah	38.252	38.329,09	37.104,59
2	Volume Sampah yang ditangani	27.924	30.601,6	28.689
3	Volume sampah yang belum ditangani	10.328	7.727,49	8.415,59

Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyebutkan bahwa jumlah produksi sampah di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 sebanyak 37.104,59 ton, dengan dominasi penyumbang sampah terbesar berasal dari Perkotaan Labuan Bajo. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tercatat telah

berhasil menangani permasalahan sampah tersebut hingga 77,32% atau sekitar 28.689 ton pada tahun 2020. Artinya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah mampu mengupayakan pengelolaan persampahan dengan baik.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, dominasi dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan cara dibakar. Pengelolaan sampah melalui cara tersebut, berdampak kurang baik bagi lingkungan dan memungkinkan munculnya permasalahan lingkungan lainnya, seperti penurunan kualitas udara. Dengan demikian, edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang sesuai perlu diupayakan, untuk meminimalkan munculnya dampak lain bagi lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat.

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Manggarai Barat lebih membaik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penanganan sampah hanya mencapai 92% pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 99,59%. Kondisi tersebut dapat terealisasi karena adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Manggarai Barat.

Selain soal persampahan, dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga melaksanakan pengawasan lingkungan, konservasi lingkungan, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kepemilikan dokumen lingkungan oleh perusahaan (AMDAL/UKL/UPL) dan pemantauan pencemaran lingkungan.

Tabel 2. 84. Gambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah pengawasan izin	35	Na	Na	Na	32
Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	32	Na	Na	Na	2

Sumber: DLH Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyebutkan bahwa pada tahun 2019, pengawasan pemerintah daerah dilakukan terhadap 32 izin yang diajukan ke Pemda dari januari hingga desember 2019. Sementara jumlah pengaduan masyarakat yang masuk berjumlah 2 aduan dan semuanya bisa ditangani dengan baik. Dari upaya pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup

itu, tercatat setidaknya luas ruang terbuka hijau di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel 2. 85. Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Tertutup Pepohonan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Ruang Terbuka Hijau	621	621	765	1391
Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan 108isban foto udara	129.732	129.732	129.732	129.732
Luas daratan	313.512	313.512	313.512	313.512
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap daratan	0,414	0,414	0,414	0,414

Sumber: DLH Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Persentase jumlah ruang terbuka hijau mengalami kenaikan mencapai 55,35% dari tahun 2016 hingga 2019. Rata-rata kenaikan ruang terbuka hijau di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 31,91%. Meskipun demikian, upaya pengelolaan ruang terbuka hijau tetap perlu dioptimalkan guna mempertahankan kualitas lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat.

7. Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, serta penerbitan izin membuka tanah. Berikut adalah data tentang luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 86. Luas Lahan yang Bersertifikat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas Lahan Bersertifikat di Suatu Daerah	131.973.819 m ²	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat di Suatu Daerah	2.974.460.000 m ²	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Suatu Daerah	4,44%	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, 2020

Urusan pertanahan di Kabupaten Manggarai Barat metitik-beratkan pada penanganan permasalahan status tanah. Status kepemilikan tanah dibedakan menjadi 109isba tanah milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan tanah milik masyarakat yang telah ditetapkan untuk fasilitas kepentingan umum. Tercatat sebesar 95,56% Lahan di Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki sertifikat pada tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih jauhnya target pencapaian luas lahan yang seharusnya memiliki sertifikat. Optimasi terkait percepatan penetapan status kepemilikan lahan di Kabupaten Manggarai Barat perlu untuk dilakukan, guna menghindarkan dari konflik status kepemilikan lahan.

8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan menjadi suatu hal yang sangat penting sebagai salah satu komponen dalam mempertimbangan perencanaan kebijakan pembangunan sebuah daerah. Data kependudukan yang terinventarisasi dengan baik, menjadikan perencanaan pembangunan sebuah daerah juga dapat lebih tepat sasaran. Demikian juga dalam pelaksanaan program akan menjadi terkelola dengan optimal.

Urgensi yang tinggi terhadap urusan ini, menuntut pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menaruh perhatian yang besar dalam pembangunan urusan kependudukan. Berikut tersajikan capaian terhadap urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 87. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Ber-KTP	80,70	85,44	92,86	93,48	93
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	88,18	86,71	84,82	84,90	100

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pasangan Ber-Akta Nikah	22,20	22,57	30	35,21	55,92
Persentase bayi berakte kelahiran	21,62	32,37	41,82	41,82	N/A
Persentase anak berakte kelahiran	74,14	79,56	79,66	83,66	92,44
Persentase kepemilikan akte kematian	7,36	15,97	42,08	28	100
Persentase kepemilikan kartu identitas anak	0	3,71	5,90	13,42	9,51

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat, 2021

Masih ada sekitar 7% masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang belum memiliki KTP hingga tahun 2020 walaupun jumlahnya terus berkurang dari tahun 2016 hingga 2020. Menurut Dinas Capilduk, sampai dengan tahun 2019, jumlah masyarakat yang belum memiliki KTP mencapai 159.369 orang. Jumlah tersebut termasuk memiliki signifikansi yang cukup tinggi. Kondisi yang sama juga ditunjukkan dengan persentase pasangan berakte nikah. Data yang tercatat menunjukkan bahwa, capaian pasangan menikah yang telah memiliki akta masih tergolong masih rendah, yakni hanya 55,92% pada tahun 2020. Kondisi – kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kelengkapan identitas diri. Kesadaran masyarakat yang rendah, terutama terjadi pada kelompok umur lanjut usia dan pelajar. Selain itu, sulitnya akses dalam melakukan pengurusan KTP juga diindikasikan menjadi penyebab hambatan. Dengan demikian, peningkatan pelayanan terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Manggarai Barat sangat diperlukan.

9. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat berupa data mengenai jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya dan persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil. Kedua data tersebut diikuti oleh beberapa indikator yang lebih mikro. Berikut adalah data yang memuat capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 88. Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya dan jumlah koperasi sehat di Kabupaten Manggarai Barat

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya	39	42	45	47	49
Jumlah koperasi sehat	68	58	56	54	54

Sumber: Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Jumlah koperasi yang meningkat SHU-nya menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kinerja sektor koperasi semakin membaik. Hal berbeda ditunjukkan pada indikator koperasi sehat. Jumlah koperasi sehat terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020. Belum optimalnya kualitas manajemen koperasi menjadi penyebab menurunnya koperasi sehat di Kabupaten Manggarai Barat.

Perkembangan urusan koperasi juga dapat dicermati melalui indikator koperasi aktif. Indikator ini pada umumnya digunakan untuk menilai koperasi produsen dan konsumen. Berikut adalah data mengenai koperasi aktif di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 89. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2015-2020

No	Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	110	112	112	114	91	98
2	Jumlah Koperasi (Unit)	122	126	128	130	132	135
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	90	88,8	87,5	87,6	68,9	72,60

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah. Catatan Dinas Perindagkop menyebutkan bahwa sebagian besar koperasi-koperasi ini bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Namun di balik itu terlihat pula data bahwa jumlah koperasi yang aktif terus menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Kurang profesionalnya manajemen koperasi yang disebabkan oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana serta kurangnya akses terhadap bantuan permodalan sedikit banyak menjadi penyebab banyaknya koperasi yang tidak aktif bahkan akhirnya tutup atau bubar.

a. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah (UKM) juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha produktifnya guna meningkatkan pendapatan dan

penciptaan lapangan pekerjaan. Semakin banyak omzet UKM di suatu daerah, maka semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data mengenai omzet usaha mikro dan persentase usaha mikro yang meningkat menjadi kecil di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 90. Omzet Usaha Mikro dan Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Menjadi Kecil di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Omzet usaha mikro	11.641.816.700	11.641.816.700	11.641.816.700	17.070.866.700	19.257.651.500
Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi kecil	12.00	16.08	17.27	17.27	17.27

Sumber: Dinas perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Omzet usaha mikro menunjukkan tren yang semakin meningkat pada tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan tertinggi terdapat pada tahun 2018 hingga 2019. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kelas usaha mikro menjadi kecil. Kinerja usaha mikro dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor, seperti kapasitas produksi, kualitas produk dan pemasaran produk usaha mikro.

Kinerja usaha mikro juga dapat dicermati menggunakan *proxy* jumlah usaha mikro. Semakin banyak usaha mikro, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui proses transaksi jual-beli. Berikut adalah perkembangan jumlah usaha mikro di Kabupaten Manggarai Barat pada kurun waktu 2015-2020:

Tabel 2. 91. Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1	2015	3.000
2	2016	3.047
3	2017	3.683
4	2018	3.703
5	2019	3.809
6	2020	3.809

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Jumlah usaha mikro di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2020. Data Dinas Perindagkop menyebutkan bahwa sebagian besar usaha mikro ini berada di Kecamatan Komodo terutama seputar kawasan Labuan Bajo. Semakin berkembangnya Perkotaan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata, sedikit banyak membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha mikronya.

10. Urusan Penanaman Modal

Berkembang pesatnya pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal 113isbandin. Keindahan alam dan budaya Kabupaten Manggarai Barat menarik minat para pemilik modal untuk berinvestasi di Manggarai Barat. Mulai dari investasi berskala kecil hingga *mega investment*, kaki lima hingga hotel berbintang lima.

Perkembangan investasi ini memberikan keuntungan kepada banyak pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat setempat. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor dan substitusi impor. Selain itu, investasi juga bermanfaat sebagai sarana untuk alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Gambaran umum perkembangan penanaman modal di Kabupaten Manggarai Barat dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyebutkan bahwa hingga tahun 2019 tercatat sudah ada 229 investor dalam negeri 113isbandin yang berinvestasi di Kabupaten Manggarai Barat. Angka ini naik secara signifikan dari tahun 2015. Berikut adalah gambaran selengkapnya.

Tabel 2. 92. Jumlah dan Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi PMDN	66	62	73	95	110	138
Investasi PMA	47	57	75	99	119	133
Jumlah Investasi PMDN & PMA	113	119	148	194	229	271
Nilai Investasi (Rp)		564.392.731.908	893.944.923.908	1.772.554.761.370	7.111.979.482.993	8.369.334.742.222

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah investasi di Kabupaten Manggarai Barat memiliki tren yang meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2020. Tren ini meningkat untuk investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Jika dihitung sejak tahun 2013 di mana Sail Komodo pertama kali diselenggarakan, maka terjadi kenaikan 187 investasi di Kabupaten Manggarai Barat. Total nilai investasinya hingga 2020 mencapai 7 triliun lebih.

Kenaikan investasi ini tentu berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Data Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyebutkan tenaga kerja yang terserap dari adanya investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2018 mencapai 1.892 orang. Jumlah ini naik menjadi 2.446 orang tenaga kerja dari jumlah investor sejumlah 35 investor pada tahun 2019. Dengan demikian, jika dihitung rasio daya serap tenaga kerja terhadap investasi di Kabupaten Manggarai Barat, maka akan diperoleh rasio 1:11. Artinya, satu investasi menyerap 11 tenaga kerja. Angka ini tergolong sangat rendah. Ada beberapa hambatan yang dijumpai antara lain seperti masih rendahnya mutu tenaga kerja lokal, sebagian besar belum bersertifikat sebagai tenaga kerja profesional dan belum tersedianya tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.

b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi PMA yang disetujui pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 47 proyek dengan nilai investasi mencapai US \$ 86.324.930 hingga tahun 2015. Angka ini melonjak tajam menjadi 133 proyek pada tahun 2020 dengan nilai investasi mencapai 602 miliar 114isban. Hal yang sama juga terjadi pada investasi dalam negeri. Berikut adalah tabel realisasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 93. Realisasi Investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi US\$	Jumlah Proyek	Nilai Investasi US\$
2017	75	239.219.978	57	61.968.780
2018	99	168.631.619.783	69	82.234.162
2019	119	592.225.898.746	103	432.627.888
2020	133	602.543.899.668	108	442.300.238

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Realisasi nilai PMA lebih kecil dari yang disetujui. Kondisi ini berlaku mulai tahun 2017 hingga 2020. Kondusivitas iklim investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap realisasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi yang sama juga terjadi untuk indikator realisasi PMDN. Berikut adalah data mengenai realisasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 94. Realisasi Investasi PMDN di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	73	3.064.969.868.523	61	91.383.188.908
2018	95	4.592.269.924.962	90	560.285.230.870
2019	110	5.176.894.483.542	100	1.271.502.994.993
2020	138	5.315.386.269.542	128	2.074.119684.792

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Jumlah dan nilai realisasi PMA maupun PMDN di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017 hingga 2020 lebih kecil daripada yang disetujui. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya serta belum terupdate-nya data peluang investasi sedikit banyak mempengaruhi hal ini. Persoalan lain yang dihadapi di urusan penanaman modal seperti belum optimalnya identifikasi, promosi dan kondusivitas iklim investasi.

Minat investor asing (PMA) untuk menanamkan investasi di Manggarai Barat lebih besar daripada investor dalam negeri dari tahun 2017 hingga 2020. Hal itu dapat disimpulkan dari jumlah investasi yang disetujui maupun realisasinya. Terlihat bahwa realisasi investasi PMA di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 bisa mencapai 442 juta 115isban atau sekitar 5,8 triliun rupiah, 115isbanding investasi dalam negeri yang hanya mencapai 2 triliun rupiah pada periode yang sama.

11. Urusan Kebudayaan

Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat memberi dampak bagi masyarakat di bidang kebudayaan. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah sanggar budaya milik masyarakat yang aktif dalam berbagai pementasan budaya di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah data persentase sanggar budaya aktif di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 95. Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 s.d 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase sanggar budaya aktif (%)	-	-	63	67,58	68,25	58,90
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Frekuensi)	2	2	2	3	1	0
Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (Unit)	22	22	22	22	23	23

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, 2020

Persentase sanggar budaya masyarakat yang aktif dari tahun 2015 hingga 2010 terus meningkat. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyebutkan bahwa hingga tahun 2018 ada 38 sanggar budaya yang aktif dari 59 sanggar yang ada. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 43 sanggar dari total 63 sanggar yang ada.

Peningkatan jumlah sanggar budaya ini tidak terlepas dari tersedianya event-event seni dan budaya, baik yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah maupun atas permintaan para wisatawan di lokasi wisata. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencatat bahwa 116isban setiap tahun pemerintah daerah menetapkan kalender event seni budaya di Kabupaten Manggarai Barat untuk menarik minat wisatawan. Sejak tahun 2015 selalu ada dua event besar yang diselenggarakan kecuali pada tahun 2018 yang meningkat dan pada tahun 2019 yang menurun. Event-event seni budaya tersebut antara lain Festival Komodo, Festival Florata dan Karnaval Budaya.

Jumlah benda situs dan cagar budaya di Kabupaten Manggarai Barat tercatat tetap sama, yaitu 23 buah dan semuanya di bawah pengawasan pemerintah daerah. Benda-benda situs dan cagar budaya ini menyebar di setiap kecamatan dan dijaga oleh Tenaga Penjaga Situs. Namun demikian, benda-benda situs dan cagar budaya ini belum banyak menarik wisatawan untuk dikunjungi. Masih kurangnya promosi dan jaringan kerja sama dengan pihak pengusaha jasa wisata menjadi kendalanya, di samping letaknya yang jauh.

12. Urusan Kepemudaan

Pelaksanaan kinerja urusan kepemudaan dapat dilihat dari persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif dari tahun 2016 hingga 2020. Data Dinas PKO

menyebutkan bahwa jumlah organisasi pemuda lima tahun terakhir cenderung stagnan. Berikut adalah data mengenai jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 96. Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	32	32	32	35	54
Jumlah Organisasi Pemuda yang Terdaftar	51	51	51	54	59

Sumber Data: Dinas PKO Kab. Manggarai Barat, 2021

Kegiatan kepemudaan adalah salah satu cara untuk memberdayakan generasi muda untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup banyak, namun sebagian besar tidak aktif. Penting untuk menggerakkan organisasi-organisasi pemuda di Kabupaten Manggarai Barat agar para putra-putri daerahnya dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai sasaran “meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”. Pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat mendorong program-program maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Capaian program dan kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

a. Lembaga Ekonomi Pedesaan

Salah satu penggerak ekonomi desa saat ini adalah lembaga ekonomi termasuk Bumdes dan Posyantekdes. Data DPMD menyebutkan bahwa jumlah lembaga ekonomi pedesaan di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2020 adalah sebanyak 130 lembaga. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018, terlihat bahwa ada kenaikan jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang signifikan. Kenaikan ini disebabkan oleh pembentukan lembaga baru terutama Bumdes yang diakomodasi oleh undang-undang. Berikut adalah sebagian dari Bumdes yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 97. Bumdes Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes	
Sano Nggoang	Cunca Rami Lestari	Usaha Perdagangan (Kios), Sanggar budaya	
	Wae Kising	Jasa Simpan Pinjam, usaha perdagangan ATK, Foto kopi	
	Wae Paku	Suplai pupuk bersubsidi	
	Maju Bersama	Produksi Kripik (Pisang, Talas dan Kacang Jambu Mete) dan Pulsa Listrik	
	Ca Nai	Jasa Simpan Pinjam, Jual beli hasil Pertanian dan Pengelolaan Bahan Galian C	
Mbeliling	Bumdes Bersama Pesona Wisata	Jasa Pariwisata	
	Bumdes Rangga watu	Jasa sewa Kursi dan Terop	
	Liang Rodak	Jasa sewa Terop	
	Bantang Cama	Pengadaan Pupuk, Jual beli sembako	
	Lembu Nai	Jasa simpan Pinjam	
	Cunca Wulang	Jasa sewa Kursi, terop dan alat musik (keyboard)	
	Sumber Makmur	Jasa Simpan Pinjam, Kios Sembako	
	Welak	Maranatha	-
		Sumber Rejeki	Air Minum
Taman Eden		Jasa sewa alat musik (Keyboard)	
Wewa Jaya		-	
Lembor	Tungku Mose	Jasa keuangan (simpan pinjam)	
	Poco Rutang	Jasa sewa Terop dan kursi	
Lembor Selatan	Tirta Jaya	Jasa simpan pinjam, jual beli komoditi	
	Ca Nai	-	
	Benteng Dewa	-	
	Satu Hati	Jasa sewa terop	
	Kakor Jaya	Pengelolaan air minum bersih dan jasa sewa terop	
	Repi Bersatu	Jasa sewa Kursi, Jual beli Komoditi	
Boleng	Sepang Jaya	Pengadaan Pupuk	
Kuwus	Mekar Jaya	Jasa sewa peralatan pesta, usaha bengkel sepeda motor, bengkel kayu dan BRI Link	
	Damai/Watu Telu	Pengadaan Pupuk	
	Bintang Muda	Toko Bangunan	
Kuwus Barat	Kolarek	Jual beli Gula Merah (Gola Kolang)	
	Caritas	Jasa Keuangan (BRI Link), Usaha Perdagangan (Fotokopi, Jual ATK) dan Jasa sewa Kursi	
Ndosso	Tesuka	Suplai beras, Pengadaan Pupuk dan obat-obat pertanian	
	Harapan Golo Bore	Jual beli hasil pertanian (beras dan komoditi lainnya)	

Kecamatan	Nama BUMDes	Jenis Usaha Bumdes
	Nderu Wulang	Suplai sembako
Macang Pacar	Timbang Raung	Jasa Transportasi (ada hibah kendaraan mini bus dari Kemenhub)
Komodo	Pongkor Lestari	Jasa Simpan Pinjam
	Kenari Lestari	Jasa Simpan Pinjam

Sumber: Dinas PMD Kab. Manggarai Barat 2021

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan bahwa Bumdes yang terbentuk di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 130 dengan berbagai bidang usaha terhitung hingga tahun 2020. Namun demikian, dari jumlah tersebut ada beberapa lembaga yang tidak aktif. Data evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menyebutkan dari total 130 Bumdes di Kabupaten Manggarai Barat hanya 47,69% atau sekitar 62 Bumdes saja yang dinilai aktif. Sisanya tidak aktif karena kendala SDM pengurus dan bidang usaha yang belum disepakati. Berikut uraian datanya.

Tabel 2. 98. Persentase Bumdes Aktif tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Bumdes yang Terbentuk	Penyertaan Modal (Rp)	Status BUMDes	
					Jumlah Desa Aktif	Jumlah Desa tidak aktif
1	Komodo	17	15	1.874.991.583	10	4
2	Mbeliling	15	15	1,600.982.445	10	5
3	Sano Nggoang	15	13	863.805.311	3	9
4	Lembor	14	8	698.466.200	4	4
5	Lembor Selatan	15	14	1.068.394.341	7	7
6	Welak	16	9	553.321.700	5	4
7	Kuwus	10	7	490.905.629	4	3
8	Kuwus Barat	10	10	448.878.548	4	6
9	Ndoso	15	14	1.033.350.972	7	7
10	Pacar	13	7	891.139.606	2	5
11	Macang Pacar	13	9	816.000.000	1	8
12	Boleng	11	10	201.947.664	5	5
Total		164	130	10.542.183.999	62	68

Sumber: Dinas PMD Kab Manggarai Barat, 2021

Komodo, Mbeliling, Lembor Selatan, dan Ndoso merupakan 4 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah desa dan Bumdes terbanyak. Keempat Bumdes tersebut juga mendapat penyertaan modal terbesar, masing-masing

sejumlah lebih dari 1 Milyar. Namun demikian, khusus untuk Lembor Selatan dan Ndosso, jumlah desa yang aktif hanya 50%. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar penyerapan anggaran Bumdes lebih dioptimalkan dengan menjamin keaktifan seluruh desa.

b. Kelompok Binaan PKK

PKK atau Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang pengelolaannya secara mandiri dikoordinir dan dilaksanakan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Pembinaan PKK melingkupi pelaksanaan 10 program pokok PKK serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.

Tabel 2. 99. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016-2020 Kabupaten Manggarai Barat

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pkk	179	180	180	180	182
2	Jumlah Kelompok Binaan	587	587	587	587	587
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	3,2	3,3	3,3	3,3	3,2

Sumber: DPMPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Kegiatan kelompok binaan PKK di Kabupaten Manggarai Barat cenderung stagnan; hanya naik 0,1 poin pada kurun waktu 2016-2020. Hal ini berbeda dengan periode 2011-2015 di mana terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari 0,94 poin di tahun 2011 menjadi 3,2 poin pada tahun 2015. Berikut adalah data tentang jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Manggarai Barat.

c. Posyandu Aktif

Salah satu indikator kinerja Dinas PMD adalah pemberdayaan masyarakat melalui posyandu. Terdapat 480 posyandu di Kabupaten Manggarai Barat dan seluruhnya berstatus sebagai posyandu aktif hingga tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020.

Tabel 2. 100. Perkembangan Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	465	465	472	480	480

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah Posyandu Aktif	465	465	472	480	480

Sumber: DPMPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Jumlah posyandu aktif di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga 2020 semakin naik. Jika dihitung per desa/ kelurahan terlihat bahwa rata-rata setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat memiliki 2 sampai 3 posyandu aktif. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki keluarga yang sehat.

14. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki sasaran meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah. Tolok ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pelayanan pengelolaan arsip pemerintah daerah. Berikut adalah tabel tentang persentase OPD yang memiliki tata kearsipan secara baik di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 101. Persentase OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah OPD yang Memiliki Tata Kearsipan secara Baik	13	5	10	25	0
Jumlah SKPD	-	13	47	54	54
Persentase		38,46	21,28	46,30	0
Persentase pembinaan pengelolaan kearsipan daerah	1,9	3,7	5,6	7,4	0
Jumlah pengelola arsip	37	50	67	75	110

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Manggarai Barat, 2021

Ada sebagian kecil OPD di Manggarai Barat yang sudah dapat menerapkan tata kearsipan yang baik dan jumlahnya terus meningkat hingga tahun 2019, walaupun pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena pandemic Covid19 yang melanda. Namun sebagian besar tercatat masih belum dapat menerapkannya. Masih minimnya jumlah arsiparis dan ketersediaan sarana arsip yang kurang memadai menjadi salah satu kendala merealisasikannya. Beberapa tahun terakhir pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada sejumlah aparatur untuk menjadi pengelola arsip di setiap OPD. Tercatat ada 91 orang aparatur dari seluruh OPD yang sudah dilatih menjadi pengelola arsip OPD.

15. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana perpustakaan daerah yang dapat mendorong minat baca masyarakat dan meningkatkan pengetahuan serta akses terhadap informasi. Berikut adalah perkembangan capaian kinerja urusan perpustakaan kurun waktu 2015-2019.

Tabel 2. 102. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks literasi	2,76	3,55	4,19	4,84	0
Jumlah pengunjung perpustakaan daerah	1.954	4.284	87.051	95.294	937
Jumlah pengelola perpustakaan	20	35	45	55	65
Jumlah perpustakaan model	10	10	10	10	10
Jumlah perpustakaan berbasis masyarakat	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Manggarai Barat, 2021

Indeks literasi di Kabupaten Manggarai Barat terus naik dari tahun 2015 hingga 2019, walaupun pada tahun 2020, sampai dengan penyusunan dokumen ini, nilai indeks ini belum dipublikasikan. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya melek membaca. Kenyataan ini berbanding lurus dengan persentase jumlah kunjungan ke perpustakaan yang terus meningkat hingga mencapai 4847,10% pada tahun 2019, walaupun menurun pada tahun 2020 karena pandemic Covid19. Peningkatan jumlah pengunjung yang luar biasa pada tahun 2018 dan 2019 disebabkan oleh adanya perpustakaan keliling yang dimiliki pemerintah daerah yang bisa menjangkau berbagai daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

16. Urusan Statistik

Urusan 122isbandin dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data/122isbandin daerah ditentukan dari ketersediaan sistem data dan statistik serta ketersediaan Buku Manggarai Barat Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Bruto (PDRB). Capaian layanan urusan Statistik diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 103. Pemenuhan Kebutuhan Data/Statistik Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku Manggarai Barat Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Manggarai Barat 2021

Berdasarkan capaian dokumen yang tersedia, sejak tahun 2016-2020 dokumen statistika yang diterbitkan sudah sesuai dengan kebutuhan mulai dari dokumen kabupaten dalam angka, buku PDRB dan integrasi sistem informasi data dan statistika sudah terpenuhi semua.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 F UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang antara lain menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, komunikasi dan informasi adalah sarana yang penting bagi pemerintah guna mendukung perkembangan sosial ekonomi dan wilayah suatu daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuannya. Berikut adalah data mengenai capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 104. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Desa/Kelurahan yang terakses komunikasi	0			63	81
2	Persentase Desa/Kelurahan yang bisa diakses RSPD	39,64			71	71
3	Persentase OPD yang menerapkan e-government	14			73	100
4	Persentase wilayah kecamatan yang terlayani akses internet	-			67	75

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Manggarai Barat, 2019

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang, mendorong masyarakat memiliki proporsi yang semakin meningkat untuk dapat mengakses layanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi tersebut direpresentasikan dari semakin bertambahnya jumlah desa, kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat mengakses layanan komunikasi, internet dan siaran radio pemerintah daerah. Data Dinas Infokom juga mencatat bahwa jumlah desa dan kelurahan yang sudah dapat mengakses layanan telekomunikasi dan siaran RSPD di Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat hingga tahun 2019.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan terdiri dari berbagai urusan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah. Fokus urusan ini terdiri dari beberapa urusan seperti pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian. Beberapa urusan di dalam 124isba layanan urusan pilihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian merupakan urusan prioritas untuk penguatan perekonomian masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Hampir 75% penduduk Kabupaten Manggarai Barat adalah petani. Beberapa wilayah pertanian di Kabupaten Manggarai Barat, seperti Lembor adalah wilayah kantong kemiskinan. Berbasis pada persoalan tersebut, maka pengembangan sektor pertanian patut diperhatikan secara serius. Berikut adalah gambaran kondisi pertanian di Kabupaten Manggarai Barat kurun pada waktu 2015 hingga 2020.

1. Tanaman Pangan

Produk pertanian tanaman pangan yang paling dominan di Kabupaten Manggarai Barat antara lain seperti padi (padi sawah maupun padi 124isban), jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Ada juga kedelai dan kacang tanah dan kacang hijau. Berikut adalah perkembangan produk-produk pertanian tersebut.

Tabel 2. 105. Luas Areal Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Tahun 2020 (Ha)

Kecamatan	Padi		Jagung		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Komodo	5138,8	4576,2	491	684	115	55	73	50
Boleng	5254	4488	306	461	141	17	39	23
Sano Nggoang	4833,5	4669,6	439	1047	167	105	63	47
Mbeliling	3163,9	3100,4	504	417	178	63	75	34
Lembor	10248,8	9918,5	155	275	101	41	78	30
Welak	2934,9	2822,5	788	629	63	69	63	28
Lembor Selatan	4275,8	3660,3	566	487	70	34	122	28
Kuwus	2395,2	2137,6	306	633	60	86	64	81
Ndoso	2118,5	1995,4	351	723	195	80	67	58
Kuwus Barat	2085,4	1720,8	484	924	24	64	50	41
Macang Pacar	2747,6	2528,6	399	1161	97	64	61	34
Pacar	2451,1	2204,3	1026	2388	475	186	131	119
Jumlah	47.647,5	43.822,2	5.815	9.829	1.686	864	886	573

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Tanaman padi sawah dan padi 125isban masih menjadi prioritas tanam para petani di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini dapat dicermati dari luas tanam dan luas panen tanaman padi yang jauh lebih besar dibandingkan tanaman pangan lainnya. Padi ditanam oleh masyarakat Manggarai Barat untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Hasil panen padi selama ini juga bisa dijual oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini berbeda dengan tanaman pangan lainnya. Tanaman pangan lain selain padi umumnya ditanam hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Luas areal tanaman padi terbesar terdapat di Kecamatan Lembor. Daerah ini menjadi lumbung padi untuk Kabupaten Manggarai Barat dan Provinsi NTT. Daerah lainnya yang menjadi lumbung padi di Kabupaten Manggarai Barat adalah Kecamatan Komodo dan Sano Nggoang. Sedangkan areal tanam jagung terbesar di Manggarai Barat terdapat di Kecamatan Pacar. Berikut adalah data mengenai luas areal tanaman jagung dan komoditas tanaman pangan lainnya di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 106. Luas Areal Tanaman Pangan (Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau) Tahun 2020 (Ha)

Kecamatan	Kedelai		Kacang Tanah		Kacang Hijau	
	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas panen (Ha)
Komodo	3	3	\-	40	10	32
Boleng	\-	\-	\-	\-	197	103
Sano Nggoang	\-	\-	\-	\-	\-	10
Mbeliling	\-	\-	\-	\-	\-	\-
Lembor	\-	\-	10	7	88	23
Welak	\-	\-	\-	3	27	20
Lembor Selatan	\-	\-	560	225	8	12
Kuwus	\-	\-	\-	\-	\-	\-
Ndoso	\-	\-	15	\-	\-	\-
Kuwus Barat	\-	\-	15	11	\-	\-
Macang Pacar	371	210	\-	12	45	34
Pacar	4	91	\-	\-	28	28
Jumlah	378	304	600	298	403	262

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Luas areal tanaman kedelai terbesar terdapat di Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Pacar. Luas tanam kacang tanah terbesar di Kabupaten Manggarai Barat terdapat di Kecamatan Lembor Selatan. Luas tanam kacang hijau terbesar terdapat di Kecamatan Boleng dan Lembor. Pertanian tanaman pangan selain padi harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung *supply* kebutuhan sektor pariwisata.

Indikator lain yang sering digunakan untuk menilai kinerja sektor pertanian adalah produksi dan produktivitas tanaman pangan. Indikator produksi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani Kabupaten Manggarai Barat. Data mengenai produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 107. Jumlah Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016-2020

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang		Padi Total	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2016	57,9	195.532,2	21,6	5.544,3	55,3	201.076,6
2017	59,5	216.932,3	22,5	25.218,8	50,8	242.151,1
2018	49,2	236.292,5	23,8	20.393,3	45,3	256.685,8

Tahun	Padi Sawah		Padi Ladang		Padi Total	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2019	54,3	238.699,0	49,4	51.583,0	53,4	290.282,0
2020	5,6	212.313,5	2,3	13.652,8	5,16	225.966,3
Tahun	Jagung		Kedelai		Kacang Tanah	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2016	27,4	7.209,2	13,5	1.830,7	93,3	9.570,6
2017	27,9	16.374,6	13,1	854,1	64,9	2.334,8
2018	35,6	39.175,0	11,2	2.364,9	16,7	125,4
2019	42,7	41.081,8	8,1	630,3	17,2	630,8
2020	6,16	60.540,9	1,35	411,5	1,2	357,6
Tahun	Kacang Hijau		Ubi Kayu		Ubi Jalar	
	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
2016	16,96	463	98,08	7.474	74,41	1.949
2017	15,45	383	99,03	34.422	75,25	15.847
2018	11,55	60	168,34	9.764	43,43	760
2019	5,03	96	128,8	18.164	85,73	4.955
2020	1,59	417,1	10	8640	9,79	5608,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kab Manggarai Barat, 2021

Produksi tanaman pangan utama di Kabupaten Manggarai Barat, berupa padi dan jagung cenderung naik dari tahun 2016 hingga 2020, walaupun produktivitasnya sering fluktuatif. Sementara produk lain seperti kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami fluktuasi produksi bahkan kelompok kacang hijau terlihat cenderung menurun produksi dan produktivitasnya. Penurunan ini lebih disebabkan karena perubahan iklim yang ekstrim serta adanya kecenderungan masyarakat untuk memprioritaskan menanam padi dan jagung. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah irigiasi usaha tani dan jalan usaha tani yang kurang memadai, kualitas bibit, obat-obatan dan pupuk yang kurang memadai serta masih adanya serangan hama penyakit.

Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, terlihat bahwa produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Manggarai Barat lebih baik daripada rata-rata NTT.

BPS menyebutkan rata-rata produksi padi di NTT tahun 2019 mencapai 38,51 kw/ha, sementara di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 53,4 kw/ha. Demikian pula rata-rata produksi jagung di NTT mencapai 26,3 kw/ha, sementara di Manggarai Barat mencapai 42,7 kw/ha pada tahun 2019.

2. Tanaman Perkebunan

Kabupaten Manggarai Barat juga dikenal karena produksi tanaman perkebunannya. Tanaman perkebunan terbanyak antara lain seperti jambu mete, kelapa, kopi, kemiri dan kakao. Berikut adalah perkembangan beberapa tanaman perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat pada kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2. 108. Luas Areal Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa	2.710	2.710	2.708	2.532	2.354
2	Jambu Mete	8.263	8.293	8.259	7.546	7.220
3	Kopi	6.572	6.627	6.571	6.346	6.271
	- Arabika	691	746	691	730	688
	- Robusta	5.881	5.881	5.880	5.617	5.583
4	Kakao	2.516	2.516	2.497	2.518	2.531
5	Kemiri	4.258	4.258	4.259	4.223	4.388
6	Kapuk	1.129	1.129	1.122	990	904
7	Cengkeh	2.152	2.412	2.153	2.552	2.761
8	Pinang	402	402	401	384	365
9	Vanili	206	210	197	204	342
10	Lada	50	50	51	51	61
11	Asam	2	3	2	2	2
12	Jarak Pagar	-	-	-	-	-
13	Pala	-	-	-	13	82
14	Kapas	-	-	-	-	-
15	Tembakau	90	46	75	45	53
16	Sirih	17	17	19	19	19
17	Lontar	-	-	-	2	2
Total		28.367	28.673	28.314	27.428	33.626

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah dari tahun 2016 hingga 2020. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi areal permukiman atau areal tanam jenis produk pertanian lainnya. Dengan luas areal tanam tersebut,

perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 109. Jumlah Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kg/Ha) Tanaman Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Komoditi	Tahun									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1	Kelapa	592	324	594	324	508	358	433	311	370	319
2	Jambu Mete	910	196	913	198	880	228	1.185	296	1.067	318
3	Kopi	2.123	492	2.124	493	1.880	503	1.997	505	1732	974
	- Arabika	216	443	216	443	182	457	191	502	143	482
	- Robusta	1.907	499	1.908	499	1.698	509	1.807	506	1.589	492
4	Kakao	530	344	536	345	616	349	564	344	527,54	342
5	Kemiri	1.073	405	1.084	409	1.278	407	1.246	427	1.227	430
6	Kapuk	146	224	145	222	70	240	68	243	59	263
7	Cengkeh	376	511	198	436	593	441	712	442	669	443
8	Pinang	52	280	55	286	50	287	51	284	52	294
9	Vanili	31	352	34	366	48	300	36	296	37	300
10	Lada	13	433	17	486	5	272	10	321	9	327
11	Asam	1	500	2	667	4	252	4	1.800	4	1.963
12	Jarak Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kapas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Tembakau	36	400	19	413	10	33	33	731	46	879
16	Sirih	4	400	5	455	5	6	6	917	4	718
17	Lontar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	5.887	351	5.726	348	5.944	372	6.346	392	5.802	445

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Hasil perkebunan di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tanaman perkebunan cengkeh yang pada tahun 2019. Tanaman cengkeh mengalami peningkatan produksi mencapai 81,63% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pada beberapa komoditi andalan seperti kopi terlihat stagnan dan justru mengalami penurunan produksi pada tahun 2019. Umur tanaman yang sudah tua sedikit banyak menjadi penyebab menurunnya produksi tanaman ini. Beberapa faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi tanaman perkebunan antara lain adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia petani, metode budidaya yang digunakan masih tradisional, sarana perkebunan yang kurang memadai dan masih adanya serangan hama penyakit.

3. Tanaman Hortikultura

Kabupaten Manggarai Barat juga merupakan pangsa pasar hortikultura yang sangat potensial. Dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat, kebutuhan akan jenis tanaman ini juga meningkat pesat. Berikut adalah perkembangan hasil komoditi hortikultura baik jenis buah-buahan maupun sayuran yang dihasilkan petani Manggarai Barat pada periode 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 110. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ton)

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Alpukat	167,6	171,5	140,6	149,8	156,6
2	Belimbing	0,3	0,8	0,8	0,9	0,9
3	Duku/Langsar	-	-	-	-	-
4	Durian	79,3	118,1	120,1	167,8	246,6
5	Jambu Biji/Kristal	8,5	53,7	70,4	111,0	115,5
6	Jambu Air	3,9	4,9	4,9	5,0	5,0
7	Jeruk Siam	344,9	321,3	314,8	355,6	334,8
8	Jeruk Besar	9,4	12,5	12,5	12,8	12,8
9	Mangga	329,6	455,6	456,4	668,9	718,3
10	Manggis	-	-	-	-	-
11	Nangka	265,8	304,0	304,0	363,8	359,3
12	Nenas	131,1	162,3	142,4	154,1	185,6
13	Pepaya	1.315,8	1.597,9	1.684,7	2.664,4	2.805,2
14	Pisang	1.986,9	2.015,0	2.471,9	4.368,4	4.567,4
15	Rambutan	689,3	838,0	838,0	1.049,7	1.134,2
16	Salak	30,0	32,0	32,0	41,8	42,8
17	Sawo	49,1	66,0	66,0	77,2	77,6
18	Markisa	-	-	-	-	-
19	Sirsak	23,8	25,3	26,0	30,7	36,8
20	Sukun	24,2	24,2	25,3	26,5	33,7
21	Semangka	-	-	-	80,0	80,0
22	Melon	-	-	-	60,0	30,0
23	Melinjo	6,7	6,7	6,7	6,7	11,4
24	Petai	6,0	11,3	11,3	12,2	12,2
25	Jengkol	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.472,3	6.220,9	6.728,7	10.407,2	10.966,7

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Produksi buah-buahan di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat secara signifikan pada tahun 2016 hingga 2020. Semakin bertambahnya hotel dan 130isbanding di Kabupaten Manggarai Barat sedikit banyak mendorong peningkatan produksi tanaman hortikultura. Produksi terbesar terdapat pada buah-buahan jenis pisang. Komoditas ini dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan petani, tetapi juga diminati oleh daerah lain, seperti NTB, Bali dan Surabaya.

Tabel 2. 111. Produksi Tanaman Sayuran di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020 (Ton)

No.	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kacang panjang	120,0	205,0	372,0	480,0	468,0
2	Cabe Besar	102,5	125,0	125,0	165,0	145,0
3	Cabe Rawit	105,0	162,5	200,0	225,0	180,0
4	Kol/Kubis	5,0	10,0	25,0	220,0	180,0
5	Buncis	12,0	44,0	8,0	60,0	80,0
6	Bayam	66,0	222,0	444,0	672,0	720,0
7	Petsai/Sawi	57,0	225,0	252,0	712,0	840,0
8	Labu Siam	70,0	66,0	260,0	580,0	540,0
9	Kangkung	90,0	240,0	480,0	924,0	900,0
10	Terung	85,0	205,0	594,0	792,0	960,0
11	Ketimun	8,0	54,0	72,0	165,0	342,0
12	Tomat	21,0	64,0	110,0	160,0	300,0
13	Bawang Merah	220,0	297,0	289,0	263,5	127,5
14	Selada Darat	4,0	2,0	12,0	24,0	16,0
15	Kentang	-	-	0,0	0,0	0,0
16	Wortel	16,0	0,0	18,0	28,5	19,0
17	Kembang Kol	2,0	0,0	10,0	40,0	90,0
18	Kacang Merah	30,0	15,0	21,0	33,0	36,0
19	Lobak	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	1.015,5	1.936,5	3.292,0	5.544,0	5.943,5

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Manggarai Barat juga meningkat secara signifikan pada tahun 2016 hingga 2020. Kebutuhan para wisatawan di hotel dan 131isbanding di Perkotaan Labuan Bajo sedikit banyak menggairahkan para petani Kabupaten Manggarai Barat untuk memproduksi jenis tanaman ini. Kualitas dan kontinuitas produksi harus tetap dijaga agar mampu memenuhi permintaan dari sektor pariwisata.

4. Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tentu dipengaruhi oleh faktor kerja keras dari para petani dan pendampingnya. Data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyebutkan bahwa ada sebagian besar petani di Kabupaten Manggarai Barat yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani (poktan). Tercatat ada sekitar 1.846 kelompok tani di Kabupaten Manggarai

Barat yang bergerak di berbagai usaha pertanian. Ada juga gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang saat ini berjumlah 133 kelompok, walaupun yang aktif tercatat tidak sampai setengahnya. Berikut adalah data mengenai jumlah kelompok petani dan jumlah gabungan kelompok petani di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 112. Jumlah Poktan dan Gapoktan di Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH KELOMPOK TANI	1.561	1.795	1.806	1.846
	a. Pemula	446	799	1.034	1.089
	b. Lanjut	224	577	699	718
	c. Madya	-	4	7	11
	d. Utama	-	-	-	-
	e. Poktan Baru/ Belum Bersertifikat	891	415	66	28
2	a. Jumlah Gapoktan	133	133	133	133
	b. Jumlah Gapoktan				
	Penerima Dana Puap	117	117	117	117
	c. Jumlah Gapoktan Yang Berkembang Baik	25	30	30	30

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Para petani, poktan, dan gapoktan ini didampingi oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang terdiri dari pegawai PNS, THL, Kontrak Daerah dan Penyuluh kabupaten. Keberadaan penyuluh sangat membantu untuk memperbaiki kapasitas sumber daya manusia petani dan metode budidaya pertanian. Berikut adalah perkembangan jumlah PPL dari tahun 2017 hingga 2020 di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 113. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020 (Orang)

No	Penyuluh Pertanian Lapangan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	PNS	38	35	35	29
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	58	58	53	52
3	Kontrak Daerah	24	25	24	26
4	Penyuluh Kabupaten	2	2	3	3
Jumlah		122	120	115	110

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Kab Manggarai Barat, 2021

Jumlah PPL di Kabupaten Manggarai Barat terus berkurang dari tahun 2017 hingga 2020. Hampir 50% penyuluh adalah PPL tenaga harian lepas. Adanya kebijakan moratorium pegawai dari Pemerintah Pusat sedikit banyak menyebabkan sejumlah PPL yang 132isband tidak dapat segera diganti oleh pemerintah daerah.

Jika PPL dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan (169 kelurahan) yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, maka terlihat bahwa rasionya adalah 1 : 1,5. Artinya satu orang PPL di Kabupaten Manggarai Barat harus mendampingi dan membina petani-petani di 1-2 desa/kelurahan. Kondisi ini sangat kurang memadai.

5. Peternakan

Peningkatan produksi dan populasi ternak harus dijalankan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan utama. Di tingkat yang lebih makro, peningkatan produksi hasil ternak juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. Berikut adalah perkembangan peternakan di Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 114. Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (kg)

No	Komoditi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	33.780	35.895	42.670	45.800	44.137	99.598
2	Kerbau	7.013	7.154	7.368	7.168	7.082	3.050
3	Babi	12.851	52.718	107.886	118.536	112.286	81.307
4	Ayam	69.331	72.029	73.577	74.290	74.670	76.807

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Babi dan sapi adalah dua komoditas terbesar di Kabupaten Manggarai Barat. Komoditas babi dan sapi mengalami penurunan pada tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa persoalan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia peternak, kurang memadainya kualitas pakan dan bibit unggul, metode budidaya masih tradisional dan masih adanya serangan hama penyakit. Berbagai persoalan tersebut juga berpengaruh terhadap produksi produk asal ternak. Berikut adalah data mengenai produksi produk asal ternak di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 2. 115. Produksi Produk Asal Ternak Tahun 2015-2020

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

No	Komoditi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Telur (kg)	22.400	25.600	27.500	31.400	38.000	27.200
2	DOC (ekor)	72.980	75.820	77.450	78.200	78.600	72.000
3	Ayam Olahan (kg)	875	980	10.250	11.300	12.700	10.500
4	Daging Sapi (kg)	2.750	2.970	3.055	3.110	3.450	2.750
5	Daging Babi (kg)	460	450	550	600	825	20

Produksi peternakan cenderung meningkat pada periode 2015 sampai dengan 2019. Anomali hanya terjadi pada jumlah produksi ternak pada tahun 2020 yang menurun di 134isban semua jenis ternak. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah populasi yang juga menurun pada tahun 2020.

Produksi produk asal ternak terlihat meningkat dengan cukup baik pada tahun 2015 hingga 2019. Kebutuhan pasar akibat perkembangan pariwisata yang cukup pesat sedikit banyak menggairahkan produksi peternakan di Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembibitan ternak, inseminasi buatan (IB) dan Pemeriksaan Kebuntingan baik bersumber dari dana APBD Kabupaten Manggarai Barat, APBD Provinsi maupun APBN. Produk asal ternak juga dipengaruhi oleh faktor populasi ternak. Berikut adalah data mengenai populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 116. Populasi Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020

Tahun	Kerbau	Sapi	Kuda	Babi	Kambing	Ayam	Ternak Lainnya
2015	19.965	16.583	408	43.549	8.461	141.597	1.831
2016	20.026	16.429	436	41.985	9.035	119.448	1.369
2017	18.289	14.526	313	38.593	6.402	111.736	1.144
2018	17.096	15.074	246	37.275	6.845	115.147	1.141
2019	16.202	12.745	227	36.814	6.882	135.012	1.426
2020	17.945	16.762	197	175.439	7.033	146.475	2.229

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2020. Perkembangan terbaik hanya terjadi pada populasi ternak ayam yang cenderung naik selama tahun 2017 hingga 2019, walaupun jumlahnya tetap lebih kecil dari populasi pada tahun 2015. Terbatasnya populasi jantan produktif akibat perdagangan dan bibit unggul lokal sedikit banyak mempengaruhi penurunan jumlah populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat. Tingkat kelahiran dan kematian ternak juga berpengaruh terhadap populasi ternak di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah data mengenai tingkat kelahiran dan kematian ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 117. Tingkat Kelahiran dan Kematian Ternak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kelahiran ternak	11,48%	8,17%	5.35%	0,24%	22.10%
Tingkat kematian ternak	Na	1343 (1.70%)	507 (0.70%)	172 (0.24%)	1969 (0.90%)

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Tingkat kelahiran ternak menunjukkan tren yang semakin meningkat pada tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini diikuti dengan naiknya jumlah kematian ternak pada tahun 2020. Masih adanya beberapa penyakit hewan strategis dan penyakit hewan lainnya mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian ternak di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.2. Urusan Pariwisata

Perkembangan pariwisata Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat seiring dengan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Perkembangan pariwisata ini diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja sektor pariwisata adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Berikut adalah data mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 118. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0.73	0.77	0.80	0.80	0.50

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Manggarai Barat mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya kunjungan wisatawan dan menurunnya *spend of money* wisatawan. Kondisi Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap dua aspek di atas. Kunjungan wisatawan sangat terpengaruh oleh adanya 135isbandi Covid-19 terutama pada periode 2020-2021.

Jumlah kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata ini tercatat terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2020. Data Dinas Pariwisata menyebutkan

bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai daya 136isba wisata di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 baru mencapai 61.257 orang, namun pada tahun 2019 meningkat secara signifikan menjadi 187.098 orang. Hasil wawancara menyebutkan bahwa data kunjungan wisatawan menurun 136isband pada tahun 2020 akibat Covid-19. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2015 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 119. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2015-2020

No	Jumlah Kunjungan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wisatawan Manca Negara	45.372	54.335	76.869	91.870	168.814	18.350
2	Wisatawan Nusantara	15.754	29.377	56.596	69.343	85.898	26.072
3	Wisatawan Lokal	131	-	2.129	1.841	1.897	83
Total		61.257	83.712	135.594	163.054	256.609	44.505

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara selalu jauh lebih banyak dibandingkan dengan wisatawan nusantara. Karakteristik daya 136isba wisata alam yang unik dan membutuhkan *effort* serta jiwa kepetualangan menjadi faktor yang banyak mempengaruhi ketertarikan wisatawan mancanegara ke Manggarai Barat. Namun demikian, pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara juga meningkat signifikan pada tahun 2015 hingga 2019 sebelum menurun pada 2020 akibat pengetatan mobilitas masyarakat. Berikut adalah data mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke daya 136isba wisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 120. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke ODTW di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018-2020

Daya Tarik Wisata	Tahun	Wisatawan			
		Wisman	Wisnu	Lokal	Total
Rinca (Loh Buaya)	2018	37.770	30.966	499	69.235
	2019	42.844	31.263	298	74.405
	2020	4.098	6.819	-	10.917
Komodo (Loh Liang)	2018	39.289	21.597	267	61.153
	2019	46.257	21.781	-	68.038
	2020	5.373	10.419	-	15.792
Batu Cermin	2018	5.561	11.800	706	18.067
	2019	6.949	17.980	1.000	25.929
	2020	919	3.558	83	8.471
Cunca Wulang	2018	5.583	2.405	39	8.027
	2019	2.902	2.102	99	5.103

Daya Tarik Wisata	Tahun	Wisatawan			
		Wisman	Wisnu	Lokal	Total
	2020	396	1.151	-	1.547
Gua Rangko	2018	3.501	2.375	205	6.081
	2019	166	200	125	491
	2019	5.707	7.416	500	13.623
	2020	994	3.000	-	3.994
Cunca Rami	2018	166	200	125	491
	2019	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-
Total 2018		91.870	69.343	1.841	163.054
Total 2019		104.659	80.542	1.897	187.098
Total 2020		11.780	24.947	83	40.721

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Rinca (Loh buaya) dan Komodo (Loh liang) masih menjadi tujuan utama wisatawan saat berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat. Daya 137isba Komodo sebagai binatang purba, keindahan alam, dan panorama bawah laut di sekitar kedua pulau ini menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan untuk dikunjungi. Sementara daya 137isba wisata lain di luar itu masih belum menjadi primadona bagi para calon wisatawan terutama wisatawan nusantara dan mancanegara.

Aspek lain yang juga menarik untuk disajikan adalah rata-rata lama tinggal para wisatawan itu di Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2019 yaitu selama 6,87 hari. Ini artinya, para wisatawan ini rata-rata menghabiskan 6 hingga 7 hari tinggal dan mengunjungi beberapa daya 137isba wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Angka ini membaik dari keadaan tahun 2018 yang mencapai 6,67 hari, tahun 2017 yang mencapai 6,1 hari dan tahun 2016 yang baru mencapai 5,6 hari. Musim kunjungannya terjadi sebanyak dua kali, yakni pada bulan Oktober – Februari dan antara Maret – September (musim puncak). Dari berbagai aktivitas para wisatawan ini, pemerintah daerah mendapat dampak positif terutama meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 121. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1	2015	2.836.432.000	64.742.881.466	4,38
2	2016	3.416.549.643	91.068.685.754	3,75
3	2017	4.884.096.889	123.431.460.591	3,95

No	Tahun	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
4	2018	8.340.637.840	103.347.460.591	8,07
5	2019	18.456.451.878	169.954.164.787	10,85
6	2020	2.692.490.000	99.340.732.323,62	2,71

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Kabupaten Manggarai Barat, sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah daerah menjadi semakin besar. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 10,85%, naik 138isban 121% dari kontribusi pada tahun 2018. Meskipun begitu, seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, maka kontribusi terhadap PAD juga menurun pada 2020 sebesar 2,71%. Secara umum, pariwisata merupakan sektor potensial harus tetap dikelola agar mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.3. Urusan Perikanan

Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang luas serta terdiri dari 146 pulau, sehingga 138isban 20% penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Dengan wilayah kepulauan seperti itu, jenis ikan tangkap di Kabupaten Manggarai Barat juga sangat beragam. Hal ini menjadi salah satu daya 138isba bagi wisatawan. Menu ikan segar menjadi pemandangan yang unik di seantero kawasan kuliner di Perkotaan Labuan Bajo. Berikut perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 122. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016-2020 (Ton)

Kecamatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Komodo	24.936	26.224	20.962	3.689	2.888
Macang Pacar	2.494	2.628	2.510	113.2	150,6
Boleng	14.962	14.469	14.507	31.190	89,2
Lembor Selatan	7.481	8.292	7.606	629	395
Jumlah	49.872	51.613	45.585	4.462	3.519

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Manggarai Barat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga 2020. Semakin banyaknya kapal nelayan yang beralih fungsi menjadi kapal pengangkut wisatawan sedikit banyak

mempengaruhi kecenderungan ini. Penurunan produksi perikanan tangkap juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas, sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil dan kualitas nelayan SDM masih kurang memadai. Penurunan produksi perikanan juga terjadi pada produksi perikanan budidaya. Berikut adalah data mengenai jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 123. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2020 (Ton)

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi perikanan budidaya (ton)	288,05	93,35	33,99	12,59	12,34	30,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Produksi perikanan budidaya terus menurun pada tahun 2015 hingga 2019. Data Dinas perikanan menyebutkan bahwa budidaya rumput laut banyak mendongkrak produksi perikanan budidaya Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015-2020. Namun dengan beralihnya kewenangan urusan itu ke pemerintah provinsi, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Manggarai Barat hanya mengandalkan budidaya ikan air tawar. Produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan pakan, bibit, modal, teknologi, metode budidaya, kapasitas SDM dan minat masyarakat untuk membudidayakan ikan.

2.3.2.4. Urusan Perdagangan

Ruang lingkup urusan perdagangan adalah mengembangkan perdagangan dengan memperluas jaringan pemasaran, memperlancar distribusi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja sektor perdagangan adalah tingkat kelancaran distribusi barang. Berikut adalah data mengenai tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 124. Tingkat kelancaran distribusi barang di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kelancaran distribusi barang	70%	75%	75%	80%	85%

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Tingkat kelancaran distribusi barang menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting perdagangan. Faktor lain yang berpengaruh berhubungan dengan sarana dan prasarana. Data tersebut dapat dicermati dari data mengenai jumlah pasar daerah, 140isb, kios dan sarana perdagangan lainnya. Berikut adalah perkembangan jumlah pasar daerah, 140isb atau kios di Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2. 125. Jumlah pasar, 140isb/kios/gudang Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasar Daerah	Na	15	15	15	15	15
2	Toko/Kios/Gudang	Na	867	902	930	978	1134

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Jumlah pasar daerah di Kabupaten Manggarai Barat tidak bertambah selama tahun 2015 hingga 2020. Data Dinas Perindagkop menyebutkan bahwa semua pasar daerah ini terletak di ibukota kecamatan termasuk Labuan Bajo yang memiliki 3 pasar daerah. Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan.

2.3.2.5. Urusan Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas untuk mengembangkan sektor 140isbandi dalam rangka mengurangi pengangguran serta menciptakan kesempatan bekerja dan berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Catatan Dinas Perindagkop, ada sekitar 2.263 industri di Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019. Namun semuanya dalam kategori 140isbandi kecil dan rumah tangga. Walau demikian, serapan tenaga kerjanya 140isban mencapai 3.659 orang. Berikut data tentang perkembangan sektor 140isbandi di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 2. 126. Perkembangan Industri di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Kecil (Formal)	367	380	386	391	443

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Industri Kecil (non- Formal)	322	322	342	642	747
3	Industri Rumah Tangga	1474	1475	1493	1230	1336

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Sektor 141isbandi di Kabupaten Manggarai Barat masih didominasi oleh 141isbandi rumah tangga dengan jenis dan kapasitas produksi yang tentunya sangat kecil. Umumnya 141isbandi-industri ini bergerak di bidang produksi makanan ringan, tenunan, souvenir, dan olahan hasil pertanian seperti kopi tepung. Berikut adalah nilai kapasitas produksi IKM di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 127. Nilai produksi IKM dan jumlah produk IKM yang bersertifikasi di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016 – 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai produksi IKM			32.408.700.000	3.359.985.000	1.179.640.000
Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	28	55	100	124	168

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Manggarai Barat, 2021

Nilai produksi IKM menunjukkan tren yang semakin menurun pada tahun 2018 hingga 2020. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa persoalan seperti ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu, kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM masih belum memadai, sarana produksi yang masih kurang dan akses terhadap bantuan permodalan yang kurang memadai. Berbeda dengan nilai produksi IKM yang semakin menurun, jumlah produk IKM yang bersertifikat justru meningkat. Standarisasi pengolahan produk IKM harus tetap ditingkatkan untuk menjaga kualitas produk secara berkesinambungan.

2.3.2. Fokus Fungsi Penunjang

Penunjang urusan memiliki peran penting dalam mendukung kualitas penyelenggaraan pelayanan 141isban di suatu daerah. Gambaran mengenai kondisi penunjang urusan dapat dilihat dari beberapa unsur, seperti perencanaan pembangunan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; pengawasan; penelitian dan pengembangan; 141isbanding141 dewan; dan pemerintahan umum/141isbanding141 daerah. Secara rinci, ketujuh urusan penunjang dapat dilihat dalam deskripsi berikut:

2.3.2.1. Perencanaan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Urusan perencanaan menjadi fondasi utama pelaksanaan pembangunan. Secara umum capaian urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 128. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan dokumen perencanaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran	100%	98%	100%	95,91%	98,34%
3	Ketersediaan dokumen evaluasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Cakupan program/ kegiatan mitra pembangunan yang tersinkronisasi dan terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan SDM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan hukum dan pemerintahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan fisik prasarana wilayah dan tata ruang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Ketersediaan dokumen hasil kelitbangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber Data: BP4D Kab. Manggarai Barat, 2021

2.3.2.2. Keuangan

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah kabupaten. Berikut

adalah perkembangan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Barat

Tabel 2. 129. Opini BPK terhadap LKPD Kab. Manggarai Barat Tahun 2016 – 2020

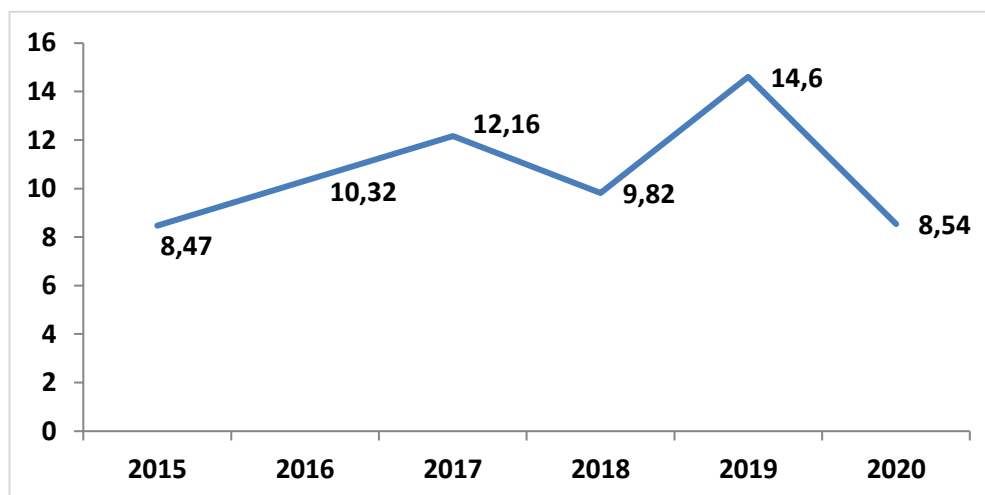
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021

Terlihat bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selalu mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebelum akhirnya pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan status sejalan dengan adanya perbaikan dari sisi Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap undang-undang, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, dan kompetensi sumber daya manusia.

Pada aspek lain, indikator kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Berikut adalah data realiasi PAD terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Manggarai Barat.

Grafik 2. 14. Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2020.



Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2021

Persentase realiasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir. Data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,78%, walaupun menurun pada tahun 2020 karena

pandemic Covid19. Hal tersebut dapat terjadi karena dilakukan perbaikan dalam pengelolaan PAD termasuk optimalisasi potensi PAD yang ada di Kabupaten Manggarai Barat

2.3.2.3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung kualitas manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian yang berkualitas akan mendorong tingkat profesionalitas ASN. Berikut ini adalah kinerja penyelenggaraan urusan kepegawaian di Kabupaten Manggarai Barat:

1. Jumlah ASN

Urusan kepegawaian dilaksanakan dalam rangka penataan dan peningkatan sumber daya aparatur. Hal ini berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen pemerintahan. Secara formal, aparatur pemerintah ini disebut dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan pegawai dengan perjanjian kerja (tenaga kontrak daerah). Data Badan Kepegawaian Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019 menyebutkan bahwa ASN di Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 6.008 orang yang terdiri dari 3.906 PNS dan 2.102 orang tenaga kontrak daerah (35%).

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat, maka diperoleh fakta bahwa rasio ASN dan penduduk mencapai 2,2%. Ini artinya 100 orang penduduk dilayani oleh 2,2 orang ASN. Rasio ini tidaklah ideal karena berada jauh di atas rasio ideal menurut kementerian PAN-RB, yakni sebesar 1,5%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah ASN di Kabupaten Manggarai Barat tergolong sangat banyak.

Tabel 2. 130. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Jumlah Pegawai Negeri Sipil					
Tahun	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
2016	2290	59,07	1587	40,93	3877
2017	2282	57,67	1675	42,33	3957
2018	2139	56,56	1643	43,44	3782
2019	2173	55,63	1733	44,37	3906
2020	2087	55	1707	45	3794

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Jumlah PNS di Kabupaten Manggarai Barat cenderung menurun dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun, sementara rekrutmen baru dibatasi oleh pemerintah pusat. Terlihat pula bahwa jumlah PNS laki-laki di Kabupaten Manggarai Barat lebih banyak dari PNS perempuan, padahal secara rata-rata jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Manggarai Barat lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Hal ini menggambarkan masih sulitnya kaum perempuan Kabupaten Manggarai Barat berkompetisi di berbagai bidang termasuk di pemerintahan.

Padahal dari rasio PNS terhadap penduduk, jumlah PNS di Kabupaten Manggarai Barat masih sangat kurang. Ini sebuah peluang bagi kaum perempuan Kabupaten Manggarai Barat ke depannya. Data BPPKD menyebutkan bahwa rasio PNS terhadap penduduk di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 1,4%. Ini artinya 100 orang penduduk dilayani oleh 1,4% saja. Menurut kriteria kementerian PAN-RB, rasio ini menunjukkan masih kurangnya jumlah PNS di Manggarai Barat untuk mendukung efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Tingkat Pendidikan ASN

Tingkat pendidikan ASN menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kompetensi ASN. Kompetensi ini memiliki korelasi positif terhadap profesionalitas ASN. Jika ditelusuri menurut tingkat pendidikannya, diperoleh data tingkat pendidikan PNS tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. 131. Tingkat Pendidikan PNS tahun 2021

Tingkat pendidikan	Jumlah
Sampai dengan SD	6
SLTP	20
SLTA	809
Diploma I	35
Diploma II	145
Diploma III	784
Diploma IV	61
S1/Sarjana	1963
S2	28
Total	3851

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Tingkat pendidikan ASN di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh lulusan strata 1 atau sarjana yakni hampir 50,97% dari keseluruhan ASN di

Kabupaten Manggarai Barat. Namun tidak sedikit ASN yang telah menyelesaikan strata 2 atau magister, yakni 28 orang.

Tabel 2. 132. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak tahun 2020

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	9	1	10
SLTP	29	10	39
SLTA	455	306	761
Diploma I dan II	14	39	53
Diploma III	102	261	363
S1/S2/S3	578	590	1168
Total	1187	1207	2394

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Jumlah ASN yang berpendidikan SLTA ke bawah ternyata masih cukup banyak dalam organisasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yakni mencapai 21,68%. Dengan tingkat pendidikan seperti ini tentu kompetensi ASN juga cukup terbatas, sehingga jenis pekerjaan yang bisa diberikan kepada mereka juga terbatas. Kondisi ini menjadi persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius.

Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2017 hingga 2020 terlihat bahwa persentase ASN berpendidikan SLTA ke bawah terus berkurang. Sementara komposisi ASN berpendidikan Sarjana dan Magister terus meningkat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari komposisi para PNS. Berikut adalah tabel mengenai jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 133. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2020

Tingkat pendidikan	2017	2018	2019	2020
Sampai dengan SD	21	11	9	7
SLTP	28	28	26	21
SLTA	1198	1040	923	856
Diploma I	53	37	36	34
Diploma II	284	229	186	157
Diploma III	778	753	772	761
Diploma IV	50	46	57	56
S1	1524	1614	1866	1874
S2	21	24	31	28

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Pemerintah daerah menugaskan atau mengirimkan sejumlah aparaturnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya ini untuk meningkatkan kompetensi para ASN. Berikut adalah data mengenai jumlah PNS

yang melanjutkan studi pada tahun 2016 hingga 2020 di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 134. Perkembangan Jumlah PNS yang Melanjutkan Studi Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PNS yang tugas belajar	17	12	13	11	5

Sumber: BKPPD Kab Manggarai Barat 2021

Terdapat sebanyak 58 orang aparatur yang menjalani pendidikan formal lanjutan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 2016. Ada yang sedang mengambil pendidikan S1 maupun S2 di berbagai bidang. Jumlah ini harus segera ditingkatkan secara berkesinambungan untuk mendukung upaya peningkatan kompetensi ASN di Kabupaten Manggarai Barat.

3. Jabatan Struktural dan Diklat PIM

Data Badan Kepegawaian daerah menyebutkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2020, pemerintah daerah mengalami kekurangan aparatur untuk mengisi jabatan struktural yang tersedia dalam organisasi pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Misalnya, pada tahun 2020, dari 612 jabatan struktural yang ada dalam pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, baru terisi sebanyak 574 jabatan struktural. Ini berarti ada 38 jabatan struktural yang kosong atau belum terisi. Masih kurangnya ASN yang memiliki kualifikasi terhadap jabatan tersebut menjadi kendala pengisian lowongan jabatan.

Tabel 2. 135. Persentase Jabatan Struktural yang Terisi di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Jabatan Struktural yang Terisi	612	579	618	587	574
Jumlah Jabatan Struktural yang Ada	733	651	649	610	612
Persentase (%)	83,49	88,94	95,22	96,23	93,79

Sumber: BKPPD Kab. Manggarai Barat, 2021

Demikian pula dari keseluruhan jabatan struktural yang telah terisi, hanya sebagian yang telah mengikuti Diklat kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak pejabat eselon II hingga IV di Kabupaten Manggarai Barat yang menduduki jabatan, namun belum dibekali dengan diklat kepemimpinan sebagaimana disyaratkan aturan. Berikut adalah data mengenai persentase pejabat

eselon II, III dan IV yang telah mengikuti PIM tahun 2016 hingga 2020 di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 136. Persentase Pejabat Eselon II, III dan IV yang Telah Mengikuti PIM Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM II (%)	59,38	75,00	76,67	69,70	25,93
2	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM III (%)	78,83	69,75	71,17	72,56	31,06
3	Persentase Pejabat yang telah Mengikuti PIM IV (%)	24,01	26,48	27,91	25,84	1,81

Sumber: BKPPD Kab. Manggarai Barat, 2021

4. Indeks Profesionalitas ASN

KemenPAN-RB melakukan pengukuran terhadap Indeks Profesionalitas ASN instansi daerah. Indeks profesionalitas ASN memiliki beberapa komponen, seperti kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Barat dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. 137. Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kab. Manggarai Barat Tahun 2019-2020

No	Dimensi	2019	2020
1.	Kualifikasi	11,0	10,86
2.	Kompetensi	15,0	15,19
3.	Kinerja	23,0	25,08
4.	Disiplin	5,0	5,00
Nilai Keseluruhan		54,0	56,13
Kategori		Sangat rendah	Sangat Rendah

Sumber: BPPKD Kab. Manggarai Barat, 2020

Keseluruhan dimensi penilaian, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Barat masuk dalam kategori sangat rendah walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2019. Komponen disiplin menjadi faktor utama yang harus diintervensi untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.2.4. Pengawasan

Inspektorat memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Organisasi inspektorat ini

membutuhkan sejumlah aparatur, yakni auditor yang memiliki kompetensi pembinaan dan pengawasan. Berikut adalah jumlah dan persentase auditor di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 138. Jumlah dan Persentase Auditor Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Auditor	9	17	17	17	17
2	Jumlah Kebutuhan	40	40	40	40	40
3	Persentase (%)	23	43	43	43	43

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2021

Target kebutuhan auditor di kantor inspektorat Kabupaten Manggarai Barat sesuai rekomendasi BPKP adalah sejumlah 40 orang. Namun, baru ada 17 orang auditor atau sekitar 43% dari kebutuhan hingga tahun 2020. Ini artinya, Kabupaten Manggarai Barat masih kekurangan 23 orang auditor untuk mencapai komposisi yang ideal. Dengan sumber daya yang ada dan dibantu dengan auditor eksternal, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan tetap berjalan. Berikut adalah perkembangan jumlah temuan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten dan lembaga pengawas lainnya.

Tabel 2. 139. Jumlah Temuan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Temuan Aparat Pengawas Eksternal (BPK)	23	23	8	6	14
Temuan Aparat Pengawas Internal (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten)	260	245	250	234	131
Jumlah	283	268	258	240	145

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2021

Jumlah temuan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat berfluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020, walaupun secara total jumlahnya terus menurun. Ini menunjukkan pembinaan dan pengawasan internal terus berlangsung dengan baik. Dari jumlah temuan tersebut, data inspektorat menyebutkan bahwa sebagian besar sudah berhasil ditindaklanjuti. Berikut data selengkapnya.

Tabel 2. 140. Jumlah Temuan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Lembaga Pemeriksa	Temuan	Tindak Lanjut Temuan	Sisa	% Tindak Lanjut
1.	2016	BPK RI	8.037.928.481,45	5.749.340.409,85	2.288.588.071,60	71,53
		BPKP	1.974.336.814,30	740.859.297,89	1.233.477.516,41	37,52
		INSPEKTORAT PROV. NTT	421.326.758,00	399.511.158,23	21.815.599,77	94,82
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	985.640.100,13	579.945.708,13	405.694.392,00	58,84
		JUMLAH 1	11.419.232.153,88	7.469.656.574,10	3.949.575.579,78	65,41
2.	2017	BPK RI	4.931.417.373,32	3.632.826.127,93	1.298.591.245,39	73,67
		APIP (BPKP, INSPEK.PROV. NTT, INSPEK KAB. MABAR)	3.160.135.158,43	623.447.515,59	2.536.687.642,84	19,73
		JUMLAH 2	8.091.552.531,75	4.256.273.643,52	3.835.278.888,23	52,60
3.	2018	BPK RI	11.499.947.027,33	8.424.336.708,62	3.075.610.318,71	73,26
		BPKP	1.993.645.602,30	1.171.826.945,90	821.818.656,40	58,78
		INSPEKTORAT PROV. NTT	421.326.758,00	401.826.758,23	19.499.999,77	95,37
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	1.070.619.281,13	739.987.167,04	330.632.114,09	69,12
		JUMLAH 3	14.985.538.668,76	10.737.977.579,79	4.247.561.088,97	71,66
4.	2019	BPK RI	8.893.102.056,59	7.398.955.649,69	1.494.146.406,90	83,20
		BPKP	1.843.412.784,30	1.071.094.127,90	772.318.656,40	58,10
		INSPEKTORAT PROV. NTT	410.991.758,00	401.826.758,23	9.164.999,77	97,77
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	921.809.700,13	699.090.690,04	222.719.010,09	75,84
		JUMLAH 4	12.069.316.299,02	9.570.967.225,86	2.498.349.073,16	79,30
5.	2020	BPK RI	9.290.387.777,23	7.102.309.394,73	2.188.078.382,50	76,45
		BPKP	1.993.645.602,30	1.184.326.945,90	809.318.656,40	59,41
		INSPEKTORAT PROV. NTT	433.825.906,00	414.325.906,23	19.499.999,77	95,51
		INSPEKTORAT KAB. MABAR	1.001.550.042,13	760.168.621,49	241.381.420,64	75,90
		JUMLAH 5	12.719.409.327,66	9.461.130.868,35	3.258.278.459,31	74,38

Sumber: Inspektorat Kab. Manggarai Barat, 2021

Data dari Inspektorat Kab. Manggarai Barat menyatakan bahwa dari 59,2 miliar rupiah hasil temuan aparat pengawasan selama tahun 2016 hingga 2020, baru 41,4 miliar rupiah (69,99%) yang sudah berhasil dikembalikan ke kas Negara, sedangkan sisanya sekitar 17,7 miliar yang belum berhasil ditindaklanjuti. Kondisi ini harus diintervensi dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan lebih lanjut.

2.3.2.5. Sekretariat Daerah

Organisasi pendukung berikutnya adalah sekretariat daerah. Organisasi ini memiliki fungsi koordinatif dan pelayanan administrasi dalam mendukung upaya pencapaian kinerja daerah. Berikut adalah perkembangan pencapaian kinerja daerah sejak tahun 2016-2020.

Tabel 2. 141. Capaian Kinerja Daerah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai AKIP	48,34 (C)	51,54 (CC)	60,17 (B)	60,25 (B)	63,12 (B)	61,60 (B)
Nilai LPPD		Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	
Indeks Pelayanan Publik						
- Dinas PMPTSP		1,66 (D)	1,66 (D)	1,66 (D)	2,48 (C-)	2,48
- Dukcapil		1,66 (D)	1,66 (D)	1,66 (D)	2,44 (C-)	2,92
- RSUD		1,77 (D)	1,77 (D)	1,77 (D)	2,66 (C+)	0
Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik		40 (E)	50 (E)	50 (E)	68,45 (C)	0
Indeks Reformasi Birokrasi	XX	XX	XX	53,76 (CC)	XX	52,31 (CC)

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Manggarai Barat, 2021

Keterangan :

XX : belum dievaluasi oleh Kemenpan RB

0 : Tidak dievaluasi/Covid

LPPD : Belum dinilai oleh Kemendagri RI

Capaian kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020 memiliki nilai 52,31 dengan predikat CC. Capaian tersebut tentunya menunjukkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat belum optimal. Selain itu, indikator capaian SAKIP dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, walaupun sedikit menurun di tahun 2020, tetapi tidak signifikan dengan predikat yang stagnan yaitu B. Hal tersebut diakibatkan oleh masih belum konsistennya akuntabilitas perencanaan dan pelaporan.

Dari segi kualitas pelayanan publik yang diukur di 3 perangkat daerah dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan nilai yang masih rendah dengan rata-rata nilai 2,52 dengan predikat C. Survei Kepuasan Masyarakat belum dilaksanakan secara keseluruhan di setiap perangkat daerah, masih terbatas hanya di 3 perangkat daerah. Hal tersebut terjadi karena tingkat kesadaran perangkat daerah

dalam melaksanakan SKM masih rendah sehingga tidak dapat menggambarkan pelayanan publik secara keseluruhan.

2.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Urusan ini diselenggarakan dalam rangka membina dan menjamin kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Urusan ini sangat erat berkaitan dengan upaya pembinaan ideologi negara dan penanganan kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut adalah data yang mampu menggambarkan capaian urusan ini.

Tabel 2. 142. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kasus Kantibmas di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Kali	1 Kali	2 Kali	3 Kali	-
2	Kegiatan Pembinaan Partai Politik	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	-
3	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditangani			46	23	

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Manggarai Barat, 2020

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP, dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung meningkat, sedangkan pembinaan terhadap partai politik cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Pembinaan diharapkan dapat meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam membina wawasan ideologi kebangsaan dan mendorong pemahaman masyarakat terhadap politik.

Data jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditangani pada tahun 2019 turun sebanyak 23 kasus. Penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut merupakan hal yang positif bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat maupun bagi pengunjung yang datang sehingga dapat semakin mendorong Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata prioritas yang ramah terhadap wisatawan.

Aspek daya saing daerah adalah kondisi kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah atau

Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia. Berikut adalah deskripsi tentang fokus kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.4. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi suatu daerah terkait bagaimana kapasitas ekonomi daerah tersebut bisa menjadi daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di daerah tersebut maupun yang akan masuk. Daya tarik ini diharapkan dapat menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya untuk memicu daya saing daerah antara lain dapat dilihat melalui perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan nilai tukar petani. Berikut adalah deskripsi data mengenai pengeluaran rumah tangga per kapita dan nilai tukar petani di Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.4.1. Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Indikator ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan. Adapun angka konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Manggarai Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 143. Angka Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun		
	2017	2018	2019
Total Pengeluaran Rumah Tangga (Rp)	692.602	839.763	914.129
Jumlah Rumah Tangga (KK)	56.422	57.699	62.964
Rasio	12,3	14,6	14,5

Sumber: Manggarai Barat dalam Angka 2017 hingga 2020

Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat pun juga terus meningkat pada tahun 2016 hingga 2019. Namun demikian, data BPS menyebutkan bahwa persentase terbesar pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat itu terdapat pada konsumsi makanan yang mencapai 54,27% pada tahun 2019. Sementara sisanya terdapat pada konsumsi non-makanan seperti keperluan perumahan dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat belum baik. Semakin tinggi persentase pengeluaran rumah tangga pada komponen makanan, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah persentase pengeluaran pada komponen makanan, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Rata-rata pengeluaran per kapita harus dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional. Hal ini harus dijalankan untuk mengetahui posisi pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat. Jika rata-rata pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT dan nasional, maka diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2. 144. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)

Wilayah	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Manggarai Barat	Kelompok makanan	395.427	473.819	496.097	494.270
	Kelompok non makanan	297.175	365.944	418.033	406.136
Provinsi NTT	Kelompok makanan	399.251	402.922	429.498	442.700
	Kelompok non makanan	282.232	331.786	321.195	351.661
Nasional	Kelompok makanan	527.956	556.899	572.551	603.236
	Kelompok non makanan	508.541	567.818	592.690	622.449

Sumber: Manggarai Barat dalam Angka 2017-2020 dan BPS, 2021

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat terus membaik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata, kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Manggarai Barat terlihat masih sangat jauh. Peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum harus tetap dijalankan secara berkesinambungan untuk memperbaiki kondisi ini.

2.3.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima dan dibayarkan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang

dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2. 145. Nilai Tukar Petani Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
NTP	101,07	102,18	105,86	106,17	96,24
NTP menurut sub-sektor:					
Tanaman pangan	103,43	104,84	108,24	107,85	95,02
Hortikultura	98,78	101,24	102,56	103,06	100,34
Perkebunan	95,10	95,45	103,76	103,02	95,65
Peternakan	105,95	106,18	107,14	109,28	102,60
Perikanan	103,67	105,67	109,43	108,47	93,10

Sumber: Balai Pusat Statistik NTT, 2021

Nilai tukar petani di Provinsi NTT termasuk di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat pada tahun 2015 hingga 2019, akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kemampuan tukar produk-produk pertanian di Provinsi NTT serta daya beli para petaninya terus meningkat. Terlihat bahwa di semua sub-sektor, NTP-nya berada di atas 100. Ini menunjukkan bahwa daya beli para petani selama tahun 2016 hingga 2019 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun 2012.

2.3.5. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Kondisi daya saing suatu daerah dari sisi fasilitas wilayah/infrastruktur berpengaruh pada berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi misalnya tentu berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap aspek ini sangat membantu perkembangan produktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Berikut adalah perkembangan infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat dalam selama tahun 2015 hingga 2020.

2.3.5.1. Transportasi

Aspek transportasi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat hingga saat ini masih difokuskan pada pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur transportasi darat, laut dan udara sebagai konsekuensi dari bentuk morfologis wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan. Di aspek transportasi darat, Dinas Perhubungan menyebutkan bahwa jumlah kendaraan di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 1018 unit. Jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.226,89 km, maka akan diperoleh rasio sebagai berikut.

Tabel 2. 146. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2019

Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
1.226,89 km	1018 unit	1,21

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tahun 2019 mencapai 1:1,21. Artinya 1 kendaraan untuk 1,21 km jalan. Rasio ini termasuk dalam kategori baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian pada tahun-tahun mendatang, antara lain seperti:

1. Masih kurangnya perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang;
2. Belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda yang menyebabkan kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas.

Walaupun demikian, jumlah pergerakan orang dan barang di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2015 hingga 2020 semakin meningkat, baik pergerakan ke luar Kabupaten Manggarai Barat, maupun pergerakan dari ibukota kabupaten ke ibu kota kecamatan, antar kecamatan, serta menuju sentra produksi dan tempat-tempat wisata. Berikut adalah tabel mengenai jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 147. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Penumpang Darat (orang)	871.620
2.	Jumlah penumpang Laut (orang)	219.000
3.	Jumlah penumpang Udara (orang)	73.000

No	Uraian	Jumlah
	Total	1.163.620
4.	Barang bawaan Penumpang angkutan darat (kg)	8.716.200
5.	Barang bawaan Penumpang angkutan laut (kg)	8.760.000
6.	Barang bawaan Penumpang angkutan udara (kg)	1.460.000
	Total	18.936.200

Sumber: Bidang Fispra BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Arus penumpang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 mencapai 1.163.620 orang, dengan porsi terbanyak pada angkutan darat antar kecamatan maupun antar kabupaten di Pulau Flores. Sedangkan total barang bawaan para penumpang ini diperkirakan mencapai 18.936.200 kg.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki satu Bandar Udara, yakni Bandar Udara Komodo. Ringkasan Eksekutif Ranwal RPJMD Mabar Kapasitas terminal bandara ini bisa menampung hingga 1,5 juta penumpang pada saat ini. Sedangkan panjang landasan pacunya (runway) berukuran 2250 x 40 meter dan dapat didarati pesawat kelas menengah jenis Airbus A320 atau Boeing 737-800.

Bandara Komodo akan dikelola oleh sebuah konsorsium bernama PT Cinta Airport Flores (CAF) yang antara lain terdiri dari perusahaan Changi Airports International Pte Ltd dan PT Cardig Aero Service. Dalam perencanaannya, Bandara Komodo akan dikembangkan menjadi salah satu Bandar udara internasional di Provinsi NTT. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 dimulai usaha perpanjangan dan pelebaran landasan pacu, sehingga nanti mampu melayani penerbangan internasional dengan menggunakan pesawat berbadan lebar.

Beberapa maskapai yang saat ini sudah melayani penerbangan dari dan ke Bandar Udara Komodo adalah Garuda Indonesia, Batik Air, Indonesia Air Asia, NAM Air, Citilink, Wings Air, Trans Nusa, dan Susi Air. Adapun rute penerbangannya antara lain penerbangan langsung dari dan menuju Jakarta, Surabaya, Bali, Kupang, Makassar dan beberapa kota kabupaten di Provinsi NTT seperti Bajawa, Ende, dan Maumere.

Di aspek transportasi laut, Kabupaten Manggarai Barat memiliki satu buah pelabuhan penumpang yang bisa disandari Kapal Penumpang PELNI, dan satu

buah pelabuhan penyeberangan. Pembangunan pelabuhan multipurpose yang terletak di Wae Kelambu, Labuan Bajo sudah dimulai pada tahun 2020. Pelabuhan ini diharapkan dapat melayani arus lalu lintas logistik, bongkat muat container, kargo dan curah cair.

2.3.5.2. Hotel dan Restoran

Ketersediaan fasilitas akomodasi dan restoran atau rumah makan adalah komponen daya saing berikutnya. Dari aspek ketersediaan akomodasi, data BPS dan Dinas Pariwisata menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 148. Perkembangan Jumlah Akomodasi Hotel di Manggarai Barat Tahun 2016-2019

Akomodasi Hotel	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Jumlah Hotel	64	76	98	101
Jumlah Kamar	1 030	1 191	1 462	
Jumlah Tempat Tidur	1 697	2 262	3 029	

Sumber: BPS dan Dinas Pariwisata Kab Manggarai Barat, 2020

Jumlah hotel beserta kamar dan tempat tidur di Kabupaten Manggarai Barat terus bertambah dari tahun 2016 hingga 2019. Data Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa klasifikasi hotel-hotel tersebut mulai dari hotel non-bintang, homestay, wisma/penginapan, hotel bintang 1 hingga bintang 4. Berikut adalah data mengenai jumlah hotel berdasarkan klasifikasi dan jumlah tenaga kerjanya pada tahun 2019 di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 149. Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi dan Jumlah Tenaga Kerjanya Tahun 2019

Klasifikasi	Jumlah	
	Hotel	Tenaga Kerja
Homestay	1	2
Wisma/penginapan	20	100
Nonbintang	67	953
Bintang 1	5	149
Bintang 2	1	80
Bintang 3	5	348
Bintang 4	2	285
Jumlah	101	1.915

Sumber: Dinas Pariwisata Kab Manggarai Barat, 2020

Data Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa hingga 2019 jumlah restaurant dan rumah makan di Manggarai Barat sebanyak 109 buah. Dari jumlah itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 731 orang yang terdiri dari 192 orang laki-laki dan 539 orang perempuan. Serapan tenaga kerja lokal untuk hotel dan restaurant harus ditingkatkan secara berkesinambungan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

2.3.5.3. Telekomunikasi

Daya saing daerah juga dapat dilihat dari ketersediaan jaringan telekomunikasi. Data Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa dari total wilayah Manggarai Barat 9.450 km², luas wilayah yang sudah tercover jaringan telekomunikasi mencapai 90%. Berikut adalah data mengenai cakupan dan pengguna layanan telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 150. Cakupan dan Pengguna Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Manggarai Barat

Luas Wilayah Yang Tercoverage (Km²)	Luas Wilayah Keseluruhan (km²)	Cakupan Layanan Telekomunikasi
8.505,00	9.450	90,00%
Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	Jumlah penduduk	Persentase penduduk yang menggunakan HP
219.751	274.689	80
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	Jumlah rumah tangga	Proporsi rumah tangga dengan akses internet
49.621	57.699	86
Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Jumlah Rumah Tangga	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
8.655	57.699	15

Sumber: Dinas Kominfo Kab Manggarai Barat, 2021

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang sudah mencapai 90% dari luas wilayah kabupaten. Kondisi ini mendukung masyarakat Manggarai Barat untuk melakukan komunikasi dan meningkatkan produktivitasnya. Hal ini terlihat dari persentase dan proporsi masyarakat yang memiliki alat-alat komunikasi seperti HP, internet, dan komputer.

2.3.5.4. Tata Ruang

Ditetapkannya RTRW Kabupaten Manggarai Barat melalui Perda No. 9 Tahun 2012 periode 2012-2032, secara langsung dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan (teknis/sektoral, dan operasional), pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, investasi pembangunan dan/atau perijinan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Arahan pemanfaatan ruang (indikasi program) yang tertuang pada RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012, jika dikaitkan dengan periode perencanaan selama RPJMD Tahun 2021-2026 ada beberapa rencana yang bersifat strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

a. Wilayah Pengembangan

1) Penetapan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan pedesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan, sehingga sesuai dengan peruntukkan tanah dan ruangnya.

Total rencana wilayah perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 10 wilayah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan Komodo, wilayah perkotaan yaitu Kelurahan Labuan Bajo dan Kelurahan Wae Kelambu, Desa Gorontalo, dan Desa Batu Cermin. Sedangkan wilayah pedesaan yang terdapat di kecamatan ini sebanyak 10 wilayah.

2. Untuk Kecamatan Sano Nggoang, wilayah perkotaan yaitu Desa Golo Mbu. Sedangkan untuk wilayah pedesaan di kecamatan ini diarahkan sebanyak 10 daerah.
3. Untuk Kecamatan Mbeliling wilayah perkotaannya adalah Desa Cunca Wulang. Sedangkan daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak 12 daerah.
4. Untuk Kecamatan Lembor, wilayah perkotaannya adalah Kelurahan Tangge.
5. Untuk kecamatan Lembor Selatan, wilayah perkotaannya adalah Desa Nanga Lili. Sedangkan daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak 9 daerah.
6. Untuk Kecamatan Welak, wilayah perkotaannya adalah Desa Orong. daerah lainnya tetap menjadi wilayah pedesaan dengan total wilayah pedesaan sebanyak tujuh daerah.
7. Untuk Kecamatan Kuwus, wilayah perkotaannya adalah Kelurahan Nantal dan Kelurahan Golo Ruu. Sedangkan untuk daerah lainnya diarahkan tetap sebagai wilayah pedesaan dimana terdiri atas 15 daerah.
8. Untuk Kecamatan Ndosu, wilayah perkotaannya adalah Desa Tentang. Daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan sistem kegiatan karakter pedesaan sebanyak 9 daerah.
9. Untuk Kecamatan Boleng, wilayah perkotaannya adalah Desa Tanjung Boleng; daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan karakter pedesaan.
10. Untuk Kecamatan Macang Pacar, wilayah perkotaannya adalah Desa Bari. Daerah lainnya tetap sebagai wilayah dengan karakter pedesaan.
11. Untuk Kecamatan Kuwus Barat, wilayah perkotaannya adalah Desa Golo Lewe.
12. Untuk Kecamatan Pacar, wilayah perkotaannya adalah Desa Pacar.

2) Rencana Sistem Perkotaan

Struktur kota-kota yang perlu dikembangkan di Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

1. Berperan sebagai PKN seperti ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang).
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kota Labuan Bajo di Kecamatan komodo.
3. Pusat kegiatan lingkungan (PKL) adalah Kota Wae Nakeng yang terletak di Kecamatan Lembor dengan fungsi sebagai pusat permukiman, perkotaan, perdagangan dan jasa.
4. Pusat Kegiatan Kawasan (PKK) adalah Kota Golo Welu di Kecamatan Kuwus dengan fungsi sebagai pusat permukiman desa, Desa Bari di kecamatan Macang Pacar dengan fungsi yang sama dengan Golo Welu dan Werang dengan fungsi permukiman desa.
5. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah Desa Munting, Tangge, Liang Dara, Nampar Macing, Waning, Tentang, Pacar, Compang, Suru Numbeng, Nanga Lili, Cunca Wulang dan Golo Mbu.

3) Rencana Sistem Perdesaan

Dasar dari rencana pengembangan kawasan perdesaan adalah pertimbangan bahwa umumnya desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah kawasan permukiman yang tidak mengelompok. Pengelompokan terjadi dalam skala yang kecil dengan jaringan jalan tanah, atau jalan lainnya yang berfungsi untuk mencapai area pertanian. Rencana pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Manggarai Barat dititik beratkan pada upaya-upaya penataan kawasan permukiman penduduk yang lebih teratur dan mengelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perambahan penduduk pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi hutan lindung atau fungsi lindung lainnya.

Dengan dilakukannya pengelompokkan kawasan perdesaan akan memudahkan pengembangan jaringan jalan, penempatan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan budaya bagi kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antara perkotaan dengan perdesaan. Sejalan dengan perkembangannya, maka kawasan perdesaanpun diharapkan mampu mempunyai pusat-pusat jasa kolektivitas untuk pelayanan lokal.

Adapun arahan pengembangan kawasan perdesaan di Manggarai Barat sangat terkait dengan potensi alam sumber daya alam yang dimilikinya. Sejalan dengan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai lumbung padi tingkat provinsi, arahan pengembangan pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan perdesaan berbasis potensi dasar yang dimiliki diantaranya melalui:
 - Kawasan pertanian lahan pangan basah yang diarahkan di Kecamatan Lembor, Kecamatan Sano Nggoang dan Kecamatan Macang Pacar;
 - Lahan pertanian berupa kebun campuran;
 - Lahan pertanian di kawasan perdesaan, khususnya di sekitar sarana irigasi;
 - Kawasan pertanian lahan kering terletak hanya ada di Kecamatan Lembor;
 - Kawasan tanaman tahunan yang diarahkan diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pengembangan perdesaan sebagai kawasan agroindustri merupakan sektor yang menunjukkan potensi cukup besar untuk dikembangkan. Pengembangan kawasan agroindustri diarahkan di Kecamatan Lembor, Kecamatan Sano Nggoang, Kecamatan Kuwus dan Macang Pacar. Pembangunan wilayah melalui pendekatan agropolitan dinilai strategis dalam pengembangan komoditas pertanian berwawasan agribisnis dengan sasaran tercapainya sinergi pengembangan antar sektor dan antar wilayah (desa-kota) dalam mendukung program pengembangan di lapangan. Struktur agroindustri harus mampu menjamin efisiensi dan daya saing serta bersifat kompetitif.

Konsep dasar dan menyeluruh dalam pengembangan agropolitan antara lain adalah:

- Menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan agroindustri;

- Melakukan zonasi komoditas dan menetapkan wilayah pengembangan lain yang berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan satelit atau pusat pertumbuhan agribisnis;
- Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, air bersih, dan energi bagi pengembangan kawasan agropolitan maupun pengembangan agribisnis di wilayah *hinterland*.

Dalam pendekatan agropolitan, desa-desa didorong untuk membentuk satuan-satuan usaha yang optimal melalui kebijakan perkreditan dan perpajakan. Satuan usaha pengembangan diorganisasikan ke dalam koperasi, perusahaan kecil dan menengah, dengan mempertimbangkan konsepsi pengembangan sebagai berikut:

- Perkembangan kelembagaan usaha dilakukan melalui pengembangan sistem insentif dan tidak perlu dicampuri oleh pemerintah;
 - Selain berfungsi sebagai pusat agribisnis, kota juga berfungsi sebagai pusat pelayanan agribisnis yang kompetitif;
 - Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu;
 - Pusat agroindustri juga berfungsi sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia untuk teknologi yang berkaitan dengan komoditas utama.
3. Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki, di antaranya melalui:
- Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk kluster;
 - Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri;
 - Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui desa pusat pertumbuhan; serta

- Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
4. Mengingat potensi kelautan yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Barat, maka direncanakan pembentukan kawasan minapolitan yang berlokasi di desa pesisir Kecamatan Komodo. Pengembangan minapolitan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di mana dalam pengelolaannya menjadi wewenang desa tersebut. Adapun arahan pengembangan bagi kawasan ini adalah sebagai berikut:
- Lokasi dan sistem transportasi untuk menunjang keberadaan kawasan minapolitan;
 - Perlunya pengembangan kelembagaan terkait usaha pengembangan kawasan minapolitan agar jelas dalam setiap tahapan produksi dimulai dari input-proses-output yang dihasilkan;

2.3.6. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia ikut berpengaruh pada aspek daya saing Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang baik tentu akan menambah beban bagi daerah, sehingga menghambat investasi dan perkembangan wilayah. Kualitas sumberdaya manusia yang berpengaruh terhadap daya saing daerah dapat dilihat dalam beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 151. Kondisi Sumber Daya Manusia Kab Manggarai Barat Tahun 2017-2020

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	263.207	269.029	274.689	256.300
2.	Jumlah penduduk miskin	49.390	48.530	49.230	49.400
3.	Tingkat pengangguran terbuka	1,30	1,19	2,42	3,72
4.	Indeks Pembangunan Manusia	61,65	62,58	63,50	63,89

Sumber: BPS Kab Manggarai Barat, 2021

Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terlihat terus meningkat, walaupun kondisi penduduk

miskin yang mengalami tren fluktuatif dari tahun ketahun. Selain itu nilai Indeks Pembangunan Manusia juga terus meningkat dan telah mencapai angka 63,89 pada tahun 2020.

2.3.6.1. Rasio Ketergantungan

Aspek berikutnya adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Komposisi ini berguna untuk menjelaskan sebaran usia produktif (15-64 tahun) dan non-produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui ratio ketergantungan (*dependency ratio*). Berikut adalah komposisi penduduk Manggarai Barat berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2. 152. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Kecamatan	0-14	15-64	>=65	Dependency Rasio
1	Macang Pacar	4700	11181	547	46,9
2	Kuwus	3756	9614	805	47,4
3	Lembor	9817	23112	1270	48
4	Sanonggoang	3687	10417	904	44,1
5	Komodo	16150	36749	1770	48,8
6	Boleng	5375	13310	779	46,2
7	Welak	6412	15102	938	48,7
8	Ndoso	5628	13966	867	46,5
9	Lembor Selatan	7188	16798	976	48,6
10	Mbeliling	3746	9790	800	46,4
11	Pacar	5084	11578	595	49
12	Kuwus Barat	3139	7305	582	50,9
	Total	74682	178922	10833	47,8

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Manggarai Barat 2021

Rasio ketergantungan di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 47,8. Ini artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2019, angka ini ternyata menurun cukup signifikan, di mana angka ketergantungan pada tahun 2019 itu mencapai 49,2. Secara teori, penurunan ini tentu berdampak positif karena menggambarkan semakin berkurangnya biaya yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk non-

produktif. Dampaknya, mereka memiliki dana untuk keperluan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.

2.3.6.2. Angka Kriminalitas

Aspek berikutnya yang berkaitan dengan daya saing daerah adalah angka kriminalitas. Data BPS Kabupaten Manggarai Barat menyebutkan bahwa tindak kriminal yang dilaporkan kepada pihak kepolisian dari tahun 2017 hingga 2020 jumlahnya fluktuatif. Angka kriminalitas jumlahnya mencapai 157 kasus pada tahun 2017. Angka tersebut naik secara signifikan menjadi 215 kasus pada tahun 2018. Angka kriminalitas kembali turun menjadi 178 kasus pada tahun 2019, lalu naik menjadi 204 pada tahun 2020. Berikut adalah data tentang angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 2. 153. Tindak Kriminal di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2020

NO	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan	157	215	178	204
2	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	129	153	134	125
3	Jumlah penduduk	263.207	269.029	274.689	256.317
4	Angka kriminalitas	0,06	0,08	0,06	0,07

Sumber: *Manggarai Barat Dalam Angka, 2021*

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, angka kriminalitas di Kabupaten Manggarai Barat memang terlihat sangat kecil. Namun demikian, potensi lonjakan bisa saja terjadi seperti pada tahun 2018. Perkembangan Kabupaten Manggarai Barat, khususnya kota Labuan Bajo yang demikian pesat, tidak saja berpotensi meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kerawanan sosial termasuk tindak kejahatan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi hasil analisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai Barat. Data dan informasi yang digunakan dalam bab ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Evaluasi kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2015-2019 dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan, proporsi dan pertumbuhan atau peningkatan Pendapatan Daerah tahun 2015-2019, serta untuk mengetahui perkembangan atau gambaran belanja daerah tahun 2015-2019. Untuk mendapatkan gambaran rinci atas kinerja pelaksanaan APBD tahun 2015-2019 itu, berikut adalah rincian dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Manggarai Barat lima tahun terakhir.

Tabel 3. 1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN (%)
1	PENDAPATAN	764.394.719.032	882.145.842.702	1.014.699.926.732	1.052.883.489.640	1.163.705.988.098	11,18
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	64.742.881.467	91.068.685.754	88.070.712.628	103.347.460.592	169.954.164.787	29,79
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.260.342.618	46.266.042.061	45.584.736.579	60.588.917.361	108.858.742.225	45,21
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.232.921.179	10.066.515.512	11.789.722.340	30.046.209.951	37.298.311.570	54,59
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.907.135.171	6.539.041.490	4.725.433.263	4.439.744.275	4.168.713.839	-11,3
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.342.482.499	28.197.086.691	25.970.820.447	8.272.589.005	19.628.397.153	21,86
1.2	DANA PERIMBANGAN	590.968.585.859	673.248.533.932	694.499.261.725	766.724.359.546	757.465.726.320	6,57
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.191.901.859	12.342.469.926	11.853.093.741	8.705.767.005	7.696.544.335	-7,96
1.2.2	Dana Alokasi Umum	469.802.864.000	499.046.254.000	496.316.854.000	506.495.526.000	532.878.109.000	3,23
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	109.973.820.000	161.859.810.006	186.329.313.984	251.523.066.541	216.891.072.985	20,88
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	108.683.251.706	117.828.623.016	232.129.952.378	182.811.669.502	236.286.096.991	28,36
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.860.984.791	470.671.890	36.857.342.875	34.500.191.627	61.469.585.201	1.926,23
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN (%)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.219.520.615	16.038.155.126	21.176.193.503	20.418.030.875	26.829.442.790	18,16
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74.268.481.000	100.959.796.000	174.096.416.000	127.893.447.000	147.987.069.000	24,39
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten atau Pemerintah Daerah Lainnya	330.000.000	360.000.000	-	-	-	-22,73
1.3.6	Pendapatan Lainnya	4.265.300	-	-	-	-	-25
2	BELANJA	752.180.221.797	915.585.059.280	1.051.883.092.665	1.050.034.639.774	562.244.813.913	-2,5
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	393.592.779.190	464.504.363.211	511.310.591.469	512.452.116.364	562.244.813.913	9,51
2.1.1	Belanja Pegawai	272.244.857.818	313.820.734.634	307.247.475.514	315.109.666.087	335.441.401.936	5,55
2.1.4	Belanja Hibah	24.628.790.000	4.224.129.000	5.018.400.000	6.188.569.294	10.438.627.000	6,99
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	207.100.000	-	4.355.000.000	6.609.000.000	2.710.942.500	-26,81
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	8.561.116.800	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	94.050.400.372	145.460.940.280	190.924.465.955	180.261.964.138	202.800.458.578	23,21
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.461.631.000	998.559.297	3.765.250.000	4.282.916.845	2.292.267.099	46,23

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN (%)
2.2	BELANJA LANGSUNG	358.587.442.607	451.080.696.069	540.572.501.196	537.582.523.410		-13,73
2.2.1	Belanja Pegawai	27.120.569.399	38.427.619.500	58.331.388.521	67.303.052.336	80.227.087.196	32,02
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.332.881.289	162.995.694.277	211.090.017.942	216.191.676.662	274.059.110.984	19,78
2.2.3	Belanja Modal	196.133.991.919	249.657.382.292	271.151.094.733	254.087.794.413	242.995.865.618	6,31
3	PEMBIAYAAN	120.265.362.529	132.531.676.264	107.884.156.814	70.700.990.881	73.609.541.746	-9,69
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.765.362.529	132.531.676.264	111.884.156.814	70.700.990.881	73.609.541.746	-9,86
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	-	4.000.000.000	-	-	-50

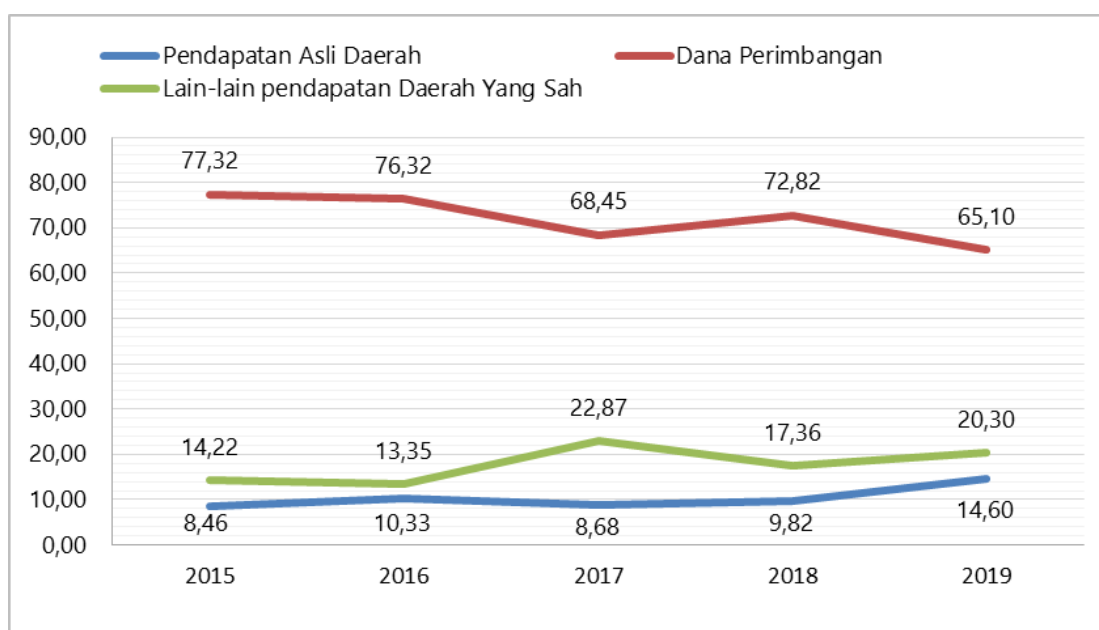
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Data pada tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa rata rata pertumbuhan Pendapatan daerah tahun 2015-2019 adalah sebesar 11,8% di mana rata rata pertumbuhan terbesar terjadi pada jenis Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 29,79% dan jenis Pendapatan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 28,36%. Jenis pendapatan dari Dana Perimbangan terlihat rata-rata pertumbuhannya hanya mencapai 6,57%.

Gambaran kinerja pertumbuhan pendapatan ini juga secara langsung berpengaruh pada kontribusi jenis pendapatan terhadap Pendapatan Daerah sejak tahun 2015-2019. Rata rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah terlihat sebesar 10,38% dan Jenis Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkontribusi sebesar 17,62%. Sementara kontribusi Dana Perimbangan terlihat masih sangat dominan yakni sebesar 72%. Namun demikian, kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 semakin membaik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Grafik 3. 1. Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat cenderung meningkat. Pada tahun 2015 kontribusinya hanya sebesar 8,46% namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,60%. Sebaliknya, kontribusi Dana Perimbangan terlihat cenderung menurun dari tahun ke tahun walaupun jumlahnya masih yang terbesar dalam struktur APBD Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2015 kontribusi Dana Perimbangan tercatat mencapai 77,32% namun pada tahun 2019 menurun menjadi 65,10%. Gambaran ini menunjukkan kinerja Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2019 semakin baik.

Untuk lebih mendalami kinerja Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh struktur pembiayaan dan pendapatan daerah, maka sangat baik jika didalami juga kinerja Obyek dan Rincian Obyek Pendapatan Daerah. Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2. Pertumbuhan dan Kontribusi PAD Tahun 2016-2019

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Rata-rata Pertumbuhan	Rata-rata Kontribusi
		Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi		
1	Pendapatan Asli Daerah	40,66	10,32	(3,29)	8,68	17,35	9,82	64,45	14,60	29,79	10,86
1.2	Pajak Daerah	69,72	50,80	(1,47)	51,76	32,91	58,63	79,67	64,05	45,21	56,31
1.3	Pajak Hotel	39,60	15,92	52,83	24,70	37,68	25,58	64,67	23,44	48,69	22,41
1.4	Pajak Restoran	32,85	11,83	44,42	17,34	32,17	17,25	59,86	15,35	42,33	15,44
1.5	Pajak Hiburan	(1,87)	0,13	102,33	0,27	52,26	0,31	60,24	0,27	53,24	0,24
1.6	Pajak Reklame	46,54	0,30	97,15	0,60	14,08	0,52	16,47	0,34	43,56	0,44
1.7	Pajak Penerangan Jalan	24,79	7,08	28,18	9,21	26,38	8,75	20,77	5,88	25,03	7,73
1.8	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	88,07	17,02	(27,23)	12,57	7,81	10,19	59,70	9,06	32,09	12,21
1.9	Pajak Parkir							(71,23)		(17,81)	0,00
1.10	Pajak Air Bawah Tanah	18,11	0,05	(53,20)	0,02	33,16	0,02	17,68	0,02	3,94	0,03
1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25,30	5,81	(14,70)	5,03	13,44	4,29	86,64	4,46	27,67	4,90
1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	121,80	41,86	(28,78)	30,26	45,27	33,07	123,69	41,18	65,50	36,59
2	Retribusi Daerah	22,27	11,05	17,12	13,39	154,85	29,07	24,14	21,95	54,59	18,86
2.1	Retribusi Jasa Umum	16,18	30,48	18,88	30,94	358,09	55,61	(48,70)	22,98	86,11	35,00
2.2	Retribusi Jasa Usaha	18,19	50,31	24,40	53,43	72,23	36,11	102,51	58,91	54,33	49,69
2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	48,01	18,03	1,55	15,63	35,04	8,28	171,43	18,11	64,01	15,01
2.4	Retribusi Daerah	47,44	1,19	(100,00)	0,00		0,00		0,00	(13,14)	0,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

Secara umum, pertumbuhan PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2019 mengalami tren meningkat. Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 29,79%. Demikian halnya dengan masing-masing komponen pembentuk pajak daerah dan retribusi daerah yang juga tumbuh dalam kurun waktu 2016-2019. Pajak daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 45,21, sedangkan retribusi daerah rata-rata tumbuh sebesar 54,59% pada tahun 2016-2019.

Berkaitan dengan kontribusi komponen pembentuk PAD, pajak daerah memberikan rata-rata kontribusi sebesar 56,31% terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2016-2019. Sementara itu, retribusi daerah rata-rata berkontribusi sebesar 18,86% terhadap PAD pada kurun waktu tersebut.

Sementara itu, kontribusi sektor lain seperti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya mencapai 4,82% dan Lain Lain PAD yang sah sebesar 20,00%. Berkaitan dengan komponen Pajak Daerah, kontribusi terbesar disumbang oleh Pajak Hotel dan Pajak BPHTB.

3.1.1.2. Kinerja Belanja Daerah

Realisasi belanja atas target yang sudah direncanakan dalam APBD tahun tahun 2015 hingga tahun 2019 cukup fluktuatif. Hal ini dapat dilihat secara spesifik pada realisasi jenis belanja pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kinerja penyerapan anggaran pada belanja tidak langsung cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada belanja langsung. Hal ini terjadi karena Belanja Tidak Langsung bukanlah belanja yang berbasis pada program dan kegiatan namun penganggarnya sudah diperhitungkan secara cermat. Namun demikian, realisasi Belanja Tidak Langsung tidak dapat mencapai 100% disebabkan karena penganggaran belanja pegawai yang merupakan proporsi terbesar dalam belanja tidak langsung harus dianggarkan lebih untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji PNS.

Rendahnya kinerja penyerapan belanja langsung disebabkan karena rendahnya realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terutama pada jenis belanja modal dan belanja Barang dan Jasa. Selain itu, adanya perencanaan yang tidak terukur menyebabkan program atau kegiatan tidak dapat

dilaksanakan. Persentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

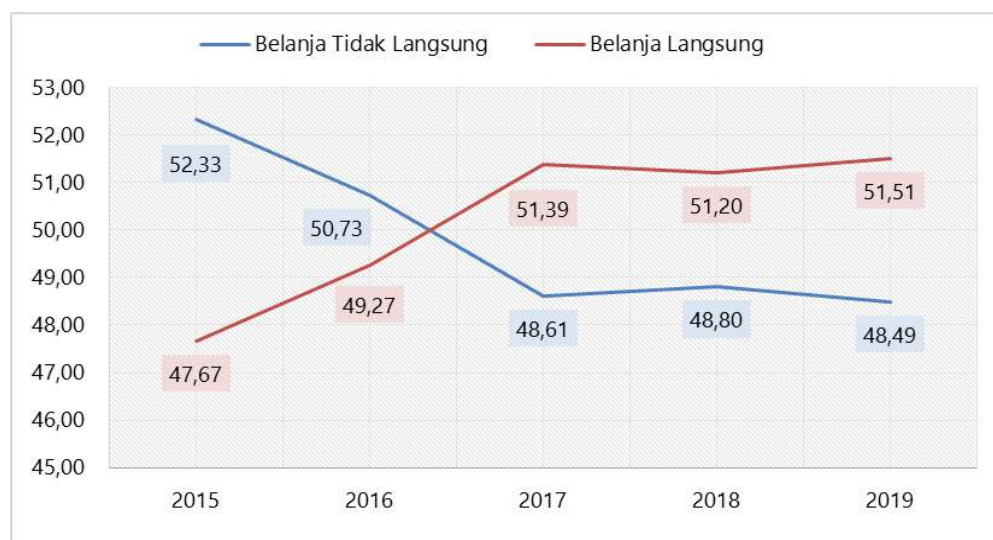
Tabel 3. 3. Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	BELANJA	83,14	94,27	91,38	91,30	93,24
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,95	97,68	94,10	93,89	97,17
1.1.1	Belanja Pegawai	82,49	98,50	93,32	92,93	96,13
1.1.2	Belanja Hibah	99,07	82,85	96,08	92,45	93,63
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	82,84	-	95,19	95,85	91,05
1.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	99,99	100,00	97,92	97,10	99,93
1.1.5	Belanja Tidak Terduga	70,33	16,38	40,28	57,11	64,18
1.2	BELANJA LANGSUNG	79,34	90,91	88,95	88,97	89,83
1.2.1	Belanja Pegawai	93,17	96,39	95,94	96,86	96,56
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,52	90,16	88,99	85,49	88,60
1.2.3	Belanja Modal	74,12	90,58	87,55	90,15	89,18

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019, diolah

Kualitas belanja daerah juga dapat diukur dari seberapa besar porsi belanja untuk Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung. Hal ini penting untuk dievaluasi karena Belanja Tidak Langsung merupakan representasi dari belanja aparatur dan Belanja Langsung merupakan representasi dari belanja publik. Grafik di bawah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa proporsi realisasi belanja Langsung cenderung lebih besar dari belanja tidak langsung atau dengan kata lain realisasi belanja program atau kegiatan (belanja yang berorientasi pada publik) lebih besar dari porsi realisasi belanja tidak langsung (belanja aparatur).

Grafik 3. 2. Proporsi Realisasi Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019, diolah

3.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Aset dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk dalam kategori sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran kinerja neraca Kabupaten Manggarai Barat dalam kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.4 :

Tabel 3. 4. Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 -2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
ASET	1.667.170.274.883,04	1.842.740.631.141,24	1.876.456.659.224,38	2.000.912.146.792,32	2.044.731.502.445,80
ASET LANCAR	160.160.646.513,23	132.527.121.527,09	109.738.447.159,49	120.883.123.254,81	147.614.245.660,66
Kas	132.480.902.099,78	113.590.266.679,40	70.977.103.407,73	73.734.205.104,72	98.297.565.810,95
Kas di Kas Daerah	130.076.519.480,78	107.666.151.282,40	67.268.988.625,77	70.444.829.845,81	67.171.323.425,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.852.500,00	15.757.000,00	50.000,00	1.882.500,00	191.854.525,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	108.232.000,00	146.360.000,00	170.077.468,00	380.459.090,00	822.932.503,00
Kas di Lainnya	382.427,00				
Kas di Bendahara BLUD					
Kas di Rekening JKN	2.287.915.692,00	4.054.235.941,00	1.639.447.811,00	1.635.283.761,00	437.357.451,00
Kas di Bendahara BOS		1.707.762.456,00	1.898.539.502,96	1.271.749.907,91	9.486.514.693,95
Kas yang dibatasi penggunaannya					20.187.583.213,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	3.382.721.085,48	9.037.145.009,38	9.564.063.845,15	9.076.739.574,45	16.580.785.665,78
Piutang Pendapatan Asli Daerah	3.800.133.383,84	5.407.908.509,84	8.319.101.011,84	12.363.667.614,84	20.157.030.097,70
Piutang Deviden					
Piutang Dana Bagi Hasil	434.472.338,00	4.946.491.619,70	3.340.452.124,88	347.632.350,00	2.062.688.321,12
Piutang Pendapatan Dana BOS					
Penyisihan Piutang Pendapatan	(851.884.636,36)	(1.317.255.120,17)	(2.095.489.291,57)	(3.634.560.390,39)	(5.638.932.753,04)
Piutang lain-lain					
Penyisihan Piutang Lainnya					
Beban Dibayar di Muka	23.791.666,67	22.125.000,00	65.970.833,00	77.262.500,00	89.575.000,00
Persediaan	24.273.231.661,30	9.877.584.838,31	29.131.309.073,61	37.994.916.075,64	32.646.319.183,93

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
INVESTASI JANGKA PANJANG	26.201.210.000,00	26.000.000.000,00	71.699.116.197,00	70.018.341.772,00	76.021.927.737,00
Investasi Non Permanen	201.210.000,00	0,00	198.758.625,00	97.547.625,00	88.118.250,00
Investasi Dana Bergulir	201.210.000,00	0,00	198.758.625,00	97.547.625,00	88.118.250,00
Dana bergulir diragukan tertagih					
Investasi Permanen	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	71.500.357.572,00	69.920.794.147,00	75.933.809.487,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	71.500.357.572,00	69.920.794.147,00	75.933.809.487,00
ASET TETAP	1.398.000.121.662,00	1.456.215.216.704,00	1.637.840.862.706,00	1.733.025.130.397,00	1.779.917.523.303,00
Tanah	140.427.490.506,00	178.587.458.331,00	185.782.092.141,00	222.572.721.841,00	230.850.948.321,00
Peralatan dan Mesin	136.236.552.311,00	149.879.577.712,00	173.280.440.391,00	202.134.809.980,00	248.077.637.338,00
Bangunan Gedung	417.505.167.238,00	450.908.608.752,00	559.454.963.448,00	597.985.256.656,00	642.171.740.875,00
Jalan, Jembatan dan Jaringan	1.137.522.538.747,00	1.037.366.098.924,00	1.213.336.421.190,00	1.348.318.246.594,00	1.479.087.414.443,00
Aset Tetap Lainnya	2.160.846.300,00	2.302.811.400,00	2.352.221.400,00	1.241.509.000,00	1.151.934.200,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.484.536.384,00	14.339.621.861,00	10.429.639.336,00	20.953.642.453,00	26.079.644.829,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(441.337.009.824,00)	(377.168.960.276,00)	(506.794.915.200,00)	(660.181.056.127,00)	(847.501.796.703,00)
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	82.808.296.707,81	227.998.292.910,15	57.178.233.161,89	76.985.551.368,51	41.177.805.745,14
Kemitraan dengan pihak Ketiga					
TPTGR	142.776.216,00	604.075.473,89	1.546.481.871,89	1.735.330.950,51	1.736.472.999,14
Tagihan Penjualan Angsuran					
Aset Tidak Berwujud	878.446.019,00	742.194.079,00	789.808.806,00	1.602.443.285,00	5.406.007.967,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				(69.772.543,00)	(467.777.411,00)
Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusnya					

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Aset Lain-Lain	81.787.074.472,81	226.652.023.357,26	54.841.942.484,00	73.717.549.676,00	34.503.102.190,00
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.667.170.274.883,04	1.842.740.631.141,24	1.876.456.659.224,38	2.000.912.146.792,32	2.044.731.502.445,80
KEWAJIBAN	8.216.202.261,00	1.072.064.900,00	1.282.168.494,96	669.283.813,72	25.237.593.565,99
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.216.202.261,00	1.072.064.900,00	1.282.168.494,96	669.283.813,72	25.237.593.565,99
Utang PFK	1.042.336,00	6.733.600,00	276.032.969,96	184.364.358,55	321.330.464,59
Utang Bunga					
Pendapatan diterima di muka	36.337.500,00	28.982.500,00	13.387.500,00	194.528.254,17	258.756.904,17
Utang Pajak					
Utang Langganan		0,00	44.352.125,00	280.775.301,00	104.459.753,00
Utang kepada pihak ketiga/rekanan					
Utang pengadaan aset tetap/kepada pihak ketiga	8.178.822.425,00	1.036.348.800,00	948.395.900,00	9.615.900,00	24.553.046.444,23
Utang Lain-lain					
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	1.658.954.072.622,04	1.841.668.566.241,24	1.875.174.490.729,42	2.000.242.862.978,60	2.019.493.908.879,81

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019, diolah

Adapun Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat periode 2016- 2019 digambarkan melalui Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3. 5. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN
ASET	10,53	1,83	6,63	2,19	
ASET LANCAR	-17,25	-17,2	10,16	22,11	-0,55
Kas	-14,26	-37,51	3,88	33,31	-3,64
Kas di Kas Daerah	-17,23	-37,52	4,72	-4,65	-13,67
Kas di Bendahara Penerimaan	100,66	-99,68	3.665,00	10.091,48	3.439,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,23	16,2	123,7	116,3	
Kas di Lainnya	-100				-100
Kas di Bendahara BLUD					
Kas di Rekening JKN	77,2	-59,56	-0,25	-73,25	-13,97
Kas di Bendahara Dana BOS		11,17	-33,01	645,94	208,03
Kas yang dibatasi penggunaannya					
Investasi Jangka Pendek					-
Deposito					-
Piutang	167,16	5,83	-5,1	82,67	62,64
Piutang Pendapatan Asli Daerah	42,31	53,83	48,62	63,03	51,95
Piutang Deviden					-
Piutang Dana Bagi Hasil	1.038,51	-32,47	-89,59	493,35	352,45
Piutang Pendapatan Dana BOS					-
Penyisihan Piutang Pendapatan	54,63	59,08	73,45	55,15	60,58
Piutang lain-lain					-
Penyisihan Piutang Lainnya					-
Beban Dibayar di Muka	-7,01	198,17	17,12	15,94	56,06
Persediaan	-59,31	194,92	30,43	-14,08	37,99
INVESTASI JANGKA PANJANG	-0,77	175,77	-2,34	8,57	45,31

URAIAN	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN
Investasi Non Permanen	-100		-50,92	-9,67	-53,53
Investasi Dana Bergulir	-100		-50,92	-9,67	-53,53
Dana bergulir diragukan tertagih					-
Investasi Permanen	0	175	-2,21	8,6	45,35
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	175	-2,21	8,6	45,35
ASET TETAP	4,16	12,47	5,81	2,71	6,29
Tanah	27,17	4,03	19,8	3,72	13,68
Peralatan dan Mesin	10,01	15,61	16,65	22,73	16,25
Bangunan Gedung	8	24,07	6,89	7,39	11,59
Jalan, Jembatan dan Jaringan	-8,8	16,96	11,12	9,7	7,25
Aset Tetap Lainnya	6,57	2,15	-47,22	-7,21	-11,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	161,46	-27,27	100,9	24,46	64,89
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-14,54	34,37	30,27	28,37	19,62
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan					
ASET LAINNYA	175,33	-74,92	34,64	-46,51	22,14
Kemitraan dengan pihak Ketiga					
TPTGR	323,09	156,01	12,21	0,07	122,84
Tagihan Penjualan Angsuran					
Aset Tidak Berwujud	-15,51	6,42	102,89	237,36	82,79
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				570,43	142,61
Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusnya					
Aset Lain-Lain	177,12	-75,8	34,42	-53,2	20,64
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	10,53	1,83	6,63	2,19	5,3
KEWAJIBAN	-86,95	19,6	-47,8	3.670,84	888,92
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-86,95	19,6	-47,8	3.670,84	888,92

URAIAN	2016	2017	2018	2019	RATA RATA PERTUMBUHAN
Utang PFK	546,01	3.999,34	-33,21	74,29	1.146,61
Utang Bunga					
Pendapatan diterima di muka	-20,24	-53,81	1.353,06	33,02	328,01
Utang Pajak					
Utang Langganan			533,06	-62,8	235,13
Utang kepada pihak ketiga/rekanan					
Utang pengadaan aset tetap/kepada pihak ketiga	-87,33	-8,49	-98,99	255.238,00	63.760,80
Utang Lain-lain					
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri					
Utang Luar Negeri					
EKUITAS	11,01	1,82	6,67	0,96	5,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019, diolah.

3.1.2.1. Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang dan termasuk dalam sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel di atas terlihat bahwa aset pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat selama periode tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,30%.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Kewajiban Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencapai Rp. 25.237.593.565,99. Rata-rata kewajiban pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah utang atau kewajiban kepada pihak ketiga.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dari data di atas terlihat perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2018-2019 tumbuh rata-rata sebesar 5,12%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksudkan dalam uraian ini adalah proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan. Untuk itu, pada tabel di bawah ini akan diuraikan obyek belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sejak tahun 2015 – 2019.

Tabel 3. 6. Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	BELANJA	344.722.611.076,59	405.415.592.896,00	429.574.813.560,00	452.602.898.982,80	507.212.663.376,00
1.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	272.244.857.817,59	313.820.734.634,00	307.247.475.514,00	315.109.666.087,00	334.461.151.936,00
1.1.2	Belanja Gaji dan Tunjangan	221.417.100.371,00	246.336.684.292,00	233.509.307.328,00	239.412.723.593,00	250.091.219.497,00
1.1.3	Belanja Tambahan Penghasilan	6.316.208.250,00	15.448.131.927,00	16.638.319.053,00	16.557.747.698,00	16.449.757.131,00
1.1.4	Belanja Penerimaan Anggotadan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.735.533.332,00	1.864.333.330,00	3.171.999.996,00	2.655.399.996,00	2.668.000.000,00
1.1.5	Belanja pemungutan Pajak Daerah	1.238.664.904,59	1.405.065.145,00	1.458.045.524,00	1.744.987.816,00	3.348.005.589,00
1.1.6	Tunjangan Profesi Guru	38.300.350.960,00	45.747.019.940,00	39.124.177.100,00	41.712.260.400,00	44.710.757.680,00
1.1.7	Tambahan Penghasilan Guru	3.237.000.000,00	3.019.500.000,00	2.986.500.000,00	2.188.526.093,00	
1.1.8	Tunjangan Khusus Guru	-	-	10.359.126.513	10.838.020.491	17.193.412.039
1.2	BELANJA LANGSUNG	72.477.753.259,00	91.594.858.262,00	122.327.338.046,00	137.493.232.895,80	172.751.511.440,00
1.2.1	Belanja Honorarium PNS dan Non PNS	26.933.734.224,00	38.238.712.000,00	48.399.742.900,00	59.468.259.100,00	74.729.170.644,00
1.2.2	Belanja Uang Lembur**)	136.285.175,00	175.445.500,00	154.925.000,00	174.887.000,00	179.664.000,00
1.2.3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	429.000.000,00	455.000.000,00	596.152.000,00	661.500.000,00	697.652.000,00
1.2.4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	717.630.000,00	2.294.567.028,00	1.549.248.000,00	1.237.985.740,00	3.598.393.020,00
1.2.5	Belanja makanan dan minuman	8.589.301.378,00	9.203.656.846,00	12.288.236.254,00	14.201.171.632,00	16.850.999.681,00
1.2.6	Belanja pakaian dinas dan atributnya	208.500.000,00	436.916.000,00	388.565.909,00	120.000.000,00	674.871.000,00
1.2.7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	61.625.000,00	131.000.000,00	150.898.500,00	102.705.000,00	255.230.000,00
1.2.8	Belanja perjalanan dinas	29.804.565.687,00	35.646.860.072,00	48.648.365.825,00	51.586.994.857,00	62.376.552.490,00
1.2.9	Belanja Modal Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dan Meja Kursi	5.597.111.795,00	5.012.700.816,00	10.151.203.658,00	9.939.729.566,80	13.388.978.605,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2019, diolah

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran APBD (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan) dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 7. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	TAHUN 2017	429.574.813.560	1.055.883.092.665	40,68
2	TAHUN 2018	452.602.898.983	1.050.034.639.774	43,10
3	TAHUN 2019	507.212.663.376	1.159.526.877.711	43,74

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019, diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 8. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.014.699.926.731,51	1.052.883.489.639,64	1.163.705.988.098,19

No	Uraian	Realisasi Tahun		
		2017	2018	2019
	Dikurangi dengan			
2	Realisasi Belanja Daerah	1.051.883.092.665,14	1.050.034.639.774,24	1.159.526.877.711,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000,00	0,00	0
		(41.183.165.933,63)	2.848.849.865,40	4.179.110.387,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2019, diolah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proyeksi APBD Kabupaten Manggarai Barat menggunakan teknik peramalan (*forecasting*). Teknis peramalan merupakan proses memperkirakan secara sistematis tentang kondisi di masa mendatang berdasarkan data (*series*) 5 tahun sebelumnya agar dihasilkan proyeksi yang mendekati presisi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Barat

Proyeksi APBD Kabupaten Manggarai Barat selama 1 (satu) periode ke depan mempertimbangkan beberapa kondisi. *Pertama*, *trend* rata-rata pertumbuhan dan tingkat realisasi tiap komponen APBD pada periode 2015-2020. *Kedua*, adanya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai respon atas kemunculan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). *Ketiga*, mempertimbangkan potensi perkembangan

perekonomian baik dari tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi, serta perubahan regulasi keuangan daerah yang berimplikasi pada APBD. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 9. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
4	PENDAPATAN DAERAH	1,252,277,476,341	1,367,022,804,604	1,582,480,639,690	1,861,262,385,032	2,207,426,968,822	2,576,805,941,374	15.57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	270,410,736,984	339,650,864,317	498,794,133,251	718,472,169,569	1,002,585,861,291	1,306,799,156,691	37.28
4.1.1	Pajak Daerah	170,601,381,984	229,564,520,189	358,402,063,745	538,333,063,370	782,834,471,187	1,054,032,111,795	44.19
4.1.1.06	Pajak Hotel	53,011,296,359	62,562,500,000	119,000,000,000	210,937,500,000	340,000,000,000	484,000,000,000.00	48.69
4.1.1.07	Pajak Restoran	33,150,000,000	43,793,750,000	83,300,000,000	147,656,250,000	238,000,000,000	338,800,000,000.00	42.33
4.1.1.08	Pajak Hiburan	660,000,000	1,000,000,000	1,400,000,000	1,960,000,000	2,744,000,000	3,841,600,000	53.24
4.1.1.09	Pajak Reklame	1,000,000,000	5,000,000,000	8,750,000,000	14,000,000,000	21,700,000,000	32,550,000,000	43.56
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	8,500,000,000	9,775,000,000	11,241,250,000	12,927,437,500	14,866,553,125	17,096,536,094	25.03
4.1.1.14	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	16,500,000,000	23,100,000,000	34,650,000,000	38,115,000,000	41,926,500,000	46,119,150,000	32.09
4.1.1	Pajak Parkir	-	15,000,000	18,750,000	23,437,500	29,296,875	36,621,094	(17.81)
4.1.1	Pajak Air Bawah Tanah	35,000,000	36,750,000	38,587,500	40,516,875	42,542,719	44,669,855	3.94
4.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20,245,085,625	20,531,520,189	26,690,976,245	32,029,171,495	36,833,547,219	40,516,901,941	27.67
4.1.1.15	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37,500,000,000	63,750,000,000	73,312,500,000	80,643,750,000	86,692,031,250	91,026,632,813	65.50
4.1.2	Retribusi Daerah	69,640,000,000	72,491,787,503	95,727,921,133	118,250,146,699	135,470,758,641	145,915,366,074	16.39
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	21,070,000,000	16,157,612,331	21,812,776,646	27,265,970,808	31,355,866,429	33,707,556,411	11.84
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	38,575,000,000	47,790,207,188	64,516,779,704	80,645,974,630	92,742,870,824	99,698,586,136	21.28
4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	9,995,000,000	8,543,967,985	9,398,364,783	10,338,201,261	11,372,021,387	12,509,223,526	5.10
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,500,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000	70,000,000,000	75.78

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4,500,000,000	10,000,000,000	15,000,000,000	30,000,000,000	50,000,000,000	70,000,000,000	75.78
4.1.4	Lain Lain PAD Yang Sah	25,669,355,000	27,594,556,625	29,664,148,372	31,888,959,500	34,280,631,462	36,851,678,822	7.50
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	906,109,138,851	991,396,240,287	1,045,912,021,439	1,103,127,006,213	1,163,194,737,819	1,226,278,096,485	6.25
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	708,789,698,000	745,661,649,300	784,452,832,392	825,263,202,351	868,197,922,864	913,367,637,792	5.20
4.2.1.01	BAGI HASIL PAJAK	6,391,056,000	6,710,608,800	7,046,139,240	7,398,446,202	7,768,368,512	8,156,786,938	5.00
	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	2,457,690,000	2,580,574,500	2,709,603,225	2,845,083,386	2,987,337,556	3,136,704,433	5.00
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau							
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3,933,366,000	4,130,034,300	4,336,536,015	4,553,362,816	4,781,030,957	5,020,082,504	5.00
4.2.1.02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SDA	1,262,494,000	1,325,618,700	1,391,899,635	1,461,494,617	1,534,569,348	1,611,297,815	5.00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	1,128,319,000	1,184,734,950	1,243,971,698	1,306,170,282	1,371,478,796	1,440,052,736	5.00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	130,297,000	136,811,850	143,652,443	150,835,065	158,376,818	166,295,659	5.00
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	-	-	-	-	-	-	
	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	3,878,000	4,071,900	4,275,495	4,489,270	4,713,733	4,949,420	5.00
4.2.1.03	DANA ALOKASI UMUM	511,595,143,000	538,607,366,550	567,045,835,504	596,985,855,619	628,506,708,796	661,691,863,020	5.28

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
	Dana Alokasi Umum	511,595,143,000	538,607,366,550	567,045,835,504	596,985,855,619	628,506,708,796	661,691,863,020	5.28
4.2.1.04	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	98,920,539,000	103,866,565,950	109,059,894,248	114,512,888,960	120,238,533,408	126,250,460,078	5.00
	DAK Fisik Reguler	61,906,381,000	65,001,700,050	68,251,785,053	71,664,374,305	75,247,593,020	79,009,972,671	5.00
	A. Bidang Pendidikan	15,237,917,000	15,999,812,850	16,799,803,493	17,639,793,667	18,521,783,350	19,447,872,518	5.00
	B. Bidang Kesehatan	27,177,043,000	28,535,895,150	29,962,689,908	31,460,824,403	33,033,865,623	34,685,558,904	5.00
	C. Bidang Jalan	12,491,421,000	13,115,992,050	13,771,791,653	14,460,381,235	15,183,400,297	15,942,570,312	5.00
	D. Bidang Transportasi Perdesaan	7,000,000,000	7,350,000,000	7,717,500,000	8,103,375,000	8,508,543,750	8,933,970,938	5.00
	DAK Fisik Reguler	37,014,158,000	38,864,865,900	40,808,109,195	42,848,514,655	44,990,940,387	47,240,487,407	5.00
	Bidang Kesehatan (Keluarga Berencana)	350,000,000	367,500,000	385,875,000	405,168,750	425,427,188	446,698,547	5.00
	Jalan Tematik Ketahanan Pangan	9,435,427,000	9,907,198,350	10,402,558,268	10,922,686,181	11,468,820,490	12,042,261,514	5.00
	Air Minum	3,371,982,000	3,540,581,100	3,717,610,155	3,903,490,663	4,098,665,196	4,303,598,456	5.00
	Sanitasi (Tematik Penurunan Angka Stunting)	5,417,627,000	5,688,508,350	5,972,933,768	6,271,580,456	6,585,159,479	6,914,417,453	5.00
	Perumahan dan Permukiman	1,359,178,000	1,427,136,900	1,498,493,745	1,573,418,432	1,652,089,354	1,734,693,822	5.00
	Irigasi	6,798,253,000	7,138,165,650	7,495,073,933	7,869,827,629	8,263,319,011	8,676,484,961	5.00
	Pertanian	2,050,000,000	2,152,500,000	2,260,125,000	2,373,131,250	2,491,787,813	2,616,377,203	5.00
	Kelautan dan Perikanan	1,052,100,000	1,104,705,000	1,159,940,250	1,217,937,263	1,278,834,126	1,342,775,832	5.00
	Pariwisata	2,131,091,000	2,237,645,550	2,349,527,828	2,467,004,219	2,590,354,430	2,719,872,151	5.00
	Lingkungan Hidup	5,048,500,000	5,300,925,000	5,565,971,250	5,844,269,813	6,136,483,303	6,443,307,468	5.00
4.2.1.05	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	90,620,466,000	95,151,489,300	99,909,063,765	104,904,516,953	110,149,742,801	115,657,229,941	5.00
	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,013,600,000	2,114,280,000	2,219,994,000	2,330,993,700	2,447,543,385	2,569,920,554	5.00

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
	DAK Tunjangan Profesi Guru	46,341,966,000	48,659,064,300	51,092,017,515	53,646,618,391	56,328,949,310	59,145,396,776	5.00
	DAK Tambahan Penghasilan Guru	657,000,000	689,850,000	724,342,500	760,559,625	798,587,606	838,516,987	5.00
	DAK Tunjangan Khusus Guru	7,482,541,000	7,856,668,050	8,249,501,453	8,661,976,525	9,095,075,351	9,549,829,119	5.00
	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	21,092,554,000	22,147,181,700	23,254,540,785	24,417,267,824	25,638,131,215	26,920,037,776	5.00
	DAK Akreditasi Puskesmas	1,238,913,000	1,300,858,650	1,365,901,583	1,434,196,662	1,505,906,495	1,581,201,819	5.00
	DAK Akreditasi Labkesda	293,838,000	308,529,900	323,956,395	340,154,215	357,161,925	375,020,022	5.00
	DAK Jaminan Persalinan	3,497,639,000	3,672,520,950	3,856,146,998	4,048,954,347	4,251,402,065	4,463,972,168	5.00
	DAK Bantuan Operasional KB	3,723,879,000	3,910,072,950	4,105,576,598	4,310,855,427	4,526,398,199	4,752,718,109	5.00
	DAK Data Pelayanan Adm. Kependudukan	1,994,835,000	2,094,576,750	2,199,305,588	2,309,270,867	2,424,734,410	2,545,971,131	5.00
	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	345,900,000	363,195,000	381,354,750	400,422,488	420,443,612	441,465,792	5.00
	DAK Pelayanan Kepariwisata	862,578,000	905,706,900	950,992,245	998,541,857	1,048,468,950	1,100,892,398	5.00
	DAK Fasilitas Penanaman Modal	392,223,000	411,834,150	432,425,858	454,047,150	476,749,508	500,586,983	5.00
	DAK Ketahanan Pangan dan Pertanian	683,000,000	717,150,000	753,007,500	790,657,875	830,190,769	871,700,307	5.00
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	171,176,377,000	216,977,220,750	229,826,081,788	243,067,385,877	256,720,755,171	270,806,792,930	9.91
4.2.2.03	DANA PENYESUAIAN	171,176,377,000	216,977,220,750	229,826,081,788	243,067,385,877	256,720,755,171	270,806,792,930	9.91
	Dana Insentif Daerah	21,674,262,000	60,000,000,000	65,000,000,000	70,000,000,000	75,000,000,000	80,000,000,001	41.33

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
	Alokasi Dana Desa	149,502,115,000	156,977,220,750	164,826,081,788	173,067,385,877	181,720,755,171	190,806,792,929	5.00
4.2.3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	26,143,063,851	28,757,370,236	31,633,107,260	34,796,417,986	38,276,059,784	42,103,665,763	10.00
4.2.3.01	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	26,143,063,851	28,757,370,236	31,633,107,260	34,796,417,986	38,276,059,784	42,103,665,763	10.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4,263,478,250	4,689,826,075	5,158,808,683	5,674,689,551	6,242,158,506	6,866,374,356	10.00
	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,762,429,809	4,138,672,790	4,552,540,069	5,007,794,076	5,508,573,483	6,059,430,832	10.00
	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6,854,285,480	7,539,714,028	8,293,685,431	9,123,053,974	10,035,359,371	11,038,895,308	10.00
	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	14,232,050	15,655,255	17,220,781	18,942,859	20,837,144	22,920,859	10.00
	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	11,248,638,262	12,373,502,088	13,610,852,297	14,971,937,527	16,469,131,279	18,116,044,407	10.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75,757,600,506	35,975,700,000	37,774,485,000	39,663,209,250	41,646,369,713	43,728,688,198	(6.50)
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	75,757,600,506	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	(10.50)
	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	39,781,900,506	-	-	-	-	-	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	39,781,900,506	-	-	-	-	-	

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
	HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	-
	Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	35,975,700,000	-
5	BELANJA	1,521,819,764,750	2,030,061,582,387	1,456,923,957,267	1,622,763,427,219	1,984,659,020,107	2,364,806,279,780	11.60
	SURPLUS/(DEFISIT)	(269,542,288,409)	(663,038,777,783)	125,556,682,423	238,498,957,813	222,767,948,715	211,999,661,594	21.11
6	PEMBIAYAAN DAERAH	269,542,288,409	663,038,777,783	(125,556,682,423)	(238,498,957,813)	(222,767,948,715)	(211,999,661,594)	21.11
6.1	Penerimaan Pembiayaan	292,282,080,075	750,000,000,000	-	-	-	-	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	42,282,080,075	-	-	-	-	-	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	250,000,000,000	750,000,000,000					
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	22,739,791,666	86,961,222,217	125,556,682,423	238,498,957,813	222,767,948,715	211,999,661,594	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	19,000,000,000	30,000,000,000	19,500,000,000	14,800,330,000	10,000,000,000	10,000,000,000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3,739,791,666	46,961,222,217	106,056,682,423	223,698,627,813	212,767,948,715	201,999,661,594	

KODE AKUN	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-rata Pertumbuhan
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah							
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		10,000,000,000					

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (telah diaudit) dan Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, diolah

Proyeksi pendapatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15.57%. Sementara itu, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 37.28%. Seluruh komponen PAD diproyeksikan tumbuh dalam kurun waktu 2021-2026. Komponen pajak daerah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 44.19%, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 16.39% selama tahun 2021-2026. Sementara itu, Pajak daerah diproyeksikan memiliki proporsi terhadap PAD sebesar 71.11%, sedangkan proporsi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 19.25% dalam satu periode.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupaya untuk melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pada 1 periode ke depan, misalnya dengan meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahun. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan pada masing-masing komponen pajak dan retribusi daerah selama tahun 2021-2026.

APBD Kabupaten Manggarai Barat diproyeksikan mengalami defisit pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan APBD mengalami surplus pada tahun 2023-2026. Defisit anggaran disebabkan oleh adanya kebijakan pemulihan perekonomian dalam masa pandemi COVID-19 dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran akan ditutup menggunakan SiLPA tahun 2021 dan penerimaan pinjaman daerah pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, surplus anggaran akan digunakan untuk pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Penyertaan Modal Daerah salah satunya dialokasikan pengembangan Perumda Bidadari di mana Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melimpahkan kewenangan pengelolaan aset strategis daerah kepada Perumda Bidadari paling lambat mulai Bulan Agustus tahun 2021.

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah dalam mendanai belanja periodik wajib mengikat dan prioritas utama serta program pembangunan jangka menengah daerah.

3.3.2.1. Perhitungan SiLPA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran atau SiLPA adalah selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran jika realisasi penerimaan lebih sedikit daripada realisasi belanja daerah. Selain itu, SiLPA digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan kewajiban lainnya yang belum dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, hasil proyeksi SiLPA dapat menunjukkan kapasitas riil keuangan suatu daerah. Hasil proyeksi SiLPA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat diketahui melalui tabel berikut.

Tabel 3. 10. Hasil Perhitungan SiLPA Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	42,282,080,075	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (telah diaudit) dan Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, diolah.

SiLPA Kabupaten Manggarai Barat hanya terdapat pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022-2026 diproyeksikan tidak terdapat SiLPA. SiLPA tahun 2021 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2021 dan 2022.

3.3.2.2. Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama

Perhitungan proyeksi belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama digunakan sebagai dasar menyusun kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah mencukupi untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan misalnya belanja pegawai dan

belanja barang dan jasa. Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11. Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Belanja Mengikat	656,030,267,870.00	689,423,909,501.36	732,995,055,979.33	781,007,048,641.46	834,007,217,998.10	890,136,519,011.83
	Belanja Pegawai	398,217,601,927.00	420,119,570,032.99	443,226,146,384.80	467,603,584,435.96	493,321,781,579.94	520,454,479,566.84
	Belanja Operasional Rutin*	32,238,824,389.00	33,044,794,998.73	34,697,034,748.66	36,431,886,486.09	38,253,480,810.40	40,166,154,850.92
	Belanja Transfer**	225,573,841,554.00	236,259,544,469.65	255,071,874,845.87	276,971,577,719.40	302,431,955,607.76	329,515,884,594.07
B	Pengeluaran Pembiayaan	22,739,791,666.00	86,961,222,217.00	125,556,682,423.00	238,498,957,813.20	222,767,948,715.40	211,999,661,593.60
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan modal daerah	19,000,000,000.00	30,000,000,000.00	19,500,000,000.00	14,800,330,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	3,739,791,666.00	46,961,222,217.00	106,056,682,423.00	223,698,627,813.20	212,767,948,715.40	201,999,661,593.60
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	10,000,000,000.00	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	678,770,059,536.00	776,385,131,718.36	858,551,738,402.33	1,019,506,006,454.66	1,056,775,166,713.50	1,102,136,180,605.43

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (telah diaudit) dan Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, diolah

Keterangan:

*Belanja operasional rutin = 15% dari belanja barang dan jasa + belanja modal

**Belanja transfer = belanja bagi hasil + bantuan keuangan (misalnya: dana desa dan alokasi dana desa)

Hasil proyeksi belanja mengikat Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6.30%. Komponen penyusun belanja mengikat yang diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu belanja transfer sebesar 7.89% di mana berasal dari belanja bagi hasil ditambah bantuan keuangan. Sementara itu, proyeksi belanja operasional rutin yang merupakan 15% dari total belanja barang dan jasa ditambah belanja modal juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4.50%. Belanja pegawai yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5.5%.

3.3.2.3. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah diperoleh dari total penerimaan daerah dikurangi dengan total belanja mengikat dan pembiayaan daerah. Hasil proyeksi kapasitas riil keuangan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12. Proyeksi Kapasitas Riil Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

NO	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1,252,277,476,341.00	1,367,022,804,603.65	1,582,480,639,689.66	1,861,262,385,031.87	2,207,426,968,822.29	2,576,805,941,373.95
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	42,282,080,075.00	-	-	-	-	-
	Penerimaan pinjaman	250,000,000,000.00	750,000,000,000.00	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1,544,559,556,416.00	2,117,022,804,603.65	1,582,480,639,689.66	1,861,262,385,031.87	2,207,426,968,822.29	2,576,805,941,373.95
	Dikurangi						
4	Jumlah Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	678,770,059,536.00	776,385,131,718.36	858,551,738,402.33	1,019,506,006,454.66	1,056,775,166,713.50	1,102,136,180,605.43
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	865,789,496,880.00	1,340,637,672,885.29	723,928,901,287.34	841,756,378,577.21	1,150,651,802,108.79	1,474,669,760,768.52

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (telah diaudit) dan Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, diolah

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyebabkan adanya perubahan format pendapatan dan belanja pada APBD. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah tidak lagi merupakan hasil pengurangan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan, melainkan menggunakan belanja operasi sebagai representasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja operasi terdiri dari komponen belanja gaji dan belanja barang dan jasa yang dialokasikan untuk pengeluaran yang mendukung program dan kegiatan pelayanan dasar.

Kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat diproyeksikan memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18.00% selama 1 periode. Untuk mengatasi keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berupaya memaksimalkan peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah dan pinjaman.

3.3.2.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas keuangan daerah selama 1 (satu) periode. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 2 prioritas penggunaan anggaran. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 3. 13. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	865,789,496,880	1,340,637,672,885	723,928,901,287	841,756,378,577	1,150,651,802,109	1,474,669,760,769
Prioritas I	606,052,647,816	938,446,371,020	506,750,230,901	589,229,465,004	805,456,261,476	1,032,268,832,538
Prioritas II	259,736,849,064	402,191,301,866	217,178,670,386	252,526,913,573	345,195,540,633	442,400,928,231

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015-2020 (telah diaudit) dan Penjabaran APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, diolah

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Barat merupakan total penerimaan daerah yang dapat didistribusikan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dibagi ke dalam 2 prioritas. Pembagian distribusi pada prioritas I dan prioritas II sebesar 70% dan 30% dengan rincian sebagai berikut:

1. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan bersifat wajib dan mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar di luar belanja modal.
2. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Kepala Daerah (selain program prioritas) untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan gambaran umum tentang capaian pembangunan Kabupaten Manggarai Barat hingga tahun 2019. Dari gambaran tersebut secara global terlihat ada sejumlah keberhasilan yang telah ditorehkan pemerintah dan masyarakat Manggarai Barat. Namun di sisi lain terdeteksi pula sejumlah permasalahan baik secara makro maupun per urusan yang menuntut perhatian semua stakeholder di tahun-tahun mendatang. Berikut adalah uraian tentang analisis terhadap persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam lima tahun terakhir.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan yang terjadi antara realisasi dengan target yang direncanakan. Seperti yang sudah dijabarkan dalam Bab II, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah cukup baik, kondisi tersebut ditunjukkan dengan tercaainya beberapa target indikator. Namun demikian, hasil tersebut masih perlu untuk ditingkatkan, terutama beberapa urusan yang masih belum memenuhi target. Belum tercapainya beberapa indikator yang direncanakan disebabkan oleh banyak faktor yang kemudian dirumuskan dalam sebuah pemetaan dengan metode analisis pohon masalah. Metode ini mengkalsifikasikan masalah ke dalam tiga level, yaitu, masalah pokok, masalah dan akar masalah. Pemetaan ini dilakukan untuk memberikan gambaran dalam merumuskan intervensi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

4.1.1. Tinjauan Terhadap Struktur Perekonomian Daerah

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sebagian besar masyarakat Manggarai Barat hidup dari pertanian. Hal ini antara lain tergambar pula dari

sumbangan sektor pertanian ini (termasuk kehutanan dan perikanan) terhadap total PDRB Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 41,05%; tertinggi dari semua sektor. Namun demikian, jika dilihat perkembangannya dalam 5 tahun terakhir terlihat bahwa pertumbuhan sektor ini cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara di lain pihak, sektor-sektor tertier seperti sektor akomodasi dan makan minum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan kecenderungan tersebut, dengan memanfaatkan analisis *location quotient* diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Location Quotient

	Lapangan Usaha	Kategori
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Basis
B	Pertambangan dan penggalian	Basis
C	Industri pengolahan	Non Basis
D	Pengadaan listrik dan gas	Non Basis
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Non Basis
F	Konstruksi	Basis
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Non Basis
H	Transportasi dan pergudangan	Non Basis
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Basis
J	Informasi dan komunikasi	Non Basis
K	Jasa keuangan dan asuransi	Non Basis
L	Real estate	Basis
M, N	Jasa perusahaan	Basis
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Basis
P	Jasa pendidikan	Non Basis
Q	Jasa lesehatan dan kegiatan sosial	Non Basis
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Non Basis

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Sektor pertanian merupakan sektor basis dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini bisa dipahami karena sumbangan sektor ini terhadap PDRB yang cukup dominan, di samping kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Manggarai Barat hidup dari pertanian. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini, terdapat 6 sektor lainnya yang juga menjadi sektor

basis dalam struktur PDRB Kabupaten Manggarai Barat, termasuk sektor akomodasi dan makan minum yang menjadi representasi sektor pariwisata. Ini artinya bahwa ketujuh sektor ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan sebagai *leading sektor* yang bisa menjadi tumpuan ekspor dan daya tarik daerah; tentu karena sumbangannya yang besar terhadap pembentukan PDRB maupun karena tren pertumbuhannya yang menjanjikan. Sementara kesepuluh sektor lainnya dinilai tidak memiliki potensi untuk itu.

Namun lebih dalam lagi, dengan menggunakan analisis *shift share* diperoleh juga data bahwa dari ketujuh sektor basis yang telah disebutkan di atas, tidak semuanya memiliki pertumbuhan yang cepat dengan daya saing yang juga tinggi. Berikut data hasil analisis *shift share* terhadap sumbangan komponen PDRB dalam dua periode pembangunan terakhir.

Tabel 4. 2. Kategori Sektor PDRB Berdasarkan Analisis Shift Share

	Lapangan Usaha	Shift Share		
		Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
B	Pertambangan dan penggalian	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
C	Industri pengolahan	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
D	Pengadaan listrik dan gas	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
F	Konstruksi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
H	Transportasi dan pergudangan	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
J	Informasi dan komunikasi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
K	Jasa keuangan dan asuransi	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang

	Lapangan Usaha	Shift Share		
		Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
L	Real estate	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
M, N	Jasa perusahaan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
P	Jasa pendidikan	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
Q	Jasa lesehatan dan kegiatan sosial	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Rendah	Berkembang
R, S, T, U	Jasa Lainnya	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Tabel 4. 3. Posisi Relatif Sektor Basis pada PDRB Kab Manggarai Barat Berdasarkan Analisis Shift Share

	Lapangan Usaha	Kategori Sektor	Shift Share		
			Makna Nilai PS (Mij)	Makna Nilai Ds (Cij)	Posisi Relatif Suatu Sektor
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Rendah	Terbelakang
B	Pertambangan dan penggalian	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
F	Konstruksi	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat
L	Real estate	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
M, N	Jasa perusahaan	Basis	Pertumbuhan lambat	Daya Saing Tinggi	Cendrung Berpotensi
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	Basis	Pertumbuhan cepat	Daya Saing Tinggi	Pertumbuhan Pesat

Sumber: Hasil Olahan BP4D Kab Manggarai Barat, 2020

Terlihat bahwa dari ketujuh sektor basis dalam struktur perekonomian Kabupaten Manggarai Barat, hanya ada tiga sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dengan daya saing yang tinggi menurut analisis *shift share*, yakni sektor

konstruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sementara satu sektor lainnya yang bukan merupakan sektor basis namun memiliki pertumbuhan yang pesat adalah sektor perdagangan.

Bila ditelisik lebih dalam, keempat sektor ini sebetulnya memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat dalam 10 tahun terakhir ini. Penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas di Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana prasarana pendukung di kota ini baik jalan, bandara, pelabuhan sampai dengan pusat kreasi dan pusat kuliner. Inilah yang menyebabkan sektor konstruksi bertumbuh dengan baik dalam 10 tahun terakhir. Perkembangan ini juga akhirnya menjadi pemicu bertumbuhnya sektor akomodasi hotel dan restaurant serta berbagai aktivitas perdagangan di Manggarai Barat.

Di lain pihak terlihat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor basis dan digeluti hampir sebagian besar masyarakat Manggarai Barat memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang rendah sehingga masuk dalam kategori terbelakang menurut analisis shift share ini. Sementara sektor lain seperti pertambangan, real estate, dan jasa perusahaan terlihat memiliki kecenderungan berpotensi karena daya saingnya yang tinggi walaupun pertumbuhannya dinilai lambat.

4.1.2. Tinjauan Terhadap Aspek Kesejahteraan Sosial

Aspek kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah. Fokus kesejahteraan sosial di Kabupaten Manggarai Barat diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat.

Secara umum, IPM Kabupaten Manggarai Barat selalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019. Namun, capaian tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Manggarai Barat 63,50, sedangkan Provinsi NTT 65,23 dan Nasional

71,92. Adapun penyebab rendahnya nilai IPM Kabupaten Manggarai Barat yaitu rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,19 dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 11,96. Dengan demikian, fokus utama dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Manggarai Barat ditekankan pada komponen RLS dan HLS.

Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Barat selama tahun 2017-2019 tergolong tinggi pada angka 18%. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi NTT sebesar 20%. Namun, lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9%. Jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kecamatan Lembor dan kecamatan Komodo. Kedua kecamatan tersebut didominasi oleh petani dan nelayan yang memiliki tingkat produktivitas dan diversifikasi produk yang tergolong kurang. Selain itu, petani di Kecamatan Lembor paling banyak buruh tani bukan pemilik sawah. Dengan demikian, tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kesejahteraan petani.

Selain itu, dilihat dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Manggarai Barat cenderung naik setiap tahun. Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Manggarai Barat 2,42%. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding rata-rata provinsi NTT dan nasional. Namun demikian, TPT tetap harus ditekan dengan mengoptimalkan penyerapan angkatan kerja pada semua sektor. Hal tersebut karena TPT berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin rendah TPT, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin menurun

4.1.3. Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

4.1.3.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar

2. Pendidikan

Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi masalah pokok dalam urusan pendidikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, tata kelola pendidikan yang belum optimal, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik yang masih terbatas, penyelenggaraan PAUD yang masih belum optimal, serta masih terbatasnya daya saing siswa di Kabupaten

Manggarai Barat. Pemetaan masalah urusan pendidikan dirumuskan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4. Pemetaan Permasalahan Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana tingkat SD dan SMP	masih terbatasnya sarana dan prasaranana pendukung pembelajaran	
	Belum optimalnya tata kelola/manajemen pendidikan		belum optimalnya pengelolaan Dapodik
			SOP pelayanan pendidikan belum tersedia
			belum optimalnya sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
			belum optimalnya monitoring pengelolaan sistem pendidikan
	Masih terbatasnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		masih rendahnya ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi standar
			belum optimalnya pengembangan keprofesian guru
			terbatasnya jumlah dan kompetensi tenaga kependidikan
	Masih rendahnya daya saing siswa		Belum terpenuhinya standar isi, standar proses, standar evaluasi, dan standar kelulusan di tingkat satuan pendidikan
	belum optimalnya penyelenggaraan PAUD		kesadaran masyarakatnya masih rendah (APK rendah)
			kualitas guru dan pengelola paud masih terbatas
			belum optimalnya peran pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD

3. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat merupakan salah satu fokus wajib dari pemerintah daerah. pembangunan daerah dalam urusan kesehatan turut menentukan keberhasilan pembangunan manusia secara umum. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi masalah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemenuhan UKP dan UKM yang masih belum optimal, pemberdayaan masyarakat dalam urusan kesehatan yang masih terbatas, pelayanan kesehatan yang masih belum optimal, dan pengawasan makanan lokal

serta pemenuhan gizi masyarakat yang masih terbatas. Belum optimalnya beberapa faktor tersebut, salah satunya berimplikasi terhadap masih tingginya angka gizi buruk dan prevalensi stunting di Kabupaten manggarai Barat. Permasalahan gizi buruk dan stunting perlu menjadi salah satu prioritas karena merupakan amanat nasional yang perlu diselesaikan bersama mulai dari level daerah, provinsi hingga nasional. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam urusan kesehatan:

Tabel 4. 5. Pemetaan Permasalahan Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM)	Fasilitas pelayanan kesehatan masih terbatas
		Penyediaan layanan dan manajemen kesehatan belum maksimal
	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	Kesediaan tenaga untuk melakukan kegiatan masih terbatas
		pemberdayaan di bidang kesehatan masih minim
		minimnya kesadaran masyarakat untuk merubah prilaku secara mandiri
	belum optimalnya pelayanan di fasilitas kesehatan	Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan
		Belum optimalnya fasilitas kesehatan
	Masih tingginya prevalensi stunting dan balita gizi buruk	Masih terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia
		belum optimalnya pemenuhan gizi
		masih rendhnya pemahaman terhadap pemenuhan gizi
	masih tingginya produk pangan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar	belum optimalnya surveilensi gizi
		masih rendahnya sertifikasi pangan

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki beberapa permasalahan pokok. Tercatat berdasarkan hasil pemetaan masalah masih terdapat tiga permasalahan pokok, diantaranya yaitu rendahnya kemantapan infrastruktur jalan, permasalahan tata

ruang dan juga irigasi. Kemantapan infrastruktur jalan yang masih rendah disebabkan karena proses dalam pembangunan jalan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dan kewenangan. Kondisi tata ruang di Kabupaten Manggarai Barat juga masih menjadi permasalahan karena masih belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsi peruntukannya. Keterbatasan irigasi menjadi permasalahan berikutnya yang juga muncul karena dalam pengembangan dan pengelolaannya yang belum optimal sehingga menyebabkan distribusi air di area persawahan menjadi kurang maksimal. Selain itu, pengelolaan air limbah masyarakat juga belum terkelola optimal, ditambah bula terkait distribusi air bersih ke area permukiman yang belum optimal walaupun keberadaan Permasalahan pokok tersebut terpetakan dalam pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6. Pemetaan Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kemantapan infrastruktur jalan kabupaten	Pembangunan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan teknis dan kewenangan	Minimnya kajian perencanaan pembangunan jalan
		Banyak kegiatan pekerjaan jalan yang dilaksanakan di luar kewenangan SK jalan
		Minimnya pembangunan jalan yang disertai dengan bangunan pelengkap jalan
		Belum optimalnya pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap
		Rendahnya pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan konstruksi jalan
		Rendahnya kualifikasi rekanan penyedia jasa konstruksi
Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Minimnya regulasi umum dan rinci yang mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung	Ketaatan pembuatan IMB masih rendah
Belum optimalnya pelayanan akses air bersih	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Belum optimalnya pengelolaan saluran air bersih
Belum optimalnya kualitas layanan limbah domestik	Masih kurangnya rumah tangga yang memiliki akses air limbah domestik yang layak	Belum optimalnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat terhadap penanganan air limbah
		Belum tersedianya IPAL Komunal masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terbatasnya lahan pertanian yang teraliri irigasi	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan irigasi daerah	Banyaknya saluran irigasi yang rusak Masih banyak irigasi yang menggunakan saluran tanah / non permanen Masih banyak daerah irigasi yang belum memiliki infrastruktur irigasi
Belum optimalnya ketersediaan banguann pengendali bencana	Belum optimalnya identifikasi kawasan rawan bencana	Masih banyak kawasan rawan bencana yang belum dilengkapi infrastruktur pengaman

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Manggarai Barat dalam urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman masih dihadapkan dengan permasalahan pokok berupa rendahnya akses rumah layak huni dan permukiman layak huni. Meskipun data dalam Dinas Perumahan mencatat bahwa jumlah rumah dan permukiman layak huni mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2020, namun jumlah tersebut masih berada jauh dibawah jumlah rumah dan pemukiman tidak layak huni. Dengan demikian, penyelesaian permasalahan tersebut diantaranya dengan melakukan pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 7. Pemetaan Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya akses rumah layak huni dan permukiman layak huni	Belum optimalnya penyelenggaraan PSU dalam kawasan permukiman	Belum tersedianya masterplan drainase permukiman
		Sistem drainase jalan lingkungan belum terintegrasi
		Minimnya koordinasi terkait lokasi pembangunan jalan lingkungan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa
		Minimnya fasilitas prasarana pendukung pemeliharaan PSU
		Rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum bersih
		Belum optimalnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak
		Belum adanya prasarana penunjang layanan sanitasi seperti IPLT, IPAL, SPAL

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya akses kepemilikan rumah layak huni	Belum tersedianya baseline data jumlah rumah tidak layak huni yang valid Rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pembangunan dan korban bencana

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, diperlukan peningkatan upaya penegakan peraturan daerah, keamanan, ketertiban, dan keindahan. Selain itu, upaya peningkatan kualitas demokrasi, pendidikan politik serta penanggulangan bencana juga menjadi fokus dalam menjaga stabilitas dan perlindungan sosial masyarakat. Secara umum, upaya perlindungan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat masih terkendala pada terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penegak serta masih rendahnya kepatuhan masyarakat. Selain itu, Kabupaten Manggarai Barat memiliki tingkat risiko terhadap bencana alam yang tinggi, sebagai dampak dari posisinya secara geografis dan geologis. Belum optimalnya dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi aksi pra bencana, Ketika bencana dan paska bencana menjadi permasalahan yang menyebabkan Kabupaten Manggarai Barat memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 8. Pemetaan Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat atas peraturan daerah dan Perkada	Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah pada masyarakat
		Masih lemahnya sanksi bagi pelanggar perda
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penegak peraturan	Rasio jumlah anggota Satpol PP dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) belum terpenuhi
		Masih terbatasnya keikutsertaan dalam pendidikan berjenjang pada Satpol PP
		Kurangnya integrasi dan sinkronisasi antar OPD
Belum optimalnya penanganan	Terbatasnya cakupan layanan penanganan	Terbatasnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
kebakaran	kebakaran	Masih terbatasnya jumlah WMK
		Masih terbatasnya personil yang terlatih
Masih adanya ancaman dan gangguan stabilitas sosial masyarakat	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Belum optimalnya FK Ormas, FK-UB, FPK serta FKDM
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme yang belum efektif
		Belum optimalnya pengawasan terhadap lembaga asing dan tenaga kerja asing
		Keterbatasan kewenangan dalam penanganan konflik pertanahan
Masih perlunya peningkatan kesadaran kehidupan berpolitik di masyarakat	Masih perlunya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Masih perlunya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
		Masih perlunya sosialisasi kegiatan pemilu
		Belum optimalnya pemanfaatan bantuan politik untuk pendidikan politik
Masih tingginya risiko bencana	Belum optimalnya penanggulangan kebencanaan	Kurangnya sosialisasi dan simulasi/ gladi penanggulangan risiko bencana
		Hirarki dokumen pencegahan penanggulangan bencana belum lengkap
		Kurangnya penyebarluasan informasi tentang ancaman, potensi, dan dampak bencana
		Belum adanya keberadaan Desa Tangguh Bencana
		Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
		Belum optimalnya penggunaan peralatan pendeteksi kebencanaan
		Belum Terbentuknya Relawan Tanggap Bencana
		Belum Terbentuknya Tim Reaksi Cepat untuk Penanganan Bencana

7. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Urusan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, keempat pilar tersebut sudah dilaksanakan, namun perlu untuk ditingkatkan. Kendala umum dalam penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Manggarai Barat yaitu belum optimalnya tata kelola penanganan PMKS dan terbatasnya kerjasama dengan

lembaga kesejahteraan sosial. Adapun jenis PMKS yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu fakir miskin, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan korban bencana. Kelompok fakir miskin menjadi salah satu prioritas utama yang perlu diselesaikan. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan sosial di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 9. Pemetaan Permasalahan Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan PMKS	Belum optimalnya tata kelola penanganan PMKS	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan PMKS berkebutuhan khusus
		Terbatasnya kapasitas shelter sosial dalam menampung PMKS
		Belum optimalnya pengelolaan data PMKS (Fakir miskin, disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, korban bencana)
		Belum optimalnya verifikasi dan validasi DTKS
		Belum optimalnya koordinasi antar OPD terkait dalam verifikasi data dan penegakan regulasi urusan sosial
		Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana
		Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (swasta, organisasi masyarakat, panti, LSM, TKSK, Peksos, PKH, Tagana)
	Belum optimalnya peran wahana kesejahteraan masyarakat	
	Belum optimalnya peran dan pembinaan pada organisasi sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial	

4.1.3.2. Layanan Urusan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Meningkatnya pengangguran merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor tenaga kerja. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor tenaga kerja:

Tabel 4. 10. Pemetaan Permasalahan Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Meningkatnya pengangguran	Minimnya kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Belum optimalnya peran BLK
		Terbatasnya kerjasama dengan BLK lain
		Belum tersedianya perencanaan ketenagakerjaan
	Belum optimalnya penempatan kerja	Terbatasnya kontrak kerjasama dengan lembaga pemberi kerja
		Belum adanya data based pencari kerja yang berkompentensi
	Masih adanya permasalahan hubungan industrial	Kurangnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan oleh pemberi kerja maupun tenaga kerja
		Kurangnya sosialisasi regulasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja
		Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan peraturan perusahaan
		Belum optimalnya perlindungan ketenagakerjaan sektor formal dan informal

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan serta masih ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah pokok diselesaikan di Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi ini berdampak terhadap keberdayaan perempuan secara umum. Berikut merupakan pemetaan masalah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 11. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pelebagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
		Belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan sektor lainnya
		Terbatasnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan	Belum optimalnya advokasi dan pendampingan layanan kebijakan perlindungan perempuan	Belum optimalnya pelayanan pengaduan bagi perempuan korban kekerasan
		Belum optimalnya kapasitas lembaga dan sumber daya manusia penyedia layanan perlindungan perempuan
		Minimnya kesadaran masyarakat untuk melindungi perempuan
Belum terpenuhinya hak anak	Minimnya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya layanan pengaduan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan
		Belum optimalnya kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak anak

3. Pangan

Menurunnya ketahanan pangan merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pangan. Persoalan ini berdampak pada laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pangan:

Tabel 4. 12. Pemetaan Permasalahan Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya ketahanan pangan	Menurunnya ketersediaan pangan	Stok cadangan pangan daerah masih kurang
		Lumbung pangan dan sarana pendukungnya masih terbatas
	Menurunnya keterjangkauan pangan	Pendistribusian pangan belum merata
		Informasi pangan masih kurang
	Menurunnya pemanfaatan pangan	Diversifikasi konsumsi pangan lokal selain beras masih kurang
	Keamanan pangan masih kurang	Beberapa jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas

4. Pertanian

Pada urusan pertanian, masalah utama yang dihadapi antara lain masih tingginya konflik kepemilikan lahan di Kabupaten Manggarai Barat. Masih

banyaknya klaim tanah ulayat oleh masyarakat karena belum ada regulasi yang mengatur terkait penetapan tanah ulayat, selain itu tanah terdampak pembangunan pemerintah juga belum optimal dalam penanganannya. Berikut pemetaan selengkapannya.

Tabel 4. 13. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya konflik terhadap kepemilikan lahan	Rendahnya proses penyelesaian pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum	Belum adanya regulasi sebagai dasar penyelesaian tanah terdampak pembangunan
		Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penetapan tanah ulayat

5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan yaitu sebuah proses memajukan suatu daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan merupakan misi dan tujuan dari setiap daerah. Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan predikat baik untuk indeks kualitas lingkungan hidup di tahun 2019. Meskipun demikian, bukan berarti Kabupaten Manggarai Barat tidak memiliki permasalahan dalam urusan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut diantaranya kualitas air, udara dan tutupan lahan yang semakin menurun, serta rendahnya sistem persampahan di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut disajikan secara lebih terperinci permasalahan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 14. Pemetaan Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kualitas air	Minimnya pengolahan limbah cair domestik	
		Belum optimalnya penggunaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
		Tingginya penggunaan bahan kimia pada aktivitas pertanian	
		Rendahnya pengelolaan limbah B3 non medis	
		Belum optimalnya konservasi sumber mata air	
	Menurunnya kualitas udara	Menurunnya kualitas udara	Keberadaan aktivitas industri
			Peningkatan emisi gas kendaraan
			Tingginya aktivitas pembangunan perkotaan
	Menurunnya kualitas	Menurunnya kualitas	Belum adanya penetapan lokasi RTH publik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	keanekaragaman hayati	Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati
		Kurangnya sosialisasi dan publikasi terkait informasi pentingnya menjaga lingkungan (sungai, mataair, hutan laut)
		Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup
	Rendahnya pengelolaan persampahan	Tingginya aktivitas pembakaran sampah
		Minimnya sarana dan prasarana penanganan sampah (TPS, kendaraan sampah)
		Rendahnya cakupan wilayah pelayanan sampah
		Belum adanya rencana induk pengelolaan sampah
		Belum optimalnya tempat pengelolaan sampah 3R

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Aministrasi dan kependudukan merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan penyediaan data kependudukan di suatu daerah. urusan ini menjadi penting karena merupakan salah stau basis yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan. Belum optimalnya cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data penduduk yang masih belum optimal dalam penentuan arah pembangunan menjadi hal yang harus diselesaikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pelayanan kependudukan yang belum optimal serta tindak lanjut pemanfaatan data yang masih terbatas. Secara rinci pemetaan permasalahan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Pemetaan Permasalahan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
masih terbatasnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan Adminduk yang masih terpusat di Dinas Dukcapil belum sampai ke kecamatan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
		Masih terbatasnya kompetensi dan kualifikasi SDM

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya pemanfaatan data kependudukan	Belum optimalnya tindak lanjut pemanfaatan data kependudukan	Masih ada OPD yang belum melakukan perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data kependudukan
		Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet dalam akses pemanfaatan data
		Belum optimalnya sosialisasi kepada OPD terkait pentingnya pemanfaatan data

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara umum, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa (masyarakat dan aparatur desa) dalam berpartisipasi aktif pada pembangunan. Urusan tersebut terdiri dari upaya penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, pembinaan dan pengawasan administrasi desa serta pemberdayaan kelembagaan desa. Permasalahan umum urusan desa di Kabupaten Manggarai Barat yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dilihat dari capaian Indeks Desa Membangun pada tahun 2020, status desa tertinggi yang ada di Kabupaten Manggarai Barat yaitu desa maju sebanyak 2 desa dari 164 desa. Masih sedikitnya desa yang memiliki status maju mengindikasikan bahwa perlu berbagai intervensi untuk membangun desa. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 16. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya kalender pembangunan desa	Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pendampingan dan pengawasan dalam pembanguana desa
		Updating profil desa belum tepat waktu
	Belum optimalnya penataan desa	Belum tersedianya peta batas desa wilayah desa sesuai dengan regulasi
		Belum optimalnya penataan aset desa
		Belum semua desa memiliki peraturan desa terkait kewenangan lokal skala desa
Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya pengelolaan potensi desa	Kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan kelompok masyarakat secara transparan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya pendampingan dan pengawasan dalam pembentukan BUMDes (sekarang monitoring)
		Belum adanya kajian studi potensi desa
		Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola BUMDes
		Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Belum optimalnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
		Terbatasnya infrastruktur desa
	Belum optimalnya peran lembaga desa dalam mendukung perencanaan dan pembangunan desa (tokoh adat, tenaga pengajar, posyandu, pemuda, dll)	Belum optimalnya pembinaan lembaga desa
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu program nasional yang diturunkan dalam pelaksanaan program KB. Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu masalah pokok yang harus diselesaikan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyelenggaraan program KB yang belum optimal, tingkat kesadaran masyarakat terhadap KB yang masih terbatas, serta belum adanya pemetaan terkait pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut adalah rumusan permasalahan pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB):

Tabel 4. 17. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya penyelenggaraan program KB	Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi masih terbatas
		Masih Terbatasnya cakupan layanan KB
		masih adanya kasus pernikahan dini

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB	Belum optimalnya penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
		Terbatasnya kompetensi tenaga penyuluh KB
		Keterlibatan/kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB sangat rendah
	Belum terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk	belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan
		belum adanya kajian kependudukan
	belum optimalnya ketahanan keluarga	belum optimalnya pembinaan keluarga sejahtera dan pra sejahtera

9. Perhubungan

Penyelenggaraan dan pelayanan dalam urusan perhubungan bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi. Kurang optimalnya dalam pelayanan bidang perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi permasalahan utama. Terdapat dua permasalahan turunan yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan pokok tersebut, yaitu masih belum optimalnya tingkat kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi serta masih minimnya penyelenggaraan lalu lintas perhubungan laut. Detail permasalahan dalam urusan perhubungan di Kabupaten Manggarai Barat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. 18. Pemetaan Permasalahan Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kualitas pelayanan bidang perhubungan	Belum Optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya regulasi yang mengatur aktivitas lalu lintas angkutan jalan
		Minimnya kelengkapan perlengkapan jalan
		Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (rambu-rambu)
	Kurangnya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Rendahnya fungsi peralatan layanan pengujian kendaraan bermotor
		Belum tersedianya dokumen layanan angkutan jalan
	Belum optimalnya pengelolaan parkir	Belum tersedianya lahan parkir yang memadai
	Belum optimalnya pengelolaan angkutan	Belum tersedianya terminal pengurai angkutan umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya penyelenggaraan lalu lintas perhubungan laut	Minimnya ketersediaan dermaga rakyat
		Minimnya sosialisasi keselamatan pelayaran pada aktivitas angkutan laut
		Belum adanya fasilitas galangan kapal

10. Komunikasi dan Informatika

Berkembangnya era digital, menjadi tantangan baru dari setiap urusan pembangunan. Komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan yang memiliki tantangan terhadap kemajuan era digital. Setiap urusan dituntut untuk mengembangkan ke arah digitalisasi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Kabupaten Manggarai Barat masih memiliki kapasitas yang rendah dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Permasalahan pokok tersebut disebabkan karena masih belum optimalnya dalam penyelenggaraan *E-government* dan juga tergolong masih rendahnya masyarakat publik dalam mengakses informasi. Penjabaran dari kedua permasalahan tersebut tersajikan pada pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 19. Pemetaan Permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	Belum optimalnya penyelenggaraan E-government	Minimnya sarana prasarana pendukung penerapan SPBE
		Rendahnya tata kelola dan layanan SPBE
		Belum memadainya kapasitas SDM bidang IT
		Minimnya regulasi yang mengatur tata kelola dan layanan SPBE
		Masih rendahnya penyelenggaraan keamanan informasi
		Minimnya perangkat daerah yang menggunakan persandian dalam komunikasi
	Masih rendahnya akses informasi publik	Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat / KIM dalam penyebaran informasi
		Kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu belum optimal
		Minimnya prasarana penunjang layanan RSPD
		Rendahnya kualitas dan kuantitas konten siaran RSPD
		Rendahnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik
		Masih adanya wilayah yang belum terjangkau telekomunikasi
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan statistik sektoral

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian belum optimal merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor koperasi dan UKM. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor koperasi dan UKM:

Tabel 4. 20. Pemetaan Permasalahan Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian belum optimal	Belum optimalnya kualitas manajemen koperasi	Kapasitas SDM pengurus koperasi masih terbatas
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Sarana koperasi belum memadai
	Omzet usaha mikro masih rendah	Kapasitas produksi belum optimal
		Kualitas produk masih kurang
		Kapasitas pemasaran belum optimal

12. Penanaman Modal

Rendahnya realisasi nilai investasi dibanding rencana investasi merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor penanaman modal. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor penanaman modal:

Tabel 4. 21. Pemetaan Permasalahan Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya realisasi nilai investasi dibanding rencana investasi	Daya tarik investasi perlu ditingkatkan	Identifikasi potensi dan peluang investasi belum optimal
		Promosi potensi investasi belum memadai
		Konduktivitas iklim investasi belum memadai
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum optimal	Kurangnya kepatuhan investor untuk melaporkan perkembangan usahanya
	Kualitas pelayanan perizinan belum optimal	Standar pelayanan dan SOP belum dilaksanakan

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kualitas pemuda di suatu daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah karena turut berkontribusi dalam menentukan pembangunan manusia. Kontribusi pemuda dalam pembangunan yang masih belum optimal serta prestasi olahraga daerah yang masih rendah perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Beberapa masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas organisasi kepemudaan yang masih terbatas, partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi yang masih rendah serta dukungan pemerintah terhadap kegiatan keolahragaan yang belum optimal. Berikut adalah rumusan rinci terkait rumusan masalah dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 22. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	belum optimalnya kualitas organisasi kepemudaan	belum optimalnya Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
		Banyak pemuda yang belum terdaftar dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
		Belum optimalnya organisasi kepramukaan
	belum optimalnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	masih terbatasnya kompetensi pemuda
		belum optimalnya Pembinaan terhadap kelompok pemuda untuk bergerak di sektor ekonomi
Masih minimnya Prestasi Olahraga	Belum optimalnya dukungan terhadap kegiatan keolahragaan	Belum optimalnya pembinaan olahraga secara berjenjang sejak usia dini
		belum optimalnya serifikasi pelatih
		belum optimalnya kapasitas wasit
		Belum memadainya Sarana prasarana olahraga
		belum optimalnya manajemen pengelolaan olahraga daerah

14. Statistik

Urusan statistik erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan data sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan. Permasalahan urusan statistik di Kabupaten Manggarai Barat secara umum yaitu masih rendahnya penggunaan data statistik sektoral untuk penyelenggaraan pembangunan yang diakibatkan oleh data statistik yang belum tersedia secara terintegrasi.

Tabel 4. 23. Pemetaan Permasalahan Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Minimnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyelenggaraan pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan statistik sektoral yang terintegrasi	Rendahnya kepatuhan OPD dalam penyediaan data statistik sektoral
		Belum adanya regulasi terkait tata kelola statistik sektoral
		Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi data

15. Kebudayaan

Terkait sektor kebudayaan, masalah utama yang dihadapi masyarakat Manggarai Barat adalah masih rendahnya usaha memajukan kebudayaan daerah. Hal ini antara lain terjadi karena pengelolaan kebudayaan yang masih rendah dan pelestarian cagar budaya yang belum maksimal. Berikut uraian selengkapnya.

Tabel 4. 24. Pemetaan Permasalahan Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya usaha pemajuan kebudayaan daerah	Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan local	Kesadaran kelompok atau pelaku budaya masih rendah
		Pengetahuan tentang kebudayaan masih rendah
		Bergesernya nilai budaya karena dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK
		Belum dilakukan pendataan manuskrip
	Rendahnya upaya pelestarian cagar budaya	Status tanah masih milik masyarakat
		Belum ada pembebasan lahan
		Belum adanya pagar pengamanan situs
		Sebagian compang ada di tengah kampung, sebagian ada di tanah milik pribadi dan ada juga di hutan tutupan

16. Perpustakaan

Pengembangan urusan perpustakaan di tingkat daerah merupakan salah satu hal yang penting. Hingga saat ini, permasalahan utama yang dihadapi terkait urusan perpustakaan adalah terkait minat baca masyarakat yang masih rendah. Terdapat berapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya adalah pengelolaan perpustakaan yang belum optimal dan kesadaran masyarakat tentang

literasi yang masih terbatas. Berikut merupakan pemetaan rinci terkait permasalahan dalam urusan perpustakaan di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 25. Pemetaan Permasalahan Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya minat baca masyarakat	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan	Ketersediaan fasilitas perpustakaan belum memadai
		Koleksi buku dalam perpustakaan masih terbatas
		Pelestarian naskah sejarah milik Daerah belum optimal.
		Pengelola perpustakaan masih terbatas
		Cakupan layanan perpustakaan masih terbatas
		masih terbatasnya SDM pengelola Perpustakaan
	Masih rendahnya Kesadaran masyarakat tentang literasi	Pembudayaan gemar membaca belum optimal
		Pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi masih minim

17. Kearsipan

Urusan kearsipan di suatu daerah diarahkan untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah. kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari cakupan layanan kearsipan serta persentase OPD yang mengelola arsip secara baku. Belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah masih menjadi permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Manggarai Barat. Sistem pengelolaan arsip daerah menjadi salah satu hal yang perlu untuk diintervensi. Berikut adalah pemetaan masalah dalam urusan kearsipan:

Tabel 4. 26. Pemetaan Permasalahan Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
belum optimalnya penyelamatan dan pemeliharaan arsip daerah	Belum optimalnya sistem pengelolaan arsip daerah	Kualitas dan kuantitas pengelola arsip (arsiparis) masih terbatas
		Pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya pengelolaan arsip masih rendah
		Belum adanya SOP terkait penghapusan arsip
		Mekanisme alih media arsip belum berjalan maksimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Sarana prasarana kearsipan belum memadai
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pengelola arsip

18. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Manggarai Barat secara umum masih belum optimalnya pelayanan persandian bagi Perangkat Daerah akibat rendahnya pemahaman terkait kemanfaatan persandian untuk keamanan informasi serta minimnya penggunaan persandian dalam pelaksanaan pemerintahan.

Tabel 4. 27. Pemetaan Permasalahan Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya jaminan keamanan data dan informasi	Belum optimalnya layanan persandian	Rendahnya pemahaman aparaturnya di bidang persandian untuk keamanan informasi
		Belum adanya regulasi terkait tata kelola keamanan informasi
		Rendahnya Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung persandian

4.1.3.3. Urusan Pilihan

1. Perikanan

Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perikanan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perikanan:

Tabel 4. 28. Pemetaan Permasalahan Urusan Perikanan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian	Menurunnya produksi perikanan tangkap	Nelayan beralih profesi ke jasa pariwisata
		Akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas
		Sarana penangkapan masih bersifat tradisional/berskala kecil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Rendahnya kapasitas SDM nelayan
		Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
	Produksi perikanan budidaya belum optimal	Pakan sangat mahal
		Terbatasnya persediaan Bibit unggul
		Akses terhadap bantuan permodalan masih terbatas
		Teknologi budidaya masih tradisional
		Sistem budidaya masih tradisional
		Minat masyarakat untuk membudidayakan ikan masih rendah
		Rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
	Kualitas produk perikanan belum memadai	Standarisasi mutu produk perikanan belum pernah dilaksanakan

2. Perindustrian

Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perindustrian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perindustrian:

Tabel 4. 29. Pemetaan Permasalahan Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Nilai produksi IKM masih rendah	Ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu
		Kapasitas SDM pelaku IKM kurang memadai
		Sarana produksi kurang memadai
		Akses terhadap bantuan permodalan kurang memadai
	Daya saing produk IKM masih rendah	Standarisasi pengolahan produk IKM belum memadai

3. Pariwisata

Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pariwisata:

Tabel 4. 30. Pemetaan Permasalahan Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan belum optimal	Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan belum optimal	
		Pemanfaatan ekonomi pariwisata untuk masyarakat lokal belum optimal	
		Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung masih kurang	
		Pelestarian lingkungan belum optimal	
	Pemasaran destinasi wisata belum optimal	Promosi langsung masih kurang	
		Promosi tidak langsung (luring dan daring) belum optimal	
	Belum optimalnya kelembagaan pariwisata	Integrasi kerjasama dengan sektor-sektor terkait belum optimal	Lembaga pariwisata berbasis masyarakat masih lemah
			Kerjasama Pemda dengan Pemerintah Pusat masih perlu ditingkatkan terutama dalam menetapkan Labuan Bajo dan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata super premium
			Lemahnya kapasitas SDM pelaku industri pariwisata
	Perkembangan industri lokal penopang pariwisata masih lemah	Intergrasi pariwisata dengan Pokdarwis, Bumdes, BUMD dan lembaga usaha lainnya belum optimal	
Pelestarian budaya belum optimal	Pelestarian budaya benda dan bukan benda belum optimal	Penelitian/ identifikasi budaya belum memadai	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Perencanaan dan upaya perlindungan budaya belum dilakukan secara komprehensif
		Pemeliharaan budaya lokal kurang maksimal
		Pemanfaatan budaya belum optimal
		Pengawasan budaya belum optimal
Belum optimalnya perekonomian sub sektor ekonomi kreatif	Kapasitas produksi ekonomi kreatif belum optimal	Kapasitas SDM pelaku Ekraf belum memadai
		Kualitas sarana / teknologi belum memadai
		Kemudahan terhadap akses bantuan permodalan belum optimal
		Ketersediaan bahan baku produksi masih terbatas
		Metode produksi belum berorientasi bisnis
	Kualitas produk ekonomi kreatif belum memadai	Penerapan standar sertifikasi belum optimal
Kapasitas pemasaran produk ekonomi kreatif masih rendah	Penerapan metode marketing-mix belum memadai	

4. Pertanian

Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor pertanian. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor pertanian:

Tabel 4. 31. Pemetaan Permasalahan Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian	Fluktuasi produktivitas tanaman pangan dan produksi tanaman hortikultura	Irigasi usaha tani kurang memadai
		Jalan usaha tani kurang memadai
		Kualitas bibit dan benih yang tersedia kurang memadai
		Akses pupuk dan obat-obatan kurang memadai

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Terbatasnya sarana penunjang produksi pertanian
		Serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
		Metode pertanian masih konvensional
		Meningkatnya alih fungsi lahan
	Produksi tanaman perkebunan menurun	Metode budidaya masih konvensional
		Kapasitas SDM petani kurang memadai
		Ketersediaan tanaman produktif sudah menurun
		Sarana produksi masih kurang memadai
		Serangan hama penyakit
	Kualitas produk pertanian kurang memadai	Penerapan <i>good handling practices</i> masih kurang
	Produksi hasil ternak menurun	Kapasitas SDM peternak belum memadai
		Metode budidaya masih konvensional
		Ketersediaan pakan ternak kurang memadai
		Bibit unggul kurang memadai
		Penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya masih terjadi
	Kualitas produk hasil peternakan belum memadai	Standarisasi penanganan produk masih kurang
	Populasi ternak menurun	Tingkat kelahiran ternak cenderung menurun
		Tingkat kematian ternak cenderung naik

5. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian belum optimal dan harga pasar yang tidak stabil merupakan masalah pokok yang dihadapi oleh sektor perdagangan. Persoalan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Berikut adalah masalah dan akar masalah di sektor perdagangan:

Tabel 4. 32. Pemetaan Permasalahan Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian belum optimal	Kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal lainnya belum optimal	Penerapan metode marketing-mix belum optimal
		Sarana pasar belum memadai
	Revitalisasi pasar tradisional belum optimal	Kapasitas SDM pedagang kurang memadai
		Akses terhadap bantuan permodalan belum memadai
		Belum optimalnya pengembangan pasar tertib ukur
Harga pasar yang tidak stabil	Tingkat kelancaran distribusi barang belum optimal	Stabilitas harga barang kurang terjaga
		Stabilitas ketersediaan barang kurang terjaga

4.1.3.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan Kewilayahan

1. Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan dalam lima tahun terakhir masih memiliki beberapa permasalahan. Diantaranya yaitu masih rendahnya kualitas kinerja perencanaan daerah/ Hal tersebut diakibatkan oleh masih rendahnya konsistensi antar dokumen perencanaan, penyusunan dokumen yang tidak tepat waktu, serta rendahnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Tabel 4. 33. Pemetaan Permasalahan Urusan Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Masih rendahnya pemahaman OPD terkait perencanaan strategis
		Belum tersedianya tenaga fungsional perencana
		Belum optimalnya rumusan indikator kinerja
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak tepat waktu
		Rendahannya ketersediaan data sebagai basis perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Rendahnya pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Masih kurangnya kualitas dan kapasitas SDM
		Rendahnya ketersediaan data kinerja pembangunan daerah
		Rendahnya pemahaman perangkat daerah dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan
		Belum adanya <i>reward and punishment</i>

2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan pendapatan, masih terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi. Di kabupaten Manggarai Barat, masih ada beberapa potensi kebocoran pajak serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum teridentifikasi secara maksimal.

Tabel 4. 34. Pemetaan Permasalahan Urusan Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah	Belum terintegrasinya sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan	Pelaporan keuangan yang belum tepat waktu dan sesuai SAP
		Inventarisasi aset belum optimal
	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan aset disetiap Perangkat Daerah
Belum optimalnya penerimaan pajak daerah	Belum optimalnya pelayanan pajak	Masih adanya potensi kebocoran pajak
		Sarana dan prasarana pembayaran pajak belum optimal (penggunaan e-pendapatan)
		Belum berjalannya kerjasama terkait pelayanan perpajakan daerah
	Masih rendahnya kesadaran wajib pajak	Belum optimalnya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>
Belum optimalnya pengawasan terhadap wajib pajak		

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah	Masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan	Belum optimalnya sarana dan prasarana retribusi kurang
		Belum optimalnya pendataan sumber-sumber retribusi

3. Kepegawaian

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi pemerintah. Di Kabupaten Manggarai Barat, masih terdapat beberapa permasalahan baik dari sisi kualitas ASN, kuantitas ASN, serta masih adanya pelanggaran disiplin serta jabatan yang tidak terisi baik itu struktural maupun fungsional.

Tabel 4. 35. Pemetaan Permasalahan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kualifikasi ASN	Belum optimalnya upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN	Penerimaan ASN masih didasarkan pada tingkat dan kualifikasi pendidikan yang rendah. (Yang melalui K2)
		Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal
Belum optimalnya kualitas manajemen ASN	Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai	Rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
		Belum terpenuhinya kebutuhan diklat fungsional
	Masih adanya jabatan struktural yang belum terisi	Belum terdatanya SDM aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong
		Belum tersedianya standar kompetensi dan pola karir aparatur yang jelas
	Masih tingginya pelanggaran disiplin ASN	Belum adanya pemberian sanksi dan penghargaan secara konsisten
	Belum adanya pemberian hukuman dan penghargaan secara konsisten	Belum tersedianya pemberian tunjangan berbasis kinerja
		Belum tersedianya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
		Belum diterapkan peraturan disiplin di setiap OPD sebagaimana peraturan yang berlaku

4. Penelitian dan Pengembangan

Hasil dan pemanfaatan dari kinerja penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal. Hal tersebut karena masih ada beberapa hasil dari penelitian dan pengembangan yang belum ditindaklanjuti.

Tabel 4. 36. Pemetaan Permasalahan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	Rendahnya tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis perencanaan pembangunan	Kurangnya sosialisasi dan diseminasi terhadap hasil-hasil penelitian
		Rendahnya koordinasi Perangkat Daerah dalam pemanfaatan hasil penelitian

5. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten. Setidaknya terdapat tiga masalah pokok yang masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan urusan pengawasan di Kabupaten Manggarai Barat. Permasalahan tersebut akan dipaparkan dalam pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 37. Pemetaan Permasalahan Urusan Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terdapat temuan administrasi dan temuan KN/KD pada LHP internal dan eksternal	Rendahnya kecukupan dan kompetensi APIP	Belum proporsionalnya jumlah dan kualitas APIP terhadap objek pemeriksaan
		Minimnya pelatihan APIP
		Masih rendahnya APIP yang bersertifikat
	Rendahnya implementasi SPIP di SKPD	Pemahaman terhadap SPIP masih rendah
		Belum adanya daftar risiko program/kegiatan di OPD
		Belum adanya monev terhadap RTL Daftar Risiko
	Masih terdapat temuan yang berulang	Belum optimalnya pemantauan kinerja dan keuangan
		Belum optimalnya reuiv kinerja dan keuangan
		Belum optimalnya asistensi dan pendampingan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya tindak lanjut temuan administrasi dan temuan kerugian negara, kerugian daerah atas LHP internal dan eksternal	Belum optimalnya kinerja tim tindak lanjut kerugian negara/daerah	Belum danya kertas kerja tim pemantauan tindak lanjut
		Belum optimalnya monev secara berkala oleh pimpinan
Rendahnya tindak lanjut pengaduan masyarakat/kasus khusus	Koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat tidak optimal	Belum tersedianya SOP terkait koordinasi pengaduan masyarakat
		Belum tersedianya tim yang menangani tindak lanjut pengaduan masyarakat secara terintegrasi
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas APIP

6. Sekretariat Dewan

DPRD merupakan mitra Kepala Daerah yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, Sekretariat Dewan dalam pelaksanaan tugas fasilitasnya masih memiliki beberapa permasalahan yang akan diuraikan dalam pemetaan masalah sebagai berikut.

Tabel 4. 38. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Dewan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum optimalnya dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti e-risalah dan e-notulen
		Belum optimalnya penyediaan informasi berbasis online
	Masih rendahnya penyelesaian pembentukan Perda	Belum tersedianya SOP pengajuan RANPERDA
		Kajian akademis belum sinkron dengan aturan yang lebih tinggi
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan pemanfaatan sarana dan prasarana Pimpinan DPRD	Rendahnya Kepatuhan DPRD terhadap penyelesaian administrasi keuangan
		Rendahnya komitmen terhadap pemanfaatan aset

7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah memiliki fungsi yang terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan kepala daerah. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Kabupaten Manggarai Barat. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang masih belum optimal, serta nilai IKM yang masih rendah dan belum terlaksana di seluruh OPD. Berikut adalah tantangan atau permasalahan Sekretariat Daerah.

Tabel 4. 39. Pemetaan Permasalahan Urusan Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masih kurangnya orientasi perencanaan dan pengukuran kinerja berbasis <i>outcome</i>	Masih kurangnya ketersediaan data dalam pengukuran kinerja di setiap OPD
		Masih kurangnya kapasitas OPD dalam penyusunan laporan kinerja
		Rilis data dari BPS yang terlambat sehingga mempengaruhi proses penyusunan laporan kinerja
		Rendahnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
Belum optimalnya fungsi pengendalian kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk akuntabilitas sosial	Masih belum terlaksananya SP dan SOP pada Perangkat Daerah
		SKM masih terbatas hanya pada 3 OPD
		Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam pelaksanaan SKM
	Belum efektifnya fungsi pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan daerah	Belum adanya instrumen pengendali dan pengukur keberhasilan kebijakan
		Belum efektifnya koordinasi implementasi kebijakan
		Belum tersedianya pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa
		Masih kurangnya identifikasi resiko dan potensi sosial dalam pemberian bansos
		Belum optimalnya peran/fungsi desiminasi informasi pembangunan dan kebijakan daerah (media informasi belum tersedia)
		Belum optimalnya tindak lanjut kebijakan pusat maupun provinsi
		Belum optimalnya tindak lanjut kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga
		Masih banyak OPD yang tidak melaksanakan Raperda

8. Pemerintahan Umum

Pada urusan pemerintahan umum khususnya dalam hal pembinaan kesatuan politik, permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Berikut uraian selengkapnya.

Tabel 4. 40. Pemetaan Permasalahan Urusan Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan kesadaran kehidupan berpolitik di masyarakat	Masih perlunya peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Masih perlunya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat
		Masih perlunya sosialisasi kegiatan pemilu
		Belum optimalnya pemanfaatan bantuan politik untuk pendidikan politik

4.1.4. Tinjauan Terhadap Lingkungan Strategis

4.1.4.1. Penelaahan Isu Internasional

Isu internasional merupakan isu besar yang memiliki dampak secara global dan perlu direspon baik oleh pemerintah pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat beberapa isu internasional yang saat ini sedang hangat, antara lain adalah berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan respon dari isu *Sustainable Development Goals* (SDG's). pada level nasional, isu tersebut direspon dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, isu global lain yang terus berhembus adalah terkait revolusi industri 4.0. isu ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah. Digitalisasi guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi menjadi fokus perhatian dalam isu revolusi industri 4.0 . isu lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait penanganan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menjadi sangat penting dalam merespon isu ini agar penanganan dan pemulihan ekonomi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Millennium Development Goals*. *Sustainable Development*

Goals (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu:

- a. Pembangunan Sosial;
- b. Pembangunan Ekonomi;
- c. Pembangunan Lingkungan;
- d. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuh belas tujuan *SDGs* dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target *SDGs* tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, evaluasi mengenai pencapaian target-target *SDGs* perlu dilakukan secara berkala.

2. Revolusi Industri 4.0

Hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan tantangan baru bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. salah satu poin paling krusial dari revolusi industri 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sektor lainnya.

Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia pada akhir tahun 2020 hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietman yang masing-masing berada pada angka 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Data lain juga menunjukkan bahwa berdasarkan *E-*

Government Survey 2020 yang dilakukan oleh United Nations mencatat bahwa tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dari sisi daya saing penyelenggaraan *e-government* di Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan transformasi digital di Indonesia diarahkan pada dua sektor prioritas yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Transformasi digital dalam pelayanan publik bersinggungan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *E-Government*. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik sudah digulirkan jauh sebelum isu digitalisasi di Indonesia muncul menjadi agenda publik. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Pengembangan *E-Government* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan. Namun demikian, tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM menjadi hal yang harus lebih dulu diintervensi. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Problem terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan infrastruktur yang belum mendukung dan merata di seluruh daerah di Indonesia. Dengan demikian, isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

3. Pandemi Covid-19

Pada awal Maret tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yang harus direspon dan ditangani secara serius oleh seluruh dunia. Pandemi Covid-19 ini turut berdampak terhadap seluruh aktivitas masyarakat di Indonesia, pada semester I tahun 2020 kebijakan

pembatasan fisik dan pembatasan sosial mulai diberlakukan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian secara nasional.

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Barat, peningkatan tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya perlu kebijakan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya preventif dan responsif sehingga berbagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 bisa lebih diminimalkan.

Dengan demikian, Covid-19 merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dokumen perencanaan hingga lima tahun ke depan. Keberadaan pandemi ini mendorong pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pembangunan harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut berlaku bagi pelaksanaan program pembangunan di seluruh sektor termasuk pariwisata yang menjadi sektor paling terpukul dengan adanya Covid-19.

Saat ini, berbagai negara telah memulai membuka kembali destinasi wisata dengan prosedur yang lebih ketat. Pencegahan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata menjadi isu global yang dilakukan oleh berbagai negara. Sebagian negara memberlakukan *screening* ketat bagi para turis seperti pemberlakuan syarat sertifikat vaksin bagi para turis dan juga pelarangan masuk bagi turis dari negara-negara dengan kasus Covid yang tinggi.

Dalam upaya membuka kembali pariwisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan program CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*). Program ini diluncurkan sebagai upaya dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan terutama di sektor usaha pariwisata. Pemberian sertifikasi ini merupakan upaya pencegahan Covid-19 yang harus ditindaklanjuti hingga level daerah dan destinasi wisata. Oleh karena itu, sertifikasi CHSE harus menjadi spirit dan juga prosedur pencegahan Covid-19 yang dilakukan di setiap destinasi wisata. Hal itu juga merupakan adaptasi kebiasaan baru dalam berbagai sektor seperti pariwisata.

4. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* adalah konsep penyelenggaraan pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa kini maupun di masa yang akan datang; dengan memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat sekitar (UNWTO & UNEP, 2005). Pengembangan pariwisata berkelanjutan beserta praktek pengelolaannya dapat diterapkan pada semua tipe wisata dan tujuan. Konsep ini berguna untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pariwisata tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dan lingkup sosio-kultural di sekitarnya.

Secara lebih sederhana, pariwisata berkelanjutan tidak hanya memperhatikan kebutuhan para wisatawan serta daerah dan masyarakat sekitar, namun juga harus melindungi dan mengembangkan pariwisata tersebut untuk masa yang akan datang. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika objek wisata sembari mempertahankan integritas kultural, proses ekologi, dan keanekaragaman hayati. Penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan harus dapat menekan dampak negatif terhadap lingkungan dan kebudayaan lokal dengan tetap meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, pariwisata berkelanjutan adalah rangkaian aktivitas pariwisata yang sensitif terhadap ekologi dan budaya setempat.

Berikut adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan:

- a. Pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan elemen utama dari pembangunan kepariwisataan secara optimal serta terjaganya keutuhan ekologi dengan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- b. Penghormatan terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan turut serta dalam pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai tradisi dengan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
- c. Terjaminnya keberlanjutan usaha yang menghasilkan manfaat sosial ekonomi yang terdistribusikan secara merata bagi para pemangku

kepentingan; yang termasuk berupa kesempatan kerja, kesempatan untuk memperoleh penghasilan, tersedianya pelayanan dan fasilitas umum yang baik bagi masyarakat lokal serta kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

4.1.4.2. Penelaahan Isu Nasional

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional di daerah, sehingga diharapkan akan tercapai keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Secara spesifik, pemerintah telah menetapkan Manggarai Barat (Labuan Bajo) sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan dan melaksanakan sejumlah program pembangunan di Manggarai Barat mulai dari membentuk Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo-Flores, pengembangan Bandar Udara Komodo dan pelabuhan *multipurpose*, serta pengembangan KEK Golomori untuk mendukung kebijakan tersebut.

Kebijakan pembangunan nasional di wilayah Manggarai Barat dapat ditelaah dari dokumen RPJMN 2020-2024. Prioritas pembangunan dalam RPJMN di wilayah NTT termasuk Kabupaten Manggarai Barat adalah percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

KORIDOR PERTUMBUHAN	KORIDOR PEMERATAAN
1. Kab. Manggarai Barat	1. Kab. Sumba Timur
2. Kab. Manggarai	2. Kab. Sumba Tengah
3. Kab. Manggarai Timur	3. Kab. Sumba Barat
4. Kab. Ngada	4. Kab. Sumba Barat Daya
5. Kab. Nagekeo	5. Kab. Timor Tengah Selatan
6. Kab. Ende	6. Kab. Timor Tengah Utara

KORIDOR PERTUMBUHAN	KORIDOR PEMERATAAN
7. Kab. Sikka	7. Kab. Malaka
8. Kab. Kupang	8. Kab. Belu
9. Kota Kupang	

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk wilayah NTT, antara lain:

1. Pengembangan sektor unggulan

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Pengembangan komoditas unggulan wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap dengan fokus komoditas yaitu kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP

2. Pengembangan kawasan strategis

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi local melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkar/trans pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, jalan akses DPP Labuan Bajo, jalan parallel

perbatasan, pengembangan pelabuhan Labuan Bajo dan Bandara Labuan Bajo

- c. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi
- d. Peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata dan revitalisasi Balai Latihan Kerja

3. Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah, percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan layanan dasar, pengembangan ekonomi local, pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal
- b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019 selama maksimal 3 tahun, yaitu Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan TTU
- c. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan asset desa, pemberdayaan masyarakat adat dan penguatan pendamping desa, penataan ruang dan penetapan batas desa serta peningkatan peran BUMDes.
- d. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditi unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur
- e. Penanganan stunting dengan lokus pada 21 kabupaten

- f. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69% di NTT
- g. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Percepatan penerapan SPM di daerah
- b. Percepatan kemudahan berusaha dan reformasi pelayanan perizinan terutama investasi
- c. Penataan lembaga dan organisasi pemda yang lebih efisien dan efektif
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Peningkatan riset dan inovasi daerah
- f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan
- g. Peningkatan kualitas belanja daerah
- h. Pengembangan dan penguatan peran kecamatan
- i. Pengembangan kerja sama antardaerah
- j. Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak
- k. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan
- l. Penataan ruang dan lahan
- m. Pemenuhan SPM kebencanaan melalui:
 - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistic kebencanaan
 - Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan local
 - Peningkatan investasi mitigasi structural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana
- n. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon yang meliputi:
 - Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi

- Optimalisasi potensi sumber energy baru terbarukan
- Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam
- Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci serta perlindungan kawasan hutan
- Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang
- Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata
- Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu
- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi masal
- Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untu mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air

4. Labuan Bajo bagian dari *major project* 10 destinasi pariwisata prioritas di dalam RPJMN 2020-2024. Peningkatan nilai tambah pada 10 destinasi pariwisata prioritas difokuskan pada peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. *Major project* tersebut diharapkan membawa manfaat:

- Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD pada 2024.
- Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan pada 2024.

4.1.4.3. Penelaahan Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018-2023 menjadi basis bagi penyusunan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat. Provinsi NTT memiliki visi yang tertuang di dalam

dokumen RPJMD. Visi Provinsi NTT periode 2018-2023 adalah “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut diturunkan menjadi beberapa misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 disebutkan bahwa permasalahan yang menjadi isu strategis provinsi NTT dalam pelaksanaan pembangunan 2018-2023 di antaranya:

1. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang masih di bawah rata-rata nasional

Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi yang tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Namun demikian, investasi dan ekspor sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi ini perannya sangat kecil akibat neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada rendahnya pengeluaran per kapita penduduk yang mencapai Rp7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional (Rp10,66 juta) dan pendapatan PDRB per kapita hanya mencapai 0,30% dari rata-rata nasional.

2. Produktivitas dan daya saing ekonomi petani, peternak dan nelayan yang rendah

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah terus menurun dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan utama pada aspek produksi,

distribusi dan fluktuasi harga. Hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya luas lahan kritis dan terlantar yang mencapai 70% dari luas lahan kering di NTT. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan. Selain itu, pemanfaatan potensi perikanan belum maksimal. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap tercatat baru mencapai sekitar 40%. Berbarengan dengan kondisi itu, tenaga produktif di sektor pertanian juga diperkirakan akan semakin berkurang di masa datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Selain terus berkurang, kapasitas SDM di bidang pertanian juga dianggap masih rendah. Diperkirakan 60,65% petani di NTT hanya tamat SD dan sebagian lagi bahkan tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian juga menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Keamanan dan cadangan pangan melalui penataan distribusi, keamanan, akses dan cadangan juga belum berjalan optimal.

3. Angka kemiskinan dan masalah sosial yang cukup tinggi

Penduduk miskin di NTT mencapai 21,38% dari total penduduk NTT. Walaupun jumlahnya terus menurun setiap tahun namun perubahannya sangat kecil dan lambat. Selain terkait jumlah, persoalan kemiskinan di NTT juga diwarnai oleh tingginya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan.

Oleh karena itu, upaya penurunan jumlah penduduk miskin di NTT juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di antaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi.

4. Kerentanan terhadap terjadinya bencana yang tinggi

NTT adalah provinsi yang memiliki sebelas jenis potensi bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 orang. Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya yang dipicu oleh iklim.

Bencana-bencana ini selalu merusak asset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman sehingga sedikit banyak memperburuk kondisi kemiskinan di NTT.

5. Kualitas hidup masyarakat yang masih rendah

Peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu daerah umumnya diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam lima tahun terakhir, IPM NTT terus meningkat di semua komponen pembentuknya yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun demikian, capaian ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Tahun 2017, IPM NTT mencapai 63,73 namun rata-rata nasional sudah berada di angka 70,81.

6. Dampak Pandemi Covid-19

Kontraksi yang terjadi terhadap perekonomian NTT pada periode 2019-2020 tidak saja disebabkan oleh dampak Pandemi Covid-19 pada skala regional NTT tetapi juga karena kontraksi perekonomian nasional dan global. Hal ini menyebabkan pukulan yang sangat berat terhadap perekonomian masyarakat terutama pada lapisan masyarakat bawah atau masyarakat yang berpendapatan tidak tetap. Kondisi ini terlihat dari pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang menurun tajam, padahal kontribusi pengeluaran dari konsumsi rumah tangga ini terhadap PDRB Pengeluaran Per Kapita NTT mencapai 46,56%. Ini menunjukkan daya beli masyarakat menjadi menurun.

Pukulan berat juga terjadi pada sektor UMKM, investasi, ekspor import, sektor tenaga kerja dan sektor riil lainnya. Pembatasan pergerakan

masyarakat mengakibatkan produktivitas sektor-sektor ini menjadi menurun. Banyak kegiatan UMKM dan perusahaan terutama yang terkait dengan dunia pariwisata terpaksa menghentikan sementara operasinya. Pemutusan hubungan kerja pun tidak terelakan. Angka pengangguran diprediksi meningkat.

Namun demikian, pandemi covid 19 ini seakan memaksa pemerintah dan dunia usaha baik di NTT maupun di Indonesia secara umum untuk mencari jalan agar tetap produktif. Pemanfaatan teknologi secara lebih intensif akhirnya menjadi tidak terbendung. Proses transisi ke ekonomi digital ini menjadi peluang bagi dunia usaha untuk terus bertahan dan produktif.

Isu Strategis Provinsi NTT direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023:

Tabel 4. 41. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
		Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk
2.	Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial	Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah
		Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin
3.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
4.	Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan pola pendekatan kawasan

No.	Tujuan	Sasaran
5.	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
6.	Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
		Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita
7.	Menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

Sumber: RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023

Provinsi NTT memiliki konsen yang besar terhadap persoalan daya dukung lingkungan, pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, bencana, perubahan iklim, lingkungan dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut yang menjadi fondasi untuk menyusun perencanaan pembangunan pada saat ini. Isu strategis Provinsi NTT memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Manggarai Barat periode saat ini.

4.1.4.4. Penelaahan Isu Daerah Sekitar

Kabupaten Manggarai Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai. Perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat harus memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Manggarai. Berbasis pada narasi tersebut, maka sub-bab ini disusun dengan tujuan mengatur sinergitas arah pembangunan dengan kabupaten sekitar pada periode perencanaan pembangunan yang sama. Berikut adalah penelaahan RPJMD Kabupaten Manggarai:

1. RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Kabupaten Manggarai dipilih karena dua alasan, yaitu: 1) Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Barat. 2) Kabupaten Manggarai memiliki periode perencanaan yang sama dengan Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu Kabupaten

Manggarai merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten Manggarai pada periode RPJMD tahun 2021-2026 memiliki visi “Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing”. Visi tersebut didukung oleh beberapa misi, yaitu:

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Meningkatkan mutu lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

Keempat misi tersebut dirumuskan untuk merespon beberapa isu strategis, seperti: 1) masih rendahnya kesejahteraan sosial, 2) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, 3) masih terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, 4) belum optimalnya infrastruktur dasar yang berkelanjutan, dan 5) belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Isu Strategis Kabupaten Manggarai direspon dengan tujuan dan sasaran di dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran tersebut adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai selama periode perencanaan. Berikut adalah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026:

Tabel 4. 42. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan
		Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan
2.	Meningkatnya Keberdayaan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
		Menurunnya ketimpangan gender
		Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Meningkatnya keberdayaan desa
3.	Meningkatnya ketahanan	Meningkatnya ketertiban umum

No.	Tujuan	Sasaran
	sosial	Menurunnya gangguan kohesivitas sosial
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana
4.	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian
		Meningkatnya realisasi penanaman modal
		Meningkatnya akses dan kualitas jaringan jalan
		Meningkatnya kualitas perhubungan
		Meningkatnya ketahanan pangan
		Meningkatnya stabilitas harga barang
5.	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian
6.	Menurunnya kemiskinan	Menurunnya pengangguran
		Meningkatnya akses terhadap pemukiman layak huni
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman
7.	Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang
8.	Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan pengendali bencana
9.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air
		Meningkatnya kualitas udara
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan
		Meningkatnya pengelolaan persampahan
10.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya integritas pemerintah daerah
		Meningkatnya profesionalitas aparatur pemerintahan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kualitas pemerintahan berbasis elektronik

Kabupaten Manggarai memiliki konsen yang besar terhadap persoalan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan. Berbagai persoalan tersebut yang menjadi fondasi untuk menyusun perencanaan pembangunan pada saat ini. Isu strategis Kabupaten Manggarai memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Manggarai Barat periode saat ini.

4.1.4.5. Penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Hasil penjaringan isu pada kajian lingkungan hidup strategis menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, terdapat 13 isu strategis di Kabupaten Manggarai Barat yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Tabel di bawah ini menunjukkan daftar permasalahan dan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 43. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Sosial	Kemiskinan	Angka Kemiskinan terancam naik
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan karena kewaspadaan terhadap konversi lahan pertanian yang semakin tinggi dan penurunan keanekaragaman hayati
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah
		Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas, Akses dan mutu Pendidikan yang Adil dan Merata
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial terhadap perempuan dan anak
Ekonomi	Akses energi terjangkau dan berkelanjutan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk energi terbarukan
		Emisi Gas Rumah Kaca
	Pengembangan ekonomi lokal, industri, dan penurunan pengangguran	Menurunnya kemandirian ekonomi daerah

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
	Penguatan kemitraan global	Penguatan desa mandiri Penguatan penggunaan teknologi
Lingkungan	Pengelolaan air bersih dan sanitasi	Rencahnya pengelolaan potensi sumber air yang tinggi Minimnya infrastruktur untuk distribusi air dari sumber mata air ke permukiman masyarakat
	permukiman yang inklusif, Aman, dan berkelanjutan	Ancaman Bencana semakin tinggi baik alam maupun non alam
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
	Dampak perubahan iklim	Perubahan Iklim semakin mengkhawatirkan: - kualitas iklim semakin menurun - Ancaman penurunan supply air tanah
	Konservasi sumberdaya laut dan darat	Perubahan fungsi lahan dan tutupan lahan di Manggarai Barat
Hukum dan Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Sumber : Analisis, 2021

1. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Sosial

Terdapat 5 (lima) isu dalam pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat yaitu kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat Kesehatan masyarakat, pendidikan, serta menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat. Kemiskinan dan Kesehatan masyarakat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Kecukupan pangan menjadi isu strategis karena Manggarai Barat merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi NTT. Jika dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat mencakup kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. Berikut merupakan rumusan isu strategi TPB pilar sosial di Kabupaten Manggarai Barat:

Tabel 4. 44. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Sosial

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan baik secara total maupun menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan • Imunisasi dasar anak umur 12-23 bulan • peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan • Peserta program keluarga harapan • akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan • Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana social • Pendampingan psikosocial korban bencana social • penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas • penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran • Akses sumber energi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan • penguatan pengurangan risiko bencana daerah • Alokasi secara langsung sumberdaya untuk program pengentasan kemiskinan • Permukiman kumuh perkotaan • Risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim wilayah yang berada pada kategori cukup rentan • Pemanfaatan sumber daya alam • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan terutama jasa ekosistem penyedia air • Peningkatan dampak dan risiko lingkungan hidup
Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kejadian stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta • malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun • Ketidakcukupan konsumsi pangan • ASI eksklusif • Pola pangan harapan dan tingkat konsumsi ikan • Kerawanan pangan • Nilai tambah pertanian • Penduduk dengan asupan kalori 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan lahan pertanian mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan • Penurunan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	<p>minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari</p>	
<p>Tingkat Kesehatan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di tolong oleh tenaga Kesehatan terlatih • Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup • Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup • Prevalensi tekanan darah tinggi • Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun • <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> • <i>Unmet need</i> pelayanan Kesehatan • penyalahgunaan narkoba • Penduduk merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun • Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir • Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang cara modern 	-
<p>Tingkat Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasi SD/MI dan SMP/MTs • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat • Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat; • Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun masih rendah • Angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun • Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi • Akses listrik, internet, komputer, sanitasi dasar dan fasilitas cuci tangan bagi sekolah • Jumlah guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik. 	-

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
<p>Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan • korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif • kekerasan terhadap anak perempuan • tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi perempuan • Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i> KB) • perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir • Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun • Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern 	-

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Ekonomi

Isu strategis di pilar ekonomi mencakup 3 (tiga) yaitu akses energi terjangkau dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi local, industri, dan penurunan pengangguran, serta penguatan kemitraan global. Tekanan perkembangan perkotaan dicerminkan oleh indikator persentase rumah tangga perkumuhan perkotaan. Tabel di bawah menunjukkan keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 45. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Ekonomi

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
<p>Akses energi terjangkau dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan bauran energi terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan emisi GRK dari sektor energi baik untuk pembangkit listrik dan penggunaan energi untuk transportasi • Pemanfaatan sumber daya alam • Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Peningkatan dampak dan risiko lingkungan hidup • Penurunan kinerja layanan atau jasa ekosistem
<p>Pengembangan ekonomi lokal, industri, dan penurunan pengangguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan laju pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita dan PDRB per tenaga kerja • Peningkatan jumlah devisa sektor pariwisata • Peningkatan jumlah pekerja pada industri pariwisata • Pekerja informal sektor pertanian dan non pertanian • Peningkatan jumlah tenaga kerja formal • Rata-rata upah pekerja per jam • Angka pengangguran tinggi • Akses UMKM ke layanan keuangan • Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit • Akses kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa dan jarak lembaga keuangan • Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan pertumbuhan PDRB • Jumlah tenaga kerja pada sektor industri manufaktur • Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri • Penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kemandirian ekonomi daerah

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran riset pemerintah terhadap PDRB • Industri kecil dengan pinjaman atau kredit 	
Penguatan kemitraan global	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan desa mandiri • Penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional • Indeks Kebebasan Sipil • Pelayanan teknologi melalui peningkatan akses pitalebar • Tota pendapatan pemerintah termasuk rasio penerimaan pajak sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya • Indikator SDGs yang terpilah dengan target • Data registrasi terkait kelahiran dan kematian • Anggaran domestik yang didanai pajak domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kemandirian ekonomi daerah

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Lingkungan

Indikator pilar lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat memiliki isu strategis sebanyak 5 (lima) isu strategis. Empat isu strategis tersebut yaitu pengelolaan air bersih dan sanitasi, permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, pengelolaan sampah, dampak perubahan iklim, serta konservasi sumberdaya laut dan darat. Lebih lengkapnya keterkaitan isu strategis dengan TPB Pilar Lingkungan akan ditunjukkan pada tabel di bawah.

Tabel 4. 46. Tabel Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Lingkungan

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
Pengelolaan air bersih dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan akses layanan sumber air minum layak, aman dan berkelanjutan • Cakupan akses sanitasi layak, dengan meningkatkan desa/ kelurahan yang melaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Manggarai Barat memiliki kemampuan jasa penyediaan air relatif sedang. Dari total luas kabupaten terdapat 174.507,88 ha (55,98%) memiliki jasa

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	<p>Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri • fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air • penghematan air pertanian/perkebunan dan industri • penataan kelembagaan sumber daya air • sistem pengelolaan air limbah terpusat • sistem pengelolaan lumpur tinja • Sumber air baku 	<p>penyediaan air kategori sedang. Jasa penyediaan air bekategori tinggi melingkupi wilayah seluas 14.290,48 ha (4,59%).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah rata-rata total aliran permukaan seluruh wilayah Manggarai Barat adalah 2.008,25 juta m³/tahun. Secara spasial, jumlah rata-rata aliran permukaan dengan nilai >200 m³/tahun mendominasi dan menyebar di wilayah dataran rendah, sedangkan di wilayah perbukitan dan pegunungan lebih didominasi oleh aliran permukaan dengan nilai <200 m³/tahun. Wilayah yang memiliki curah hujan tahunan tinggi adalah Kecamatan Macang Pacar, Kuwus, dan Ndosso. • Ketersediaan air permukaan seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 2.008,25 juta m³/tahun, sementara berdasarkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat (2019) kebutuhan air total sebesar 879 juta m³/tahun, mengalami surplus sebesar 1.129,24 juta m³/tahun. • Secara administrasi, Kecamatan Lembor Selatan adalah wilayah administrasi yang paling tinggi memiliki ketersediaan air yaitu 323,44 juta m³/tahun dan Kecamatan Kuwus Barat hanya memiliki ketersediaan air paling rendah yaitu 38,40 juta m³/tahun. • Jasa ekosistem pengatur iklim

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
		<p>mayoritas berada dalam kategori sedang dengan rincian: berkategori sangat rendah seluas 49,13 ha (0,02%), berkategori rendah seluas 46.009,19 ha (14,76%), berkategori sedang seluas 217.254,39 ha (69,69%), berkategori tinggi seluas 48.422,50 ha (15,53%).</p>
<p>Permukiman yang inklusif. Aman, dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan • kerugian ekonomi langsung akibat bencana • Indeks Risiko Bencana (IRB) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Manggarai Barat termasuk daerah yang memiliki ancaman bencana berkategori tinggi dengan nilai indeks risiko bencana 163.57 pada tahun 2020. Risiko bencana banjir, kekeringan, dan gunung berapi masuk dalam kategori sedang, sedangkan bencana tanah longsor, tsunami, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam kategori berisiko tinggi. • Ancaman bencana tanah longsor dan kebakaran hutan serta lahan memiliki risiko bencana paling tinggi dengan skor yang sama yaitu 36, sedangkan gunung berapi dan banjir memiliki skor risiko paling rendah yaitu 7.
<p>Pengelolaan sampah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daur ulang sampah dan pengelolaan limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah timbulan sampah di Manggarai Barat tahun 2019 sebanyak 10.594,125 ton yang didominasi sampah yang berada di Kota Labuan Bajo. Jumlah sampah yang tertangani sekitar 10.220 ton atau 96,47%
<p>Dampak perubahan iklim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana iklim • Memperkuat kapasitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Manggarai Barat memiliki 63 desa rentan terhadap perubahan iklim dari 2.966 desa rentan di NTT.

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
	ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Welak merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap ketahanan pangan dan gizi akibat perubahan iklim • Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Kuwus, dan Macang Pacar merupakan wilayah yang cukup tahan terhadap perubahan iklim, • sementara wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki ketahanan pangan dan gizi paling tinggi terhadap perubahan iklim adalah Kecamatan lembor dan Lembor Selatan
Konservasi sumberdaya laut dan darat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan dan rehabilitasi kawasan konservasi terdegradasi dan lahan kritis • Kerangka legisasi, administrasi, dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata • Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Manggarai Barat didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 93.212,46 ha (36,02%), diikuti Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 35.877,78 ha (13,87%). Sebagian Hutan lahan kering primer dan sekunder secara spasial tersebar hampir di seluruh kecamatan.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

4. Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu strategis untuk pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Manggarai Barat adalah reformasi birokrasi. Aspek pemerintahan dan kelembagaan di Kabupaten Manggarai Barat menjadi isu strategis yang perlu ditindaklanjuti, selain itu kepemilikan administrasi masyarakat juga terkait isu strategis seperti persentase anak yang memiliki akta kelahiran atau proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil.

Tabel 4. 47. Keterkaitan Isu Strategis dengan TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Kelompok Isu Strategis	Isu Strategis TPB	Isu Strategis terkait Lingkungan dan Keuangan Daerah
<p>Reformasi Birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) • pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui • Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan • keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) • anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil • Peningkatan kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah • Penurunan jumlah anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh • Kekerasan terhadap anak 	

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

4.1.4.6. Penelaahan RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD diantaranya mengacu pada tujuan RTRW Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032, yaitu mewujudkan ruang daerah yang produktif dan berwawasan lingkungan sebagai pusat distribusi barang dan jasa sesuai ruang peruntukan. Pengaturan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Aspek struktur dan pola ruang merupakan pokok dari penataan ruang di Kabupaten Manggarai Barat. Berikut rencana struktur ruang wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.

1. Sistem jaringan Pusat Kegiatan

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan di Kabupaten Manggarai Barat, maka sistem jaringan pusat kegiatan ini terdiri dari:

Tabel 4. 48. Sistem Pusat Kegiatan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat

Hierarki	Struktur Wilayah Perkotaan	Kecamatan	Desa
I	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Kecamatan Komodo	Kota Labuan Bajo (Ibukota Kabupaten)
II	Pusat Kegiatan Kawasan (PPK).	Ibukota Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkotaan Bari 2. Perkotaan Golo Wulu 3. Perkotaan Wae Nakeng 4. Perkotaan Werang 5. Perkotaan Terang 6. Perkotaan Orong 7. Perkotaan Tentang 8. Perkotaan Lengkong Cepang 9. Perkotaan Warsawe 10. Perkotaan Pacar 11. Perkotaan Landong
III	Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL).	Ibukota Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boleng Darat di Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng; 2. Lando di Desa Mbut Kecamatan Boleng; 3. Benteng di Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo; 4. Noa di Desa Compang Kecamatan Pacar; 5. Nangalili di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan; 6. Rangu di Desa Rangu di Kecamatan Kuwus; 7. Rego di Desa Rego Kecamatan Macang Pacar; 8. Datak di Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak; 9. Maras di Desa Wae Kanta Kecamatan Lembor; 10. Rekas di Desa Kempo di Kecamatan Mbeliling.

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai Barat 2012-2032

2. Sistem jaringan Prasarana Utama

Sistem jaringan prasarana utama terdiri dari:

- a. Sistem jaringan transportasi darat
- b. Sistem jaringan transportasi laut
- c. Sistem jaringan transportasi udara

Berikut rincian rencana pola struktur ruang sistem jaringan prasarana utama untuk transportasi darat, laut dan udara.

Tabel 4. 49. Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Utama untuk Transportasi Darat, Laut Dan Udara

No	Rencana Struktur Ruang	Waktu Pelaksanaan
		2021-2025
Transportasi Darat		
1	Transportasi Jalan	Peningkatan kapasitas jalan pada jalan arteri primer yang menghubungkan Labuan Bajo - Manggarai Barat – Ngada – Nagekeo – Ende – Sikka – Flores Timur.
2	Transportasi Penyebrangan	Pengembangan trayek transportasi penyeberangan untuk mengantisipasi beban lalu lintas di jalan raya serta kondisi topografi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, antara lain:
		<ol style="list-style-type: none"> a. trayek Bolok – Naikliu – Teluk Gurita; b. trayek Labuan Bajo – Aimere; c. trayek Labuan Bajo- Marapokot;
Transportasi Laut		
1	Transportasi Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pelabuhan laut dan terminal peti kemas di kawasan Rangko/Ketentang Manggarai Barat. 2. Pengembangan prasarana pelabuhan serta jalan akses ke pelabuhan laut
Transportasi Udara		
1	Transportasi Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan trayek transportasi udara untuk mendukung sektor pariwisata Labuan Bajo – Tambolaka, Labuan Bajo – Maumere, Labuan Bajo – Lombok, Labuan Bajo – Surabaya, Labuan Bajo – Jakarta dan Labuan Bajo – Makasar; 2. Peningkatan fasilitas bandar udara Komodo meliputi fasilitas Bandar udara, run way, taxiway, apron dan fasilitas keselamatan penerbangan; 3. Peningkatan kelas bandara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi bandar udara pengumpul skala tersier sesuai dengan peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan.
2	Transportasi Udara	Studi lokasi

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

3. Sistem jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

a. Sistem jaringan energi

Kabupaten Manggarai Barat belum memiliki jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dikarenakan belum adanya kajian dan penelitian mengenai potensi minyak dan gas bumi di kabupaten ini.

b. Sistem jaringan ketenagalistrikan

Tabel 4. 50. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	PLTD	PLTMG	PLTMH	PLTS	PLTP	PLTB	PLTAL	PLTSa
1	Boleng	1	1		2				
2	Komodo	3			3			1	1
3	Kuwus	1							
4	Lembor	1							
5	Sano Nggoang					1			
6	Welak			1					
7	Mbeliling			1					
8	Macang Pacar				1				
9	Lembor Selatan				1		1		
Jumlah		6	1	2	7	1	1	1	1

Sumber : RTRW Kabupaten Manggarai Barat 2012-2032

c. Sistem jaringan telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap. Jaringan telekomunikasi tetap difungsikan untuk telekomunikasi publik dan sirkit sewa. Jaringan tetap terdiri atas Jaringan mikro analog dan Jaringan mikro digital terdiri atas jaringan serat optik Telkom dan jaringan serat optik Palapa Ring yang terdapat di Kabupaten Manggarai Barat.

Operator Seluler telah menggelar layanan 4G LTE di sebagian wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperlancar akses komunikasi masyarakat. Pembangunan menara telekomunikasi perlu ditambah agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini mengeluhkan buruknya jaringan operator di sebagian wilayah lainnya. Pembangunan menara telekomunikasi juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui usulan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bagian dari

komitmen pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan telekomunikasi dan dalam rangka membangun dari daerah pinggiran.

d. Sistem jaringan sumber daya air

Sumber air permukaan lainnya di Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas; embung di seluruh Kabupaten Manggarai Barat; waduk Wae Dongkong di Kecamatan Komodo dan waduk Wae Mese di Kecamatan Mbeliling; dan sumber air permukaan yang lain di setiap Kecamatan.

Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) kabupaten, terdiri atas:

- CAT Ruteng yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 3.724 Km² yang terletak pada titik koordinat BT 119° 50'12.45" – 120° 22'35.4", dan LS 08° 32'14.19" -08° 57' 34.56";
- CAT Labuan Bajo yang merupakan CAT dalam satu kabupaten Manggarai Barat dengan luas 413 Km², terletak pada koordinat BT 119° 47'52.8" – 120° 04'32.63" dan LS 08° 25'15.82" – 08° 47'44.72";
- CAT Lempe yang merupakan CAT lintas kabupaten dengan luas 398 Km², yang terletak pada titik koordinat BT 120° 03'58.98" – 120° 27'15.73" dan LS -08° 17'51.01" – 08° 31'10.40".

Adapun prasarana sumber daya air, terdiri atas:

- Sistem jaringan irigasi adalah jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, di setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat;
- Sistem pengendalian banjir, terdapat di Kecamatan Komodo, Kecamatan Boleng, Kecamatan Lembor, Kecamatan Lembor Selatan, Kecamatan Sanonggoang dan Kecamatan Macang Pacar serta Kecamatan Pacar Kabupaten Manggarai Barat;
- Jaringan air baku untuk air bersih, terdapat di seluruh desa di Kabupaten Manggarai Barat;
- Jaringan air bersih ke kelompok pengguna, terdiri atas:
 - Embung Cumbi di Kecamatan Komodo;
 - Embung Wol di Kecamatan Welak;
 - Embung Wae Wako, Siru di Kecamatan Lembor; dan
 - Embung Amba di Kecamatan Lembor Selatan.

Adapun rencana pola ruang wilayah menurut dokumen RTRW tahun 2012 - 2032 Kabupaten Manggarai Barat meliputi:

1. Kawasan lindung

- a. **Kawasan hutan lindung**, memiliki luasan kurang lebih 54.059,13 Ha yang tersebar di semua kecamatan;
- b. **Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya**, terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air;
- c. **Kawasan perlindungan setempat**, meliputi:
 - 1) Kawasan sempadan sungai, terdiri atas:
 - a) Kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman yang berjarak antara 50 meter hingga 100 meter di kiri dan kanan tepi sungai terdapat di Kecamatan Komodo, Lembor, Ndosso, Lembor Selatan, Macang Pacar dan Boleng;
 - b) Kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yang berjarak sekurang-kurangnya 10 meter kiri dan kanan tepi sungai terdapat di seluruh kecamatan.
 - 2) Kawasan sempadan pantai meliputi jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, berada pada Kecamatan Lembor Selatan, Komodo, Boleng, dan Macang Pacar.
 - 3) Kawasan sempadan mata air, yang memiliki luas 200 meter jari – jari yang diukur dari mata air dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
 - 4) Kawasan sempadan waduk / danau; berjarak antara 50 meter hingga 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi danau/waduk Kecamatan Sano Nggoang.
 - 5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, ditandai dengan keberadaan situs peninggalan sejarah di kabupaten Manggarai Barat. Kecamatan Komodo dan Kecamatan Boleng memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal berupa peninggalan batu balok. Kecamatan Lembor memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Wae Bangka dan Desa Ponto Ara. Desa Wae Bangka memiliki kearifan lokal berupa Compang Watu Manggar sedangkan Desa Ponto Ara memiliki kearifan lokal berupa Compang Lale Lombong. Kecamatan Welak memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa

Pong Welak berupa Watu Pong Welak. Kecamatan Kuwus memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Suka Kiong berupa Situs Altar Compang. Kecamatan Pacar memiliki kawasan lindung spiritual hampir disemua desa dengan kearifan lokal berupa Compang dan Mbaru Gendang. Kecamatan Pacar memiliki kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Desa Pacar berupa Compang Pacar dan Mbaru Gendang.

- 6) Ruang terbuka hijau, terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luas lebih kurang 60%.

d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas:

- 1) Kawasan cagar alam meliputi kawasan suaka alam rawa Wae Wul terdapat di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 1.484,84 Ha.
- 2) Kawasan pantai berhutan bakau yang tersebar di beberapa kecamatan berupa Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Manggarai Barat;
- 3) kawasan taman nasional dan taman nasional laut, terdiri atas:
 1. Kawasan taman nasional satwa terdapat di Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, pulau Gilimotang, Pulau Kambing Rinca, Pulau Kalong Rinca, Pulau Kalong Komodo, Batu Bolong, Pulau Papa Garang, Gili Lawa Laut, dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas kurang lebih 132.572 Ha
 2. Kawasan taman nasional laut perairan laut Sawu terdapat di wilayah selatan kabupaten Manggarai Barat yang terdiri atas 6 (enam) desa
- 4) kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut terdiri atas:
 1. Kawasan Pegunungan Mbeliling terdapat kecamatan Sano Nggoang dan Kawasan hutan Nggorang Bowosie yang terdapat didalamnya Air Terjun Cunca Wulang dengan luas kurang lebih 23.000 Ha.
 2. Kawasan taman wisata alam Taman Nasional Komodo terdapat di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, pulau Gilimotang, Pulau Kambing Rinca, Pulau Kalong Rinca, Pulau Kalong Komodo, Batu Bolong, Pulau Papa Garang, Gili Lawa Laut, dan beberapa pulau kecil lainnya dengan luas kurang lebih 173.300 Ha.
- 5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:

- 1) Desa adat dengan luas kurang lebih 500 Ha terdapat di dusun Tado Desa Nampar Macing kecamatan Sano Nggoang, desa Pacar kecamatan Macang Pacar, dan desa lain;
- 2) situs-situs purbakala dengan luas kurang lebih 100 Ha; dan
- 3) Taman Nasional dengan luas kurang lebih 173.300 Ha.

Berikut rincian luas kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat di setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 51. Luas Kawasan Hutan Lindung Per Kecamatan Di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Hutan Lindung	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya			Kawasan Perlindungan Setempat			Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
			Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Resapan Air	Total	Sempadan Sungai	Sempadan Pantai	Sekitar Danau/Waduk	Hutan bakau
1	Macang Pacar	8.066,00	8.066,00	3.049,69	11.115,69	525,04	331,25	-	577,79
2	Kuwus	1.126,27	1.126,27	-	1.126,27	132,68	-	-	-
3	Lembor	1.853,34	1.853,34	-	1.853,34	2.360,09	-	-	-
4	Sano Nggoang	10.070,07	10.070,07	1.011,60	11.081,67	1.103,41	-	96,41	-
5	Komodo	14.998,80	14.998,80	990	15.988,80	1.215,39	662,07	-	584,7
6	Boleng	2.670,97	2.670,97	2.104,20	4.775,17	716,28	353,83	-	864,79
7	Welak	231,01	231,01	1.657,19	1.888,20	1.300,14	-	-	-
8	Ndoso	279,54	279,54	-	279,54	557,84	-	-	-
9	Lembor Selatan	9.846,59	9.846,59	185,39	10.031,98	3.186,12	283,38	-	293,21
10	Mbeliling	2.771,32	2.771,32	182,72	2.954,04	718,03	-	-	-
11	Pacar	2.123,96	2.123,96	930,76	3.054,72	250,93	-	-	-
12	Kuwus Barat	21,26	21,26	-	21,26	267,91	-	-	-
TOTAL		54.059,13	54.059,13	10.111,55	64.170,68	12.333,86	1.630,53	96,41	2.320,49

Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

e. Kawasan rawan bencana, meliputi:

- 1) Kawasan rawan tsunami, yang terdiri dari tiga kelas
- 2) Kawasan rawan tanah longsor; terdiri atas:
 1. Kecamatan Sano Nggoang terdapat di Kampung Loha, Desa Golo Mbu, Lara (Desa Golo Kempo) dan Desa Golo Ndoal, Desa Watu Wangka, Wae Lolos, Golo Desat, Liang Dara, desa Kempo;
 2. Kecamatan Kuwus terdapat di Kelurahan Nantal, Desa Suka Kiong, Golo Ruu, Kolang, Lewur;
 3. Kecamatan Macang Pacar terdapat di Desa Golo Lajang, Desa kombo, Desa Nanga Kantor dan Desa Rokap;
 4. Kecamatan Ndosso terdapat di Waning, Tentang, Golo Poleng, Momol, Ndosso, Wae Buka;
 5. Kecamatan Lembor terdapat di Wae Bangka; dan
 6. Kecamatan Welak terdapat di desa Semang, Pengka, Dunta, dan Lawe.
- 3) Kawasan rawan gempa bumi terdapat di seluruh kecamatan;
- 4) Kawasan rawan banjir, terdiri atas:
 1. Kecamatan Macang Pacar terdapat di Desa Nggilat dan Desa Bari;
 2. Kecamatan Lembor Selatan terdapat di Desa Nanga Lili (lokasi pertemuan Sungai Wae Kanta, Wae Longge dan Wae Ara);
 3. Kecamatan Komodo terdapat di Desa Gorontalo dan Desa Macang Tanggar; dan
 4. Kecamatan Boleng terdapat di Desa Golo Sepang
- 5) Kawasan rawan gelombang pasang dan arus vortex dan/atau arus leher botol, yang selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya abrasi terdapat di Kecamatan Komodo, Boleng, Macang Pacar, Sano Nggoang dan Lembor Selatan. Arus vortex terdapat di selat Batu Tiga kawasan Taman Nasional Komodo dan arus laut yang sangat kuat di selat Molo.
- 6) Kawasan rawan bencana kekeringan, semua Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat kecuali Kecamatan Kuwus Barat.

Berikut rincian luas Kawasan rawan bencana dari setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 52. Luas Kawasan Rawan Bencana Per Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kerawanan Tsunami			Kerawanan Longsor			Kerawanan Gempa Bumi			Kerawanan Banjir			Kerawanan Abrasi			Kerawanan Gempa Bumi		
		KRB I Tsunami	KRB II Tsunami	KRB III Tsunami	KRB I Longsor	KRB II Longsor	KRB III Longsor	KRB I Gempa Bumi	KRB II Gempa Bumi	KRB III Gempa Bumi	KRB I Banjir	KRB II Banjir	KRB III Banjir	KRB I Abrasi	KRB II Abrasi	KRB III Abrasi	KRB I Kekeringan	KRB II Kekeringan	KRB III Kekeringan
1	Boleng	290,04	123,37	2504,77			18215	23369	5568,55	1045,3	1611	1793	257,88		1898			11743,84	18240,85
2	Komodo	194,54	133,08	12157,9	6325,84	41060	12395	92479	8329,05	340,14	4099	1821	84,18		15160			38339,12	62826,3
3	Kuwus						4892	5580,8										2186,52	3394,25
4	Kuwus Barat						4024,4	4547,1	63,23										4610,35
5	Lembor				1960,08	4188,4	2304,2	19032	1069,73		3059	928,8	29,55					13814,19	6287,91
6	Lembor Selatan	47,27	31,22	1422,62	5244,85	13514	1903	36252	916,5		5792	743,4	10,05		1498			25217,5	11950,57
7	Macang Pacar	88,39	55,7	1594,04		2445,3	13047	20702	6300,19	56,89	1170	376,5	9,32		1067			26440,65	618,17
8	Mbeliling				3853,9	779,07	10870	21334	2,37		320,8	15,43						62,3	21273,64
9	Ndoso						10411	11732	447,92									9949,39	2230,57
10	Pacar						9489,8	13857	2835,9	3,54	556,8	51,36			72,95			1918,1	14778,63
11	Sano Nggoang			35,21	6928,19	1079,3	10919	28010	629,32		1704	501,7	491,91					17669,41	10970,28
12	Welak				193,34	1432,3	9176,3	15580	140,14		551,2	10,65						6090,17	9630,25
TOTAL		620,23	343,37	17715	24506	64498	100000	300000	26303	1446	18864	6242	882,9		19696			153431,18	166811,79

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

f. Kawasan lindung geologi meliputi:

- 1) Kawasan cagar alam geologi, terdiri atas:
 - a) Kawasan keunikan batuan dan fosil, seperti Batu menyerupai balok yang terdapat di Desa Rinca, batu menyerupai balok dan meja di Desa Warloka, fosil kayu di kenari, batu menyerupai balok di Nggorang dan Merombok di Kecamatan Komodo, batu menyerupai balok di Desa Pota Wangka dan fosil kayu di Desa Tebedo Kecamatan Boleng, batu menyerupai balok di Desa Watu Umpu Kecamatan Welak, batuan menyerupai perahu dan jembatan di Wae Jare Kecamatan Mbeliling, dan batuan dasar/geoheritage yang terdapat di sekeliling Danau Sano Nggoang serta semua lokasi yang memiliki keragaman batuan, batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil), batuan yang memiliki nilai antropologi dan arkeologi dan batuan yang merupakan jejak struktur geologi masa lampau yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat;
 - b) Kawasan Keunikan bentang alam, antara lain gua batu cermin di Kecamatan Komodo, gua Liang Rodak di Kecamatan Mbeliling, gua ular (istana ular) di Kecamatan Welak dan semua gua yang berada dalam kabupaten Manggarai Barat. Air terjun Cunca Wulang, Cunca Rami, Cunca Lolos dan Cunca Polo dan semua air terjun yang ada tersebar di Kabupaten Manggarai Barat. Keindahan gugusan pulau-pulau (kecil dan besar) yang terdapat di dalam kawasan atau di luar kawasan Taman Nasional Komodo, Danau Sano Nggoang, kawasan Gunung mbeliling menerus sampai Sesok. Gugusan pegunungan dan bukit serta bentang alam karst yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
 - c) Kawasan Keunikan Proses Geologi, kawasan ini terdapat pada Danau Sano Nggoang (mataair panas Wae Nggerengguk) dan seluruh kawasan dengan kemunculan solfatura, fumarola dan semua lokasi yang memiliki keunikan proses geologi.
- 2) Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:

- a) Kawasan rawan letusan gunung berapi, terdapat di Danau Sano Nggoang (danau vulkanik) kecamatan Sano Nggoang;
 - b) Kawasan rawan gempa bumi, terdapat di seluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat;
 - c) Kawasan rawan abrasi; terdapat di seluruh wilayah pesisir kabupaten Manggarai Barat;
 - d) Kawasan rawan bahaya gas beracun, terdapat di danau Sano Nggoang kecamatan Sano Nggoang; dan
 - e) Kawasan rawan bencana gerakan tanah; terdapat diseluruh wilayah kabupaten Manggarai Barat.
- 3) Kawasan perlindungan terhadap air tanah, yang terdiri atas:
- a) Kawasan imbuhan air tanah pada Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri atas CAT Ruteng yang merupakan CAT lintas kabupaten (termasuk yang berada di Wilayah Kabupaten Manggarai) dengan luas 3.724 Km² yang terletak pada titik koordinat BT 119° 50'12.45" – 120° 22'35.4", dan LS 08° 32'14.19" - 08° 57' 34.56", CAT Labuan Bajo seluas kurang lebih 413 KM² terletak pada koordinat BT 119° 47'52.8" – 120° 04'32.63" dan LS 08° 25'15.82' – 08° 47'44.72" dan CAT Lempe seluas kurang lebih 398 KM² (termasuk yang berada di Wilayah Kabupaten Manggarai) yang terletak pada titik koordinat BT 120° 03'58.98" –120° 27'15.73" dan LS -08° 17'51.01" – 08° 31'10.40".
 - b) Kawasan sempadan mata air seluas kurang lebih 518,36 Ha, tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan sempadan mata air merupakan kawasan letaknya paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air, yang mana kawasan ini dibatasi oleh garis sempadan mata air. Adapun mata air yang terdapat di Kecamatan Komodo antara lain Wae Cumpe, di Kecamatan Mbeliling antara lain adalah Wae Kaca, Wae Mbaru, Wae Cecer, Wae Moto, Wae Mbaru, di Kecamatan Lembor antara lain Wae Mowol, dan lain-lain.
- 4) Kawasan lindung lainnya, terdiri atas:
- a) Kawasan cagar biosfer, meliputi Kawasan Taman Nasional Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 40.728 Ha

- b) Kawasan perlindungan plasma nutfah adalah Kawasan Taman Nasional Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 40.728 Ha, dan kawasan hutan Mbeliling seluas 25.793,55 Ha.
- c) Kawasan perlindungan satwa, terdiri atas:
- Kawasan pulau Komodo di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 17.500 Ha;
 - Kawasan pulau Padar di Kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 7.600 Ha;
 - Kawasan pulau Rinca di kecamatan Komodo dengan luas kurang lebih 15.628 Ha;
 - Kawasan hutan Mbeliling seluas 25.793,55 Ha; dan
 - Kawasan konservasi sumber daya alam Wae Wul di Kecamatan Komodo.
- d) Kawasan terumbu karang meliputi Kawasan Perairan laut Kabupaten Manggarai Barat di Kecamatan Macang Pacar, Boleng, Komodo, Lembor Selatan dengan luas kurang lebih 15.000 Ha.

2. Kawasan budidaya

Berikut rincian Luas Kawasan Budidaya peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, dan Kawasan peruntukan pertanian, Industri, Pariwisata, dan Permukiman di setiap kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 4. 53. Luas Kawasan Budidaya Per Kecamatan, Kabupaten Manggarai Barat

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Pertanian				Kawasan peruntukan industri		Kawasan Pariwisata	Kawasan Peruntukan Permukiman		
				Kawasan Tanaman Pangan	Kawasan Hortikultura	Kawasan Perkebunan	Kawasan Peternakan	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga		Kawasan Permukiman Perkotaan	Kawasan Permukiman Perdesaan	Total
1	Macang Pacar	-	4.531,73	1.112,45	5.357,02	417,8	4,99	28	178	-	423,95	359,57	783,52
2	Kuwus	-	173,99	791,61	301,07	44,54	-	16	143	-	38,7	180,07	218,77
3	Lembor	-	4.042,23	2.958,02	6.877,61	257,83	-	114	243	-	328,71	725,7	1.054,41
4	Sano Nggoang	-	9.556,15	1.146,04	2.412,90	1.206,27	-	36	108	11,15	138,69	581,3	719,99
5	Komodo	2.989,76	3.927,44	1.768,31	2.901,47	314,69	592,12	105	369	5.249,70	2.618,44	439,12	3.057,56
6	Boleng	10.220,69	4.643,47	2.372,58	518,9	763,28	3,71	50	32	107,28	857,38	256,69	1.114,07
7	Welak	591,08	13,5	1.541,29	8.676,37	671,45	-	17	12	-	151,3	399,86	551,16
8	Ndoso	-	1.994,93	1.401,08	2.219,73	53,69	-	-	-	-	76,06	473,66	549,72
9	Lembor Selatan	-	1.859,51	2.513,03	10.654,35	2.423,72	2.000,33	0	12	818,52	308,98	528,43	837,41
10	Mbeliling	1.740,33	7.055,89	1.226,53	2.841,42	44,91	72,42	0	73	1.996,51	52,28	531,87	584,15
11	Pacar	2.270,68	2.865,02	1.578,63	2.604,38	283,97	-	-	-	-	146,27	264,23	410,5
12	Kuwus Barat	-	563	749,07	304,09	154,54	-	-	-	-	89,6	134,09	223,69
TOTAL		17.812,54	41.226,86	19.158,64	45.669,31	6.636,69	2.673,57	366	1170	8183,16	5.230,36	4.874,59	10.104,95

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat, 2018

4.2. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Manggarai Barat

Dari kondisi pembangunan dan permasalahan yang dihadapi serta mencermati lingkungan eksternal baik regional maupun nasional, maka dapat ditarik beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. Isu-isu strategis ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah, yang akan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang. Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Barat itu antara lain sebagai berikut.

4.2.1. Manggarai Barat sebagai destinasi wisata super prioritas

Sejalan dengan kebijakan nasional yang menetapkan Manggarai Barat terutama Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas nasional, maka pariwisata merupakan isu penting dalam perencanaan pembangunan ke depan. Pemerintah pusat telah membentuk Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Kehadiran BOPLBF merupakan representasi pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Oleh karena itu, pariwisata merupakan sektor strategis yang bisa menjadi katalisator pembangunan di Kabupaten Manggara Barat.

Namun demikian, pengembangan pariwisata membutuhkan upaya lintas sektor. Pembangunan pariwisata tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas destinasi wisata dan juga objek wisata tapi membutuhkan upaya komprehensif di berbagai sektor. Pengembangan pariwisata harus didukung oleh penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang hingga saat ini belum memadai. Berdasarkan data yang ada, lebih dari 50% penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga sekolah dasar dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,19 tahun. Pada saat yang sama, pengembangan pariwisata juga membutuhkan intervensi yang massif pada sektor infrastruktur yang hingga saat ini masih menjadi isu besar. Peningkatan akses ke destinasi wisata sudah menunjukkan perkembangan yang

massif, namun demikian hal itu belum sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur dasar lainnya seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.

Dari sisi tatakelola, penetapan Kawasan Komodo dan Labuhan Bajo sebagai kawasan super prioritas dalam pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) membawa tantangan tersendiri. Tantangan berupa sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, Provinsi NTT, dan Kabupaten Manggarai Barat. Kebijakan daerah di satu sisi perlu sinkron untuk menopang prioritas pembangunan nasional, namun di sisi lain kebijakan nasional juga perlu memperhatikan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat lokal dan tata ruang wilayah.

Tingginya intensitas pembangunan pariwisata juga berimplikasi tidak hanya pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus membawa tantangan sosial. Gencarnya pembangunan di Manggarai Barat mulai memunculkan potensi konflik, terutama berupa sengketa tanah. Pembangunan pariwisata yang pesat juga masih memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membawa dampak multiganda. Berdasarkan data kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2020, jumlah penduduk miskin paling banyak terdapat pada Kecamatan Komodo dan Kecamatan Lembor. Kedua kecamatan tersebut justru merupakan daerah pusat pariwisata dan pusat pertanian. Artinya, potensi ekonomi yang tinggi belum disertai dengan tingkat kesejahteraan pada masyarakat setempat. Para pelaku wisata baik pada sektor formal maupun informal masih didominasi oleh masyarakat luar Manggarai Barat. Sedangkan pada pertanian, masih belum terintegrasinya aspek pertanian dengan pariwisata.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka tantangan terbesar dalam pembangunan pariwisata di Manggarai Barat adalah aspek keberlanjutan. Hingga saat ini konsen pemangku kepentingan masih bertumpu pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pengeluaran wisatawan. Namun pada saat yang sama, aspek keberlanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan belum menjadi prioritas. Berkembangnya pariwisata berpotensi menimbulkan efek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sangat besar mulai dari makin besarnya ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu,

pembangunan pariwisata harus diintervensi dengan cara komprehensif dan bertumpu pada tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Hal lain yang juga krusial dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan wisata di masa pandemi adalah penerapan protokol kesehatan. Saat ini, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menentukan standar penerapan pariwisata di masa pandemi dengan sebutan CHSE atau kebersihan (Cleanliness), kesehatan (Health), Keamanan (Safety), dan Kelestarian Lingkungan (Environmental Sustainability). Hal ini merupakan isu yang sangat strategis dalam masa pemulihan pasca Covid-19. Harapannya, peningkatan kegiatan wisata selaras dengan upaya pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19.

4.2.2. Manggarai Barat sebagai wilayah pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor terbesar yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Barat. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Manggarai Barat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang semakin menurun dari tahun 2015 hingga 2019. Kondisi ini berkorelasi terhadap kesejahteraan petani dan upaya penanggulangan kemiskinan. Menurunnya kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, masih rendahnya kualitas produk pertanian dan masih kurangnya nilai tambah produk-produk pertanian.

Ketiga faktor tersebut harus diintervensi dengan baik agar pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* yang baik bagi sektor pertanian. Jaringan kerjasama (*linkage*) antara sektor pariwisata dan pertanian harus dipererat. Kualitas produk-produk pertanian harus ditingkatkan agar mampu mensuplasi kebutuhan makan dan minum sektor pariwisata. Selain itu, ragam produk-produk olahan hasil pertanian juga harus ditingkatkan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Manggarai Barat. Upaya ini juga

dapat dijalankan untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, terutama di beberapa wilayah pusat pertanian yang menjadi kantong kemiskinan.

4.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia seringkali dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pada level global, target pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara eksplisit menasar pembangunan sosial yang meliputi pengembangan SDM. Melihat kebijakan nasional, pembangunan manusia juga menjadi salah satu dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Pada level daerah, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 menempatkan isu SDM sebagai salah satu fokus pembangunan. Isu strategis yang berkaitan dengan SDM di level Provinsi lebih berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan terhadap semua penduduk. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan SDM menjadi salah satu pilar utama yang menunjang pada pembangunan di sektor lainnya.

Pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat diukur dengan cara melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM menunjukkan pembangunan manusia berdasarkan tiga urusan besar, yaitu pendidikan, kesehatan dan tingkat kehidupan layak. Capaian IPM Kabupaten Manggarai Barat mengalami tren yang meningkat sejak 2017 hingga 2019. Rata-rata peningkatan IPM Kabupaten Manggarai Barat setiap tahunnya adalah 0.92. Meskipun mengalami tren yang positif, capaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan karena masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Barat, terutama berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak masyarakatnya.

4.2.4. Stabilitas ekonomi serta pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan

Isu strategis di rumpun urusan ekonomi terkait dengan persoalan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan dan potensial. Pertumbuhan ekonomi di sektor unggulan terkait dengan beberapa urusan, seperti pertanian, konstruksi dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor ini menjadi seharusnya mampu menjadi pemimpin bagi pertumbuhan ekonomi, namun tren pertumbuhan di beberapa sektor tersebut cenderung menurun mulai tahun 2016 hingga 2020. Persoalan pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan permintaan dan penawaran barang serta jasa di sektor tersebut. Kondisi ini menyebabkan kapasitas produksi dan pemasaran terpengaruh, sehingga kapasitasnya semakin menurun. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian juga dipengaruhi oleh beberapa persoalan mendasar, seperti kapasitas sumber daya manusia petani yang kurang memadai, belum optimalnya penerapan metode pertanian berorientasi agribisnis dan kurangnya ketersediaan sarana serta prasarana pertanian.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat di sektor pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani yang semakin menurun dan diikuti oleh pertumbuhan yang besar di sektor ekonomi tersier, menyebabkan perbedaan pendapatan antar sektor dan antar kelas ekonomi. Kondisi ini berpengaruh terhadap menurunnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat juga terkait dengan kinerja sektor koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak masyarakat Kabupaten Manggarai Barat yang bekerja dan menggantungkan mata pencahariannya di sektor UKM. Jika sektor ini dikelola dengan baik, maka kinerja ekonomi sektor ini akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat kecil dan menengah. Kondisi ini dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Persoalan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan yang belum berjalan dengan optimal. Kemiskinan dengan pendekatan *basic need approach* sangat terkait dengan pendapatan masyarakat. Faktor tersebut memiliki korelasi dengan

kekuatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jika pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian meningkat dan diikuti oleh meningkatnya kesejahteraan petani, maka upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Peningkatan produksi dan kapasitas pemasaran produk-produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menurunkan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat. Kapasitas pemasaran produk pertanian dan perikanan juga harus ditingkatkan dan dihubungkan secara berkesinambungan dengan pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini sangat penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan *multiplier effect* yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

4.2.5. Infrastruktur dasar untuk menopang perekonomian yang berkelanjutan

Infrastruktur merupakan faktor pendukung di semua sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah. Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Manggarai Barat masih perlu untuk ditingkatkan, karena dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih belum optimal. Dampak dari rendahnya kondisi infrastruktur wilayah di Kabupaten Manggarai Barat adalah produktivitas masyarakat masih rendah, pelayanan kesehatan kurang optimal, peluang pengembangan objek wisata baru di luar Pulau Komodo dan Rinca belum berjalan baik, serta pemasaran produk pertanian ke Labuan Bajo sebagai pasar potensial belum bisa dilakukan dengan cepat.

Infrastruktur dasar jaringan jalan menjadi hal utama permasalahan wilayah, seperti kualitas jaringan jalan kabupaten maupun jalan lingkungan yang masih belum baik. Kondisi jalan terlihat sangat memprihatinkan pada saat musim hujan, jalan menjadi sulit untuk dilewati karena berlumpur. Walaupun konektivitas seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai Barat sudah terhubung jaringan jalan, namun aksesibilitasnya masih kurang dengan kondisi kualitas jalan yang belum baik. Selain perhubungan darat, hal lain yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah tentang perhubungan laut, dengan kondisi wisata utama di Manggara Barat adalah wisata laut, permasalahan perhubungan laut menjadi penting untuk diperhatikan.

Sumber daya air di Kabupaten Manggarai Barat tergolong melimpah, kondisi mata air tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten. Namun yang menjadi permasalahan yakni belum optimalnya pengadaan saluran yang mengalirkan air bersih dari sumber air menuju permukiman masyarakat, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat masih belum terpenuhi. Bahkan pada kondisi tertentu, masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Selain akses terhadap air bersih, masyarakat juga masih sulit untuk mengakses saluran air limbah yang memadai. Pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Manggarai Barat, namun kondisi persawahan belum didukung dengan jaringan irigasi yang memadai. Kondisi jaringan irigasi yang belum baik menyebabkan aliran air menuju persawahan menjadi kurang optimal, sehingga menyebabkan hasil produksi pertanian tidak maksimal.

Hal lain yang seringkali ditemui dalam pembangunan yaitu kesesuaian dengan rencana tata ruang dan pilihan antara kepentingan ekonomi atau lingkungan hidup. Pembangunan wilayah yang identik dengan aktivitas pemanfaatan ruang tentu harus mempedomani rencana tata ruang, baik struktur maupun pola ruang. Selain itu, pembangunan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah.

4.2.6. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan pelayanan publik yang prima

Perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terhadap pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat sangatlah tinggi. Namun hal itu belum didukung oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur di Kabupaten Manggarai Barat masih tergolong lemah serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik juga masih belum berjalan optimal sehingga pelayanan publik masih terkesan lamban dan berbelit

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat yang sejauh ini belum berjalan secara optimal dapat dilihat dari masih rendahnya Indeks Pelayanan

Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2018 sebesar 53,76 dengan predikat CC. Kondisi tersebut menuntut pelebagaan reformasi birokrasi yang sinergis diseluruh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian komponen pengungkit maupun komponen hasil dari reformasi birokrasi.

Dari sisi aspek pengawasan, Kabupaten Manggarai Barat memiliki Maturitas SPIP sebesar 2,77. Sedangkan dari sisi akuntabilitas keuangan sudah menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun dengan beberapa catatan.

Hal lain yang menunjukkan kinerja tata kelola pemerintahan yang masih rendah adalah masih belum optimalnya capaian SAKIP (63,18/B) yang erat kaitannya dengan keterpaduan antara perencanaan dan akuntabilitas pemerintahan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis antara kepala daerah dengan struktur perangkat daerah.

Selain itu, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat juga masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang hanya dilakukan di 3 perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan rata-rata nilai sebesar 2,52. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di seluruh Perangkat Daerah sifatnya menjadi penting untuk melihat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Barat secara menyeluruh dari sisi pengguna yaitu masyarakat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi mencerminkan kondisi yang akan dicapai di akhir periode perencanaan, sedangkan misi merupakan rumusan umum sebagai upaya untuk mencapai visi. Visi dan misi diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang merujuk kepada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025 dan mempertimbangkan pemetaan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang berkembang dan menentukan arah pembangunan.

5.1. Visi

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dielaborasi dengan kebutuhan dan isu strategis pembangunan daerah yang harus direspon. Rumusan visi dan misi didasarkan pula pada RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025, yang pada periode terakhir pembangunan jangka panjang ini memiliki tema pembangunan berupa “Pengelolaan Pertumbuhan Ekonomi, Dunia Pariwisata, Penciptaan Lapangan Kerja dan Pendapatan, Mobilisasi Investasi dan Kerjasama antar Daerah”. Berangkat dari berbagai dasar tersebut, visi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026, yaitu:

Visi:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”.

Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Mabar Bangkit**, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata “Bangkit” mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Dalam Konteks Visi tersebut, kata “Bangkit” dimaknai sebagai berikut:

- **Bangkit** merupakan seruan dan ajakan untuk membangun kebulatan tekad bersama masyarakat Manggarai Barat untuk *“bangun dari tidurnya”* dan berjuang bersama melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pembangunan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi pertanian.
- **Bangkit** juga dimaknai sebagai suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit juga sebuah ajakan bersama yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat Manggarai Barat untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan **semangat restorasi**. Semangat restorasi diharapkan membawa kerja keras seluruh komponen untuk mengejar ketertinggalan Kabupaten Manggarai Barat dalam berbagai dimensi pembangunan.

2. **MANTAP** merupakan singkatan dari Maju, Unggul, Tangguh dan Populer.

- **Mabar Mantap** mengandung pengertian sebuah sikap hati/keyakinan bersama dan optimisme untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Pembangunan daerah difokuskan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang merata, berkualitas dan memadai.
- **Mabar Mantap** juga bermakna terwujudnya kualitas SDM yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif, jujur, beretika dan berintegritas, sehingga mampu bersaing secara kompetitif dan

komparatif di berbagai bidang kehidupan. Melalui **Mabar Mantap**, prioritas pembangunan akan diarahkan berdasarkan potensi daerah setempat melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan berbagai aspek pembangunan sehingga mampu mandiri dan menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada sektor pariwisata dan pertanian.

- **Mabar Mantap** juga memberi arti bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan sepenuhnya berpihak pada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat.

3. Mabar Bangkit menuju Mabar Mantap menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Manggarai Barat menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah guna mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam setiap dimensi pembangunan untuk **Masyarakat Manggarai Barat Yang Maju, Unggul, Tangguh Dan Populer**.

5.2. Misi

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Manggarai Barat. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi

Kabupaten Manggarai Barat memiliki karakteristik pariwisata yang unik dan memiliki keunggulan komparatif. Karakteristik tersebut ditopang dengan perhatian pemerintah pusat yang besar bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Pembangunan pariwisata Manggarai Barat perlu dikerangkai dalam konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan pariwisata yang inklusif tidak hanya digerakkan dan menggerakkan sektor pariwisata sendiri, melainkan juga menjadi lokomotif

utama atau pemicu (*trigger*) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pariwisata yang inklusif digerakkan oleh lintas sektor dan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Berpijak dari pembangunan yang inklusif, pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dapat dijalankan, yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah, sekaligus mampu diterima dan diwarnai oleh budaya lokal dan membawa kesejahteraan masyarakat, serta tidak kalah penting tetap membawa manfaat bagi kelestarian lingkungan.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat *dalam* mendapatkan pelayanan dasar yang tanggap, cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman. Selain itu, Misi 2 juga menjadi upaya untuk menjalankan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga tidak terdapat ketimpangan akses bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Potensi ekonomi Manggarai Barat yang melimpah, antara lain berupa pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dioptimalkan untuk membangun daya saing daerah. Pembangunan daya saing yang berbasis potensi *lokal* diharapkan semakin memperkuat struktur perekonomian daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Perekonomian daerah yang kokoh juga ditopang oleh pelaku UMKM yang mampu menjaga eksistensi dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, Manggarai Barat sebagai prioritas pembangunan nasional, terutama di bidang pariwisata, perlu direspon dengan membangun iklim investasi yang kondusif. Peningkatan investasi tetap diarahkan agar mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga gerak perekonomian Manggarai Barat yang

semakin meningkat, beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas perekonomian, serta membuka aksesibilitas daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir. Pembangunan infrastruktur dalam Misi 4 juga terkait peningkatan kelayakhunian, yang sekaligus memiliki sasaran khusus untuk ikut menjalankan upaya pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni. Tidak kalah penting, Misi 4 juga mengarahkan derap pembangunan infrastruktur yang menopang aktivitas perekonomian tetap mampu menjaga kesesuaian dengan kebijakan tata ruang wilayah, menjaga daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup, serta meningkatkan ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

Kebijakan utama dalam menjalankan Misi 5 adalah penerapan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Penerapan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan di dalam Misi 5 juga terkait implementasi prinsip partisipasi publik dalam pembangunan yang semakin meningkat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Efektivitas pembangunan daerah juga ditopang dengan peningkatan keberdayaan desa. Oleh karena itu, Misi 5 juga memiliki prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan optimalisasi *pembangunan* desa melalui kelembagaan masyarakat desa yang kuat dalam mengelola potensi lokal desa.

Kelima rumusan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 perlu memiliki keterkaitan dengan misi pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keterkaitan tersebut memberikan kerangka umum adanya sinergi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Visi dan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026	RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023
<p>Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing</p> <p>Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa</p>	<p>Misi 1: Mengembangkan Pariwisata secara Berkelanjutan dan Inklusif sebagai Penggerak Utama Ekonomi</p>	<p>Misi 2: Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (<i>Ring of Beauty</i>)</p>
<p>Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia</p>	<p>Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas</p>	<p>Misi 4: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia</p>
<p>Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing</p>	<p>Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal</p>	<p>Misi 1: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Adil</p>
<p>Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan</p> <p>Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan</p>	<p>Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan</p>	<p>Misi 3: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan</p>
<p>Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya</p> <p>Misi 7: Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga</p> <p>Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya</p> <p>Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan</p>	<p>Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani</p>	<p>Misi 5: Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</p>

Misi RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan Misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan baik dari sisi jumlah maupun muatan substansi yang terkait langsung. Selain aspek umum pembangunan berupa sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, keterkaitan tersebut juga berupa rumusan misi khusus tentang pariwisata. Adanya keterkaitan ini diharapkan mampu membangun sinergi antara Manggarai Barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Misi RPJMD Manggarai Barat juga memiliki keterkaitan substansi dengan Misi RPJMN, yaitu satu Misi RPJMD mengandung beberapa Misi RPJMN. Muatan Misi RPJMN tersebut terlihat pula dalam penjelasan Misi RPJMD.

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam setiap tujuan memiliki rumusan sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi yang akan dicapai memiliki indikator kinerja hasil dan dampak sebagai alat ukur keberhasilan. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Visi: "MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP"

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah										
Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah		Indikator Tujuan: Indeks Pariwisata Inklusif	Angka	NA	60	62,5	65	67,5	70	70
	Semakin meningkatnya daya tarik pariwisata Manggarai Barat	Indikator Sasaran: Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	5,8	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9
		Indikator Sasaran: Persentase kunjungan wisatawan	Persen	NA	10	25	45	70	100	100
	Meningkatnya perekonomian masyarakat sektor pariwisata	Indikator Sasaran: <i>Spend of money</i>	USD/hari	USD 118,25	USD 125,29	USD 128,12	USD 137,36	USD 141,79	USD 152,17	USD 152,17
	Meningkatnya kelestarian Budaya Daerah	Indikator Sasaran : Persentasi Budaya Yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas										
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63,5	64,42	65,34	66,26	67,18	68,10	68,10

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Indikator Sasaran: Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,26	8,61	8,73	8,849	8,97	9,09	9,09
		Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,59	13,49	14,05	14,61	15,17	15,73	15,73
		Indikator Sasaran: Presentase sekolah SD berakreditasi B	Persen	58.76%	63.40%	68.04%	72.68%	77.32%	81.96%	81.96%
		Indikator Sasaran: Presentase sekolah SMP berakreditasi B	Persen	76%	80.05%	84%	88.15%	92.20%	96.25%	96.25%
	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Indikator Sasaran: Indeks literasi masyarakat	Indeks	4,48	6,36	6,93	7,51	8,10	8,67	8,67
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	67,12	67,58	68,04	68,5	68,96	69,42	69,42
		Indikator Sasaran: Prevalensi Stunting	Persen	19,06%	17,06%	15,06%	13,06%	11,06%	9,06%	9,06%
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Indikator Sasaran: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka	2,48	2,46	2,44	2,42	2,40	2,38	2,38
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Indikator Sasaran: Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	64,81	65,81	66,81	67,81	68,81	69,81	69,81

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indikator Sasaran: Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	Peringkat	N/A	10	10	9	9	8	8
Meningkatnya Keberdayaan Sosial		Indikator Tujuan: Angka PMKS	Angka	81.770	81.270	80.770	80.270	79.770	79.270	79.270
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Indikator Sasaran: Persentase PMKS yang tertangani	Persen	86,96%	88,56	90,16	91,76	93,36	94,96	94,96
		Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	65,61	67,24	68,87	70,5	72,13	73,76	73,76
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indikator Sasaran: Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	87,17	87,32	87,47	87,62	87,77	87,92	87,92
		Indikator Sasaran: Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 3: Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal										
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang		Indikator Tujuan: Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	0,89	5,76	5,86	5,97	6,08	6,19	6,19
		Indikator Tujuan:	Juta rupiah	12,6	13,4	14,2	15	15,8	16,6	16,6

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
berkualitas dan inklusif		PDRB Per Kapita								
	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	41,05	42,23	42,82	43,41	44	44,59	44,59
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,92	10,27	10,41	10,55	10,70	10,84	10,84
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Persen	0,450	0,454	0,456	0,458	0,460	0,462	0,462
	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi nilai PMA	Persen	20	30	40	50	60	70	70
		Indikator Sasaran: Persentase peningkatan realisasi nilai PMDN	Persen	24	28	32	36	42	48	48
		Indikator Tujuan: Indeks Gini	Angka	0,356	0,340	0,332	0,324	0,316	0,308	0,308
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Indikator Sasaran: Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	Persen	47	54	57	59	62	64	64

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indikator Sasaran: Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	Persen	17,27	20,67	21,84	23,02	24,19	25,36	25,36
		Indikator Tujuan: Laju Inflasi	Angka	3-3,4	3-3,2	3-3,2	3-3,2	3-3,2	3-3,2	3-3,2
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indikator Sasaran: Indeks ketahanan pangan	Nilai	71,05	74,09	75,61	77,13	78,65	80,17	80,17
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Indikator Sasaran: Indeks Harga Konsumen	Nilai	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53	104,44-104,53
		Indikator Tujuan: Tingkat kemiskinan	Nilai	18,01	16,18	15,65	15,09	14,55	14,01	14,01
	Menurunnya pengangguran	Indikator Sasaran: Tingkat pengangguran terbuka	Nilai	3,73	3,51	3,40	3,29	3,18	3,07	3,07
Misi 4: Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Kelestarian Lingkungan										
Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah		Indikator Tujuan: Indeks Infrastruktur Daerah	Nilai	54,35	61,35	64,77	67,41	69,89	72,49	72,49
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Indikator Sasaran: Tingkat kemantapan jalan	Nilai	52,77	59,29	62,55	65,81	69,07	72,33	72,33
	Meningkatnya ketersediaan air baku	Indikator Sasaran: Rasio luas daerah pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Persen	0,514	0,536	0,547	0,558	0,569	0,580	0,580

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indikator Sasaran: Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Persen	61,01	69,63	74,39	79,47	84,90	90,70	90,70
	Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	79,24	92,71	98,60	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Indikator Sasaran: Rasio konektivitas	Persen	0,33	0,40	0,44	0,49	0,54	0,59	0,59
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Indikator Sasaran: Rasio rumah layak huni	Persen	0,366	0,379	0,385	0,390	0,396	0402	0,402
	Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Indikator Sasaran: Persentase kesesuaian fungsi, struktur, dan pola ruang (RTRW)	Persen	62,27	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62,19	64,69	68,66	72,63	76,60	76,81	76,81
	Meningkatnya kualitas air	Indikator Sasaran: Indeks kualitas air	Nilai	35,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	70,00
	Meningkatnya kualitas udara	Indikator Sasaran: Indeks kualitas udara	Nilai	89,70	91,09	91,56	92,03	92,50	92,98	92,98
	Meningkatnya kualitas lahan	Indikator Sasaran: Indeks kualitas lahan	Nilai	58,00	58,25	58,34	58,42	58,51	58,59	58,59

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya penanganan persampahan	Indikator Sasaran: Persentase sampah yang tertangani	Persen	77,32	84,88	87,51	90,23	93,03	95,92	95,92
Menurunnya risiko bencana		Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	163,57	161,70	160,77	159,85	158,93	158,02	158,02
	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Indikator Sasaran: Angka Korban Bencana	Angka	8	0	0	0	0	0	0
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani										
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis		Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	53,76	65	68	71	74	77	77
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Nilai	63,12 (B)	66	69	72	75	81	81
		Indikator Sasaran: Nilai EKPPD	Nilai/pre dikat	NA	2,8500	2,9000	2,9500	3,0000	3,0500	3,0500
		Indikator Sasaran: Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indikator Sasaran: Kontribusi PAD (juta rupiah)	Juta rupiah	146.157	339.650	498.794	718.472	1.002.585	1.306.799	1.306.799
		Indikator Sasaran: Indeks Arsip	Nilai	48,8	50	62,5	75	87,5	100	100
		Indikator Sasaran: Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	NA	60,00	79,60	79,70	79,80	79,90	79,90

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
		Indikator Sasaran: Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Nilai	NA	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indikator Sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,15	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95
		Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	56,13	62	65	68	71	74	74
	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72,10	74	76	78	80	82	82
Meningkatnya kemandirian desa		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,5574	0,6074	0,6324	0,6574	0,6824	0,7074	0,7074
	Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase desa berkembang	Persen	18,93	24,85	27,81	30,76	33,72	36,68	36,68
Terwujudnya kondusivitas sosial masyarakat		Indikator Tujuan: Angka Konflik Sosial	Angka	3	3	2	2	1	0	0
	Meningkatnya ketentraman dan kerukunan hidup masyarakat	Indikator Sasaran: Persentase potensi konflik yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Secara umum bab ini mencakup tiga poin besar, yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, dan program pembangunan daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan arah kebijakan merupakan operasionalisasi dari masing-masing strategi. Selain itu, rumusan strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan memperhatikan rumusan masalah dan akar masalah dari setiap urusan yang sudah dijabarkan pada Bab IV. Strategi yang dirumuskan akan menjadi panduan dalam merumuskan program pembangunan maupun perangkat daerah, sedangkan arah kebijakan akan menjadi petunjuk bagi perumusan kegiatan pada level Renstra. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 6. 1. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah			
Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Semakin meningkatnya daya tarik pariwisata Manggarai Barat	Peningkatan kualitas daya tarik wisata	Optimalisasi kajian dan pengembangan terhadap potensi destinasi wisata baru
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata yang inklusif
			Penyiapan SDM melalui pemberdayaan komunitas
			Penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata
		Peningkatan pemasaran destinasi wisata	Peningkatan promosi pada pasar regional dan global
			Peningkatan promosi tidak langsung (luring dan daring)
		Pengembangan destinasi wisata berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan
			Peningkatan pemanfaatan ekonomi destinasi wisata untuk masyarakat lokal
			Penyediaan sarana dan prasarana ramah lingkungan
		Penguatan kelembagaan dan kerjasama pariwisata	Integrasi kerjasama dengan sektor-sektor terkait
Intergrasi pariwisata dengan Pokdarwis, Bumdes, BUMD dan lembaga usaha lainnya			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dalam mendorong Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium
			Pemanfaatan nilai budaya untuk menopang pariwisata
	Meningkatnya perekonomian masyarakat sektor pariwisata	Pengintegrasian ekonomi masyarakat untuk menopang kegiatan wisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi di sekitar destinasi wisata
			Fasilitasi pemasaran produk lokal di sekitar destinasi wisata
		Peningkatan kapasitas produksi ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas SDM pelaku Ekraf
			Peningkatan kualitas sarana / teknologi penopang ekraf
			Peningkatan kemudahan terhadap akses bantuan permodalan
			Peningkatan ketersediaan bahan baku produksi
			Pengembangan metode produksi berorientasi bisnis
			Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif
		Penerapan standar sertifikasi produk Ekraf	
		Meningkatnya kelestarian Budaya Daerah	Peningkatan pelestarian budaya dan kesenian daerah
	Peningkatan peran lembaga adat dalam pengembangan nilai budaya		
	Peningkatan kolaborasi budaya dengan kegiatan pariwisata		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi identifikasi dan pengelolaan seni budaya
			Peningkatan kelembagaan tata kelola seni budaya
Visi: Jabar Bangkit Menuju Jabar Mantap			
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Peningkatan fasilitas pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP	Pembangunan dan pembaharuan gedung pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP
		peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	peningkatan kualitas pengelolaan dapodik
			peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
			peningkatan sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan dana pendidikan
			peningkatan monitoring pengelolaan sistem pendidikan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	peningkatan kompetensi guru
			peningkatan keprofesian guru
			peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
			pengembangan kurikulum muatan lokal
			Pengembangan pendidikan karakter sejak usia dini
			peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		peningkatan daya saing siswa	peningkatan standar isi, standar proses, standar evaluasi dan standar kelulusan di tingkat satuan pendidikan
			Fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi
	Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan	peningkatan fasilitas penunjang layanan perpustakaan
			peningkatan koleksi buku perpustakaan
			peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan
			pengembangan layanan perpustakaan
			peningkatan pembinaan perpustakaan
			peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebiasaan membaca
			Peningkatan kesadaran membaca masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas ibu	peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
			peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			peningkatan penanganan komplikasi saat persalinan
			peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
			peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Lahir Rendah (BBLR)	
			peningkatan gizi bayi	
			peningkatan Imunisasi dasar Lengkap (IDL)	
		Peningkatan penanganan gizi buruk dan <i>Stunting</i>	memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil	
			memenuhi gizi bayi dan balita	
			optimalisasi pemberian PMT	
			peningkatan penerapan PHBS	
		peningkatan penanganan penyakit menular dan tidak menular	peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang	
			peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyakit menular dan tidak menular	
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan kesehatan	
			peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas	
			peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan	
			peningkatan pengawasan obat dan makanan	
		peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	peningkatan peran kader kesehatan	
			peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan kesehatan	
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Peningkatan cakupan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pengendalian penduduk dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			keluarga bencana	
			Peningkatan partisipasi/akseptor KB aktif	
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB	
			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	
		Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	
			Pencegahan kasus pernikahan dini	
			Pengembangan <i>grand design</i> kependudukan	
			Peningkatan pemanfaatan data kependudukan	
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Peningkatan kompetensi pemuda
				Pembinaan terhadap kelompok pemuda untuk bergerak di sektor ekonomi
	Peningkatan pengembangan organisasi kepemudaan		Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan	
			Fasilitasi pendaftaran pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
			Optimalisasi peran organisasi kepramukaan	
	Peningkatan fasilitasi dan dukungan terhadap	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		kegiatan keolahragaan	Peningkatan kualitas dan kualifikasi SDM pelatih	
			Peningkatan pembinaan atlet muda berdasarkan minat dan bakat	
			Peningkatan pengelolaan manajemen olahraga daerah	
Meningkatnya Keberdayaan Sosial	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Peningkatan tata kelola penanganan PMKS	Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	
			Peningkatan upaya rehabilitasi sosial diluar panti	
			Peningkatan pemberdayaan PMKS	
			Peningkatan kapasitas shelter sosial	
			Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	
	Peningkatan kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial	Peningkatan kontrak kerjasama dengan lembaga swasta, LSM dan panti dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peningkatan pembinaan dan peran lembaga sosial masyarakat	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial	
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan		Peningkatan pelembagaan pengarusutamaan gender
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			publik
			Mendorong perempuan untuk lebih aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Peningkatan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan
			Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan
			Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan
		Peningkatan perlindungan terhadap anak	Peningkatan fasilitas layanan pengaduan
			Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
			Peningkatan kesadaran hak-hak anak
			Peningkatan sarana dan prasarana ramah anak

Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap

Misi 3: Mengembangkan Daya saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan ketersediaan irigasi usaha tani
			Peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan system irigasi
			Perluasan lahan pertanian
			Penurunan alih fungsi lahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketersediaan jalan usaha tani
			Peningkatan sarana pertanian (benih unggul, pupuk, obat-obatan dan sarana penunjang lainnya)
			Penurunan serangan hama penyakit dan dampak perubahan iklim
			Penerapan metode pertanian berorientasi agribisnis
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan petani
			Peningkatan ketersediaan tanaman produktif
			Peningkatan sarana produksi perkebunan
		Peningkatan kualitas produk pertanian	Peningkatan penerapan <i>good handling practices</i>
		Peningkatan produksi hasil ternak	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan
			Peningkatan ketersediaan pakan
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul
			Penurunan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas produk hasil ternak	Peningkatan standarisasi penanganan produk pasca panen
		Peningkatan populasi ternak	Peningkatan kelahiran ternak
			Peningkatan kesehatan ternak
			Penurunan tingkat kematian ternak
		Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan sarana penangkapan
			Peningkatan kapasitas SDM nelayan
			Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok nelayan
		Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan ketersediaan pakan bersubsidi
			Peningkatan ketersediaan bibit unggul
			Peningkatan akses bantuan modal
			Peningkatan penguasaan teknologi
			Peningkatan metode budidaya berorientasi agribisnis
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok perikanan budidaya
	Peningkatan kualitas produk perikanan	Standarisasi penanganan produk perikanan	
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan dan produk lokal	Penerapan metode 8Ps marketing-mix (Price, promotion, physical evidence, people, product, process, place,	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			planet)
		Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan kualitas sarana pasar
			Peningkatan kapasitas SDM pedagang
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Pengembangan pasar tertib ukur
	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi IKM	Peningkatan ketersediaan bahan baku secara kontinu
			Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan sarana produksi
			Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
		Peningkatan daya saing produk IKM	Peningkatan standarisasi pengolahan produk IKM
	Meningkatnya realisasi nilai investasi	Peningkatan minat / daya tarik investasi	Identifikasi potensi dan peluang investasi
			Peningkatan promosi potensi investasi
		Peningkatan kepatuhan investor untuk melaporkan perkembangan usahanya	Pengembangan sistem pelaporan perkembangan usaha
		Peningkatan kemudahan perizinan berinvestasi	Standarisasi pelayanan perizinan sesuai SOP
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Peningkatan kualitas manajerial koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	terhadap perekonomian		Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan
			Peningkatan sarana koperasi
		Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan kapasitas produksi
			Peningkatan kualitas produk
			Peningkatan kapasitas pemasaran
		Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas pengolahan produk pertanian
	Peningkatan sarana dan prasarana produksi		
	Peningkatan akses terhadap bantuan permodalan		
	Peningkatan pemasaran produk olahan pertanian		Peningkatan penerapan metode marketing mix (8Ps)
	Peningkatan ketersediaan pangan		Peningkatan stok cadangan pangan daerah
			Peningkatan ketersediaan lumbung pangan dan sarana pendukungnya
	Peningkatan akses pangan		Peningkatan kemudahan pendistribusian pangan
			Peningkatan akses informasi pangan
	Peningkatan pemanfaatan pangan		Peningkatan diversifikasi pangan lokal
	Peningkatan keamanan keamanan pangan		Penurunan jenis pangan masih menggunakan bahan kimia di luar ambang batas
	Meningkatnya stabilitas harga barang	Peningkatan kelancaran distribusi barang pokok dan	Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menurunnya pengangguran	barang penting	Stabilisasi ketersediaan barang pokok dan barang penting
		Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja
		Penurunan permasalahan hubungan industrial	Pengembangan jaringan penempatan tenaga kerja Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan

Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pembangunan Infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan pemeliharaan jalan
			Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan jalan
			Peningkatan pemerataan jaringan jalan
	Meningkatnya ketersediaan air baku	Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
		Peningkatan akses air minum	Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM
	Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan laut	Peningkatan ketersediaan dermaga rakyat dan pelabuhan pengumpan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi pengelolaan keselamatan pelayaran angkutan laut
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan
		Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan	Peningkatan kelaikan angkutan umum
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi layanan angkutan darat
	Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/ rusak
			Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh
			Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
		Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan
			Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman
Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang	
		Meningkatkan pengawasan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi sengkata tanah garapan Fasilitasi sengkata tanah ulayat
		Optimalisasi penyelesaian ganti rugi tanah pembangunan	Peningkatan penggantian ganti rugi tanah pembangunan
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Optimalisasi pengawasan pembangunan gedung
		Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Pencegahan pencemaran air	Optimalisasi pemantauan kualitas air di badan air
			Minimalisasi penggunaan bahan kimia oleh pelaku usaha dan atau kegiatan
			Optimalisasi konservasi sumber mata air
	Meningkatnya kualitas udara	Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian emisi gas industri dan kendaraan
			Pengendalian emisi gas rumah kaca
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara
	Meningkatnya kualitas lahan	Optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati	Optimalisasi pengelolaan RTH
			Optimalisasi pengelolaan flora dan fauna
			Pengendalian alih fungsi lahan
	Meningkatnya penanganan persampahan	Optimalisasi pengelolaan sampah	Peningkatan pengelolaan sampah 3R

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan
			Peningkatan cakupan wilayah pelayanan sampah
			Optimalisasi pengelolaan limbah B3
Menurunnya risiko bencana	Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Optimalisasi penanggulangan kebencanaan	Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana baik petugas maupun kelompok masyarakat
			Peningkatan penyusunan dokumen kebencanaan
			Optimalisasi pendampingan korban pasca bencana
			Peningkatan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan
		Peningkatan cakupan layanan penanganan kebakaran	Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
			Penambahan jumlah WMK
			Penambahan personil pemadam kebakaran
		Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali bencana	Peningkatan capaian pembangunan drainase perkotaan
			Normalisasi Sungai
			Penurunan luasan kawasan genangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketersediaan bangunan penahan longsor
			Peningkatan ketersediaan bangunan pengaman pantai
Visi: Mabar Bangkit Menuju Mabar Mantap			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan sinkronisasi antar dokumen perencanaan
			Peningkatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan
			Peningkatan tindak lanjut partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
			Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi dalam perencanaan pembangunan
			Pembangunan dan manajemen sistem data kinerja
		Penguatan kelembagaan dan implementasi reformasi birokrasi	Fasilitasi penerapan SAKIP di setiap Perangkat Daerah
			Fasilitasi penerapan 8 area perubahan di setiap perangkat daerah
			Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah
		Peningkatan administrasi kewilayahan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemerintah daerah
			Optimalisasi fungsi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran
			Peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik
			Peningkatan kapasitas manajerial BUMD
		Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan inventarisasi aset daerah
			Peningkatan kapasitas pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Pengintegrasian sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kapasitas PAD	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak (kapal dan restoran) dan retribusi daerah
			Optimalisasi pengurangan kebocoran potensi PAD
			Optimalisasi peran Perumda Bidadari
		Peningkatan fungsi kearsipan sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Pengelolaan arsip secara baku
		Percepatan implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi	Peningkatan kelembagaan pengawasan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas dan sistem pengawasan daerah	Peningkatan sistem pengendalian intern dii setiap perangkat daerah
			Peningkatan akses dan penyelesaian pengaduan masyarakat
	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Percepatan iplementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi aplikasi e-government untuk pelayanan publik
			Integrasi aplikasi e-government untuk layanan internal pemerintah daerah
		Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik	Penguatan kapasitas PPID dan PPID pembantu
			Penguatan ruang/media interaksi masyarakat dengan pemerintah daerah
		Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit dalam birokrasi	Pemenuhan pegawai berbasis kebutuhan
			Peningkatan sistem pengendalian kinerja pegawai
			Peningkatan kualitas layanan kepegawaian
			Peningkatan pembinaan terhadap pegawai
			Peningkatan sistem pengembangan kompetensi ASN
		Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Peningkatan sistem pengendalian dan percepatan kualitas pelayanan publik
	Penguatan koordinasi dan percepatan SPM		
	Pengembangan dan penerapan inovasi daerah		
	Pemenuhan kebutuhan dan penerapan PATEN		
Peningkatan fasilitasi kecamatan			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dalam pembangunan desa dan kelurahan
		Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan akses layanan kepada masyarakat secara merata Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan
		Peningkatan dukungan kinerja DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD
Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan desa
			Optimalisasi kewenangan lokal berskala desa
		Peningkatan pengelolaan potensi desa	Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan potensi desa berbasis lingkungan
			Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Peningkatan pembinaan lembaga desa
		Peningkatan peran lembaga desa dalam perencanaan dan pembangunan desa	Peningkatan pembinaan lembaga desa
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional lembaga desa			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kondusivitas sosial masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan kerukunan hidup masyarakat	Peningkatan deteksi dan kewaspadaan dini pada gangguan stabilitas sosial masyarakat	Optimalisasi peran Forum Kerjasama Organisasi Masyarakat (FK Ormas), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
			Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme
		Peningkatan budaya politik masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan bantuan pendidikan politik
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
		Peningkatan penegakan ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada
			Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat penegak peraturan

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan harus dicapai dan dijalankan setiap tahun yang disertai adanya penekanan dan prioritas tahunan yang berbeda. Oleh karena itu, perlu disusun arah kebijakan tahunan yang berbasis pada proyeksi kebutuhan daerah yang perlu diintervensi setiap tahun. Arah kebijakan tahunan akan membangun sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan yang menjadi tema dan prioritas pembangunan setiap tahun sebagai berikut:



6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program pembangunan daerah dalam dimensi politik berisi prioritas pembangunan dan bersifat unggulan yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat dalam periode 2021-2026 pada dasarnya adalah penjabaran atas makna *Mabar Bangkit* menuju *Mabar Mantap*. Makna ini diangkat dari nilai kerja keras dalam budaya orang Manggarai seperti yang tersirat dari peribahasa "***Neka Mejeng Hese, Neka Ngonde Holes***". Oleh karena itu pula, program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2021-2026 ini juga diberi nama **Program Mabar Bangkit** dan **Program Mabar Mantap**. Program pembangunan ini merupakan program lintas sektor dan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Program *Mabar Bangkit* diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan

peningkatan kualitas SDM sehingga diharapkan nantinya akan tercipta masyarakat yang unggul dan tangguh. Sedangkan Program Mabar Mantap lebih diarahkan untuk menciptakan Manggarai Barat yang maju dan populer melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Berikut uraian kedua program ini selengkapnya:

Tabel 6. 2. Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050	Urusan
1.	Program MABAR BANGKIT		
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Program Pengembangan UMKM	Koperasi-Ukm
	Pertanian, peternakan dan perikanan zonasi berbasis teknologi	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan Kelautan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan Kelautan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Perikanan Kelautan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian
	Beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta insentif bagi tenaga medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050	Urusan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Non Urusan
	Perhatian khusus bagi para lansia, komitmen untuk tekan angka kematian ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal produktif di semua sector	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
2.	Program MABAR MANTAP		
	Labuan Bajo <i>smart city</i> dan penciptaan kota-kota baru di kecamatan	Program Aplikasi Informatika	Kominfo
		Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Program Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Program Pengembangan Sdm	Pendidikan Dan Pelatihan
		Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kewilayah-Kecamatan
	Layanan publik berbasis teknologi	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Kominfo
		Program Aplikasi Informatika	Kominfo

No	Program Prioritas Pembangunan	Nomenklatur Program Berdasarkan Kepmendagri 050	Urusan
	Generasi berani wirausaha	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan Dan Olahraga
	Pemerataan dan peningkatan kualitas semua jenis infrastruktur pelayanan masyarakat dan jalan raya		
		Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan
	Pengelolaan air minum berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Perumusan program pembangunan daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan yang bersifat politik dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi *outcome* dan *impact*.

Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif guna mencapai apa yang menjadi cita-cita bersama tersebut. Oleh karena itu, gerakan inovasi daerah menjadi suatu keharusan. Inovasi daerah menjadi suatu kewajiban, bukan lagi suatu rutinitas belaka. Inovasi akan membantu daerah dalam mempercepat

proses pembangunan di daerah. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan daerah:

Tabel 6. 3. Program Pembangunan Daerah

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi 1: Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah																
Tujuan : Meningkatnya manfaat sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Indeks Pariwisata Inklusif	N/A	Angka	60		62,5		65		67,5		70		70		
Sasaran : Semakin meningkatnya daya tarik pariwisata Manggarai Barat	Persentase kunjungan wisatawan	-82,63	Persen	10		25		45		70		100		100		
	Rata-rata lama tinggal wisatawan	5,8	Hari	6,1		6,3		6,5		6,7		6,9		6,9		
Program Pembangunan Daerah																
Program pemasaran pariwisata	Persentase produk wisata yang bisa dipasarkan secara global	38,46	Persen	86,54	947.361.848	86,54	1.100.000.000	88,46	1.700.000.000	100	1.950.000.000	100	6.753.890.378	100	12.451.252.226	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan secara digital	64,29	Persen	71,43	647.361.848	78,57	900.000.000	85,71	1.200.000.000	92,86	1.650.000.000	100	4.953.890.378	100	9.351.252.226	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Persentase destinasi wisata yang ditingkatkan daya tariknya	34,62	Persen	38,46	1.673.338.197	42,31	2.701.244.744	46,15	3.414.822.687	50,00	7.008.978.214	53,85	8.746.766.747	53,85	23.545.150.589	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
	Persentase destinasi wisata baru yang dikembangkan	0	Persen	5,88	2.981.317.925	11,76	4.051.867.116	17,65	5.122.234.030	23,53	9.081.903.957	29,41	12.143.204.932	29,41	33.380.527.960	
Sasaran : Meningkatkan Kelestarian Budaya Daerah	Persentase Budaya yang dilestarikan	100	Persen	100		100		100		100		100		100		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	N/A	Persen	100	1.258.434.852	100	2.000.000.000	100	2.465.438.803	100	3.402.875.227	100	5.179.512.064	100	14.306.260.946	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik	58,90	Persen	100	853.936.957	100	1.107.659.679	100	1.200.000.000	100	1.240.000.000	100	1.600.000.000	100	6.001.596.636	
Sasaran : Meningkatkan perekonomian masyarakat sektor pariwisata	Jumlah Belanja Wisatawan (Spend of money)	118,25 USD	USD	125,29 USD		128,12 USD		137,36 USD		141,79 USD		152,17 USD		152,17 USD		
Program Pembangunan Daerah																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	2,73	Persen	3,28	1.575.545.210,00	5,30	2.475.992.245,00	7,04	2.723.541.857,00	8,46	6.961.595.678,00	10,40	8.473.992.857,00	10,40	22.210.667.847	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
Misi 2: Mewujudkan Sumber daya manusia yang berkualitas																
Tujuan: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,5	Nilai	64,42		65,34		66,26		67,18		68,1		68,1		
Sasaran: Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,26	Tahun	8,61		8,73		8,84		8,97		9,09		9,09		
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,59	Tahun	13,49		14,05		14,61		15,17		15,73		15,73		
	Persentase Sekolah Dasar (SD) berakreditasi B	58,76	Persen	63,4		68,04		72,68		77,32		81,96		81,96		
	Persentase sekolah menengah (SMP) berakreditasi B	76%	Persen	80,05		84%		88,15		92,20		96,25		96,25%		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengelolaan pendidikan	APK PAUD	46	Persen	50	121.689.225.349	54	128.899.131.807	60	70.625.137.321	64	71.571.827.237	68	80.092.140.856	68	472.877.462.569	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	98,01	Persen	98,2		98,75		99,15		99,6		100				
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	92,67	Persen	93		94		95,00		96		97				

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	104,93	Persen	100		100		100		100		100		100		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	97,75	persen	98		98,5		99		99,5		100		100		
	Persentase SD yang terakreditasi	58,76	Persen	62		66		70		74		78		78		
	Persentase SMP yang terakreditasi	76	Persen	78		80		82		84		86		86		
	Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah) (SPM)	95,97	Persen	96,15		96,45		96,6		96,9		97,05		97,05		
	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	1	Persen	1,5		2		2,5		3		3,5		3,5		
Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	24,47	Persen	28,5	5.805.518.130	32,5	5.951.718.130	36,5	71.072.679.521	40,5	72.488.604.668	44,5	76.838.742.882	44,5	232.157.263.331	Dinas Pendidikan, Kepemudaan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	23,07	Persen	26,5		38,5		50,5		62,5		74,5		74,5		dan Olahraga
	Rasio guru terhadap murid SD	1 : 11	Rasio	1:16		1:20		1:24		1:26		1:29		1:29		
	Rasio Guru Terhadap Murid SMP	1 :11	Rasio	1:14		1:18		1:20		1:22		1:24		1:24		
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	90,48	Persen	91,5		92		92,5		93		93,5		93,5		
	Rasio guru per murid per kelas SD	1 : 11 :1	Rasio	1:16:1		1:20:1		1:24:1		1:26:1		1:29:1		1:29:1		
	Rasio guru per murid per kelas SMP	1 : 11 : 1	Rasio	1:14:1		1:18:1		1:20:1		1:22:1		1:24:1		1:24:1		
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan	N/A	Persen	50	96.986.390	55	130.000.000	60	216.010.000	65	290.250.000	70	355.250.000	70	1.088.496.390	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan non formal yang dikembangkan	N/A	Persen	20		25		30		35		40		40		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Peningkatan alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran bagi masyarakat umum	0,42	Persen	0,53	1.162.150.099	0,53	1.000.914.833	0,61	1.365.288.578	0,67	1.205.488.122	0,73	1.245.981.028	0,73	5.979.822.660	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sasaran: Meningkatnya literasi/minat baca masyarakat	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	4,48	Nilai	6,36		6,93		7,51		8,1		8,67		8,67		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pembinaan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	N/A	Nilai	50	396.326.689	65	510.750.000	70	541.687.117	77,00	1.000.000.000	87	1.978.640.874	87	4.427.404.680	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	0,17	Rasio	0,18	154.326.690	0,18	237.162.839	0,19	254.650.000	0,20	372.296.709	0,21	1.106.600.000	0,21	2.125.036.238	
Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	67,12	Tahun	67,58		68,04		68,5		68,96		69,42		69,42		
	Prevalensi Stunting	19,06	Persen	17,06		15,06		13,06		11,06		9,06		9,06		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,008	Rasio	0,010	27.722.594.561	0,009	55.408.243.940	0,0086	47.011.049.678	0,0078	85.277.035.384	0,0071	93.518.132.957	0,0071	207.728.812.557	Dinas Kesehatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
masyarakat	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,53	Rasio	0,48	30.110.851.985	0,44	24.272.666.260	0,4	32.639.943.302	0,36	23.594.345.801	0,33	51.766.511.552	0,33	174.086.569.009	
	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	73,74	Persen	91	1.292.705.000	92	1.566.670.000	93	1.697.880.000	94	1.763.100.000	95	1.805.700.000	95	8.126.055.000	
	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	87,3	Persen	91	3.531.295.000	92	3.564.460.000	93	3.565.665.000	94	3.566.870.000	95	3.568.557.000	95	17.796.847.000	
	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	60,37	Persen	100	975.752.000	100	482.120.000	100	607.116.000	100	1.211.960.000	100	746.880.000	100	4.023.828.000	
	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	88	Persen	100	271.812.000	100	205.920.000	100	314.640.000	100	243.360.000	100	354.080.000	100	1.389.812.000	
	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	60,94	Persen	62	2.267.330.000	65	2.055.500.000	68	2.330.000.000	70	2.145.000.000	75	2.035.000.000	75	10.832.830.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100	Persen	100		100		100		100		100		100		
	Persentase balita gizi kurang	10,26	Persen	16	81.335.100	15	89.468.610	14	97.602.120	13	105.735.630	12	113.869.140	12	488.010.600	
	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	36	Persen	44	93.400.000	46	47.900.000	48	80.000.000	50	54.360.000	52	85.000.000	52	360.660.000	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	92	Persen	85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	85	400.000.000	85	400.000.000	85	1.700.000.000	
	Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	67,98	Persen	67		70		75		77		80		80	-	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	63	Persen	67	36.990.000	70	-	75	36.990.000	77	-	80	-	80	73.980.000	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)	0	Persen	0	100.000.000	0	100.000.000	0	150.000.000	0	200.000.000	0	250.000.000	0	800.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	48	Persen	52	-	56	25.000.000	58	-	60	-	65	-	65	25.000.000	
	Persentase puskesmas terakreditasi	68,18	Persen	81,82	14.170.455.000	95,45	14.219.755.000	100	14.385.525.000	100	14.119.755.000	100	14.281.095.000	100	71.176.585.000	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	0,17	Rasio	0,5	19.393.167.754	0,6	23.250.649.824	0,7	30.166.240.407	0,8	27.032.457.467	0,9	47.157.800.289	0,9	147.000.315.741	
	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	0,35	Rasio	0,5	6.193.865.000	0,6	6.193.865.000	0,7	6.193.865.000	0,8	6.193.865.000	0,9	6.193.865.000	0,9	30.969.325.000	
Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar	100	Persen	100	175.630.000	100	176.000.000	100	177.000.000	100	178.000.000	100	179.000.000	100	885.630.000	Dinas Kesehatan
	Persentase peserta penyuluh kemandirian pangan yang mendapat sertifikat	99,93	persen	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	270.000.000	
Program Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	20,77	Rasio	50,04	107.844.000	51,27	184.844.000	52,5	107.844.000	53,73	186.844.000	54,96	107.844.000	54,96	695.220.000	Dinas Kesehatan
	Persentase desa siaga aktif	60	Persen	72	1.030.000.000	73,17	1.215.000.000	74,34	1.513.100.000	75,51	1.538.100.000	76,68	1.558.100.000	76,68	6.854.300.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	60,40	Persen	63,40	610.000.000	66,40	660.000.000	69,40	770.550.000	72,40	795.000.000	75,40	810.000.000	75,4	3.645.550.000	
Sasaran: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,48	Persen	2,46		2,44		2,42		2,40		2,38		2,38	-	
Program Pembangunan Daerah:																
Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	65,51	Persen	66,41	1.421.436.638	67,38	1.400.851.714	68,36	1.447.703.766	69,42	1.505.967.470	70,47	1.735.766.256	70,47	7.511.725.844	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	20,89	Persen	20	977.948.993	19,02	933.901.142	18,04	965.135.835	16,98	1.003.978.313	15,93	1.157.177.504	15,93	5.038.141.787	
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	22,35	Persen	23,24	756.205.170	24,22	700.425.857	25,19	723.851.862	26,25	752.983.735	27,30	867.883.128	27,3	3.801.349.752	
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi masyarakat	100,00	Persen	100,00	534.461.347	100,00	466.950.571	100,00	482.567.917	100,00	501.989.157	100,00	578.588.752	100	2.564.557.744	
	Total Fertility rate (TFR)	2,08	Persen	1,26	1.199.692.816	1,24	1.167.376.428	1,22	1.206.419.793	1,20	1.254.972.891	1,18	1.446.471.880	1,18	6.274.933.808	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	0,00	Persen	16,67	893.298.054	33,33	848.883.287	50,00	852.676.539	83,33	871.774.583	100,00	1.172.864.000	100	4.639.496.464	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	0,00	Persen	21,00	411.903.443	22,05	339.553.315	22,87	341.070.616	23,36	348.709.833	24,15	469.145.600	24,15	1.910.382.807	
	Cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB	0,00	Persen	44,40	251.438.572	50,00	169.776.657	63,80	170.535.308	69,40	174.354.917	83,30	234.572.800	83,3	1.000.678.254	
	Cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB	0,00	Persen	41,60	251.438.572	58,30	169.776.657	66,60	170.535.308	75,00	174.354.917	91,60	234.572.800	91,6	1.000.678.254	
	Cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB	0,00	Persen	38,80	251.438.572	50,00	169.776.657	61,10	170.535.308	66,60	174.354.917	77,70	234.572.800	77,70	1.000.678.254	
Program pengendalian penduduk	Persentase Sektor yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Pendudukan	0,00	Persen	15	470.043.360	17	423.794.012	20	290.380.064	23	210.755.934	25	1.251.296.480	25	2.646.269.850	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
Sasaran: Meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	64,81	Persen	65,81		66,81		67,81		68,81		69,81		69,81		
	Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	N/A	Peringkat	10		10		9		9		8		8		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	54	Persen	58	1.020.534.410	62	1.046.534.410	66	1.120.000.000	70	1.195.000.000	74	1.275.000.000	74	5.657.068.820	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	65	Persen	70	1.065.960.000	75	1.175.960.000	80	1.295.960.000	85	1.300.000.000	90	1.350.000.000	90	6.187.880.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	N/A	buah	420	2.797.310.080	460	2.952.310.460	500	3.266.512.460	540	3.525.000.000	580	3.860.000.000	580	16.401.133.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Cakupan pelatih yang tersertifikasi	6	orang	8		10		12		14		16		16		
	Cakupan Atlet muda yang dibina	N/A	orang	50		60		70		80		90		90		
Tujuan: Meningkatkan Keberdayaan Sosial	Angka PMKS	81,770	Angka	81,270		80,770		80,270		79,770		79,270		79,270		
Sasaran: Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	86,96	Persen	88,56		90,16		91,76		93,36		94,96		94,96		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial	86,96	Persen	87,41	941.194.000	87,46	1.560.210.192	87,52	1.617.479.761	87,75	2.596.697.714	87,87	3.361.483.297	87,87	10.077.064.964	Dinas Sosial

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	3,73	Persen	6,72	222.130.000	10,45	239.545.455	14,93	265.000.000	22,39	293.335.248	34,33	400.000.000	34,33	1.420.010.703	Dinas Sosial
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluarpanti (SPM)	0,87	Persen	1,12	161.605.000	1,40	240.545.455	1,71	270.301.815	2,21	450.000.000	2,62	550.000.000	2,62	1.672.452.270	
	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	0	Persen	5	43.198.873	15	89.545.455	30	120.000.000	50	250.000.000	75	350.000.000	75,00	852.744.328	
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	10,38	Persen	11,73	203.630.000	13,41	272.837.009	15,34	300.000.000	19,18	450.000.000	23,99	573.904.022	23,99	1.800.371.031	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat (SPM)	98,27	Persen	100	510.700.000	100	510.536.713	100	424.941.693	100	670.806.593	100	916.886.776	100	3.033.871.775	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kontrak kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	0	Persen	100	220.948.323	100	169.918.639	100	200.000.000	100	342.362.467	100	427.348.682	100	1.360.578.111	Dinas Sosial
	Persentase lembaga masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	10,71	Persen	10,71	166.110.000	10,71	205.545.455	10,71	226.672.119	10,71	300.000.000	10,71	400.000.000	10,71	1.298.327.574	
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang bersertifikat	77,10	Persen	77,10	145.308.220	81,68	219.545.455	86,26	250.000.000	91,60	380.000.000	100,00	500.000.000	100	1.494.853.675	
Tujuan: Meningkatkan Keberdayaan Sosial	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,61	Nilai	67,24		68,87		70,5		72,13		73,76		73,76		
Sasaran: Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,17	Nilai	87,32		87,47		87,62		87,77		87,92		87,92		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	100	Persen	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	37,50	Persen	45,00	189.534.829	52,50	211.897.006	60,00	145.190.032	67,50	105.377.967	72,50	625.648.240	72,5	1.277.648.074	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
	Persentase perempuan pengambil keputusan publik	7,50	Persen	10,00	189.534.829	12,50	211.897.006	15,00	145.190.032	17,50	105.377.967	20,00	625.648.240	20	1.277.648.074	
Program perlindungan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	78,26	Persen	79,34	284.302.244	78,26	317.845.509	81,52	217.785.048	82,60	158.066.950	84,78	938.472.360	84,78	1.916.472.111	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	72,72	Persen	77,27	284.302.244	81,81	317.845.509	86,36	217.785.048	90,90	158.066.950	95,42	938.472.360	95,42	1.916.472.111	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase fasilitas publik layak anak	45,00	Persen	50,00	189.534.829	54,00	211.897.006	62,00	145.190.032	70,00	105.377.967	79,00	625.648.240	79,00	1.277.648.074	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi 3: Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal																
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Laju pertumbuhan ekonomi	0,89	Persen	5,76		5,86		5,97		6,08		6,19		6,19		
Sasaran: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	41,05	Persen	42,23		42,82		43,41		44		44,59		44,59		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Pengembangan Jaringan irigasi dan sumber-sumber air dalam kondisi baik	85,20	Persen	88,75	12.005.764.929,00	89,91	15.967.000.000,00	91,72	19.364.214.000,00	91,98	23.914.795.751,87	93,12	30.560.485.742,00	93,12	101.812.260.422,87	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase peningkatan Luas Lahan pertanian Fungsional	36,159	Persen	36,161		36,163		36,165		36,167		36,169		36,169		
	Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (ha)	18.267,00	Ha	18.267,00		18.267,00		18.267,00		18.267,00		18.267,00		18.267,00		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase Panjang jalan usaha tani berkondisi baik	95,31	Persen	96,84		97,37		97,75		98,06		98,30		98,30		
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase luas areal pertanian tanaman pangan yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk , Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	3,34	Persen	3,40		3,68		3,93		4,10		4,39		4,39		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				11.200.000.000,00		15.000.000.000,00		17.846.049.286,74		22.350.861.768,13		28.661.890.120,00		95.058.801.174,87		
	Persentase luas lahan pertanian <i>Hortikultura</i> yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	0,97	Persen	8,61		9,74		11,37		12,99		14,21		14,21		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase luas lahan pertanian <i>Perkebunan</i> yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	1,58	Persen	1,28		1,46		1,64		1,75		2,01		2,01		
	Persentase kelompok petani (perkebunan) yang memiliki sarana perkebunan sesuai standar	0,23	Persen	0,45		0,62		0,73		0,85		1,01		1,01		
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas lahan pertanian yang terserang hama penyakit (Ha)	2.000	Ha	3.500		4500		5.500		6.000		6.500,00		6.500,00		
	Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (ha)	N/A	Ha	100	2.850.000.000,00	150	3.850.000.000,00	200	4.470.742.091,26	250	5.531.027.672,00	300	7.570.549.607,00	300	24.272.319.370,26	
Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	1,7	Persen	2,90	6.370.000.000	3,70	8.549.122.499,00	4,60	10.310.814.000,00	5,40	12.725.575.392,00	6,30	16.166.000.000,00	6,30	54.121.511.891,00	
	Persentase SDM petani yang terlatih	31,85	Persen	41,09		45,72		50,45		55,19		59,81		59,81		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	2,08	Persen	3,11		3,92		4,73		5,54		6,35		6,35		
	Persentase produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (Good Handing Practices)	N/A	Persen	9,09		18,18		27,27		36,36		45,54		45,54		
Program penyuluhan pertanian	Persentase SDM kelompok peternak terlatih	15,48	Persen	19,05		30,95		46,83		67,46		100		100		
	Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis	2,78	Persen	4,76	650.000.000	18,65	2.025.000.000	32,54	3.161.250.000	46,43	4.639.250.000	60,32	8.428.500.000	60,32	18.904.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase kelompok peternak yang memiliki bibit unggul sesuai standar	14,75	Persen	27,03		35,15		59,21		69,62		84,34		84,34		
	Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	19,84	Persen	20,99	1.841.621.801	35,46	6.254.154.292	43,05	4.838.377.856	52,80	15.801.680.755	71,64	20.076.788.483	71,64	48.812.623.187,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak	8,15	Persen	7,5		4,5		2		1,5		0,5		0,5		
	Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	0,04	Persen	0,022	2.657.635.246	0,012	5.651.500.000	0,01	8.668.467.635	0,007	10.376.068.750	0	17.807.465.625	0	45.161.137.256	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	12,23	Persen	17,25		27,19		46,06		53,08		68,20		68,20		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan yang sesuai standar	43,5	Persen	51,6	1.055.202.500	59,7	3.079.970.125	67,7	4.558.706.018	75,81	5.326.206.573	83,87	8.307.238.069	83,87	22.327.323.285	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase kelompok nelayan terlatih	3,2	Persen	7,26		8,06		8,87		9,68		10,48		10,48		
	Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya	5,6	Persen	6,5		7,3		8,06		8,87		9,68		9,68		
Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase kelompok yang mendapat bantuan sarana	39,2	Persen	49	2.267.064.608	62,75	3.531.901.674	73	3.869.555.374	84,31	4.842.660.340	100	7.848.783.057	100	22.359.965.053	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar	26,5	Persen	36,30		48,00		59,80		71,57		91,20		91,20		
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK	4,9	Persen	6,90		8,80		10,80		12,75		14,70		14,70		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis	4,9	Persen	6,90		8,80		10,80		12,75		14,70		14,70		
	Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	0	Persen	0,98		1,96		2,94		3,92		4,90		4,90		
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase produk perikanan yang ditangani sesuai standar prosedur yang sertifikasi	0	Persen	20	600.000.000	40	700.000.000	60	800.000.000	80	900.000.000	100	2.000.000.000	100	5.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9,92	Persen	10,27		10,41		10,55		10,70		10,84		10,84		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase kelompok pedagang yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	N/A	Persen	5,78	75.000.000	14,90	134.774.250	34,78	199.406.589	55	227.618.634	90	405.614.129	90	1.042.413.602	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase IKM Pengolahan Pangan yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	N/A	Persen	3,57		15		30		40		50		50		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar tradisional yang memiliki sarana sesuai standar	6,67	Persen	20,00	1.500.000.000	33,33	2.695.485.000	46,67	3.088.131.787	60,00	5.552.372.672	73,33	8.112.282.577	73,33	20.948.272.036	
	Persentase kelompok pedagang yang terlatih	N/A	Persen	11,55	190.000.000	17,33	341.428.100	26	505.163.360	34,66	776.633.872	51,99	1.027.555.793	51,99	2.840.781.125	
	Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	N/A	Persen	5	50.000.000	10	89.849.500	15	132.937.726	20	151.745.756	25	270.409.419	25	694.942.401	
Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase pasar tradisional yang berstatus pasar tertib ukur	9,09	Persen	27,27	264.000.000	50	474.405.360	100	551.911.194	100	1.001.217.590	100	1.427.761.734	100	3.719.295.878	
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	0,450	Persen	0,454		0,456		0,458		0,460		0,462		0,462		
Program Pembangunan Daerah:																
Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase bahan baku produksi yang tersedia secara kontinu	88,93	Persen	90,36	301.840.000	93,1	320.000.000	95,95	377.618.808	97,62	600.000.000	99,05	150.000.000	99,05	1.749.458.808	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Persentase pelaku IKM terlatih	21,90	Persen	33,33	950.000.000	39,29	1.780.000.000	45,24	2.004.851.819	51,19	2.566.195.123	57,14	4.884.766.961	57,14	12.185.813.903	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	13,10	Persen	14,05	485.387.464	15,36	1.018.293.087	16,90	1.320.090.714	19,29	2.825.556.529	22,38	3.366.597.427	22,38	9.015.925.221	
	Persentase kelompok IKM yang memperoleh bantuan permodalan	0	Persen	5	100.000.000	10,12	120.000.000	15,48	130.000.000	19,64	140.000.000	23,81	150.000.000	23,81	640.000.000	
Sasaran: Meningkatkan realisasi nilai investasi	Persentase peningkatan realisasi nilai PMA	20	Persen	30		40		50		60		70		70		
	Persentase peningkatan realisasi nilai PMDN	24	Persen	28		32		36		42		48		48		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase Realisasi Nilai Investasi	N/A	Persen	100	541.230.563	100	750.000.000	100	850.000.000	100	758.308.283	100	3.000.000.000	100	5.899.538.846	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program promosi penanaman modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	N/A	Persen	40	425.000.000	45	650.000.000	50	736.628.442	55	733.459.865	60	4.100.000.000	60	6.645.088.307	
Program pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perizinan yang dijalankan sesuai SOP	84,37	Persen	85	635.000.000	87	1.100.000.000	90	1.069.467.035	92	1.478.667.259	95	4.200.000.000	95	8.483.134.294	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Indeks Gini	0,356	Nilai	0,340		0,332		0,324		0,316		0,308		0,308		
Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang meningkat SHU-nya	47	Persen	54		57		59		62		64		64		
	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi kecil	17,27	Persen	20,67		21,84		23,02		24,19		25,36		25,36		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang memiliki SDM terlatih	7,41	Persen	18,52	140.000.000	29,63	280.000.000	42,22	400.000.000	57,04	500.000.000	67,41	900.000.000	67,41	2.220.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	N/A	Persen	5,9	100.000.000	16,3	219.000.000	29,63	324.000.000	45,93	370.000.000	67,41	660.000.000	67,41	1.673.000.000	
	Persentase koperasi yang memiliki sarana sesuai standar	10,99	Persen	21,98	10.000.000	27,47	10.000.000	32,97	15.000.000	43,96	15.000.000	49,45	15.000.000	49,45	65.000.000	
Program pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas produksinya	1,43	Persen	5,95	100.000.000	11,90	219.000.000	17,86	324.000.000	20,83	370.000.000	41,67	660.000.000	41,67	1.673.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
	Persentase produk usaha mikro yang bersertifikat	20,71	Persen	23,10	80.000.000	25,48	159.000.000	27,86	236.000.000	30,24	269.000.000	32,62	480.000.000	32,62	1.224.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	N/A	Persen	20	80.000.000	40	150.000.000	60	200.000.000	80	250.000.000	100	300.000.000	100	980.000.000	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Laju Inflasi	3-3,4	Nilai	3-3,2		3-3,2		3-3,2		3-3,2		3-3,2		3-3,2		
Sasaran: Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan	71,05	Nilai	74,09		75,61		77,13		78,65		80,17		80,17		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Stok cadangan pangan daerah	11,550	Ton	60	2.289.796.923	60	2.098.992.500	70	2.350.000.000	98	1.445.553.167	122	1.524.764.740	122	9.709.107.330	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang berkondisi baik	82	Persen	84,62		86,70		88,24		88,89		89,5		89,5		
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	4,14	Persen	3,55	175.000.000	2,96	200.000.000	2,37	225.000.000	1,18	250.000.000	1,2	500.000.000	1,2		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi pangan	0,58	Persen	0,47		0,35		0,25		0,15		0,15		0		
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras	6,67	Persen	20	2.232.445.000	40	2.226.007.500	60	2.466.657.875	80	3.309.190.769	100	4.000.000.000	100	14.234.301.144	
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	100	Persen	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	3.600.000.000	
Sasaran: Meningkatnya stabilitas harga barang	Indeks Harga Konsumen	104,44-104,53	Nilai	104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		104,44-104,53		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Tingkat stabilitas harga barang pokok dan barang penting	0,5	Persen	0,6	200.000.000	0,7	359.398.000	0,8	401.750.905	0,9	606.983.023	0,10	1.081.637.677	0,10	2.649.769.605	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Tingkat stabilitas Ketersediaan barang pokok dan barang penting	2	Persen	3	75.800.000	4	136.211.852	5	140.533.593	6	230.048.566	7,00	409.940.680	7,00	992.534.691	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Tingkat kemiskinan	18,01	Persen	16,18		15,65		15,09		14,55		14,01		14,01		
Sasaran: Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,73	Persen	3,51		3,40		3,29		3,18		3,07		3,07		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja Lokal yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan permintaan pasar	11,98	Persen	22,42	1.060.000.000,00	25,02	3.720.000.000,00	30,01	5.430.000.000,00	40,01	11.930.000.000,00	59,99	24.690.800.000,00	59,99	46.830.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	75,62	Persen	81,55	350.000.000,00	83,62	450.000.000,00	85,47	593.254.807,00	86,08	870.000.000,00	87,86	980.000.000,00	87,86	3.243.254.807,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	31,73	Persen	39,90	591.884.763,00	50	1.070.888.157,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.660.268.976,00	100,00	2.300.000.000,00	100,00	6.823.041.896,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
Misi 4: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Yang Berbasis Kelestarian Lingkungan																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	54,35	Nilai	61,35		64,77		67,41		69,89		72,49		72,49		
Sasaran: Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan	Tingkat kemantaban jalan	52,77	Persen	59,29		62,55		65,81		69,07		72,33		72,33		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	55,53	Persen	34,88	778.665.418.413	33,91	65.143.848.216	32,07	108.206.684.827	26,27	197.617.884.903	18,50	262.862.035.981	18,50	1.412.495.872.340	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	44,47	Persen	65,12		66,09		67,93		73,73		81,50		81,50		
Sasaran: Meningkatkan ketersediaan air baku	Rasio luas daerah pertanian yang terlayani jaringan irigasi	0,514	Nilai	0,536		0,547		0,558		0,569		0,580		0,580		
	Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	61,01	Persen	69,63		74,39		79,47		84,90		90,70		90,70		
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengelolaan sumber daya air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	52,72	Persen	60,47	16.400.000.000	69,29	18.650.000.000	79,41	21.422.663.927	95,82	42.329.691.873	100	46.209.517.627	100	145.011.873.427	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	68,54	Persen	81,39	22.444.201.100	85,86	7.791.003.882	89,66	6.639.500.000	94,60	16.246.384.903	100	17.773.210.657	100	70.894.300.542	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Sasaran: Meningkatnya ketersediaan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	79,24	Persen	92,71		98,6		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD-T	73,88	Persen	75,19	4.602.000.000	82,38	20.077.000.882	85,32	10.281.710.219	92,85	33.899.595.122	100	53.577.420.876	100	122.437.727.099	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur perhubungan	Rasio Konektivitas	0,33	Rasio	0,40		0,44		0,49		0,54		0,59		0,59		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan pelayaran	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	0	Persen	0,05	362.815.745	0,25	250.000.000	0,45	280.000.000	0,60	250.000.000	0,75	250.000.000	0,75	1.392.815.745	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
	Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi	45	Persen	55	512.815.745	67	400.000.000	75	400.000.000	85	400.000.000	100	400.000.000	100	2.112.815.745	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase fasilitas terminal dalam kondisi baik	35	Persen	45	562.815.745	55	586.774.764	65	556.048.483	75	996.273.967	85	4.500.624.271	85	7.202.537.230	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	45	Persen	50	312.815.745	55	200.000.000	60	200.000.000	75	200.000.000	90	1.000.000.000	90	1.912.815.745	
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	20	Persen	25	412.815.745	30	300.000.000	40	300.000.000	50	2.000.000.000	75	2.429.000.000	75	5.441.815.745	
	IKM terhadap pelayanan parkir	40	Nilai	45	412.815.745	50	350.000.000	60	380.000.000	75	500.000.000	100	500.000.000	100	2.142.815.745	
	Cakupan layanan angkutan umum	20	Persen	25	362.815.745	30	250.000.000	40	280.000.000	50	350.000.000	70	350.000.000	70	1.592.815.745	
Sasaran: Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak huni	0,366	Nilai	0,379		0,385		0,390		0,396		0,402		0,402		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pembangunan Daerah:																
Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan rumah layak huni	36,62	Persen	37,4	10.830.244.680	37,7	14.343.014.407	38,1	13.967.093.831	38,5	16.964.540.370	41,2	21.876.974.346	41,2	77.981.867.634	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh	N/A	Persen	18	5.796.360.112	16	14.343.014.407	14	13.967.093.831	11	16.964.540.370	9	21.876.974.346	9	72.947.983.066	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban terdampak relokasi program pemerintah	N/A	Persen	100	4.283.190.901	100	2.543.197.269	100	1.381.076.946	100	2.206.844.297	100	3.486.618.886	100	13.900.928.299	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	N/A	Persen	100	4.283.190.901	100	2.543.197.269	100	1.381.076.946	100	2.206.844.297	100	3.486.618.886	100	13.900.928.299	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan di kawasan permukiman dan permukiman kumuh dalam kondisi baik	N/A	Persen	20	2.228.604.615	25	2.848.587.004	30	1.599.840.613	40	3.417.735.319	50	6.420.441.751	50	16.515.209.302	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Sasaran: Meningkatnya kualitas tata bangunan dan penataan ruang	Persentase kesesuaian fungsi, struktur, dan pola ruang (RTRW)	62.27	Persen	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kawasan yang sesuai RRTR	57	Persen	65		70		75		85		100		100		Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
	Persentase dokumen RDTR yang tersedia	100	Persen	100	2.700.000.000	100	3.500.000.000	100	3.000.000.000	100	11.617.884.903	100	12.497.710.657	100	33.315.595.560	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	N/A	Persen	100	489.082.743	100	508.639.454	100	513.692.315	100	735.614.766	100	1.104.872.962	100	3.351.902.240	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penggantian kerugian dan santunan tanah masyarakat terdampak pembangunan	N/A	Persen	100	3.423.579.200	100	3.560.476.176	100	3.595.846.208	100	5.149.303.359	100	7.734.110.735	100	23.463.315.678	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Izin yang di keluarkan sesuai SOP	N/A	Persen	100	978.165.486	100	1.017.278.908	100	1.027.384.631	100	1.471.229.531	100	2.209.745.924	100	6.703.804.480	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
																	Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan dengan IMB	38,45	Persen	42,78	350.000.000	50,67	500.000.000	65,58	5.000.000.000	76,17	8.117.884.903	85,80	8.997.710.657	85,80	22.965.595.560		Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Kontruksi yang terlatih	40	Persen	52,5	525.000.000	65	525.000.000	77,5	525.000.000	90	8.142.884.903	100	9.022.710.657	100	18.740.595.560		Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
	Persentase rekomendasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	58	Persen	64		70		75		85		100		100			
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,19	Nilai	64,69		68,66		72,63		76,60		76,81		76,81			
Sasaran: Meningkatkan kualitas air	Indeks Kualitas Air	35,00	Nilai	40		50		60		70		70		70			
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab	
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Sungai yang memenuhi baku mutu	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100		5.579.758.998	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	1,64	Persen	21	676.025.047	41	896.662.226	61	1.019.972.308	80	1.400.112.703	100	1.586.986.714	100			
Sasaran: Meningkatkan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	89,70	Nilai	91,09		91,56		92,03		92,50		92,98		92,98			
Program Pembangunan Daerah:																	
Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq)	Baik	Predikat	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		8.092.069.197	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu	N/A	Persen	100	676.025.047	100	896.662.226	100	1.019.972.308	100	2.325.436.188	100	3.173.973.428	100			
Sasaran: Meningkatkan kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	58	Nilai	58,25		58,34		58,42		58,51		58,59		58,59			
Program Pembangunan Daerah:																	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Ruang terbuka Hijau yang terkelola	N/A	Persen	50	270.410.019	100	251.065.423	100	270.350.059	100	930.174.475	100	1.269.589.371	100	2.991.589.348	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan	100	Persen	100	270.410.019	100	251.065.423	100	270.350.059	100	930.174.475	100	1.269.589.371	100	2.991.589.348	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sasaran: Meningkatkan penanganan persampahan	Persentase sampah yang tertangani	77,32	Persen	84,88		87,51		90,23		93,03		95,92		95,92		
Program Pembangunan Daerah:																
Program pengelolaan persampahan	Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	1,47	Persen	2,54	8.504.484.886	4,23	7.108.230.278	4,34	7.613.864.368	4,40	8.931.857.719	4,62	9.934.678.240	4,62	42.093.115.491	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Persentase penyediaan sarana prasarana persampahan	21	Persen	51		53,47		56,44		59,41		62,40		62,40		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	2	Persen	27	405.615.028	42	466.264.357	52	647.242.366	72	920.472.495	92	1.904.384.057	92	4.343.978.304	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tujuan: Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	163,57	Nilai	161,70		160,77		159,85		158,93		158,93		158,93		
Sasaran: Meningkatnya upaya mitigasi dan pengendalian bencana	Angka Korban Bencana	8	Nilai	0		0		0		0		0		0		
Program Pembangunan Daerah:																
Program penanggulangan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	0	Persen	0,61	317.346.372	1,21	236.600.000	1,82	243.773.997	2,42	216.742.823	3,03	239.358.093	3,03	1.253.821.285	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah
	Persentase masyarakat yang memperoleh pelatihan mitigasi	5	Persen	1,03	331.763.549	2,07	445.055.647	3,1	567.460.647	4,14	2.157.372.095	5,17	2.448.687.635	5,17	5.950.339.573	
	Persentase korban yang mendapat pendampingan pasca bencana	100	Persen	100	109.293.549	100	296.313.006	100	265.622.823	100	423.560.030	100	773.550.030	100	1.868.339.438	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan	30	Persen	0,86	149.720.000	4,76	896.060.000	9,44	916.060.000	17,24	2.208.720.000	25,55	2.410.120.000	25,55	6.580.680.000	
Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	360	Menit	360	224.751.099	300	2.600.000.000	240	2.165.627.148	180	3.350.000.000	120	7.554.832.618	120	15.895.210.865	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	32,55	Persen	42,29	2.066.000.000	49,84	1.600.000.000	57,38	1.600.000.000	81,90	12.817.884.903	100	15.831.710.657	100	33.915.595.560	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
Program pengelolaan sumber daya air	Persentase kawasan rawan longsor dengan bangunan penahan longsor	51	Persen	52,39	6.100.000.000	55,31	12.839.143.043	58,39	13.589.143.043	64,55	34.717.884.903	69,98	32.385.903.687	69,98	99.632.074.676	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
	Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi bangunan pengaman pantai	30,56	Persen	36,2	1.500.000.000	43,8	2.000.000.000	51,7	2.100.000.000	60,4	9.917.884.903	69,4	10.897.710.657	69,4	26.415.595.560	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani																
Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	53,76	Nilai	65		68		71		74		77		77		
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	63,12 (B)	Nilai	66		69		72		75		81		81		
	Nilai EKPPD	N/A	Nilai	2,8500		2,9000		2,9500		3,000		3,0500		3,0500		
	Opini BPK	WTP	Predikat	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
	Kontribusi PAD	146.157	Juta Rupiah	339.650		498.794		718.472		1.002.585		1.306.799		1.306.799		
	Indeks Arsip	48,8	Nilai	50		62,5		75		87,5		100		100		
	Indeks Survei Penilaian Integritas	N/A	Nilai	60,00		79,60		79,70		79,80		79,90		79,90		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	N/A	Persen	100	1.605.112.329	100	2.332.528.906	100	2.362.435.204	100	2.452.277.104	100	3.062.856.069	100	11.815.209.613	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100		
	Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	N/A	Persen	100		100		100		100		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi target program RPJMD	N/A	Persen	45		55		65		75		85		85	13.503.096.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase hasil musrenbang yang ditindaklanjuti dalam penganggaran daerah	N/A	Persen	20	1.834.414.091	22	2.665.747.322	25	2.699.925.948	29	2.802.602.405	34	3.500.406.936	34		
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan	N/A	Persen	100	1.146.508.807	100	1.666.092.076	100	1.687.453.717	100	1.751.626.503	100	2.187.754.335	100	8.439.435.438	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase Inovasi Daerah yang dimiliki	N/A	Persen	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal BB	N/A	Persen	27,78	1.250.000.000	100	704.079.809	100	759.946.299	100	1.374.106.115	100	1.586.473.920	100	5.674.606.143	Bagian Organisasi
	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi	27,78	Persen	41,67		55,56		69,44		83,33		100		100		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang diimplementasikan	100	Persen	100	5.176.247.350	100	5.671.850.718	100	5.461.154.314	100	4.821.952.486	100	4.983.924.110	100	26.115.128.978	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase titik batas wilayah yang diselesaikan	20	Persen	30	362.186.403	40	419.033.333	50	400.500.000	60	458.479.532	70	510.500.000	70	2.150.699.268	Bagian Pemerintahan
	Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan	100	Persen	100	330.989.596	100	85.600.000	100	95.434.363	100	115.152.281	100	130.500.995	100	757.677.235	Bagian Pemerintahan
	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersedia sesuai standar	80	Persen	100	504.745.903	100	683.101.133	100	775.884.363	100	748.734.094	100	880.950.995	100	3.593.416.488	Bagian Pemerintahan
	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	Persen	100	387.245.903	100	224.049.688	100	203.434.000	100	273.920.656	100	288.565.000	100	1.377.215.247	Bagian Pemerintahan
	Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	100	Persen	100	1.675.664.470	100	1.577.080.600	100	1.652.292.767	100	1.892.461.205	100	2.084.993.166	100	8.882.492.208	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	20	Persen	30,0	633.599.422	50	314.461.730	70	1.152.050.863	90	626.410.847	100	1.210.228.567	100	3.936.751.429	Bagian Perekonomian & SDA
	Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu	99,4	Persen	98,7	622.401.282	98,5	305.167.295	98,4	649.365.475	99,5	620.177.903	99,5	1.210.228.567	99,5	3.407.340.521	Bagian Administrasi Pembangunan
	Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	83,48	Persen	90,01	1.642.556.913	95,98	1.629.684.758	99,00	1.665.028.997	100	2.518.140.446	100	2.968.907.468	100	10.424.318.582	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	96,21	Persen	100	13.511.126.237	100	14.358.863.338	100	14.827.493.699	100	15.682.980.646	100	18.474.762.402	100	76.855.226.320	Sekretariat DPRD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang telah diinventarisasi	98	Persen	99	3.031.609.750	100	2.850.629.329	100	3.792.630.015	100	3.826.944.890	100	5.008.556.020	100	18.510.370.004	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	100	Persen	100	1.453.513.250	100	950.629.329	100	592.630.015	100	626.944.890	100	958.556.020	100	4.582.273.504	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Pemenuhan Belanja Wajib Terhadap APBD	70,60	Persen	70,60	4.403.201.560	100	4.350.629.329	100	4.492.630.015	100	4.526.944.890	100	7.379.002.418	100	25.152.408.212	
	Persentase realisasi belanja terhadap total Belanja Daerah	100	Persen	100	1.549.806.000	100	955.629.329	100	597.630.015	100	631.944.890	100	1.153.556.020	100	4.888.566.254	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	8,59	Persen	16,04	4.022.033.120	31,52	3.825.629.329	38,10	4.467.630.015	45,42	4.501.944.890	50,71	4.973.556.020	50,71	21.790.793.374	Badan Pendapatan Daerah
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	N/A	Persen	16,67	146.204.963	37,50	223.219.618	58,33	203.948.109	79,17	456.898.354	100,00	1.212.000.000	100,00	2.242.271.004	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Persentase pengelola Arsip bersertifikat	45,45	Persen	57,29	85.000.000	80,21	97.000.000	100,00	115.000.000	100,00	135.000.000	100,00	175.000.000	100,00	607.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	8,55	Persen	8,64	319.448.417	8,77	427.693.218	8,90	477.389.007	8,99	780.398.354	8,97	1.698.240.874	8,97	3.703.169.870	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase OPD yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	0	Persen	5,41	799.613.395	10,81	542.458.029	21,62	888.863.334	43,24	888.863.334	86,49	926.308.629	86,49	4.046.106.722	Inspektorat
	Persentase OPD yang menyelenggarakan Monitoring Center for Prevention (MCP)	32,43	Persen	37,84	371.980.366	40,54	188.150.469	43,24	188.150.469	48,65	213.894.170	54,05	213.894.170	54,05	1.176.069.643	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) internal dan eksternal	74,38	Persen	75,00	728.086.366	77,00	398.606.053	81,00	695.719.057	85,00	691.921.998	90,00	876.853.507	90,00	3.391.186.981	
	Persentase pengawasan yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi	100,00	Persen	100	1.572.645.536	100	3.142.578.787	100	3.160.197.475	100	3.136.913.346	100	4.635.204.793	100,00	15.647.539.937	
	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100,00	Persen	100	789.430.066	100	532.274.700	100	532.274.700	100	532.274.700	100	991.072.869	100,00	3.377.327.035	
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,15	Indeks	2,75		3,05		3,35		3,65		3,95			-	
Program Pembangunan Daerah:																

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25	Persen	50	3.121.309.103	60	3.677.694.790	75	3.856.428.941	85	5.772.134.713	100	10.413.678.139	100	26.841.245.686	Dinas Kominfo
	Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	40	Persen	50		60		75		85		100		100		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	10	Persen	15	71.264.284	20	91.942.370	25	97.210.246	30	145.142.866	35	262.104.900	35	667.664.666	Dinas Kominfo
	Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	10	Persen	20		30		40		50		60		60		
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	0	Persen	60	805.219.880	70	797.023.331	80	729.076.845	90	1.088.571.498	100	1.965.786.753	100	5.385.678.307	Dinas Kominfo
	Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	3	Persen	25		50		75		85		100		100		
	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	25	Persen	40		55		70		85		100		100		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	38	Persen	45	106.896.426	50	137.913.555	60	145.815.369	70	217.714.300	80	393.157.351	80	1.001.496.999	Dinas Kominfo
Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	56,13	Nilai	62		65		68		71		74		74		
Program Kepegawaian Daerah	Persentase keterpenuhan kebutuhan pegawai	67,00	Persen	76,00	3.036.035.700	84,00	3.526.951.420	91	3.597.171.910	96	3.701.000.410	100	4.150.546.410	100,00	18.011.705.850	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"	23,76	Persen	70,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		
	Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP)	85,00	Persen	87,00		90,00		92,00		93,00		95,00		95,00		
	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	1,40	Persen	1,30		1,20		1,10		1,00		1,00		1,00		
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	90,00	Persen	91,00	2.006.085.782	92,00	2.173.987.212	93,00	2.309.422.365	94,00	2.788.451.688	95,00	3.846.586.584	95,00	13.124.533.631	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	43,10	Persen	44,80		46,51		48,21		49,91		53,49		53,49		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya	80,00	Persen	82,00		85,00		87,00		90,00		95,00		95,00		
Sasaran: Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,10	Nilai	74		76		78		80		82		82		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase OPD yang memiliki Kualitas Pelayanan Publik yang bernilai baik	4,17	Persen	6,25		16,67		20,83		25		27,08		27,08		Setda
	Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	2,08	Persen	10,42		16,67		20,83		25		25				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	N/A	Persen	100	875.025.041	100	1.417.316.508	100	1.904.712.791	100	1.830.994.234	100	2.067.298.309	100	8.095.346.883	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan	N/A	Persen	100	2.718.640.436	100	5.607.318.570	100	5.053.826.930	100	5.792.106.691	100	6.305.791.854	100	25.477.684.481	Kecamatan
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa di wilayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	N/A	Persen	100	804.809.893	100	1.285.275.191	100	1.807.962.763	100	1.695.619.554	100	1.935.819.082	100	7.529.486.482	Kecamatan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan e-KTP	95,73	Persen	95,87	1.869.215.977	95,93	1.244.026.236	96	1.318.473.852	96,84	1.432.189.654	97,88	1.725.646.902	97,88	7.589.552.622	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase kepemilikan dokumen KIA	10,59	Persen	39,80		52,73		64,35		74,85		84,39		84,39		
	Persentase kepemilikan dokumen KK	63,46	Persen	84,31		88,17		88,5		93,44		94,81		94,81		
Program Pencatatan Sipil	persentase kepemilikan dokumen akta Kelahiran	92,44	Persen	96,00	618.378.119	97,12	720.703.039	98,15	767.235.023	98,19	846.561.439	98,22	1.079.044.739	98,22	4.031.922.358	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	persentase kepemilikan dokumen akta Perkawinan	72,10	Persen	72,59		73,06		74,38		75,26		76,11		76,11		
	Persentase kepemilikan dokumen akta Kematian	80,00	Persen	80,00		85,18		89,66		90,63		96,88		96,88		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan data kependudukan yang dimutakhirkan	100	Persen	100	895.989.201	100	1.024.095.677	100	1.087.546.766	100	1.189.716.213	100	1.471.049.789	100	5.668.397.647	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase OPD/instansi pemerintah yang memanfaatkan data kependudukan sesuai ketentuan regulasi	0,00	Persen	0,06		0,085		0,106		0,127		0,148		0,148		

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan: Meningkatkan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5574	Nilai	0,6074		0,6324		0,6574		0,6824		0,7074		0,7074		
Sasaran: Meningkatkan keberdayaan desa	Persentase desa berkembang	18,93	Persen	24,85		27,81		30,76		33,72		36,68		36,68		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	21	Persen	28%	1.915.282.728	35%	1.925.000.000	43%	1.706.000.000	50%	2.248.866.447	65%	3.425.000.000	65	11.220.149.175	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	5	Persen	24	8.605.111.810	30	8.222.212.461	37	8.530.823.084	43	8.908.543.750	49	13.301.625.665	4900%	47.568.316.770	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	0%	Persen	2%	300.000.000	4%	340.000.000	5%	375.000.000	7%	350.000.000	9%	575.000.000	9%	1.940.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	63%	Persen	64%	900.000.000	66%	1.101.820.050	67%	1.079.717.277	68%	1.125.000.000	70%	1.920.000.000	70%	6.126.537.327	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	0%	Persen	7%	200.000.000	15%	225.000.000	22%	200.000.000	29%	200.000.000	37%	400.000.000	37%	1.225.000.000	

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan: Terwujudnya kondusivitas sosial masyarakat	Angka Konflik Sosial	3	Angka	3		2		2		1		0		0		
Sasaran: Meningkatnya ketentraman dan kerukunan hidup masyarakat	Persentase potensi konflik yang tertangani	100	Persen	100		100		100		100		100		100		
Program Pembangunan Daerah:																
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi serta dibina	45	Persen	55	870.775.574	65	729.500.000	75	747.000.000	85	765.500.000	95	836.791.590	95	3.949.567.164	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial	58	Persen	100	748.775.574	100	601.000.000	100	608.700.000	100	610.700.000	100	635.800.000	100	3.204.975.574	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	43	Persen	100	1.735.303.574	100	1.600.000.000	100	50.719.918.837	100	1.246.898.670	100	1.781.726.917	100	57.083.847.998	Badan Kesbangpol

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Awal	Satuan	Target Capaian										Kondisi Akhir		OPD Penanggung jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Politik	Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	0	Persen	33	438.583.048	44	288.862.692	61	295.500.000	78	235.600.000	94	345.800.000	94	1.604.345.740	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase desa yang berkarakter kebangsaan berdasarkan budaya lokal	0	Persen	25	979.775.574	37	830.000.000	54	847.500.000	74	761.399.999	96	875.600.000	96	4.294.275.573	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik sara yang diselesaikan	100	Persen	100	748.775.574	100	601.000.000	100	608.700.000	100	610.700.000	100	635.800.000	100	3.204.975.574	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan (K3)	80	Persen	85	1.600.000.000	85	1.756.387.275	90	2.190.000.000	90	3.685.269.201	95	5.894.372.287	95	15.126.028.763	Satuan Polisi Pamong Praja
					1.287.278.892.574		669.928.021.823		797.386.488.826		1.069.712.229.423		1.399.355.558.911		5.134.155.197.703	

6.4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan sebuah hasil identifikasi dan pengkajian yang berorientasi pada aspek lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengintegrasian KLHS kedalam rencana pembangunan, dalam hal ini terhadap Rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi penting, guna memastikan rencana pembangunan yang sedang direncanakan dan nantinya terealisasi telah mengakomodir aspek pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian rencana pembangunan yang terealisasi menjadi sinkron dengan tujuan aspek pembangunan berkelanjutan. Berikut hasil integrasi dari hasil kajian KLHS terhadap RPJMD di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021-2026 yang menunjukkan program apa saja yang perlu untuk dicantumkan dalam RPJMD.

Tabel 6. 4. Integrasi Program Rekomendasi KLHS RPJMD

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																		
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5									
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani									
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3				
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1
1	Perlindungan dan jaminan sosial							√																												
2	Pemasaran dan penggunaan produk lokal													√																						
3	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian																																			
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian																																			
5	Penyuluhan pertanian																																			
6	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√																																		
7	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata	√																																		

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																				
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5											
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani											
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3						
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1		
	kabupaten / kota																																					
8	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			√																																		
9	Program hubungan industrial											√																										
10	Program pemberdayaan sosial							√																														
11	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)							√																														
12	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			√																																		

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																		
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5									
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani									
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3				
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1		
13	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				√																															
14	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum																																			
15	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional																																			
16	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah																																			
17	Program kawasan permukiman																																			
18	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh																																			

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																						
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5													
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani													
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3								
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S1	S1			
19	Program pencatatan sipil																																			√				
20	Program pengelolaan ketenagaan listrik																																							
21	Program penanggulangan bencana																																							
22	Program penanganan bencana																																							
23	Program pengelolaan pendidikan			√																																				
24	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan																																							
25	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)																																							
26	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian																																							

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																	
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5								
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani								
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3			
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1	
27	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	√																																	
28	Program pendidik dan tenaga kependidikan			√																															
29	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				√																														
30	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat															√																			
31	Penanganan kerawanan pangan															√																			
32	Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan										√																								
33	Penyediaan pengembangan prasarana pertanian														√																				

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																			
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5										
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani										
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3					
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1	
34	program perizinan usaha pertanian																																				
35	program perizinan dan pendaftaran perusahaan																																				
36	Program pembinaan keluarga berencana																																				
37	Program pengawasan keamanan pangan																																				
38	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner																																				
39	Program pembinaan perpustakaan																																				
40	Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan																																				

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																				
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5											
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani											
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3						
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S1	S2	S3		
41	Program perlindungan perempuan								√																													
42	Program perlindungan khusus anak								√																													
43	SBS																						√															
44	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase																						√															
45	Program pengelolaan energi baru terbarukan																						√															
46	Program pengelolaan pendapatan daerah													√																								
47	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja																																					
48	Program penempatan tenaga kerja																																					

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5							
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani							
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3		
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1
49	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)															√																		
50	Program pemasaran pariwisata	√																																
51	Program perekonomian dan pembangunan																																	
52	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi															√																		
53	Program pengembangan UMKM															√																		
54	Program penelitian dan pengembangan daerah																																	
55	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik																																√	√

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																			
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5										
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani										
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3					
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1			
56	Program administrasi pemerintahan desa																																	√			
57	Program padat karya berbasis pertanian			√																																	
58	Peningkatan jaringan pemasaran produk lokal													√																							
59	Peningkatan efektivitas dana desa untuk urusan pemberdayaan																																		√		
60	Peningkatan infrastruktur																																				
61	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, serta industri kecil dan menengah													√																							
62	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum																																	√	√		

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																					
		Misi 1		Misi 2						Misi 3									Misi 4								Misi 5												
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas						Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani												
		T1		T1			T2			T1									T1				T2				T3	T1			T2	T3							
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1			
63	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum																																			√			
64	Program pengelolaan persampahan																																			√			
65	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)																																			√			
66	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup																																			√	√	√	√
67	Program pengelolaan hutan																																			√	√	√	√

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																	
		Misi 1		Misi 2					Misi 3									Misi 4							Misi 5										
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas					Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal									Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan							Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani										
		T1		T1			T2		T1									T1			T2				T3	T1			T2	T3					
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1
68	Program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)																									√	√	√	√						
69	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi																																		√
70	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)																									√	√	√	√						
71	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota																														√	√	√		
72	Program pengelolaan aplikasi informatika																														√	√	√		
73	Program pengembangan jasa kontruksi																									√									
74	Program pengelolaan keuangan daerah														√																				

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	SASARAN RPJMD KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021 -2026																																				
		Misi 1		Misi 2				Misi 3						Misi 4								Misi 5																
		Mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan dan inklusif sebagai penggerak utama ekonomi daerah		Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas				Mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal						Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan								Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani																
		T1		T1			T2		T1						T1				T2				T3	T1			T2	T3										
		S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S1	S2	S3	S4	S1	S1	S2	S3	S1	S1		
75	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan																																			√		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta yang memenuhi layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Selain target program, bab ini juga memuat pagu indikatif yang merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada Bab III (Tiga) RPJMD terutama yang berkaitan dengan kerangka pendanaan yang terdiri atas kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	865,789,496,880	1,340,637,672,885	723,928,901,287	841,756,378,577	1,150,651,802,109	1,474,669,760,769
Prioritas I	606,052,647,816	938,446,371,020	506,750,230,901	589,229,465,004	805,456,261,476	1,032,268,832,538
Prioritas II	259,736,849,064	402,191,301,866	217,178,670,386	252,526,913,573	345,195,540,633	442,400,928,231

Ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat, melainkan juga dari APBN maupun sumber pendanaan lainnya. Meskipun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah pada bagian ini hanya mencantumkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Manggarai Barat. Kerangka pendanaan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program atau pagu indikatifnya. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD.

Tabel 7. 2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
x																			
x	xx																		
x	xx	01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase urusan rutin Pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100	100	721.785.236.550	100	765.729.054.898	100	798.833.045.843	100	893.727.321.747	100	938.474.055.693	100	4.118.548.714.731	Seluruh OPD
				Persentase fasilitasi layanan kedinasan KDH/WKDH/Sekretariat Daerah sesuai standar	Persen	100	100	1.296.500.000	100	1.154.057.706	100	1.149.085.591	100	1.791.364.871	100	1.980.758.115	100	7.371.766.283	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
				Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	2.729.568.664	100	3.881.476.750	100	3.965.207.593	100	2.638.731.205	100	2.532.249.425	100	15.747.233.637	Bagian Umum
				Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	N/A	61		63		65		71		75		75		
				Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi 8 area perubahan reformasi	Persen	27,78	41,67	1.250.000.000	55,56	704.079.809	69,44	759.946.299	83,33	1.374.106.115	100	1.586.473.920	100	5.674.606.143	Bagian Organisasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		birokrasi																
		Persentase OPD yang memiliki kualitas pelayanan publik yang bernilai baik	Persen	4,17	6,25	16,67	20,83	25	27,08									
		Persentase OPD yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat minimal "Baik"	Persen	2,08	10,42	16,67	20,83	25	25									
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Persen	0	100	700.000.000	100	750.000.000	100	780.000.000	100	800.000.000	100	820.000.000	100			Bagian Perencanaan dan Keuangan
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
1	01	02 Program Pengelolaan	Persen	46	50	121.689.	54	128.899.1	60	70.625.1	64	71.571.8	68	80.092.140.856	68	472.877.462.56	Dinas Pendidikan,	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	98,01	98,2	225.349	98,75	31.807	99,15	37.321	99,6	27.237	100		100	9	Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	92,67	93		94		95,00		96		97				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	104,93	100		100		100		100		100				
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	persen	97,75	98		98,5		99		99,5		100				
		Persentase SD yang terakreditasi	Persen	58,76	62		66		70		74		78				
		Persentase SMP yang terakreditasi	Persen	76	78		80		82		84		86				
		Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) (SPM)	Persen	95,97	96,15		96,45		96,6		96,9		97,05				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang dikembangkan	Persen	N/A	50	55	60	65	70			70				
				Persentase kurikulum muatan lokal PAUD dan pendidikan non formal yang dikembangkan	Persen	N/A	20	25	30	35	40			40				
1	01	04	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	24,47	28,5	32,5	36,5	40,5	44,5			44,5				
				Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	23,07	26,5	38,5	50,5	62,5	74,5			74,5				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Rasio guru terhadap murid SD	Rasio	1 : 11	1:16		1:20		1:24		1:26		1:29		1:29		
		Rasio Guru Terhadap Murid SMP	Rasio	1 :11	1:14		1:18		1:20		1:22		1:24		1:24		
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	Persen	90,48	91,5		92		92,5		93		93,5		93,5		
		Rasio guru per murid per kelas SD	Rasio	1 : 11 :1	1:16:1		1:20:1		1:24:1		1:26:1		1:29:1		1:29:1		
		Rasio guru per murid per kelas SMP	Rasio	1 : 11 : 1	1:14:1		1:18:1		1:20:1		1:22:1		1:24:1		1:24:1		
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	02	02 Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio	0,008	0,010	27.722.594.561	0,009	55.408.243.940	0,0086	47.011.049.678	0,0078	85.277.035.384	0,0071	93.518.132.957	0,0071	207.728.812.557	Dinas Kesehatan
			Rasio	0,53	0,48	30.110.851.985	0,44	24.272.666.260	0,4	32.639.943.302	0,36	23.594.345.801	0,33	51.766.511.552	0,33	174.086.569.009	
			Persen	73,74	91	1.292.705.000	92	1.566.670.000	93	1.697.880.000	94	1.763.100.000	95	1.805.700.000	95	8.126.055.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	87,3	91	3.531.29 5.000	92	3.564.460. 000	93	3.565.66 5.000	94	3.566.87 0.000	95	3.568.557.000	95	17.796.847.000	
		Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60,37	100	975.752. 000	100	482.120.0 00	100	607.116. 000	100	1.211.96 0.000	100	746.880.000	100	4.023.828.000	
		Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	88	100	271.812. 000	100	205.920.0 00	100	314.640. 000	100	243.360. 000	100	354.080.000	100	1.389.812.000	
		Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	60,94	62	2.267.33 0.000	65	2.055.500. 000	68	2.330.00 0.000	70	2.145.00 0.000	75	2.035.000.000	75	10.832.830.000	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase balita gizi kurang	Persen	10,26	16	81.335.1	15	89.468.61	14	97.602.1	13	105.735.	12	113.869.140	12	488.010.600	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						00		0		20		630					
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persen	36	44	93.400.000	46	47.900.000	48	80.000.000	50	54.360.000	52	85.000.000	52	360.660.000	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	92	85	300.000.000	85	300.000.000	85	300.000.000	85	400.000.000	85	400.000.000	85	1.700.000.000	
		Persentasae penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	67,98	67		70		75		77		80		80	-	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	63	67	36.990.000	70	-	75	36.990.000	77	-	80	-	80	73.980.000	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)	Persen	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	150.000.000	0	200.000.000	0	250.000.000	0	800.000.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	Persen	48	52	-	56	25.000.000	58	-	60	-	65	-	65	25.000.000		
		Persentase puskesmas terakreditasi	Persen	68,18	81,82	14.170.455.000	95,45	14.219.755.000	100	14.385.525.000	100	14.119.755.000	100	14.281.095.000	100	71.176.585.000		
1	02	03	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,5	19.393.167.754	0,6	23.250.649.824	0,7	30.166.240.407	0,8	27.032.457.467	0,9	47.157.800.289	147.000.315.741	Dinas Kesehatan
				Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	Rasio	0,35	0,5	6.193.865.000	0,6	6.193.865.000	0,7	6.193.865.000	0,8	6.193.865.000	0,9	6.193.865.000	30.969.325.000	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen	100	100	175.630.000	100	176.000.000	100	177.000.000	100	178.000.000	100	179.000.000	885.630.000	Dinas Kesehatan
				Persentase peserta penyuluh keamanan pangan yang mendapat sertifikat	persen	99,93	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	270.000.000	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	20,77	50,04	107.844.000	51,27	184.844.000	52,5	107.844.000	53,73	186.844.000	54,96	107.844.000	695.220.000	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		bidang kesehatan	Persentase desa siaga aktif	Persen	60	72	1.030.000.000	73,17	1.215.000.000	74,34	1.513.100.000	75,51	1.538.100.000	76,68	1.558.100.000	76,68	6.854.300.000		
			Persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	Persen	60,40	63,40	610.000.000	66,40	660.000.000	69,40	770.550.000	72,40	795.000.000	75,40	810.000.000	75,4	3.645.550.000		
1	03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																	
1	03	02	Program pengelolaan sumber daya air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	52,72	60,47	16.400.000.000	69,29	18.650.000.000	79,41	21.422.663.927	95,82	42.329.691.873	100	46.209.517.627	100	145.011.873.427	
				Persentase kawasan rawan longsor dengan bangunan penahan longsor	Persen	51	52,39	6.100.000.000	55,31	12.839.143.043	58,39	13.589.143.043	64,55	34.717.884.903	69,98	32.385.903.687	69,98	99.632.074.676	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
				Persentase luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi bangunan pengaman pantai	Persen	30,56	36,2	1.500.000.000	43,8	2.000.000.000	51,7	2.100.000.000	60,4	9.917.884.903	69,4	10.897.710.657	69,4	26.415.595.560	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	03	03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga memiliki akses SPAM	Persen	68,54	81,39	22.444.201.100	85,86	7.791.003.882	89,66	6.639.500.000	94,60	16.246.384.903	100	17.773.210.657	100	70.894.300.542	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1	03	05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah Tangga yang memiliki akses SPALD-T	Persen	73,88	75,19	4.602.000.000	82,38	20.077.000.882	85,32	10.281.710.219	92,85	33.899.595.122	100	53.577.420.876	100	122.437.727.099	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir	Persen	32,55	42,29	2.066.000.000	49,84	1.600.000.000	57,38	1.600.000.000	81,90	12.817.884.903	100	15.831.710.657	100	33.915.595.560	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1	03	09	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan dengan IMB	Persen	38,45	42,78	350.000.000	50,67	500.000.000	65,58	5.000.000.000	76,17	8.117.884.903	85,80	8.997.710.657	85,80	22.965.595.560	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
1	03	10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase panjang jalan rusak dan rusak berat yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	55,53	34,88	778.665.418.413	33,91	65.143.848.216	32,07	108.206.684.827	26,27	197.617.884.903	18,50	262.862.035.981	18,50	1.412.495.872.340	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	44,47	65,12		66,09		67,93		73,73		81,50		81,50		
1	03	1	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Kontruksi yang terlatih	Persen	40	52,5		65		77,5		90		100	18.740.595.560	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
				Persentase rekomendasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan	Persen	58	64	525.000.000	70	525.000.000	75	85	8.142.884.903	100	9.022.710.657	-	
1	03	1	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kawasan yang sesuai RRTR	Persen	57	65	2.700.000.000	70	3.500.000.000	75	85	11.617.884.903	100	12.497.710.657	33.315.595.560	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Tata Ruang
				Persentase dokumen RDTR yang tersedia	Persen	100	100		100		100	100		100		-	
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman														
1	04	0	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban terdampak relokasi program pemerintah	Persen	N/A	100	4.283.190.901	100	2.543.197.269	100	100	2.206.844.297	100	3.486.618.886	13.900.928.299	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
				N/A	100	4.283.190.901	100	2.543.197.269	100	1.381.076.946	100	2.206.844.297	100	3.486.618.886	100	13.900.928.299			
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase unit rumah korban bencana yang dibangun kembali	Persen	N/A													
				Persentase ketersediaan rumah layak huni	Persen	36,62	37,4	10.830.244.680	37,7	14.343.014.407	38,1	13.967.093.831	38,5	16.964.540.370	41,2	21.876.974.346	41,2	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
				Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh	Persen	N/A	18	5.796.360.112	16	14.343.014.407	14	13.967.093.831	11	16.964.540.370	9	21.876.974.346	9	77.981.867.634	
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase jalan di kawasan permukiman dan permukiman kumuh dalam kondisi baik	Persen	N/A	20	2.228.604.615	25	2.848.587.004	30	1.599.840.613	40	3.417.735.319	50	6.420.441.751	50	16.515.209.302	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketentraman,	Persen	80	85	1.600.000.000	85	1.756.387.275	90	2.190.000.000	90	3.685.269.201	95	5.894.372.287	95	15.126.028.763	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Umum	Ketertiban, dan Keindahan (K3)																	
1	05	03	Program penanggulangan bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen	0	0,61	317.346.372	1,21	236.600.000	1,82	243.773.997	2,42	216.742.823	3,03	239.358.093	3,03	1.253.821.285	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase masyarakat yang memperoleh pelatihan mitigasi	Persen	0,06	1,03	331.763.549	2,07	445.055.647	3,1	567.460.647	4,14	2.157.372.095	5,17	2.448.687.635	5,17	5.950.339.573	
				Persentase korban yang mendapat pendampingan pasca bencana	Persen	100	100	109.293.549	100	296.313.006	100	265.622.823	100	423.560.030	100	773.550.030	100	1.868.339.438	
				Persentase masyarakat yang memperoleh informasi kebencanaan	Persen	0,29	0,86	149.720.000	4,76	896.060.000	9,44	916.060.000	17,24	2.208.720.000	25,55	2.410.120.000	25,55	6.580.680.000	
				Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	360	360	224.751.099	300	2.600.000.000	240	2.165.627.148	180	3.350.000.000	120	7.554.832.618	120	15.895.210.865	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																	
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kontrak kerjasama dengan lembaga penyelenggara kejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	Persen	0	100	220.948. 323	100	169.918.6 39	100	200.000. 000	100	342.362. 467	100	427.348.682	100	1.360.578.111	Dinas Sosial
				Presentase lembaga masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kejahteraan sosial	Persen	10,71	10,71	166.110. 000	10,71	205.545.4 55	10,71	226.672. 119	10,71	300.000. 000	10,71	400.000.000	10,71	1.298.327.574	
				Persentase tenaga kejahteraan sosial yang bersertifikat	Persen	77,10	77,10	145.308. 220	81,68	219.545.4 55	86,26	250.000. 000	91,60	380.000. 000	100,00	500.000.000	100	1.494.853.675	
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran dan Eks Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan orang terlanjar yang dpulangkan dari Labuan Bajo ke Daerah	Persen	100	100	25.779.3 20	100	26.390.93 6	100	40.298.4 17	100	60.138.9 69	100	78.079.334	100	230.686.976	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal																	
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	3,73	6,72	222.130.000	10,45	239.545.455	14,93	265.000.000	22,39	293.335.248	34,33	400.000.000	34,33	1.420.010.703	Dinas Sosial
			Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluarpanti (SPM)	Persen	0,87	1,12	161.605.000	1,40	240.545.455	1,71	270.301.815	2,21	450.000.000	2,62	550.000.000	2,62	1.672.452.270		
			Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	Persen	0	5	43.198.873	15	89.545.455	30	120.000.000	50	250.000.000	75	350.000.000	75,00	852.744.328		
			Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	10,38	11,73	203.630.000	13,41	272.837.009	15,34	300.000.000	19,18	450.000.000	23,99	573.904.022	23,99	1.800.371.031		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		(SPM)																
1	06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	86,96	87,41	941.194. 000	87,46	1.560.210. 192	87,52	1.617.47 9.761	87,75	2.596.69 7.714	87,87	3.361.483.297	87,87	10.077.064.964	Dinas Sosial	
1	06 06	Program Penanganan Bencana	Persen	98,27	100	510.700. 000	100	510.536.7 13	100	424.941. 693	100	670.806. 593	100	916.886.776	100	3.033.871.775	Dinas Sosial	
1	06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Persen	0	10	158.180. 000	15	149.927.3 81	20	175.216. 969	25	220.555. 875	30	250.231.315	30	954.111.540	Dinas Sosial	
2		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																
2	07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Serapan Tenaga Kerja	Persen	75,62	81,55	200.000.000,00	84	200.000.000,00	85,47	300.000.000,00	87,12	300.000.000,00	88,59	400.000.000,00	88,59	1.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	07	03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja Lokal yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan permintaan pasar	Persen	11,98	22,42	1.060.000.000,00	25,02	3.720.000.000,00	30,01	5.430.000.000,00	40,01	11.930.000.000,00	59,99	24.690.800.000,00	59,99	46.830.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	07	04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75,62	81,55	350.000.000,00	83,62	450.000.000,00	85,47	593.254.807,00	86,08	870.000.000,00	87,86	980.000.000,00	87,86	3.243.254.807,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	07	04	Program hubungan industrial	Persentase perusahaan yang mematuhi regulasi ketenagakerjaan	Persen	31,73	39,90	591.884.763,00	50	1.070.888.157,00	100,00	1.200.000.000,00	100,00	1.660.268.976,00	100,00	2.300.000.000,00	100,00	6.823.041.896,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Persen	37,50	45,00	189.534.829	52,50	211.897.006	60,00	145.190.032	67,50	105.377.967	72,50	625.648.240	72,5	1.277.648.074	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
				Persentase perempuan pengambil keputusan publik	Persen	7,50	10,00	189.534.829	12,50	211.897.006	15,00	145.190.032	17,50	105.377.967	20,00	625.648.240	20	1.277.648.074	
2	08	03	Program perlindungan perempuan	Persentase korban kekerasan yang ditangani	Persen	78,26	79,34	284.302.244	78,26	317.845.509	81,52	217.785.048	82,60	158.066.950	84,78	938.472.360	84,78	1.916.472.111	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
2	08	06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Persentase fasilitas publik layak anak	Persen	45,00	50,00	189.534.829	54,00	211.897.006	62,00	145.190.032	70,00	105.377.967	79,00	625.648.240	79,00	1.277.648.074	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
2	08	07	Program perlindungan khusus anak	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	72,72	77,27	284.302.244	81,81	317.845.509	86,36	217.785.048	90,90	158.066.950	95,42	938.472.360	95,42	1.916.472.111	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																
2	09	02	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Stok cadangan pangan daerah	Ton	11,550	60	2.289.796.923	60	2.098.992.500	70	2.350.000.000	98	1.445.553.167	122	1.524.764.740	122	9.709.107.330	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase lumbung pangan yang memiliki sarana yang baik	Persen	82	84,62		86,70		88,24		88,89		89,5		89,5		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	09	03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi pangan non-beras	Persen	6,67	20	2.232.445.000	40	2.226.007.500	60	2.466.657.875	80	3.309.190.769	100	4.000.000.000	100	14.234.301.144	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah yang masuk ke dalam kategori sulit untuk pendistribusian pangan	Persen	4,14	3,55	175.000.000	2,96	200.000.000	2,37	225.000.000	1,18	250.000.000	1,2	500.000.000	1,2	1.350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi pangan	Persen	0,58	0,47		0,35		0,25		0,15		0,15		0		
2	09	05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Aman /bebas Zat kimia berbahaya	Persen	100	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	3.600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Izin yang di keluarkan sesuai SOP	Persen	N/A	100	978.165.486	100	1.017.278.908	100	1.027.384.631	100	1.471.229.531	100	2.209.745.924	100	6.703.804.480	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
																		Pertanahan	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	Persen	N/A	100	489.082.743	100	508.639.454	100	513.692.315	100	735.614.766	100	1.104.872.962	100	3.351.902.240	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penggantian kerugian dan santunan tanah masyarakat terdampak pembangunan	Persen	N/A	100	3.423.579.200	100	3.560.476.176	100	3.595.846.208	100	5.149.303.359	100	7.734.110.735	100	23.463.315.678	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diimplementasikan	Persen	100	100	270.410.019	100	251.065.423	100	270.350.059	100	930.174.475	100	1.269.589.371	100	2.991.589.348	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	11	03	Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	Persen	1,64	21	676.025.047	41	896.662.226	61	1.019.972.308	80	1.400.112.703	100	1.586.986.714	100	5.579.758.998	
			Nilai Emisi Gas Rumah Kaca (ion CO2eq)	Predikat	Baik	Baik		Baik		Baik	Baik		Baik	Baik		Baik		
			Persentase udara ambien yang memenuhi baku mutu	Persen	N/A	100	676.025.047	100	896.662.226	100	1.019.972.308	100	2.325.436.188	100	3.173.973.428	100	8.092.069.197	
2	11	04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persen	N/A	50	270.410.019	100	251.065.423	100	270.350.059	100	930.174.475	100	1.269.589.371	100	2.991.589.348	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	2	27	405.615.028	42	466.264.357	52	647.242.366	72	920.472.495	92	1.904.384.057	92	4.343.978.304	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	11	11	Program pengelolaan persampahan	Persen	1,47	2,54	8.504.484.886	4,23	7.108.230.278	4,34	7.613.864.368	4,40	8.931.857.719	4,62	9.934.678.240	4,62	42.093.115.491	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
				Persen	21	51		53,47		56,44		59,41		62,40		62,40		
2	12		Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil															
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persen	95,73	95,87	1.869.215.977	95,93	1.244.026.236	96	1.318.473.852	96,84	1.432.189.654	97,88	1.725.646.902	97,88	7.589.552.622	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persen	10,59	39,80		52,73		64,35		74,85		84,39				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase kepemilikan dokumen KK	Persen	63,46	84,31		88,17		88,5		93,44		94,81		94,81		
2	12	03															
			Program Pencatatan Sipil														
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat														

Kode	Bidang Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		dan Desa																	
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	4,88	24	8.605.111.810	30	8.222.212.461	37	8.530.823.084	43	8.908.543.750	49	13.301.625.665	49	47.568.316.770	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang menjalin kerjasama desa dan pihak ketiga	Persen	0%	2%	300.000.000	4%	340.000.000	5%	375.000.000	7%	350.000.000	9%	575.000.000	9%	1.940.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menjalankan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan regulasi	Persen	21%	28%	1.915.282.728	35%	1.925.000.000	43%	1.706.000.000	50%	2.248.866.447	65%	3.425.000.000	65%	11.220.149.175	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Persen	63%	64%	900.000.000	66%	1.101.820.050	67%	1.079.717.277	68%	1.125.000.000	70%	1.920.000.000	70%	6.126.537.327	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif	Persen	0%	7%	200.000.000	15%	225.000.000	22%	200.000.000	29%	200.000.000	37%	400.000.000	37%	1.225.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	02	Program pengendalian penduduk	Persentase Sektor yang memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Pendudukan	Persen	0,00	15	470.043.360	17	423.794.012	20	290.380.064	23	210.755.934	25	1.251.296.480	25	2.646.269.850	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
			Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase peserta KB aktif	Persen	65,51	66,41	1.421.436.638	67,38	1.400.851.714	68,36	1.447.703.766	69,42	1.505.967.470	70,47	1.735.766.256	70,47	7.511.725.844	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & P3A
2	14	03		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Persen	20,89	20	977.948.993	19,02	933.901.142	18,04	965.135.835	16,98	1.003.978.313	15,93	1.157.177.504	15,93	5.038.141.787	
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	Persen	22,35	23,24	756.205.170	24,22	700.425.857	25,19	723.851.862	26,25	752.983.735	27,30	867.883.128	27,3	3.801.349.752	
				Cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi masyarakat	Persen	100,00	100,00	534.461.347	100,00	466.950.571	100,00	482.567.917	100,00	501.989.157	100,00	578.588.752	100	2.564.557.744	
				Total Fertility rate (TFR)	Persen	2,08	1,26	1.199.692.816	1,24	1.167.376.428	1,22	1.206.419.793	1,20	1.254.972.891	1,18	1.446.471.880	1,18	6.274.933.808	
			Program pemberdayaan	Persentase pusat pelayanan	Persen	0,00	16,67	893.298.	33,33	848.883.2	50,00	852.676.	83,33	871.774.	100,00	1.172.864.000	100	4.639.496.464	Dinas Pengendalian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)				054		87		539		583						Penduduk, KB & P3A
2	14	04																
2	15																	
2	15	02																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	20	25	412.815.745	30	300.000.000	40	300.000.000	50	2.000.000.000	75	2.429.000.000	75	5.441.815.745			
		IKM terhadap pelayanan parkir	Nilai	40	45	412.815.745	50	350.000.000	60	380.000.000	75	500.000.000	100	500.000.000	100	2.142.815.745			
		Cakupan layanan angkutan umum	Persen	20	25	362.815.745	30	250.000.000	40	280.000.000	50	350.000.000	70	350.000.000	70	1.592.815.745			
2	15	03	Program pengelolaan pelayaran	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	0	0,05	362.815.745	0,25	250.000.000	0,45	280.000.000	0,60	250.000.000	0,75	250.000.000	0,75	1.392.815.745	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan
				Persentase angkutan laut yang memiliki izin operasi	Persen	45	55	512.815.745	67	400.000.000	75	400.000.000	85	400.000.000	100	400.000.000	100	2.112.815.745	
2	16		Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika																
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi	Persen	0	60	805.219.880	70	797.023.331	80	729.076.845	90	1.088.571.498	100	1.965.786.753	100	5.385.678.307	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		komunikasi (STARKOM)															
		Persentase OPD yang memiliki PPID pembantu aktif	Persen	3	25	50	75	85	100					100			
		Persentase komunitas masyarakat/mitr a strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	25	40	55	70	85	100					100			
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50	60	75	85	100			100			
				Persentase layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi	Persen	40	60	60	75	85	100			100			
						3.121.30 9.103	3.677.694. 790	3.856.42 8.941	5.772.13 4.713				10.413.678.139			26.841.245.686	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Dan Menengah																	
2	17	02	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penurunan Koperasi simpan pinjam yang merugikan masyarakat	Persen	32,59	0	100.000.000	0	125.000.000	0	175.000.000	0	200.000.000	0	415.427.592	0	1.015.427.592	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
2	17	06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang memiliki SDM terlatih	Persen	7,41	18,52	140.000.000	29,63	280.000.000	42,22	400.000.000	57,04	500.000.000	67,41	900.000.000	67,41	2.220.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
				Persentase koperasi yang mendapatkan bantuan permodalan	Persen	N/A	5,9	100.000.000	16,3	219.000.000	29,63	324.000.000	45,93	370.000.000	67,41	660.000.000	67,41	1.673.000.000	
				Persentase koperasi yang memiliki sarana sesuai standar	Persen	10,99	21,98	10.000.000	27,47	10.000.000	32,97	15.000.000	43,96	15.000.000	49,45	15.000.000	49,45	65.000.000	
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,82	1,59	150.000.000	2,37	200.000.000	3,15	250.000.000	3,93	300.000.000	4,71	400.000.000	4,71	1.300.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
			Program pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat	Persen	1,43	5,95	100.000.000	11,90	219.000.000	17,86	324.000.000	20,83	370.000.000	41,67	660.000.000	41,67	1.673.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		kapasitas produksinya																Koperasi dan UKM
2	17	08	Persen	20,71	23,10	80.000.000	25,48	159.000.000	27,86	236.000.000	30,24	269.000.000	32,62	480.000.000	32,62	1.224.000.000		
		Persentase usaha mikro yang bersertifikat																
		Persentase usaha mikro yang meningkat kapasitas pemasaran produknya	Persen	N/A	20	80.000.000	40	150.000.000	60	200.000.000	80	250.000.000	100	300.000.000	100	980.000.000		
2	18																	
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
2	18	02	Persen	N/A	100	541.230.563	100	750.000.000	100	850.000.000	100	758.308.283	100	3.000.000.000	100	5.899.538.846		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program pengembangan iklim penanaman modal																
2	18	03	Persen	N/A	40	425.000.000	45	650.000.000	50	736.628.442	55	733.459.865	60	4.100.000.000	60	6.645.088.307		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program promosi penanaman modal																
2	18	04	Persen	84,37	85	635.000.000	87	1.100.000.000	90	1.069.467.035	92	1.478.667.259	95	4.200.000.000	95	8.483.134.294		Dinas Penanaman Modal dan
		Program pelayanan penanaman																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		modal	dijalankan sesuai SOP														Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	05	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	Persen	N/A	50	411.834.150	55	432.425.858	60	454.047.150	65	476.749.508	70	500.586.983	70	2.275.643.649	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang terlayani kebutuhan datanya dan informasi perizinan	Persen	0,00	100	72.666.546	100	162.826.929	100	200.000.000	100	200.000.000	100	822.728.247	100	1.458.221.722	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang kepemudaan dan Olahraga																
2	19	02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	54	58	1.020.534.410	62	1.046.534.410	66	1.120.000.000	70	1.195.000.000	74	1.275.000.000	74	5.657.068.820	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Buah	N/A	420	2.797.310.080	460	2.952.310.460	500	3.266.512.460	540	3.525.000.000	580	3.860.000.000	580	16.401.133.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
				Cakupan pelatih yang tersertifikasi	Orang	6	8		10		12		14	16			16		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Cakupan Atlet muda yang dibina	Orang	N/A	50		60		70		80		90		90				
2	19	04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	65	70	1.065.960.000	75	1.175.960.000	80	1.295.960.000	85	1.300.000.000	90	1.350.000.000	90	6.187.880.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase PD yang memiliki data statistik sektoral lengkap dan digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	38	45	106.896.426	50	137.913.555	60	145.815.369	70	217.714.300	80	393.157.351	80	1.001.496.999	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10	15		20		25		30		35		35		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase aplikasi persandian yang diterapkan dalam SPBE	Persen	10	20	71.264.284	30	91.942.370	40	97.210.246	50	145.142.866	60	262.104.900	60	667.664.666	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2	22																		
		Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan																	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	Persen	N/A	100	1.258.434.852	100	2.000.000.000	100	2.465.438.803	100	3.402.875.227	100	5.179.512.064	100	14.306.260.946	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian daerah yang dikelola dengan baik	Persen	58,90	100	853.936.957	100	1.107.659.679	100	1.200.000.000	100	1.240.000.000	100	1.600.000.000	100	6.001.596.636	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	04	Program pembinaan sejarah	Persentase warisan sejarah dilestarikan	Persen	100	100	100.000.000	100	451.478.415	100	649.052.338	100	946.504.956,00	100	1.443.830.203	100	3.590.865.912	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	22	05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	1.800.000.000	100	2.000.000.000	100	2.300.000.000	100	3.000.000.000,00	100	3.500.000.000	100	12.600.000.000	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
2	23		Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan																
2	23	02	Program Pembinaan perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai	N/A	50	396.326.689	65	510.750.000	70	541.687.117	77,00	1.000.000.000	87	1.978.640.874	87	4.427.404.680	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,18	154.326.690	0,18	237.162.839	0,19	254.650.000	0,20	372.296.709	0,21	1.106.600.000	0,21	2.125.036.238			
2	24	Urusan pemerintahan bidang kearsipan																	
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	N/A	16,67	146.204.963	37,50	223.219.618	58,33	203.948.109	79,17	456.898.354	100,00	1.212.000.000	100,00	2.242.271.044	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase pengelola Arsip bersertifikat	Persen	45,45	57,29	85.000.000	80,21	97.000.000	100,00	115.000.000	100,00	135.000.000	100,00	175.000.000	100,00	607.000.000	
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Persen	8,55	8,64	319.448.417	8,77	427.693.218	8,90	477.389.007	8,99	780.398.354	8,97	1.698.240.874	8,97	3.703.169.870	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan																
3	25	03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana penangkapan	Persen	43,5	51,6	1.055.202.500	59,7	3.079.970.125	67,7	4.558.706.018	75,81	5.326.206.573	83,87	8.307.238.069	83,87	22.327.323.285,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		yang sesuai standar																	
		Persentase kelompok nelayan terlatih	Persen	3,2	7,26	8,06	8,87	9,68	10,48	10,48									
		Persentase kelompok nelayan yang meningkat kelasnya	Persen	5,6	6,5	7,3	8,06	8,87	9,68	9,68									
3	25	04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase kelompok yang mendapat bantuan sarana	Persen	39,2	49	2.267.064.608	62,75	3.531.901.674	73	3.869.555.374	84,31	4.842.660.340	100	7.848.783.057	100	22.359.965.053,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang memiliki ketersediaan bibit unggul sesuai standar	Persen	26,5	36,30	48,00	59,80	71,57	91,20	91,20							
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang menguasai penggunaan IPTEK	Persen	4,9	6,90	8,80	10,80	12,75	14,70	14,70							
				Persentase kelompok perikanan budidaya yang	Persen	4,9	6,90	8,80	10,80	12,75	14,70	14,70							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		menggunakan metode budidaya berorientasi agribisnis																
		Persentase kelompok perikanan budidaya yang naik kelas	Persen	0	0,98		1,96		2,94		3,92		4,90		4,90			
3	25	06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persen	0	20	600.000.000	40	700.000.000	60	800.000.000	80	900.000.000	100	2.000.000.000	100	5.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
3	26	02	Program peningkatan daya tarik destinasi wisata	Persen	34,62	38,46	1.673.338.197	42,31	2.701.244.744	46,15	3.414.822.687	50,00	7.008.978.214	53,85	8.746.766.747	53,85	23.545.150.589	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
			Persentase destinasi wisata baru yang dikembangkan	Persen	0	5,88	2.981.317.925	11,76	4.051.867.116	17,65	5.122.234.030	23,53	9.081.903.957	29,41	12.143.204.932	29,41	33.380.527.960	
3	26	03	Program pemasaran pariwisata	Persen	38,46	86,54	947.361.848	86,54	1.100.000.000	88,46	1.700.000.000	100	1.950.000.000	100	6.753.890.378	100	12.451.252.226	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Persen	64,29	71,43	647.361.848	78,57	900.000.000	85,71	1.200.000.000	92,86	1.650.000.000	100	4.953.890.378	100	9.351.252.226		
3	26	04	Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persen	N/A	5	597.361.848	15	475.000.000	27	575.000.000	60	850.000.000,00	100	3.203.890.378	100	5.701.252.226	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3	26	05	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	2,73	3,28	1.575.545.210,00	5,30	2.475.992.245,00	7,04	2.723.541.857,00	8,46	6.961.595.678,00	10,40	8.473.992.857,00	10,40	22.210.667.847	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
3	27	02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	3,34	3,40	11.200.000.000,00	3,68	15.000.000.000,00	3,93	17.846.049.286,74	4,10	22.350.861.768,13	4,39	28.661.890.120,00	4,39	95.058.801.174,87	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		penunjang lainnya)															
		Persentase luas lahan pertanian <i>Hortikultura</i> yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	0,97	8,61	9,74	11,37	12,99	14,21	10,96							
		Persentase luas lahan pertanian <i>Perkebunan</i> yang menerapkan sarana produksi sesuai standar (benih unggul, Pupuk Obat - obatan dan sarana penunjang lainnya)	Persen	1,58	1,28	1,46	1,64	1,75	2,01	2,01							
		Persentase kelompok petani (perkebunan) yang memiliki	Persen	0,23	0,45	0,62	0,73	0,85	1,01	1,01							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		sarana perkebunan sesuai standar																
		Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persen	14,75	27,03	1.841.621.801	35,15	6.254.154.292	59,21	4.838.377.856	69,62	15.801.680.755	84,34	20.076.788.483	84,34	48.812.623.187,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Persentase kelompok peternak yang memiliki pakan sesuai standar	Persen	19,84	20,99		35,46		43,05	52,80	71,64			71,64				
3	27	03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	85,20	12.005.764.929,00	88,75	89,91	15.967.000.000,00	91,72	19.364.214.000,00	91,98	23.914.795.751,87	93,12	30.560.485.742,00	93,12	101.812.260.422,87	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		Pesentase peningkatan Luas Lahan pertanian Fungsional	Persen	36,159	36,161		36,163		36,165	36,167	36,169			36,169				
		Luas lahan pertanian LP2B yang tidak beralih fungsi (ha)	Ha	18.267,00	18.267,00		18.267,00		18.267,00	18.267,00	18.267,00			18.267,00				
		Persentase Panjang jalan usaha tani	Persen	95,31	96,84		97,37		97,75	98,06	98,30			98,30				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		berkondisi baik																	
		Persentase Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar	Persen	N/A	33		-	67		-	100		100,00						
		Persentase Prasarana Pembibitan ternak, HPT dan Veteriner	Persen	46,67	60,00	8.050.000.000	73,33	5.500.000.000	86,67	7.441.746.598	93,33	1.750.000.000	100,00	1.825.000.000	100,00	24.566.746.598,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat kematian ternak akibat penyakit ternak	Persen	8,15	7,5		4,5	2	1,5	0,5		0,5					
				Tingkat kejadian Penyakit Zoonosis	Persen	0,04	0,022		0,012	0,01	0,007	0		0					
				Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar sertifikasi	Persen	12,23	17,25	2.657.635.246	27,19	5.651.500.000	46,06	53,08	68,20	10.376.068.750	68,20	17.807.465.625	45.161.137.256	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	05	Program pengendalian dan penanggulangan an bencana pertanian	Luas lahan pertanian yang terserang hama penyakit (Ha)	Ha	2.000	3.500		4500	5.500	6.000	6.500,00		6.500,00					
				Luas lahan pertanian yang ditanggulangi akibat perubahan iklim dan bencana (ha)	Ha	N/A	100	2.850.000.000,00	150	3.850.000.000,00	200	250	300	4.470.742.091,26	300	5.531.027.672,00	7.570.549.607,00	24.272.319.370,26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase permohonan Usaha Pertanian yang diusulkan dan diproses	Persen	N/A	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	1.000.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Persentase Permohonan Usaha Peternakan yang direkomendasikan	Persen	26,8	35,2	102.000.000	59,2	450.000.000	77,7	550.000.000	91,5	670.000.000	100	330.000.000	100	2.102.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		
3	27	07	Program penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok tani yang menerapkan metode pertanian berorientasi agribisnis	Persen	1,7	2,90		3,70		4,60		5,40		6,30		6,30		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Persentase SDM petani yang terlatih	Persen	31,85	41,09		45,72		50,45		55,19		59,81		59,81		59,81		
			Persentase kelompok petani yang meningkat kelas taninya	Persen	2,08	3,11	6.370.000.000	3,92	8.549.122.499,00	4,73	10.310.814.000,00	5,54	12.725.575.392,00		6,35		6,35			6,35
			Persentase produk pertanian yang tertangani sesuai standar GHP (Good Handing Practices)	Persen	N/A	9,09		18,18		27,27		36,36		45,54		45,54		45,54		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase SDM kelompok peternak terlatih	Persen	15,48	19,05		30,95		46,83		67,46		100		100		
		Persentase kelompok peternak yang menerapkan metode peternakan berorientasi agribisnis	Persen	2,78	4,76	650.000.000	18,65	2.025.000.000	32,54	3.161.250.000	46,43	4.639.250.000	60,32	8.428.500.000	60,32	18.904.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3	30	03 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persen	6,67	20,00	1.500.000.000	33,33	2.695.485.000	46,67	3.088.131.787	60,00	5.552.372.672	73,33	8.112.282.577	73,33	20.948.272.036	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase kelompok pedagang yang terlatih	Persen	N/A	11,55	190.000.000	17,33	341.428.100	26	505.163.360	34,66	776.633.872	51,99	1.027.555.793	51,99	2.840.781.125	
		Persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan permodalan	Persen	N/A	5	50.000.000	10	89.849.500	15	132.937.726	20	151.745.756	25	270.409.419	25	694.942.401	
3	30	04 Program Stabilisasi harga barang pokok dan barang penting	Persen	0,5	0,6	200.000.000	0,7	359.398.000	0,8	401.750.905	0,9	606.983.023	0,10	1.081.637.677	0,10	2.649.769.605	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		pokok dan barang penting	Persen	2	3	75.800.000	4	136.211.852	5	140.533.593	6	230.048.566	7,00	409.940.680	7,00	992.534.691		
3	30	06	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Persen	9,09	27,27	264.000.000	50	474.405.360	100	551.911.194	100	1.001.217.590	100	1.427.761.734	100	3.719.295.878	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persen	N/A	5,78	75.000.000	14,90	134.774.250	34,78	199.406.589	55	227.618.634	90	405.614.129	90	1.042.413.602	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase IKM Pengolahan Pangan yang menerapkan metode marketing-mix (4Ps)	Persen	N/A	3,57		15		30		40	50		50			
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
3	31	02	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persen	88,93	90,36	301.840.000	93,1	320.000.000	95,95	377.618.808	97,62	600.000.000	99,05	150.000.000	99,05	1.749.458.808	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Persentase pelaku IKM terlatih	Persen	21,90	33,33	950.000.000	39,29	1.780.000.000	45,24	2.004.851.819	51,19	2.566.195.123	57,14	4.884.766.961	57,14	12.185.813.903			
		Persentase pelaku IKM yang memiliki sarana produksi sesuai standar	Persen	13,10	14,05	485.387.464	15,36	1.018.293.087	16,90	1.320.090.714	19,29	2.825.556.529	22,38	3.366.597.427	22,38	9.015.925.221			
		Persentase kelompok IKM yang memperoleh bantuan permodalan	Persen	0	5	100.000.000	10,12	120.000.000	15,48	130.000.000	19,64	140.000.000	23,81	150.000.000	23,81	640.000.000			
3	31	03	Program Pengendalian Izin usaha industri Kabupaten/kot a	Persentase izin usaha yang memenuhi ketentuan perizinan	Persen	11,07	25	120.000.000	50	226.470.417	100	300.941.181	100	350.941.181	100	727.408.981	100	1.725.761.760	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase IKM terdata	Persen	100	100	80.000.000	100	226.470.417	100	300.941.181	100	350.941.181	100	727.408.981	100	1.685.761.760	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi																
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penataan Kawasan Transmigrasi	Persen	67	67,00	1.550.000.000,00	67	850.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00	100,00	1.250.000.000,00	100,00	1.350.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
																		UKM	
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi Mandiri	Persen	67	67,00	181.000.000,00	67	250.000.000,00	100,00	300.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	410.009.030,00	100,00	1.491.009.030,00	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
4	01		Sekretariat Daerah																
4	01	02	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersedia sesuai standar	Persen	80	100	504.745.903	100	683.101.133	100	775.884.363	100	748.734.094	100	880.950.995	100	3.593.416.488	Bagian Pemerintahan
				Persentase Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persen	100	100	387.245.903	100	224.049.688	100	203.434.000	100	273.920.656	100	288.565.000	100	1.377.215.247	Bagian Pemerintahan
				Persentase titik batas wilayah yang diselesaikan	Persen	20	30	362.186.403	40	419.033.333	50	400.500.000	60	458.479.532	70	510.500.000	70	2.150.699.268	Bagian Pemerintahan
				Persentase kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan	Persen	100	100	5.176.247.350	100	5.671.850.718	100	5.461.154.314	100	4.821.952.486	100	4.983.924.110	100	26.115.128.978	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		rakyat yang diimplementasikan															
		Persentase Peningkatan alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran bagi masyarakat umum	Persen	0,42	0,53	1.162.150.099	0,53	1.000.914.833	0,61	1.365.288.578	0,67	1.205.488.122	0,73	1.245.981.028	0,73	5.979.822.660	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	Persen	100	100	1.675.664.470	100	1.577.080.600	100	1.652.292.767	100	1.892.461.205	100	2.084.993.166	100	8.882.492.208	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
		Persentase kerjasama pemerintah daerah yang berjalan	Persen	100	100	330.989.596	100	85.600.000	100	95.434.363	100	115.152.281	100	130.500.995	100	757.677.235	Bagian Hukum dan Kerjasama Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	Persen	20	30,0	633.599.422	50	314.461.730	70	1.152.050.863	90	626.410.847	100	1.210.228.567	100	3.936.751.429	Bagian Perekonomian & SDA
		Persentase realisasi serapan anggaran tepat waktu	Persen	99,4	98,7	622.401.282	98,5	305.167.295	98,4	649.365.475	99,5	620.177.903	99,5	1.210.228.567	99,5	3.407.340.521	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Persen	83,48	90,01	1.642.556.913	95,98	1.629.684.758	99,00	1.665.028.997	100	2.518.140.446	100	2.968.907.468	100	10.424.318.582	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4	02	Sekretariat DPRD															
4	02	02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	96,21	100	13.511.126.237	100	14.358.863.338	100	14.827.493.699	100	15.682.980.646	100	18.474.762.402	100	76.855.226.320	Sekretariat DPRD
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	01	Perencanaan															
5	01	02 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	N/A	45		55		65		75		85		85		
			Persen	N/A	20	1.834.414.091	22	2.665.747.322	25	2.699.925.948	29	2.802.602.405	34	3.500.406.936	34	13.503.096.700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persen	N/A	100	1.605.112.329	100	2.332.528.906	100	2.362.435.204	100	2.452.277.104	100	3.062.856.069	100	11.815.209.613	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100		dan Pengembangan Daerah	
			Persentase keselarasan Renja dengan RKPD	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100			
5	02		Keuangan																
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	1.453.513.250	100	950.629.329	100	592.630.015	100	626.944.890	100	958.556.020	100	4.582.273.504	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Pemenuhan Belanja Wajib Terhadap APBD	Persen	70,60	70,60	4.403.201.560	100	4.350.629.329	100	4.492.630.015	100	4.526.944.890	100	7.379.002.418	100	25.152.408.212	
				Persentase realisasi belanja terhadap total Belanja Daerah	Persen	100	100	1.549.806.000	100	955.629.329	100	597.630.015	100	631.944.890	100	1.153.556.020	100	4.888.566.254	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset daerah yang telah diinventarisasi	Persen	98	99	3.031.609.750	100	2.850.629.329	100	3.792.630.015	100	3.826.944.890	100	5.008.556.020	100	18.510.370.004	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	Persen	8,59	16,04	4.022.033.120	31,52	3.825.629.329	38,10	4.467.630.015	45,42	4.501.944.890	50,71	4.973.556.020	50,71	21.790.793.374	Badan Pendapatan Daerah
5	03		Kepegawaian																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5	03	Program Kepegawaian Daerah	Persen	67,00	76,00	84,00	91	96	100	100,00								Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Persentase ke terpenuhan kebutuhan pegawai	Persen	23,76	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00								
		Persentase pegawai yang memiliki nilai SKP minimal "Tinggi"	Persen		3.036.03 5.700		3.526.951. 420		3.597.17 1.910		3.701.00 0.410		4.150.546.410		18.011.705.850			
		Persentase layanan pegawai sesuai Standar Pelayanan (SP)	Persen	85,00	87,00	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00								
		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persen	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00								
5	04	Pendidikan dan Pelatihan																
5	04	Program Pengembang an Sumber Daya Manusia	Persen	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00								Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Persentase jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		2.006.08 5.782		2.173.987. 212		2.309.42 2.365		2.788.45 1.688		3.846.586.584		13.124.533.631			
		Persentase jabatan struktural yang telah lulus diklat Pim Tk 2, PKA, PKP	Persen	43,10	44,80	46,51	48,21	49,91	53,49	53,49								

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Persentase OPD yang terpenuhi kebutuhan diklatnya	Persen	80,00	82,00		85,00		87,00		90,00		95,00		95,00					
5	05	Penelitian dan Pengembangan																		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti dalam perencanaan dan sebagai bahan pengambilan keputusan	Persen	N/A	100		100		100		100		100		2.187.754.335		8.439.435.438	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Inovasi Daerah yang dimiliki	Persen	N/A	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			
6			Unsur Pengawasan Pemerintahan Daerah																	
6	01		Inspektorat Daerah																	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) internal dan eksternal	Persen	74,38	75,00	728.086.366	77,00	398.606.053	81,00	695.719.057	85,00	691.921.998	90,00	876.853.507	90,00	3.391.186.981		Inspektorat
				Persentase pengawasan yang	Persen	100,00	100	1.572.645.536	100	3.142.578.787	100	3.160.197.475	100	3.136.913.346	100	4.635.204.793	100	15.647.539.937		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi																	
		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Persen	100,00	100	789.430.066	100	532.274.700	100	532.274.700	100	532.274.700	100	991.072.869	100	3.377.327.035			
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase OPD yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM)	Persen	0	5,41	799.613.395	10,81	542.458.029	21,62	888.863.334	43,24	888.863.334	86,49	926.308.629	86,49	4.046.106.722	Inspektorat
			Persentase OPD yang menyelenggarakan Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	32,43	37,84	371.980.366	40,54	188.150.469	43,24	188.150.469	48,65	213.894.170	54,05	213.894.170	54,05	1.176.069.643		
7			Unsur Kewilayahan																
7	01		Kecamatan																
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan publik kecamatan sesuai standar pelayanan	Persen	N/A	100	875.025.041	100	1.417.316.508	100	1.904.712.791	100	1.830.994.234	100	2.067.298.309	100	8.095.346.883	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat desa yang aktif dalam pembangunan	Persen	N/A	100	2.718.640.436	100	5.607.318.570	100	5.053.826.930	100	5.792.106.691	100	6.305.791.854	100	25.477.684.481	Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	N/A	100	449.777.601	100	665.149.318	100	1.158.782.503	100	995.919.785	100	1.171.268.423	100	4.440.897.630	Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terselenggara	Persen	N/A	100	1.776.785.134	100	2.966.206.419	100	3.527.273.028	100	3.608.321.406	100	3.963.588.169	100	15.842.174.157	Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa di wilayah kecamatan yang tertib menjalankan kalender pembangunan	Persen	N/A	100	804.809.893	100	1.285.275.191	100	1.807.962.763	100	1.695.619.554	100	1.935.819.082	100	7.529.486.482	Kecamatan
8			Unsur Pemerintahan Umum																
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik																
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	Persentase desa yang berkarakter kebangsaan berdasarkan budaya lokal	Persen	0	25	979.775.574	37	830.000.000	54	847.500.000	74	761.399.999	96	875.600.000	96	4.294.275.573	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
8	01	03	Kebangsaan																
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	43	100	1.735.303.574	100	1.600.000.000	100	50.719.918.837	100	1.246.898.670	100	1.781.726.917	100	57.083.847.998	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam pendidikan politik masyarakat	Persen	0	33	438.583.048	44	288.862.692	61	295.500.000	78	235.600.000	94	345.800.000	94	1.604.345.740	
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi serta dibina	Persen	45	55	870.775.574	65	729.500.000	75	747.000.000	85	765.500.000	95	836.791.590	95	3.949.567.164	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Potensi Konflik sara yang diselesaikan	Persen	100	100	748.775.574	100	601.000.000	100	608.700.000	100	610.700.000	100	635.800.000	100	3.204.975.574	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik sosial	Persen	58	100%	944.775. 574	100%	575.000.0 00	100%	1.410.00 0.000	100%	470.000. 000	100%	460.000.000	100%	3.859.775.574	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
								2.030.0 61.582. 387		1.456.923 .957.267		1.622.7 63.427. 219		1.984.65 9.020.10 7		2.364.806.279. 780		9.292.910.289 .839	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan tentang gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. IKU tersebut ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk satu periode kedepan. Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Indeks Pariwisata Inklusif	Nilai	N/A	N/A	60	62,5	65	67,5	70	70
2	Indeks Gini	Persen	N/A	0,356	0,34	0,332	0,324	0,316	0,308	0,308
3	Indeks Pembangunan	Angka	63,50	63.89	64.42	65.34	66.26	67.18	68.10	68.10

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
			2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	manusia (IPM)									
4	Prevalensi Stunting	Persen	N/A	19.06	17.06	15.06	13.06	11.06	9.06	9.06
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	N/A	65.61	67.24	68.87	70.5	72.13	73.76	73.76
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	N/A	0,5574	0,6074	0,6324	0,6574	0,6824	0,7074	0,7074
7	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,54	0,89	5,76	5,86	5,97	6,08	6,19	6,19
8	Tingkat Kemiskinan	Persen	18,01	17,71	16,18	15,65	15,09	14,55	14,01	14,01
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	NA	3,72	3,51	3,4	3,29	3,18	3,07	3,07
10	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	12,6	13,73	13,4	14,2	15	15,8	16,6	16,6
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	62.19	N/A	64.69	68.66	72.63	76.60	76.81	76.81
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	163.57	163.57	161.70	160.77	159.85	158.93	158.02	158.02
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat	53,76	N/A	65	68	71	74	77	77
14	Kontribusi PAD	Juta rupiah	146.157.	N/A	339.650	498.794	718.472	1.002.585	1.306.799	1.306.799

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat OPD. IKU OPD secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut adalah IKU dari masing – masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 – 2026

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	Rata-rata lama tinggal	Hari	N/A	5,8	6,1	6,3	6,5	6,7	6,9	6,9
		Persentasi kunjungan wisatawan (target kunjungan 2022-2026 sebesar 4 juta kunjungan)	persen	N/A	N/A	10	25	45	70	100	100
		Spend of money	USD/hari	N/A	USD 118,25	USD 125,29	USD 128,12	USD 137,36	USD 141,79	USD 152,17	USD 152,17
		Persentasi Budaya Yang Dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	N/A	8.26	8.61	8.73	8.849	8.97	9.09	9.09
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	N/A	11.59	13.49	14.05	14.61	15.17	15.73	15.73
		Persentase Sekolah Dasar (SD) berakreditasi B	persen	N/A	58.76%	63.40%	68.04%	72.68%	77.32%	81.96%	81.96%
		Persentase Sekolah Menengah (SMP) berakreditasi B	persen	N/A	76%	80.05%	84%	88.15%	92.20%	96.25%	96.25%
		Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	64,81%	N/A	65,81%	66,81%	67,81%	68,81%	69,81%	69,81%

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Peringkat pada event olahraga daerah (PORPROV)	Peringkat	N/A	N/A	10	10	9	9	8	8
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Literasi Masyarakat/Indeks Minat Baca	Indeks	N/A	4.48	6.36	6.93	7.51	8.10	8.67	8,67
		IKM Kearsipan	Nilai	NA	NA	79	80	81	82	83	83
		Indeks Arsip	Nilai	48,8	N/A	50	62,5	75	87,5	100	100
4	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Persen	N/A	67.12	67.58	68.04	68.5	68.96	69.42	69.42
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	110.22	N/A	99.72	89.22	78.72	68.22	57.72	57.72
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9.92	N/A	8.92	7.92	6.92	5.92	4.92	4.92
		Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	Angka	N/A	1,15	2	2	2	2	2	2
5	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laju pertumbuhan Penduduk (LPP)	Angka	2,1	1,41	1,3	1,2	1,1	1,05	1,05	1,05
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	N/A	87.17	87.32	87.47	87.62	87.77	87.92	87.92
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit pelayanan terpadu	Persen	100	N/A	100	100	100	100	100	100

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	N/A	86.96%	88.56	90.16	91.76	93.36	94.96	94.96
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase desa berkembang	Persen	18,93	N/A	24,85	27,81	30,76	33,72	36,68	36,68
8	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Produksi Padi	Ton	N/A	225.966,31	229.032,30	233.625,46	238.487,44	243.472,55	248.643,78	248.643,78
		Produksi Jagung	Ton	N/A	60.540,90	62.884,89	64.068,90	65.316,89	66.612,89	67.956,90	67.956,90
		Produksi Kedelai	Ton	N/A	411,75	439,1	495,1	582,09	699,71	849,71	849,71
		Porang	Ton	N/A	N/A	6.000,00	10.500,00	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
		Produksi Tanaman sayuran (Sayur daun dan Sayur buah)	Kg	N/A	6.572,00	18.746,00	20.862,00	21.528,00	23.588	25.668,00	25.668,00
		Produksi Tanaman buah – buahan	Kg	N/A	10.829,00	13.646,80	13.838,00	14.375,40	14.777,10	14.938,80	14.938,80
		Produksi Biofarmaka (Jahe)	Kg	N/A	439,6	624	820	1.032,00	1.260,00	1.504,00	1.504,00
		Produksi Kopi	Kg	N/A	1.732,25	1.764,94	1.778,40	1.791,90	1.805,44	1.814,05	1.814,05
		Produksi Kakao	Kg	N/A	527,71	698,4	744,96	776	853,6	931,2	931,2
		Produksi Cengkeh	Kg	N/A	668,93	685,44	699,05	711,21	725,04	736	736
		Produksi Vanili	Kg	N/A	36,9	39,22	40,39	41,58	42,78	43,99	43,99
		Persentase produk pertanian yang tersertifikasi	persen	N/A	Na	100	100	100	100	100	100
9	Dinas Peternakan dan	Produksi Telur	Kg	N/A	24,33	26,03	31,24	40,61	56,86	85,28	85,28

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kesehatan Hewan	Produksi Daging Sapi	Kg	94.222	112.971	117.928	123.827	130.070	136.678	142.824	142.824
		Produksi Daging Babi	Kg	231.928	1.105.265	1.138.422	1.217.084	1.301.189	1.391.097	1.487.222	1.487.222
		Persentase produk hasil ternak yang berertififikasi ASUH	Persen	Na	75	80	85	90	95	100	100
		Populasi Sapi	Ekor	N/A	16.762	17.781	19.040	20.388	21.831	23.158	23.158
		Populasi Kerbau	Ekor	N/A	17.945	18.449	19.002	19.572	20.159	20.726	20.726
		Populasi Kambing	Ekor	N/A	175.439	180.702	193.188	206.538	220.809	236.067	236.067
		Populasi Babi	Ekor	N/A	7.033	7.226	7.497	7.872	8.265	8.679	8.679
		Populasi Ayam	Ekor	N/A	146.475	150.429	154.491	158.662	162.946	167.346	167.346
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Produksi perikanan tangkap	Ton	4.462,00	12,34	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000	5.000
		Produksi perikanan budidaya	Ton	3.519	30,91	23	27	31	35	45	45
		Persentase produk perikanan yang tersertifikasi	Persen	Na	Na	100	100	100	100	100	100
		Indeks ketersediaan	Angka	95.05	94.06	95.85	96.90	97.95	98.75	98.99	98.99
		Indeks keterjangkauan	Angka	68.00	62.60	65.12	68.17	71.22	73.27	76.32	76.32
		Indeks pemanfaatan	Angka	64.24	60.14	62.59	64.64	66.69	68.74	70.79	70.79

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase penurunan kasus keracunan pangan	Persen	Na	Na	100	100	100	100	100	100
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk pertanian, perikanan	Persen	Na	Na	23,92	31,77	38,62	45,47	52,32	52,32
		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk lokal lainnya	Persen	Na	Na	10,5	15,5	20,5	25,5	30,5	30,5
		Persentase pasar tradisional yang berhasil direvitalisasi	Persen	Na	Na	20	30	40	50	60	60
		Nilai produksi IKM	Angka	6.859.428.000	7.159.428.000	7.759.000.000	8.059.000.000	8.359.000.000	8.659.000.000	8.959.000.000	8.959.000.000
		Persentase produk IKM yang tersertifikasi SNI	Persen	Na	Na	10	15	20	25	30	30
		Nilai produksi IKM produk pertanian	Angka	617.900.000	651.180.000	660.000.000	680.000.000	700.000.000	710.000.000	720.000.000	720.000.000
		Persentase peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan pertanian	Persen	Na	Na	23,92	31,77	38,62	45,47	52,32	52,32
		Tingkat kelancaran distribusi barang pokok dan barang penting	Persen	Na	Na	100	100	100	100	100	100

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase peningkatan investor	Persen	Na	Na	25	30	35	40	45	45
		Persentase realisasi nilai investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase investor yang melaporkan perkembangan usahanya	Persen	Na	Na	80	90	100	100	100	100
		Tingkat kemudahan perizinan investasi	Persen	Na	Na	85	87	90	100	100	100
13	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM	Tingkat serapan tenaga kerja	Persen	Na	Na	70	75	80	85	90	90
		Persentase koperasi yang aktif	Persen	87,6	68,9	87	89	91	93	95	95
		Persentase usaha mikro yang meningkat omzetnya	Persen	Na	Na	10	20	30	40	50	50
		Persentase penurunan permasalahan hubungan industrial	Persen	Na	Na	63,63	45,45	27,27	9,09	0	0
14	Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan	Tingkat kemantapan jalan	Angka	53.40	52.77	59.29	62.55	65.81	69.07	72.33	72.33
		Rasio Konektivitas	Angka	0.33	N/A	0.40	0.44	0.49	0.54	0.59	0.59
15	Dinas Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah pertanian yang terlayani jaringan irigasi	Nilai	0.511	0.514	0.536	0.547	0.558	0.569	0.580	0.580

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase rumah tangga berakses air minum layak dan kelanjutan	Persen	61,32	61,01	69,63	74,39	79,47	84,9	90,7	90,7
		Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	75,44	79,24	92,71	98,60	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian fungsi, struktur, dan pola ruang (RTRW)	Persen	62,27	N/A	100	100	100	100	100	100
16	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rasio Rumah Layak huni	Nilai	0.361	0.366	0.379	0.385	0.390	0.396	0.402	0.402
		Indeks Kualitas Air	Nilai	35.00	N/A	40.00	50.00	60.00	70.00	70.00	70.00
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,7	N/A	91,09	91,56	92,03	92,5	92,98	92,98
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	58.00	N/A	58,25	58,34	58,42	58,51	58,59	58,59
		Persentase sampah yang tertangani	Persen	79,84	77,32	84,88	87,51	90,23	93,03	95,92	95,92
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Angka Korban Bencana	Angka	8	N/A	0	0	0	0	0	0
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Nilai	2,15	N/A	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai	NA	NA	79	80	81	82	83	83
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	NA	NA	65	68	72	75	78	78
21	Sekretariat Daerah	Nilai/Peringkat EKPPD	Nilai/Predikat	N/A	NA	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72,1	N/A	74	76	78	80	82	82
22	Sekretariat DPRD	IKM pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD	Nilai	N/A	N/A	80	83	86	89	92	92
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase laporan keuangan sesuai SAP	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
		Persentase aset yang diinventarisasi	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100
24	Badan Pendapatan daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	64,05	62,88	71,85	74,93	78,08	80,66	80,66	80,66
		Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	14,60	8,90	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71	50,71

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase peningkatan penerimaan PAD	Persen	64,45	-41,55	25,61	46,85	44,04	39,54	30,34	30,34
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6,85	11,23	24,85	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71
		Persentase realisasi penerimaan PAD	Persen	102,77	82,34	85,75	92,85	95,74	98,65	100	100
25	Inspektorat	Indeks Kematangan Penerapan Manajemen Resiko	Nilai	NA	NA	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
		Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	NA	NA	79,6	79,7	79,8	79,9	80	80
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	N/A	56,13	62	65	68	71	74	74
27	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72,1	N/A	74	76	78	80	82	82
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltiik	Angka Konflik Sosial	Angka	N/A	3	3	2	2	1	0	0
29	Satuan Polisi Pamong Praja	Angka Gangguan K3	Angka	13	N/A	12	11	10	9	8	8

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK Kabupaten Manggarai Barat disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 -2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1,1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	46	50	54	60	64	68	68
1,2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,01	98,25	98,5	98,75	99	99,25	99,25
1,3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	92,67	93	93,25	93,5	93,75	94	94
1,4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	1	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,45
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
2,1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,01	0,03	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07
2,2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2,3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	90,00%	92,00%	94,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
2,4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	89,10%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2,5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	91,20%	92,00%	93,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%
2,6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	35,80%	44%	46,00%	48,00%	50,00%	50,00%	50,00%
2,7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	60,37%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2,8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	32,00%	52,00%	63,00%	71,00%	75,00%	80,00%	80,00%
2,9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	60,96%	62,00%	65,00%	68,00%	70,00%	75,00%	75,00%
2,1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	62,66%	67,00%	70,00%	75,00%	77,00%	80,00%	80,00%
2,1 1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	67,98%	67,00%	70,00%	75,00%	77,00%	80,00%	80,00%
2,1 2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	47,96%	52,00%	56,00%	58,00%	60,00%	65,00%	65,00%
2,1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2,1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	0,10%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3,1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	51	52,39	55,31	58,39	64,55	69,98	69,98

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3,2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai	Persen	30,56	36,2	43,8	51,7	60,4	69,4	69,4
3,3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Nilai	52,72	64,06	75,94	89,09	100	100	100
3,4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	68,54	81,39	85,86	89,66	94,60	100	100
3,5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	73,88	75,19	82,38	85,32	92,85	100	100
3,6	Rasio kepatuhan IMB	Persen	39,78	43,22	53,52	65,48	86,09	87,87	87,87
3,7	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	44,47	65,12	66,09	67,93	73,73	81,50	81,50
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4,1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
4,2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
4,3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	N/A	18	20	22	25	27	27
4,4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	26,67	40,00	53,34	73,34	86,67	100,00	100,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5,1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
5,2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
6,1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	2,01	0,49	0,61	0,71	1,22	1,61	6,65
6,2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	98,27	100	100	100	100	100	100
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
1,1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100
1,2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	11,98	22	25	30	40	60	60
1,3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Nilai	1.261.700.293	1.280.625.797	1.299.835.184	1.319.332.712	1.339.122.702	1.406.078.838	1.406.078.838
1,4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	31,73	40	50,00	100	100	100	100,00
1,5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	75,62	81,55	83,62	85,47	87,12	88,59	88,59

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1,6	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Persen	11,98	22	25	30	40	60	60
1,7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	31,73	40	50,00	100	100	100	100,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
2,1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18,7	18,85	20	20,15	20,23	20,32	20,32
2,2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,014	0,015	0,016	0,017	0,019	0,019	0,019
2,3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	70,44	68,91	68,41	66,61	65,85	64,32	64,32
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
3,1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	454,67	459,67	464,67	469,67	474,67	479,67	479,67
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
4,1	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	3.752	4.752	5.752	6.752	7.752	8.752	8.752
4,2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
5,1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,19	64,69	68,66	72,63	76,60	76,81	76,81
5,2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	77,32	84,88	87,51	90,23	93,03	95,92	95,92
5,3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	2	27	42	52	72	92	92
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
6,1	Persentase perekaman KTP elektronik	Persen	95,73	95,9	95,93	96	96,84	97,88	100
6,2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	10,59	39,8	52,73	64,35	74,85	84,39	100
6,3	Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen	92,44	96	97,12	98,15	98,2	98,22	100
6,4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa								
7,1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	26%	34%	42%	50%	60%	69%	69%
7,2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0%	3%	6%	9%	13%	16%	16%
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8,1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	persen	N/A	0,29	0,45	0,62	0,83	1,05	1,05
8,2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	angka	N/A	1,69	1,57	1,45	1,33	1,26	1,26
8,3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen	N/A	0,11	0,22	0,32	0,42	0,52	0,52
8,4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen	65,51	66,41	67,38	68,36	69,42	70,47	70,47
8,5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8,6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	34,11	35	35,94	36,85	37,81	38,74	38,74
8,7	Persentasae pelayanan KB pasca persalinan	Persen		0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,7
8,8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen	20,89	20	19,02	18,04	16,98	15,93	15,93
8,9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen	N/A	3,32	3,37	3,42	3,47	3,52	3,52

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
9	Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan								
9,1	Rasio konektivitas	Angka	0,46	0,29	0,41	0,65	0,65	0,66	0,66
9,2	Kinerja lalu lintas	Persen	70	61	117	67	67	85	85
10	Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
10,1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	92	100	100	100	100	100	100
10,2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	25	50	60	75	85	100	100
10,3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	Persen	53	62	70	73	78	80	80
11	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11,1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	67,41	72,59	77,78	82,96	88,15	93,33	93,33
11,2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,82	1,59	2,37	3,15	3,93	4,71	4,71
12	Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
12,1	Persentase peningkatan investasi	Persen	18,72	25	30	35	40	50	50
13	Usuran Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
13,1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,06	1,5	2	2,5	3	3,5	3,5
13,	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	Persen	0,46	1	1,5	2	2,5	3	3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	ekonomi mandiri								
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
14,1	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	38	45	50	60	70	80	80
14,2	Persentase OPD yang menggunakan statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	38	45	50	60	70	80	80
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
15,1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	10	15	20	25	30	35	35
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
16,1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	3.840	5.500	6.500	8.000	10.500	15.000	15.000
16,2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,22	0,22
16,3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	0,36	4,57	5,71	5,9	4,57	7,62	7,62
16,4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen	0,17	0,18	0,18	0,19	0,2	0,21	0,21
16,5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								
17,1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	Persen	23,03	23,02	22,99	22,96	22,94	22,94	22,94

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
17,2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	7,87	7,96	8,06	8,17	8,25	8,23	8,23
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
18,1	Rasio cagar budaya yang terlestarikan	Nilai	100	100	100	100	100	100	100
C	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
1,1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Angka	43	4.523	4.627	4.731	4.835	5.045	5.045
2	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata								
2,1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	-89,13	1262,40	65,20	66,10	66,18	67,54	67,54
2,2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	Persen	-70,21	473,50	51,33	57,71	62,01	63,79	63,79
2,3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	N/A	2,97	2,51	2,71	3,12	3,85	3,85
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
3,1	Produktivitas pertanian per hektas per tahun								
	Tanaman Pangan	Angka	5,31	5,718	5,72	5,734	5,76	5,76	5,76
	Tanaman Perkebunan	Angka	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44	0,44	0,44
	Tanaman Hortikultura	Angka	12,30	12,50	12,80	13,07	13,27	13,27	13,27
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
4,1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Persen	N/A	65	70	75	80	85	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)								
4,2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	N/A	80	100	100	100	100	100
4,3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	N/A	73,78	80	100	100	100	100
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
5,1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Persen	N/A	24,629	26,19	26,51	26,85	27,04	27,07
5,2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	N/A	-	0	0	30	40	50
5,3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	N/A	70	75	80	85	90	90
5,4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	70	75	80	83	85	90	90
D	Urusan Penunjang Pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah								
1,1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0	0
1,2	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	69,18	70,05	73,2	75	78,3	80,2	85,3
1,3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	12,81	15	17	21,45	24,25	35,2	40

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
2	Sekretariat Dewan								
2,1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2,3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Perencanaan								
3,1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,5	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3,6	Persentase konsistensi Program RKPD kedalam	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	APBD								
3,7	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Keuangan								
4,1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	8,65	5,94	9,2	8,47	8,49	7,41	7,41
4,2	Rasio PAD terhadap APBD non migas	Persen	8,96	16,79	24,65	35,51	49,55	64,59	64,59
4,3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	8,64	9,71	15,5	15,55	13,15	12,39	12,39
4,4	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4,5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	82,29	84,75	88,79	90,5	97,65	100	100
4,6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	82,29	85,78	88,79	95,25	100	100	100
4,7	Persentase aset yang terinventarisasi	Persen	86,72	92,75	98,05	100	100	100	100
4,8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	3,05	2,85	2,35	2,15	1,95	1,65	1,65
4,9	Persentase informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	25,15	45,78	100	100	100	100	100
410	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah yang tersedia	Persen	15,75	35,75	100	100	100	100	100
5	Kepegawaian								
5,1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	Persen	3,29	4,69	5,77	6,87	7,90	8,86	8,86
5,2	Rasio pegawai fungsional	Persen	0,03	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,12

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
5,3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	90	91	92	93	94	95	95
5,4	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tahun	0,42	25	23	21	20	21	21
5,5	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,007
5,6	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	43,10	44,80	46,51	48,21	49,91	53,49	53,49
6	Penelitian dan Pengembangan								
6,1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6,3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6,4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100
7	Pengawasan								
7,1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat	2	3	3	3	3	3	3
			(skor 2,77)	(skor 3,0)	(skor 3,3)	(skor 3,5)	(skor 3,7)	(skor 3,9)	(skor 3,9)
7,2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	2	2	3	3	3	3	3

BAB IX

PENUTUP

Dokumen RPJMD berisi tentang upaya pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyejahterakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dokumen RPJMD juga menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal, serta optimalisasi potensi pariwisata daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Visi dan misi yang Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah yaitu “**MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP**” yang dijabarkan ke dalam rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program perangkat daerah sebagai panduan dalam merumuskan RKPD, RAPBD dan APBD serta dokumen Renstra perangkat daerah.

Ketersediaan dokumen RPJMD menjadi sangat penting dalam rangka membangun manajemen kinerja dan menjalankan pembangunan yang berorientasi hasil, serta sebagai instrumen pengukuran kinerja daerah. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan akuntabilitas kinerja sangat bergantung pada penjabaran dan pelaksanaan dokumen RPJMD. Sebagai upaya untuk memastikan sinergi antar dokumen perencanaan, maka dalam RPJMD ini diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Manggarai Barat;
2. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen RKPD;
3. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat memiliki kewajiban untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi, tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Manggarai Barat dengan melaksanakan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang telah dirumuskan;

4. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat memiliki kewajiban untuk menyusun Dokumen Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya dengan berpedoman kepada dokumen RPJMD ini;
5. Perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat diwajibkan untuk membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi dan partisipasi publik tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama dan gender melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan Perencanaan Kabupaten Manggarai Barat memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Kabupaten Manggarai Barat;
7. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar hukum, maka penyusunan RKPD 2027 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlaku.

Bupati Manggarai Barat

Edistasius Endi, SE.